

**PT RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA (Persero)
(dan Entitas Anak/ *and Subsidiaries*)**

Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020/

*Consolidated Financial Statements
for the year ended
31 December 2020*

beserta Laporan Auditor Independen/
with Independent Auditors' Report

Daftar Isi/ Table of contents

Halaman/ Page

Surat Pernyataan Direksi/ *Directors' Statement*

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan Konsolidasian/ *Consolidated Financial Statements*

Laporan posisi keuangan konsolidasian/ <i>Consolidated statements of financial position</i>	1 – 2
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian/ <i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>	3
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian/ <i>Consolidated statements of changes in equity</i>	4
Laporan arus kas konsolidasian/ <i>Consolidated statements of cash flows</i>	5
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian/ <i>Notes to consolidated financial statements</i>	6 – 237

Lampiran/ *Appendix*

Laporan keuangan Entitas Induk/ *Financial statements of Parent Company*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (DISAJIKAN KEMBALI)

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/

*DIRECTORS' STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019 (RESTATED)*

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned :*

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Nama / <i>Name</i> | : Arief Prasetyo Adi |
| | Alamat kantor / <i>Office address</i> | : Waskita Rajawali Tower
Jln. M.T. Haryono Kav. 12, Jatinegara,
Jakarta Timur 13330 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau
kartu identitas lain / <i>Residential address</i>
(<i>as in identity card</i>) or other identity | : Kompleks Depkes Blok C 7/5 RT/RW: 008/004
Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara |
| | Nomor telepon / <i>Phone number</i> | : 021 80604255 |
| | Jabatan / <i>Title</i> | : Direktur Utama/ <i>President Director</i> |
| 2. | Nama / <i>Name</i> | : Pramusti Indrascaryo |
| | Alamat kantor / <i>Office address</i> | : Waskita Rajawali Tower
Jln. M.T. Haryono Kav. 12, Jatinegara,
Jakarta Timur 13330 |
| | Alamat domisili sesuai KTP atau
kartu identitas lain / <i>Residential address</i>
(<i>as in identity card</i>) or other identity | : Kav. Lestari II/63, RT/RW: 012/007
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan |
| | Nomor telepon / <i>Phone number</i> | : 021 80604255 |
| | Jabatan / <i>Title</i> | : Direktur Keuangan/ <i>Finance Director</i> |

Menyatakan bahwa :

Hereby state that :

- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries for the year ended 31 December 2020;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information in the consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The consolidated financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;</i> |

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak.

4. Responsible for the Company's internal control system in PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is issued to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors :*

Jakarta, 25 Februari/February 2021



10000
SERATUS RIBU RUPIAH
TGL. 20
METERAI
TEMPEL
612AJX029923375

Arief Prasetyo Adi
Direktur Utama/President Director

Pramusti Indrascaryo
Direktur Keuangan/Finance Director



No. : 00131/2.1133/AU.1/10/0261-2/1/II/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
dan Entitas Anak**

*Shareholders, Boards of Commissioner
and Director*

***PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
and Subsidiaries***

Laporan Auditor Independen

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying financial statements of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries, which comprise of the consolidated statement of financial position as of 31 December 2020, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and Standards on Auditing based on State Finance Audit Standards (SPKN) established by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 52 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018 dengan adanya penerapan kebijakan akuntansi baru. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries as of 31 December 2020, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The emphasis of a matter

As disclosed in Note 52 to the accompanying consolidated statements, the Company restated its consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 and the consolidated statements of financial position as of 1 January 2019/ 31 December 2018 as implementation of new accounting policies. Our opinion is not modified in this matter.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan entitas induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi keuangan entitas induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menurut opini kami, informasi keuangan entitas induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other matters

Our audit of the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries as of 31 December 2020 as attach, was conducted for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes on investments in subsidiary and associate (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. This Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relate directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami No. PHHARP-AL/082/AH/BL/2021 dan No. PHHARP-AL/084/AH/BL/2021 masing-masing tertanggal 25 Februari 2021.

Compliance with laws and regulations and the internal control have been submitted in separate reports to the management with our report No. PHHARP-AL/082/AH/BL/2021 and No. PHHARP-AL/084/AH/BL/2021 dated 25 February 2021, respectively.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Drs. Paul Hadiwinata, CPA., CA., ACPA

Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP.0261

Izin Usaha KAP/ *Business License* No. 855/KM.1/2017

25 Februari/ *February* 2021

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Laporan posisi keuangan konsolidasian
Per 31 Desember 2020

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Consolidated statements of financial position
As of 31 December 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019*)	31 Desember/ December 2018*)	
Aset					Assets
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	3d, 4	307.299.268.370	986.460.306.076	669.836.443.803	Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya	3e, 5	1.081.779.053.941	794.796.633.457	-	Restricted cash and cash equivalent
Piutang usaha	3f, 3m, 6				Account receivables
Pihak berelasi		21.770.542.417	1.459.440.360	2.638.125.000	Related parties
Pihak ketiga		606.563.844.328	563.437.895.451	773.531.983.484	Third parties
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	3f, 3m, 7	81.094.927.550	75.930.491.395	49.101.543.856	Related parties
Pihak ketiga	3f, 3g, 7	476.201.320.952	496.056.717.609	457.157.166.195	Third parties
Persediaan	3o, 8	1.491.963.493.652	660.895.234.810	987.717.461.523	Inventories
Beban panen tanaman tebu					Harvest sugarcane expense
Beban satu tahun					Future one year
yang akan datang	3n,3p, 9	84.327.340.175	75.564.073.675	93.748.134.731	harvest expense
Pendapatan yang akan diterima	11	3.054.739.100	1.962.873.574	1.323.023.302	Accrued income
Uang muka	12	212.996.425.985	121.163.182.713	126.715.787.572	Advances
Biaya dibayar dimuka	3h, 13	37.059.965.989	40.885.522.856	37.243.996.768	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka - bersih	3z, 14a	482.336.637.257	397.064.924.698	427.626.417.008	Prepaid taxes – net
Aset biologis	3t, 10	82.011.539.679	64.145.640.041	56.333.774.074	Biological assets
Aset tidak lancar yang diklasifikasi sebagai aset dalam penghentian dan investasi tersedia untuk dijual	24c	15.431.725.891	15.431.725.891	15.745.472.831	Non current assets classified as discontinued asset and available for sales investment
Jumlah aset lancar		4.983.890.825.286	4.295.254.662.606	3.698.719.330.147	Total current assets
Aset tidak lancar					Non-current assets
Aset pajak tangguhan	3z, 14e	500.944.036.334	498.222.902.484	392.485.624.914	Deferred tax assets
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	3m, 3f, 7	49.298.819.712	49.298.819.712	49.298.819.712	Related parties
Pihak ketiga	3f, 3g, 3i, 7	165.085.183.576	148.797.123.899	149.295.021.978	Third parties
Piutang pajak	14c	19.396.574.086	21.806.496.924	20.970.795.407	Tax receivable
Investasi jangka panjang	15	55.787.718.288	66.789.072.381	239.473.181.723	Long term investments
Tanaman tahunan	3r, 16	900.899.491.634	867.069.506.522	855.172.338.467	Annual plantation
Aset tetap - bersih	3r, 3s, 17	3.480.059.923.455	4.213.608.373.640	4.339.503.938.059	Property, plant and equipment - net
Beban panen dua tahun yang akan datang	3p, 3n, 18	21.545.363.060	21.392.567.640	32.442.252.381	Future two years' harvest expense
Properti investasi	3q, 19	3.858.070.948.747	3.206.425.795.714	3.222.286.119.112	Investment property
Aset non-operasional	3v, 20	251.731.564.090	145.834.041.310	142.824.540.403	Non-operational assets
Uang jaminan	21	2.240.259.906	3.529.491.709	5.697.370.867	Security deposits
Aset tak berwujud	3u, 22	51.832.183.106	55.377.082.825	174.795.447.015	Intangible assets
Aset lain-lain	23	83.108.395.373	117.605.997.917	77.395.542.550	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		9.440.000.461.367	9.415.757.272.677	9.701.640.992.588	Total non-current assets
Jumlah aset		14.423.891.286.653	13.711.011.935.283	13.400.360.322.735	Total assets

Disajikan kembali. *)

Restated. *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Laporan posisi keuangan konsolidasian (lanjutan)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Consolidated statements of financial position (continued)

Per 31 Desember 2020

As of 31 December 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019*)	31 Desember/ December 2018*)	
Liabilitas dan ekuitas					Liabilities and equity
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang bank	25	2.615.483.315.770	2.146.091.219.607	1.970.804.075.366	Bank loans
Utang usaha					Trade payables
Pihak berelasi	3m, 3x, 26	105.723.003	181.485.815.963	1.117.561.646	Related parties
Pihak ketiga	3x, 26	908.157.574.962	220.852.966.900	326.798.449.280	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	3m, 3x, 27	13.117.071.530	37.253.522.064	19.202.007.967	Related parties
Pihak ketiga	3x, 27	728.213.468.847	443.631.036.613	628.681.117.504	Third parties
Utang pajak	3z, 14b	134.101.419.743	164.409.106.336	73.647.688.222	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	28	79.384.560.596	163.684.086.682	222.443.118.294	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	29	28.682.832.296	55.383.654.924	30.803.091.657	Unearned revenues
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturity of liabilities
Rekening Dana Investasi	32	22.381.291.446	2.400.547.119	5.906.091.062	Investment fund account
Sewa pembiayaan	33	6.083.570.244	2.775.177.733	5.339.138.313	Lease payable
Bank	34	67.904.892.701	35.660.765.104	47.809.885.242	Bank loan
Surat berharga jangka menengah	30	497.678.233.316	465.000.000.000	-	Medium term notes
Sukuk ijarah	31	-	200.000.000.000	-	Sukuk ijarah
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian	24b	38.511.386	38.511.386	38.511.386	Liabilities that are directly related to non current assets classified as discontinued assets
Jumlah liabilitas jangka pendek		5.101.332.465.840	4.118.666.410.431	3.332.590.735.939	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term bank loans - net of current portion
Surat berharga jangka menengah	30	-	492.987.553.681	1.153.823.046.887	Medium term notes
Sukuk ijarah	31	-	-	200.000.000.000	Sukuk ijarah
Rekening Dana Investasi	32	1.167.238.462.081	1.188.568.135.404	1.190.968.682.523	Investment fund account
Sewa pembiayaan	33	627.646.559	4.994.575.933	1.363.046.163	Lease
Bank	34	964.256.745.720	894.368.819.879	857.265.560.217	Bank loans
Pendapatan yang ditangguhkan	35	68.222.400.000	68.222.400.000	67.143.233.329	Deferred income
Liabilitas pajak tangguhan	3z, 14e	54.407.551.867	54.806.614.950	45.934.562.396	Deferred tax liabilities
Imbalan paska kerja	3ab, 36	512.624.360.520	499.471.336.681	516.132.672.091	Post employment benefits
Utang lain-lain	27b	166.248.937.235	-	-	Other payables
Jumlah liabilitas jangka panjang		2.933.626.103.982	3.203.419.436.528	4.032.630.803.606	Total non-current liabilities
Ekuitas					Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan					Equity attributable to owner of the Company
Modal saham – modal dasar					Share capital – authorized
4.100.000 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar ditempatkan dan disetor penuh					4,100,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share, fully paid of
2018 : 1.051.567 lembar					2018 : 1,051,567 shares
2019 : 1.051.567 lembar					2019 : 1,051,567 shares
2020 : 1.051.567 lembar	3ae, 37	1.051.567.000.000	1.051.567.000.000	1.051.567.000.000	2020 : 1,051,567 shares
Tambahan modal disetor	38	996.231.122.101	996.231.122.101	1.080.047.517	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya		3.148.698.386.125	3.184.138.038.648	3.356.562.786.143	Other components of equity
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	39	1.056.633.742.444	1.126.779.889.526	972.633.437.876	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	39	57.608.686.290	(76.042.058.967)	152.764.460.043	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan		6.310.738.936.960	6.282.673.991.308	5.534.607.731.579	Total equity attributable to owner of the Company
Kepentingan non pengendali		78.193.779.871	106.252.097.016	500.531.051.611	Non-controlling interests
Jumlah ekuitas		6.388.932.716.831	6.388.926.088.324	6.035.138.783.190	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		14.423.891.286.653	13.711.011.935.283	13.400.360.322.735	Total liabilities and equity

Disajikan kembali. *)

Restated. *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

For the year ended 31 December 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2020	2019	
Penjualan bersih	3ad, 40	6.974.083.944.999	6.523.333.277.843	Net sales
Beban pokok penjualan	3ad, 41	(5.871.647.983.264)	(5.443.841.002.869)	Cost of goods sold
Laba kotor		1.102.435.961.735	1.079.492.274.974	Gross profit
Beban umum dan administrasi	3ad, 42	(207.092.308.032)	(247.520.610.466)	General and administrative expenses
Beban pegawai	3ad, 42	(412.791.999.359)	(425.341.448.608)	Employee expenses
Beban penjualan	3ad, 42	(77.876.950.142)	(109.108.037.722)	Selling expenses
Pendapatan lain-lain	3ad, 43	162.131.049.978	145.834.084.641	Other incomes
Beban lain-lain	3ad, 43	(100.645.903.505)	(182.124.818.304)	Other expenses
Beban keuangan	3ad, 44	(377.856.033.739)	(376.818.337.518)	Finance cost
Laba sebelum pajak penghasilan		88.303.816.936	(115.586.893.003)	Profit before income taxes
Manfaat (beban) pajak penghasilan				Tax income (expense)
Pajak penghasilan kini				Current income tax
Pajak kini	3z, 14d	(55.705.397.302)	(73.839.475.043)	Current tax
Pajak tangguhan	3z, 14e	4.646.631.467	76.636.217.258	Deferred tax
Jumlah manfaat (beban) pajak penghasilan		(51.058.765.835)	2.796.742.215	Total tax income (expenses)
Laba tahun berjalan		37.245.051.101	(112.790.150.788)	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :				Item that will not be reclassified to profit or loss :
Keuntungan revaluasi aset				Profit revaluation of assets
Keuntungan (kerugian) aktuarial	36	(34.274.810.080)	(147.227.071.412)	Actuarial gain or loss
Pajak penghasilan yang terkait		(674.129.927)	36.771.980.332	Relating income tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain		(34.948.940.007)	(110.455.091.080)	Total other comprehensive income
Jumlah laba (rugi) komprehensif		2.296.111.094	(223.245.241.868)	Total comprehensive income (loss)
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				Total net profit (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		57.608.686.290	(76.042.058.967)	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali		(20.363.635.189)	(36.748.091.821)	Non-controlling interests
		37.245.051.101	(112.790.150.788)	
Laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:				Total comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk		20.902.327.984	(178.662.617.964)	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali		(18.606.216.890)	(44.582.623.904)	Non-controlling interests
Jumlah		2.296.111.094	(223.245.241.868)	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries

Consolidated statements of changes in equity

For the year ended

31 December 2020

(Expressed in Rupiah)

	Modal saham/ Capital share	Tambahan modal di setor/ Additional paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity component	Saldo laba/ Retained earnings Ditentukan penggunaannya Appropriate	Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriate	Ekuitas induk Parent equity	Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	Jumlah ekuitas Total equity	
Saldo per 31 Desember 2018*)	1.051.567.000.000	1.080.047.517	3.356.562.786.143	972.633.437.876	152.764.460.043	5.534.607.731.579	500.531.051.611	6.035.138.783.190	Balance as of 31 December 2018*)
Cadangan umum	-	-	-	152.764.460.043	(152.764.460.043)	-	-	-	General reserve
Dividen	-	-	-	(4.582.933.800)	-	(4.582.933.800)	(40.067.839.432)	(44.650.773.232)	Dividend
<u>Laba (rugi) komprehensif lainnya:</u>									<u>Other comprehensive income (loss):</u>
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	-	-	(103.157.554.957)	-	-	(103.157.554.957)	(7.297.536.124)	(110.455.091.081)	Actuarial gain (loss) on defined benefit retirement plans
Penyesuaian aset	-	-	7.940.671.394	-	-	7.940.671.394	5.024.444.883	12.965.116.277	Recognition asset
Rajawali Gloves Company	-	-	-	(3.187.537.928)	-	(3.187.537.928)	-	(3.187.537.928)	Rajawali Gloves Company
Penyesuaian PT Madu Baru	-	-	-	9.152.463.335	-	9.152.463.335	(315.189.932.102)	611.905.741.885	Recognition PT Madu Baru
Pengaruh disvestasi PT Phapros Tbk	-	995.151.074.584	(77.207.863.932)	-	(76.042.058.967)	927.095.673.987	(36.748.091.820)	(112.790.150.787)	Disvestment effect PT Phapros Tbk
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(76.042.058.967)	(76.042.058.967)	(36.748.091.820)	(112.790.150.787)	Loss of current year
Saldo per 31 Desember 2019*)	1.051.567.000.000	996.231.122.101	3.184.138.038.648	1.126.779.889.526	(76.042.058.967)	6.282.673.991.308	106.252.097.016	6.388.926.088.324	Balance as of 31 December 2019*)
Cadangan umum	-	-	-	(76.042.058.967)	76.042.058.967	-	-	-	General reserve
<u>Laba (rugi) komprehensif lainnya:</u>									<u>Other comprehensive income (loss):</u>
Penyesuaian PT Madu Baru	-	-	-	5.895.911.885	-	5.895.911.885	-	5.895.911.885	Recognition PT Madu Baru
Pensiun manfaat pasti	-	-	(35.439.652.523)	-	-	(35.439.652.523)	(7.694.681.958)	(43.134.334.481)	Defined benefit pension
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	57.608.686.290	57.608.686.290	(20.363.635.187)	37.245.051.103	Net profit of current year
Saldo per 31 Desember 2020	1.051.567.000.000	996.231.122.101	3.148.698.386.125	1.056.633.742.444	57.608.686.290	6.310.738.936.960	78.193.779.871	6.388.932.716.831	Balance as of 31 December 2020

Disajikan kembali. *)

Restated. *)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**

Laporan arus kas konsolidasian

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah)

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**

Consolidated statements of cash flows

For the year ended
31 December 2020

(Expressed in Rupiah)

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	6.940.673.972.779	6.675.410.596.044	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan untuk biaya-biaya lainnya	(6.268.427.848.050)	(6.540.909.229.925)	Cash paid to suppliers, employees and for other expenses
Kas diperoleh dari operasi	672.246.124.729	134.501.366.119	Cash received from operations
Pembayaran beban bunga	(334.085.878.838)	(362.065.731.912)	Payments of interest expenses
Pembayaran pajak	(161.150.666.260)	(328.107.017.352)	Tax payments
Penerimaan (pembayaran) aktivitas operasional lainnya - bersih	-	6.186.352.971	Addition (payments) from other operating activity - net
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	177.009.579.631	(549.485.030.174)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penerimaan (pembayaran) uang muka Penggantian lahan	-	(263.064.861.016)	Addition from (payments) from land replacement
Penerimaan investasi jangka panjang	-	1.361.000.000.000	Addition from long term investment
Perolehan aset tetap dan tanaman perkebunan	(224.553.314.873)	(265.782.437.331)	Acquisition cost of fixed assets and plantations
Perolehan aset lain-lain	-	(43.219.956.274)	Other acquisitions
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(224.553.314.873)	788.932.745.379	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) utang bank	583.758.568.591	200.241.283.765	Addition (payments) from bank loans
Pembayaran dividen	-	(4.582.933.798)	Dividend payments
Pembayaran utang rekening dana investasi	(1.304.405.425)	(5.906.091.062)	Investment fund accounts payments
Penerimaan (pembayaran) MTN	(659.595.539.792)	-	Addition (payments) of MTN
Penerimaan (pembayaran) sewa pembiayaan	(1.073.655.010)	1.067.569.190	Addition (payments) of leasing
Penerimaan (pembayaran) lain-lain	(553.402.270.828)	-	Other addition (payments)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(631.617.302.464)	190.819.828.095	Net cash provided from (used in) financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(679.161.037.706)	430.267.543.300	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Pengaruh divestasi PT Phapros Tbk	-	(113.643.681.027)	Impact divestment PT Phapros Tbk
Kas dan setara kas pada awal tahun	986.460.306.076	669.836.443.803	Cash and cash equivalent at the beginning of period
Kas dan setara kas pada akhir tahun	307.299.268.370	986.460.306.076	Cash and cash equivalent at the end of period

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. Umum

Pendirian Perusahaan

Berdasarkan SK Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan No. 0642/M.K.3/64 tanggal 11 Agustus 1964, Pemerintah menggunakan seluruh harta kekayaan eks Oei Tiong Ham Concern sebagai penyeteroran Modal Pemerintah dalam pendirian PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Negara (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia ("Perusahaan"). Hal tersebut dilakukan dengan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, Jakarta No.5 tanggal 12 Oktober 1964, kemudian diubah dengan Akta Notaris Joeni Mulyani, Semarang No. 26 tanggal 30 Juni 1969 dan No. 17 tanggal 16 Juli 1969.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama yang sama. Perubahan bentuk badan hukum tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. J.A.S/25/13 tanggal 20 April 1976 dan No. C.24260-HT01-04 tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara, telah dilakukan penyesuaian/ perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, No. 87 tanggal 13 September 1986. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan No. C.2-160-HT.01.04 tahun 1987 tanggal 9 Januari 1987.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. SK-291/MBU/05/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diaktakan dengan Akta Notaris No.11 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011956.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 yang diantaranya meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp 600.000.000.000 menjadi Rp 4.100.000.000.000 dan penempatan modal serta diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.027.425 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp 1.027.425.000.000.

1. General

Establishment

Based on the Decree of the Coordinating Minister of Finance Compartment No. 0642/M.K.3/64 dated 11 August 1964, the Government used all the assets of former Oei Tiong Ham Concern as Government Capital Deposit in the establishment of PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Negara (PPEN) Rajawali Nusantara Indonesia (the "Company"). The Company was established based on Notarial Deed of Mrs. Adasiah Harahap, Jakarta No. 5 dated 12 October 1964, subsequently amended by Notarial Deed of Joeni Mulyani, Semarang No. 26 dated 30 June 1969 and No. 17 dated 16 July 1969.

Based on Law No. 6 year 1968 and Government Regulation No. 5 year 1974, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia adjusted its legal form into a Limited Liability Company (Persero) with the same name. Changes in the legal entity has obtained approval from the Minister of Justice No. J.A.S/25/13 dated 20 April 1976 and No. C.24260-HT01-04 year 1983 dated 3 June 1983. With the issuance of Government Regulation No. 3 year 1983 on procedures for guidance and supervision of State-Owned Enterprises, there have been made the adjustments/ changes in the Company's Articles of Association by Imas Fatimah, SH, No. 87 dated 13 September 1986. The amendment has been ratified by the Minister of Justice with his Decree No. C.2-160-HT.01.04 year 1987 dated 9 January 1987.

On 31 May 2017 the Company changes its Articles of Association based on Decision Letter of SOE Minister as a shareholder No. SK-291/MBU/05/2017 dated 8 May 2017 which then notarized into Deed No.11 of Notary Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his decision letter Number AHU-0011956.AH.01.02 year 2017 dated 2 June 2017 which increase the authorized capital of the Company from amounting to Rp 600,000,000,000 to Rp 4,100,000,000,000 and capital placed and paid by the Republic of Indonesia consisting of 1,027,425 shares or amounting to Rp 1,027,425,000,000.

1. Umum (lanjutan)

Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, terakhir tanggal 22 Mei 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia melakukan penambahan kegiatan usaha, penambahan modal disetor dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. S-302/MBU/04/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 mengenai penambahan modal Negara Republik Indonesia kedalam saham Perseroan berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp 24.141.010.000 dan sebesar Rp 990.000 berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan/ disetor PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang semula Rp 1.027.425.000.000 menjadi sebesar Rp 1.051.567.000.000.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bertujuan turut melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan sektor pertanian, industri, dan perdagangan pada khususnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan menjalankan usaha di bidang pengelolaan (manajemen), industri, perkebunan, perdagangan umum, perdagangan farmasi dan alat-alat kesehatan, pembangunan kawasan, perumahan, dan gedung-gedung (*real estate*).

1. General (continued)

Establishment (continued)

The Company's Articles of Association were amended several times, most recently on 22 May 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia added its business activities, added its paid-up capital and amended the Articles of Association based on the Decree of the Minister of BUMN as Shareholder No. S-302/MBU/04/2018 dated 4 May 2018 which was notarized by Notarial Deed Number 14 dated 22 May 2018 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree Number AHU-0011424.AH.01.02.Year 2018 dated 23 May 2018 concerning the addition of the capital of the Republic of Indonesia into the Company's shares in the form of transfer of State Owned Goods to the Ministry of Industry whose procurement is sourced from the State Budget of 2010. Based on Government Regulation No. 50 of 2017 dated 7 December 2017 amounting to Rp 24,141,010,000 and Rp 990,000 came from the capitalization of part of the reserves of PT Rajawali Nusantara Indonesia. With the addition of the capital, the issued/ paid-up capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) which was originally Rp 1,027,425,000,000 become Rp 1,051,567,000,000.

Purpose and Objectives of Business Activities

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) aims to contribute implement and support government programs policies in economics and national development in general, and the development of agriculture, industry, and trade in particular. To achieve these objectives, the Company carries on business in the field of management, industry, plantations, general trading, trading pharmaceuticals and medical equipment, region development, housing, and buildings (*real estate*).

31 Desember 2020

31 December 2020

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha (lanjutan)

Purpose and Objectives of Business Activities (continued)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. S-302/MBU/04/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 menyetujui penambahan kegiatan usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), berupa penambahan bidang industri pengolahan hasil pertanian dan produk turunannya, dan bidang pengelolaan kawasan dengan status Hak Pengelolaan (HPL).

Based on the Decree of the Minister of BUMN as Shareholder No. S-302/MBU/04/2018 dated 4 May 2018 which was notarized by Notarial Deed Number 14 dated 22 May 2018 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree No. AHU-0011424.AH.01.02.Year 2018 dated 23 May 2018 approves the addition of business activities of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), in the form of additional industrial processing of agricultural products and derivative products area management with the status of Management rights.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dan dalam menjalankan usahanya, Perusahaan berkantor pusat di gedung Rajawali Nusantara Indonesia, Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan, Jakarta Selatan sedangkan anak/ unit/ cabang Perusahaan tersebar di hampir seluruh kota Indonesia.

The Company is domiciled in Jakarta, and in running the business, the Company's head-office located at the Rajawali Nusantara Indonesia Building, Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan, South Jakarta while the subsidiaries/ units/ company branches spread across almost all cities in Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Directors

Susunan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasar pada SK - 125/MBU/04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, sehingga susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2020 based on the letter No. SK-125/MBU/04/2020 dated 21 April 2020 concerning Discontinuation and Appointment of the Board of Commissioners and Determination of the Company's Independent Commissioner of the Company (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia is as follows:

	2020	2019	
Dewan Komisaris :			Board of Commissioners :
Komisaris Utama	Ramelan	Ramelan	President Commissioner
Komisaris	Abdi Mustakim	Jamaluddin Malik	Commissioner
Komisaris	Abdul Rochim	Drs. Suropto	Commissioner
Komisaris	Himawan Arief Sugoto	Aditya Dhanwantara	Commissioner
Komisaris Independen	Arie Sujito	Teguh Juwarno	Independence Commissioner

31 Desember 2020

31 December 2020

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Board of Commissioners and Directors (continued)

Susunan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasar pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai Rapat Umum Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor : SK-365/MBU/11/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero). Para pemegang saham PT Rajawali Nusantara Indonesia memutuskan melalui surat Nomor : SK-397/MBU/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn tanggal 18 Januari 2021 Nomor 4 perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, sehingga susunan Direksi sebagai berikut :

Composition of the Board of Directors as of 31 December 2020 is based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises in the General Meeting of Shareholders of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Number: SK-365/MBU/11/2020 dated 21 November 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Company's Directors (Persero). The shareholders of PT Rajawali Nusantara Indonesia decided by letter Number: SK-397/MBU/12/2020 dated 21 December 2020 through Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn dated 18 January 2021 Number 4 to change the Nomenclature of Position and Appointment of members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, so that the composition of the Board of Directors is as follows:

Susunan Direksi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The members of the Company's Directors as of 31 December 2020 and 2019 are as follows :

31 Desember 2020/ 31 December 2020		
Direktur Utama	Arief Prasetyo Adi	President Director
Direktur SDM	Johanes Nanang Marjianto	Human Resources Director
Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha	Febriyanto	Development and Business Control Director
Direktur Keuangan	Pramusti Indrascaryo	Finance Director
Direktur Manajemen Aset	Endang Suraningsih	Asset Management Director
Direktur Komersial	Frans Marganda Tambunan	Commercial Director
Direktur Supply Chain Management & Teknologi Informasi	Thomas Hadinata	Supply Chain Management & Information Technology Director
31 Desember 2019/ 31 December 2019		
Direktur Utama	B. Didik Prasetyo	President Director
Direktur SDM dan Umum	Johanes Nanang Marjianto	Human Resources and General Director
Direktur Pengendalian Usaha	Agung Primanto Murdanoto	Business Control Director

31 Desember 2020

31 December 2020

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Board of Commissioners and Directors (continued)

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of 31 December 2020 is as follows :

31 Desember 2020/ 31 December 2020		
Komite Nominasi dan Remunerasi:		Nomination and Remuneration Committee:
Ketua	Ramelan	Chairman
Sekretaris	Desti Fitriani	Secretary
Anggota	Himawan Arief Sugoto	Member
Anggota	Abdul Rochim	Member
Anggota	Arie Sujito	Member
Anggota	Abdi Mustakim	Member

Susunan Komite Manajemen Risiko per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The composition of the Risk Management Committee as of 31 December 2020 and 2019 is as follows :

2020		2019	
Komite Manajemen Risiko:			Risk Management Committee:
Ketua	Abdul Rochim	Aditya Dhanwantara	Chairman
Sekretaris	Pratama S. Adi	Muhammad Yusuf	Secretary
Anggota	Risqi Fadilah Romadhona	Desti Fitriani	Member

Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2020 and 2019 is as follows :

2020		2019	
Komite Audit :			Audit Committee :
Ketua	Abdi Mustakim	Teguh Juwarno	Chairman
Anggota	M. Malik	M. Malik	Member
Anggota	Azwir Zamrinurdin	Pratama S. Adi	Member

Jumlah karyawan Perusahaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

The number of employees of the Company as of 31 December 2020 and 2019 is as follows :

2020		2019	
Formasi karyawan :			Employees formation :
Karyawan pimpinan	709	723	Officer
Karyawan pelaksana	3.408	3.274	Executor employee
Karyawan kontrak waktu tertentu	4.811	5.402	Definite period contract employee
Jumlah	8.928	9.399	Total

Pengawasan terhadap kegiatan usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Control of business activities of PT Rajawali Nusantara Indonesia is conducted by the Internal Audit Unit (SPI), which is directly responsible to the President Director.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan

2. Investments

Rincian dari penyertaan Perusahaan pada entitas anak dan perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of the Company's investments in subsidiaries and associate companies are as follows:

Keterangan/ <i>Descriptions</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i>	Lokasi/ <i>Location</i>	Bidang usaha/ <i>Business field</i>
Entitas anak yang dikonsolidasikan			Consolidated subsidiaries :
PT Rajawali Nusindo	100%	Kantor pusat di Jakarta dan cabang di seluruh Indonesia/ <i>Central office in Jakarta and branch offices in all across Indonesia</i>	Distribusi dan perdagangan obat, alat kesehatan, dan perdagangan umum/ <i>Distribution and trading of medicine health equipment, and general trading</i>
PT PG Rajawali I	100%	Surabaya	Industri gula/ <i>Sugar industry</i>
PT PG Rajawali II dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	100%	Cirebon	Industri gula, alkohol, arak, and spiritus/ <i>Sugar, alcohol, arrack, and spirituous.</i>
PT PG Candi Baru	98,85%	Sidoarjo	Industri gula/ <i>Sugar industry</i>
PT Mitra Rajawali Banjaran	100%	Bandung	Industri alat kesehatan meliputi kondom, alat suntik sekali pakai, dan Hyperbaric Oxygen Chamber Therapy (HBOT)/ <i>Medical equipment industry such as condom, disposable syringe and Hyperbaric Oxygen Chamber Therapy (HBOT).</i>
PT Perkebunan Mitra Ogan	73,58%	Palembang	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit serta perkebunan karet/ <i>Palm Oil plantations and mills and rubber plantations.</i>
PT Mitra Kerinci dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	100%	Padang	Perkebunan teh/ <i>Tea plantation</i>
PT GIEB Indonesia	80,96%	Denpasar	Distribusi dan perdagangan/ <i>Distribution and trading</i>

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Notes to consolidated financial statements (continued)
 For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

Rincian dari penyertaan Perusahaan pada entitas anak dan perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. Investments (continued)

The details of the Company's investments in subsidiaries and associate companies are as follows: (continued)

Keterangan/ Descriptions	Persentase Kepemilikan/ Owner percentage	Lokasi/ Location	Bidang usaha/ Business field
PT Rajawali Citramass	100%	Mojokerto	Industri karung plastik/ Plastic bag industry
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	100%	Sidoarjo	Industri karung plastik dan kulit/ Plastic bag and leather industry
PT Laras Astra Kartika	100%	Palembang	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit/ Palm Oil plantations and mills
PT Rajawali Gloves Corporation (dalam likuidasi/ in liquidation)	61,25%	Sidoarjo	Industri sarung tangan kulit/ Gloves industry
Perusahaan asosiasi :			Associate companies :
PT Madu Baru	35%	Yogyakarta	Industri gula, spiritus, dan alkohol/ Sugar, spirituous, and alcohol industry
PT Padi Energi Nusantara	14%	Jakarta	Ketahanan pangan dan energi/ Food and energy endurance
PT Mitra BUMDes Nusantara	10%	Jakarta	Logistik dan perdagangan / Logistics and trading
PT PP Sinergi Banjaratma	7%	Jakarta	Pembangunan, perdagangan dan Jasa / Building, trading and service
Ventura bersama :			Joint venture :
PT Rajawali Stevia Indonesia	45%	Padang	Tanaman Stevia

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

Pada tanggal 27 Maret 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham sehubungan dengan pelepasan hak atas 56,77% kepemilikan saham Perusahaan di PT Phapros Tbk kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan nilai akuisisi sebesar Rp 1.361.000.000.000. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Kimia Farma (Persero) merupakan entitas yang dimiliki dan dikuasai oleh Kementerian BUMN, dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian mengadopsi PSAK 38 tentang Bisnis Entitas Sepengendali, maka selisih nilai pelepasan PT Phapros Tbk dicatat sebagai berikut :

Imbalan yang diterima	1.361.000.000.000	Benefits received
Nilai Kepentingan Non Pengendali	273.569.096.180	Non – controlling interest value
Akumulasi nilai penghasilan komprehensif Lainnya	77.207.863.933	Accumulated value of other comprehensive income
Jumlah	1.711.776.960.113	Total
Aset bersih PT Phapros Tbk	(701.835.090.459)	Net asset – PT Phapros Tbk
Beban-beban terkait pelepasan PT Phapros Tbk	(14.790.795.070)	Expenses related to the disposal of PT Phapros Tbk
Tambahan modal disetor	995.151.074.584	Paid in capital

Sehubungan dengan divestasi tersebut, dikarenakan telah hilangnya kendali Perusahaan atas PT Phapros Tbk maka laporan keuangan PT Phapros Tbk tidak lagi dikonsolidasikan.

On 27 March 2019, the Company entered into a Share Transfer Agreement with respect to the transfer of rights 56.77% of the Company's share ownership in PT Phapros Tbk to PT Kimia Farma (Persero) Tbk with an acquisition value amounting to Rp 1,361,000,000,000. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and PT Kimia Farma (Persero) are entities owned and controlled by the Ministry of BUMN, in presenting the consolidated financial statements adopting SFAS 38 concerning Business Entities under Common Control, the difference in value of the release of PT Phapros Tbk is recorded as follows:

In connection with the divestment, due to the loss of control over PT Phapros Tbk, its financial statements are no longer consolidated.

a. Penyertaan pada entitas anak

1) PT Rajawali Nusindo

PT Rajawali Nusindo dibentuk pada tanggal 31 Mei 2004 dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 4 tanggal 31 Mei 2004 sehubungan perubahan usaha Perusahaan dari *operating holding* menjadi *investment holding*. Pendirian entitas anak tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-244/MBU/2004 tanggal 4 Mei 2004 serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-16617.HT.01.01.TH.2014 tanggal 2 Juli 2004.

a. Investment in subsidiaries

1) PT Rajawali Nusindo

PT Rajawali Nusindo was formed on 31 May 2004 through Deed of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 4 dated 31 May 2004 in respect of changes in the Company's business from operating holding company into an investment holding company. Establishment of subsidiaries was approved by the Minister of State Owned Enterprises No. S-244/MBU/2004 dated 4 May 2004 and was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C- 16617.HT.01.01.TH.2014 dated 2 July 2004.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

1) PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

Penyertaan Perusahaan pada PT Rajawali Nusindo dilakukan dengan cara penyerahan aset “di luar tanah dan bangunan” dan kewajiban divisi perdagangan dan distribusi dengan menggunakan nilai buku per tanggal 31 Mei 2004. Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PT Rajawali Nusindo adalah sebesar Rp 160.000.000.000 dengan kepemilikan sebesar 100%. Atas penyerahan aset dan kewajiban dalam rangka penyertaan tersebut tidak terdapat keuntungan dan kerugian.

Berdasarkan Perjanjian No. 159/S.Pj/RNI. 01/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengonversi tagihan PT Rajawali Nusindo menjadi penyertaan saham sebesar Rp 95.000.000.000.

Penyertaan saham tersebut baru diaktakan pada tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan Akta No.18, dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. – Notaris di Jakarta.

Perubahan terakhir dari Anggaran Dasar Perusahaan didasarkan akta notaris No. 03 tanggal 06 September 2019 oleh Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, notaris di Jakarta tentang peningkatan modal dasar dan modal disetor Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat No.: AHU-AH.01.03.0330653 tertanggal 12 September 2019.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung RNI, jalan Denpasar Raya kav. D III, Kuningan, Jakarta dengan 42 cabang dan 1 Unit Bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

1) PT Rajawali Nusindo (continued)

The Company's investment in PT Rajawali Nusindo was done by transferring assets “excluding land and buildings” and the obligations of trade and distribution division by using the book value as of 31 May 2004. The value of shares of the Company's investment in PT Rajawali Nusindo amounting to Rp 160,000,000,000 with ownership at 100%. On the transfer of assets and liabilities in connection with of these investments there are no profit or loss.

Based on Agreement No. 159/S.Pj/RNI. 01/XII/2016, dated 23 December 2016, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) agreed to convert PT Rajawali Nusindo's payable to equity participation amounting to Rp 95,000,000,000.

The shares were notarized on 19 January 2017 based on Deed No. 18, from Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. - Notary in Jakarta.

The latest change in the Company's Articles of Association is based on notarial deed No. 03 dated 06 September 2019 of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, notary in Jakarta concerning the increase in authorized capital and paid-up capital of the Company. Changes to the Company's Articles of Association have been recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights in accordance with letter No.: AHU-AH.01.03.0330653 dated 12 September 2019.

The Company head office is located at RNI Building, Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan, Jakarta with 42 branches and 1 Business Unit spread throughout Indonesia.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I

PT Pabrik Gula Rajawali I (PT PG Rajawali I) pada awalnya merupakan penggabungan 2 (dua) Pabrik Gula yaitu PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia, selaku Pemegang Saham, melalui surat No. S.560/MK.016/1995 tanggal 19 September 1995.

Penggabungan tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru tanggal 5 Desember 1995 yang risalahnya diaktakan oleh Notaris Sutjipto, SH, masing-masing dengan Akta No. 14 dan 13 tanggal 3 Januari 1996 yang dipertegas dengan Akta No. 90 dan 91 tanggal 28 Agustus 1996 oleh Notaris yang sama.

Perjanjian Penggabungan Usaha PG Krebet Baru dan PG Rejo Agung Baru No. 16/SP/DIRU/XII/95 tanggal 29 Desember 1995 yang diaktakan oleh Notaris Sutjipto, SH, dengan Akta No. 92 tanggal 28 Agustus 1996 berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1996. Perubahan nama menjadi PT PG Rajawali I sesuai dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 91 tanggal 28 Agustus 1996.

Pada tanggal 22 November 2000 sesuai Akta Notaris No.103 dari Notaris Sutjipto, S.H., Entitas telah mengubah status badan hukum entitas anak, PT Pucuk Rosan Baru dan PT Mitra Nusantara, menjadi unit-unit Entitas. Perubahan status tersebut efektif mulai tanggal 1 Januari 2001.

Maksud dan tujuan usaha PT PG Rajawali I sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya sektor pertanian industri gula.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I

PT Pabrik Gula Rajawali I (PT PG Rajawali I) was originally a merger of 2 (two) Sugar Mills, i.e. PG Krebet Baru and PG Rejo Agung implemented under the approval of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, as a shareholder, through letter No. S.560/MK.016/1995 dated 19 September 1995.

The merger was decided in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PG Krebet and PG Rejo Agung Baru dated 5 December 1995 that documented by Notary Sutjipto, SH, with Deed No. 14 and 13 dated 3 January 1996 which then confirmed by Deed No. 90 and 91 dated 28 August 1996 by the same Notary.

Merger Agreement of PG Krebet Baru and PG Rejo Agung Baru No. 16/SP/DIRU/XII/95 dated 29 December 1995 which was documented by Notary Sutjipto, SH, through deed No. 92 dated 28 August 1996 was effective from 1 January 1996. The amendment of name to PT PG Rajawali I is in accordance with the Deed of Sutjipto, SH, No. 91 dated 28 August 1996.

On 22 November 2000 pursuant to Notarial Deed No.103 of Notary Sutjipto, S.H., the Entity has changed the status of the legal entity of its subsidiaries, PT Pucuk Rosan Baru and PT Mitra Nusantara, to become Entity units. The status change was effective starting 1 January 2001.

The purpose and objectives of PT PG Rajawali I in accordance with the Amendments to the Articles of Association are to implement and support government program policies in the national economic and development fields in general, especially the sugar industry's agricultural sector.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Entitas pada pasal 4 disebutkan modal dasar Entitas sebesar Rp115.000.000.000 yang terdiri dari 115.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000.

3) PT Pabrik Gula Rajawali II dan entitas anak

PT Pabrik Gula Rajawali II (PT PG Rajawali II) berawal dari PT Perkebunan XIV berkedudukan di Cirebon yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Mei 1981 dan diperbaiki dengan Akta No. 57 tanggal 29 Juni 1983 dari Notaris Gustaaf Moemala Soankoepon Loemban Tobing, SH, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C27991.HT.01.01.TH.83 tanggal 12 Desember 1983.

Akta pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 05 tanggal 6 September 2019 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notaris di Jakarta Selatan tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang semula PT Perkebunan XIV berkedudukan di Jakarta menjadi PT Pabrik Gula Rajawali II (Perusahaan) yang berkedudukan dan berkantor di Kota Cirebon dengan alamat Jalan Dr. Wahidin No. 46 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan RT 1 RW 1 Kota Cirebon 45122, Jawa Barat. Telp. (0231) 204752. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0070504.AH01.02.Tahun 2019 tanggal 17 September 2019.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

2) PT Pabrik Gula Rajawali I (continued)

Based on the Amendment of Articles of Association mentioned in Article 4 of the authorized capital amounted to Rp 115,000,000,000 consisting of 115,000 shares with a nominal of Rp 1,000,000.

3) PT Pabrik Gula Rajawali II and its subsidiaries

PT Pabrik Gula Rajawali II (PT PG Rajawali II) formerly PT Perkebunan XIV which domiciled in Cirebon was established based on Deed No. 3 dated 2 May 1981 and amended with Deed No. 57 dated 29 June 1983 of Notary Gustaaf Moemala Soankoepon Loemban Tobing, SH, Notary in Jakarta. Its Articles of Association have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C27991.HT.01.01.TH.83 dated 12 December 1983.

The Notarial Deed of Establishment has been amended several times, most recently through Notarial Deeds No. 05 dated 6 September 2019 of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notary in South Jakarta, concerning the amendment to the Company's Articles of Association which was originally PT Perkebunan XIV domiciled in Jakarta to become PT Gula Rajawali II domiciled and has an office in Cirebon City with the address at Jalan Dr. Wahidin No. 46 Sukapura Subdistrict, Kejaksan District RT 1 RW 1 Cirebon City 45122, West Java. Tel. (0231) 204752. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0070504.AH01.02. 2019 on 17 September 2019.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

2. Investments (continued)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

a. Investment in subsidiaries (continued)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II dan entitas anak (lanjutan)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II and its subsidiaries (continued)

Berdasarkan perubahan akta terakhir No. 05 tanggal 6 September 2019 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Perusahaan yang tertuang dalam pasal 3 berubah sebagai berikut: (1) Melakukan usaha di bidang pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI; (2) Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor; (3) Perdagangan eceran bukan mobil dan motor; (4) Industri makanan dan minuman; (5) Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; (6) Industri farmasi; (7) Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (8) Real estate; (9) Aktivitas kesehatan manusia; dan (10) Aktivitas administrasi kantor.

Based on the latest notarial deeds No. 05 dated 6 September 2019 from Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notary in South Jakarta, the purpose and objectives of the Company set forth in article 3 are changed as follows: (1) conducting business in the fields of agriculture, animal husbandry, hunting and YBDI activities ; (2) Wholesale that are not cars and motorcycles; (3) Non-car and motorcycle retail trade; (4) Food and beverage industry; (5) Chemical industry and chemical goods; (6) Pharmaceutical industry; (7) Warehousing and transportation support activities; (8) Real estate; (9) Human health activities; and (10) Office administration activities.

Mulai musim tanam tahun 2018/2019 Perusahaan sudah tidak mengelola tebu milik sendiri (TS) karena lahan HGU Perusahaan disewakan kepada petani/warga desa dalam rangka menyejahterakan warga dan membentuk situasi yang kondusif. Diharapkan pula dengan pola tersebut dapat memberikan kontribusi positif kepada Perusahaan.

Starting on the planting season in 2018/2019, the Company no longer manages its own sugarcane (TS) because the Company's HGU land is leased to farmers / villagers in order to prosper the residents and form a conducive situation. It is also hoped that this scheme can make a positive contribution to the Company.

PT PG Rajawali II yang berdomisili di Cirebon memiliki 4 unit pabrik gula dan 1 unit pengolahan tetes (pabrik spiritus dan alkohol/ PSA) yaitu sebagai berikut :

PT PG Rajawali II which domiciled in Cirebon has 4 sugar factory units and 1 unit of molasses processing (spirituous and alcohol/ PSA factory) as follows :

- PG Sindang Laut
- PG Tersana Baru
- PSA Palimanan
- PG Jatitujuh
- Unit Research & Development (Puslitagro)
- PG Subang
- Apotek Nusindo Farma

- PG Sindang Laut
- PG Tersana Baru
- PSA Palimanan
- PG Jatitujuh
- Research & Development Unit (Puslitagro)
- PG Subang
- Nusindo Farma Pharmacy

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II dan entitas anak (lanjutan)

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan PT PG Rajawali II nomor: 916/S.PMh/RW-11.01NII/2015, PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) dinyatakan beku operasi per tanggal 31 Juli 2015 hingga waktu yang belum ditentukan. Seluruh kewajiban PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) baik pada pihak ketiga/rekanan maupun kepada karyawan PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) diambil alih dan diselesaikan oleh PT PG Rajawali II.

Masing-masing Pabrik Gula dipimpin oleh Administrator sebagai General Manager yang bertanggung-jawab kepada Direksi. Pelaksanaan pembukuan dilakukan oleh masing-masing pabrik/unit usaha. Kantor Direksi menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan didasarkan laporan yang disusun oleh masing-masing PG dan Unit Usaha.

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan PT PG Rajawali II nomor: 028/SK/RW-11.1/X/2015, unit PG Karangsuwung dinyatakan beku operasi dan statusnya berubah menjadi rayon Karangsuwung dibawah pengelolaan dan tanggung jawab unit pabrik gula Sindang Laut yang efektif mulai awal tahun 2016.

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi PT PG Rajawali II nomor 10.1/SK/RW-II.01/2018 tanggal 17 Mei 2018, terdapat penggabungan Subang ke Jatitujuh menjadi unit Pabrik Gula Guna Usaha (Jatitujuh dan Subang). Kondisi ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawasan, optimalisasi kapasitas pabrik dan persiapan perubahan peruntukan lahan HGU PG Subang, sehingga pada tahun 2018 PG Subang tidak melaksanakan giling dan digabung ke Jatitujuh.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

3) PT Pabrik Gula Rajawali II and its subsidiaries (continued)

Based on decree issued by PT PG Rajawali II number: 916 / S.PMh / RW-11.01NII / 2015, PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) was suspended starting on 31 July 2015 until an undetermined time. All obligations of PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) either to third parties / partners or to employees of PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) were taken over and settled by PT PG Rajawali II.

Each Sugar Factory is lead by an Administrator as General Manager who reports to the Board of Directors. Bookkeeping is carried out by each factory / business unit. The Office of the Directors compiles the Company's Consolidated Financial Statements based on the reports prepared by each PG and Business Unit.

Based on a decision issued by PT PG Rajawali II number: 028/SK/RW-11.1/X/2015, the Karangsuwung PG unit was suspended and its status was changed to Karangsuwung rayon under the management and responsibility of the Sindang Laut sugar factory which began to be effective at the beginning of the year 2016.

Based on a decree issued by the Board of Directors of PT PG Rajawali II number 10.1/SK/RW-II.01/2018 dated 17 May 2018, concerning the merger between Subang and Jatitujuh to become Pabrik Gula Guna Usaha (Jatitujuh and Subang) in order to be more efficient and effective in monitoring the factory, optimizing plant capacity and preparing changes to the allocation of PG Subang's HGU land, so that in 2018 PG Subang will no longer do the milling activity and be merged into Jatitujuh.

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

4) PT Pabrik Gula Candi Baru

PT Pabrik Gula Candi Baru (PT PG Candi Baru) sebelumnya merupakan Perusahaan perorangan yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1911. Pengesahannya sebagai badan hukum terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya No. 122 tanggal 31 Oktober 1911 dengan nama NV Suiker Fabrik Tjandi. Berdasarkan RUPS tanggal 8 Februari 1962 nama Perusahaan diubah menjadi PT Pabrik Gula Tjandi dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A5/112/1 tanggal 4 Oktober 1962. Berdasarkan akta pernyataan RUPS yang dikukuhkan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 73 tanggal 28 Juli 1993 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, berubah menjadi PT Pabrik Gula Candi Baru.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 9 tanggal 12 September 2019 yang disusun oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn terkait dengan perubahan ketentuan pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Perubahan terakhir tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0072910.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 September 2019.

Anggaran dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 8 tanggal 14 Mei 2020 yang disusun oleh Notaris Ermin Yuniastuti, S.H terkait dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Perubahan terakhir tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-AH.01.03-0219628 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

4) PT Pabrik Gula Candi Baru

PT Pabrik Gula Candi Baru (PT PG Candi Baru) was previously a private company that was established on 21 October 1911. The authorization as a legal entity was registered in the District Court Clerk in Surabaya No. 122 dated 31 October 1911 under the name of NV Suiker Fabrik Tjandi. Based on the Annual General Meeting on 8 February 1962 the Company's name was changed to PT Pabrik Gula Tjandi and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his Decree No. Y.A5/112/1 dated 4 October 1962. Based on the deed of GMS statement which is notarized through the Deed of Association Amendment No. 73 dated 28 July 1993 made by Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, was changed to PT Pabrik Gula Candi Baru.

The Articles of Association of the Entity have been updated several times, most recently with Deed No. 9 dated 12 September 2019 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, related to changes in the provisions of article 3 concerning the Purpose and Objectives of the Company. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0072910.AH.01.02. YEAR 2019 dated 20 September 2019.

The Articles of Association of the Entity have been updated several times, most recently with deed No. 8 dated 14 May 2020 compiled by Notary Ermin Yuniastuti, S.H related to changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. The latest amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No.AHU-AH.01.03-0219628 YEAR 2020 dated 14 May 2020.

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

4) PT Pabrik Gula Candi Baru

PT PG Candi Baru berkedudukan di Sidoarjo dan beroperasi di Jl. Raya Candi No. 10, Sidoarjo.

Sesuai dengan pasal 3 Akta No. 19 tanggal 18 Juli 1998, maksud dan tujuan pendirian adalah berusaha dalam bidang perkebunan dan pertanian tebu, serta industri gula dan perdagangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

5) PT Mitra Rajawali Banjaran

Anggaran Dasar PT Mitra Rajawali Banjaran diaktakan oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 21 tanggal 12 Januari 1994, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7003.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996.

Anggaran Dasar PT Mitra Rajawali Banjaran telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya tentang jangka waktu pendirian serta maksud dan tujuan pendirian, dan selanjutnya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Skifa Rajawali Indonesia, menyetujui rancangan penggabungan usaha dan rapat umum luar biasa pemegang saham PT Mitra Rajawali Banjaran yang diaktakan oleh Notaris yang sama.

Pada tahun 1998 PT Skifa Rajawali Indonesia dan PT Mitra Rajawali Banjaran telah melakukan penggabungan usaha dengan menggunakan metode penggabungan (*merger*) *pooling of interest* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta peraturan pajak dan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

4) PT Pabrik Gula Candi Baru

PT PG Candi Baru is located in Sidoarjo and operates at Jl. Raya Candi No. 10, Sidoarjo.

In accordance with article 3 of Deed No. 19 dated 18 July 1998, the intent and purpose of establishment is to engage in agricultural plantations and sugarcane, as well as the sugar industry and trade by applying the principles of Limited Company.

5) PT Mitra Rajawali Banjaran

Articles of Association of PT Mitra Rajawali Banjaran were notarized by Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, with Deed No. 21 dated 12 January 1994, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his Decree No. C2-7003.HT.01.01.TH.96 dated 6 March 1996.

The Articles of Association of PT Mitra Rajawali Banjaran have been amended several times, including amendment regarding the time period of establishment and the purpose and objectives of the establishment, and subsequently based on the Extraordinary Shareholders General Meeting of PT Skifa Rajawali Indonesia, approved the draft merger and extraordinary general meeting of shareholders of PT Mitra Rajawali Banjaran which then notarized by the same Notary.

In 1998 PT Skifa Rajawali Indonesia and PT Mitra Rajawali Banjaran have been merged using amalgamation (*merger*) *pooling of interest* in accordance with Financial Accounting Standards and tax regulations and applicable law in Indonesia.

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

5) PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

Berkaitan dengan penggabungan usaha tersebut, dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Rajawali Banjaran dengan Akta No. 108 tanggal 29 Desember 1998 dari Notaris Sutjipto, SH, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-15189.HT.01.04.TH.99 tanggal 19 Agustus 1999.

Maksud dan dasar tujuan didirikannya PT Mitra Rajawali Banjaran adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang industri dan perdagangan khususnya alat-alat kesehatan.

Sampai dengan 31 Desember 2015 PT Mitra Rajawali Banjaran mempunyai kewajiban tidak lancar sebesar Rp 24.000.000.000 kepada Perusahaan. Untuk memperbaiki kinerja dan struktur permodalan PT Mitra Rajawali Banjaran saat ini, Perusahaan setuju untuk melakukan Perjanjian Konversi Tagihan/ Pinjaman menjadi Penyertaan Saham pada tanggal 23 Desember 2016 dengan No. 160/S.Pj/RNI.01/XII/2016.

Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mitra Rajawali Banjaran No. 54/Kep.PS/RNI.01/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 telah menyetujui konversi seluruh pinjaman dari Perusahaan menjadi penyertaan saham sejumlah 24.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

5) PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

In connection with the merger, the Articles of Association of PT Mitra Rajawali Banjaran were amended with Deed No. 108 dated 29 December 1998 of Sutjipto, SH, and has received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C-15189.HT.01.04.TH.99 dated 19 August 1999.

The purpose and objective of the establishment of PT Mitra Rajawali Banjaran are to conduct and support government policies and programs in the field of industry and trade in especially in medical devices.

As of 31 December 2015 PT Mitra Rajawali Banjaran has a non-current liability amounting to Rp 24,000,000,000 to the Company. To improve performance and capital structure of PT Mitra Rajawali Banjaran at current time, the Company agreed to enter into Claims Conversion Agreement/ Loan converted into Investments in Shares on 23 December 2016 under No. 160/S.Pj/RNI.01/ XII/2016.

The decision of the Shareholders outside of the General Meeting of Shareholders of PT Mitra Rajawali Banjaran No. 54/Kep.PS/RNI.01/XII/2016 dated 23 December 2016 has approved the conversion of all of the Company's loan to equity consisting of 24,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share.

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

6) PT Perkebunan Mitra Ogan

PT Perkebunan Mitra Ogan didirikan berdasarkan Akta No. 170 tanggal 19 Desember 1988 dari Imas Fatimah, SH. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan berkedudukan di Jalan Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan lokasi perkebunannya terletak di Peninjauan dan Semidang Aji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), di Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim dan Batanghari Leko dan Sekayu Sungai Keruh di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Notaris No. 31 tanggal 13 Agustus 2008 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat dan disampaikan oleh Siti Rayhana, SH, sebagai pengganti dari notaris B.R.Ay. Mahyastoeti N, SH. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-75920 AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3 ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang industri atas hasil pertanian, dan perkebunan serta industri perdagangan.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

6) PT Perkebunan Mitra Ogan

PT Perkebunan Mitra Ogan was established based on Deed No. 170 dated 19 December 1988 of Imas Fatimah, SH. This deed was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia. The Company is domiciled at Jalan Kol. H. Burlian Km. 9 Palembang, South Sumatra Province and the plantations are located in Peninjauan and Semidang Aji in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency, in Rambang Lubai, Muara Enim Regency and Batanghari Leko and Sekayu Sungai Keruh in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra Province.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest was made based on Notarial Deed No. 31 dated 13 August, 2008 regarding the approval of amendment to the Articles of Association of the Company made and submitted by Siti Rayhana, SH, in lieu of notary B.R.Ay. Mahyastoeti N, SH. The amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his Decree Number AHU-75920 AH.01.02 of 2008 dated 20 October 2008. In accordance with the article 3 of the Articles of Association, the scope of activities of the Company is mainly engaged in the industry of the agricultural products, plantations and the trade industry.

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

7) PT Perkebunan Mitra Kerinci

PT Perkebunan Mitra Kerinci (PTP Mitra Kerinci) didirikan pada tanggal 17 Juli 1990 oleh PTP VIII (sekarang PTP IV). Komposisi kepemilikan modal saham PTP Mitra Kerinci beberapa kali di ubah, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris Sutjipto, SH No. 6 tanggal 3 Agustus 2001 dan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2001 tentang penyerahan 1 saham dari Drs. Kopon Melialia, Ak, maka seluruh modal saham PTP Mitra Kerinci sebanyak 16.000.000 saham atau Rp 16.000.000.000 menjadi 100% milik Perusahaan.

PTP Mitra Kerinci pada saat ini bergerak dalam bidang perkebunan teh dan pengolahannya, berkedudukan di Padang dengan pabriknya berlokasi di Desa Liki, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

PT Perkebunan Mitra Kerinci memiliki anak perusahaan yaitu PT Rajawali Liki Energi (PT RLE) dengan kepemilikan secara langsung sebesar 55%, laporan keuangan PT RLE dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan PT Perkebunan Mitra Kerinci. Kegiatan utama PT RLE adalah dalam bidang pembangkit tenaga listrik air (PLTA).

8) PT GIEB Indonesia

PT GIEB Indonesia (dahulu bernama PT Gabungan Import Export Bali) didirikan tanggal 20 Agustus 1948 dengan Akta Wakil Notaris PJV Leeuween No.12 dan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No 26 tanggal 29 Mei 2020 dengan Notaris I Gede Semester Winarno S.H. mengenai perubahan susunan Direksi PT GIEB Indonesia.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

7) PT Perkebunan Mitra Kerinci

PT Perkebunan Mitra Kerinci (PTP Mitra Kerinci) was established on 17 July 1990 by PTP VIII (now PTP IV). Composition of share capital ownership of PTP Mitra Kerinci was amended several times, most recently by Statement of Meeting Resolution of Sutjipto, SH. No. 6 dated 3 August 2001 and a Power of Attorney dated 29 March 2001 on the transfer of one share from Drs. Kopon Melialia, Ak., therefore, the entire share capital of PTP Mitra Kerinci which consists of 16,000,000 shares or Rp 16,000,000,000 100% owned by the Company.

PTP Mitra Kerinci currently engaged in tea plantation and processing mill and domiciled in Padang which is located in the Liki Village, Sangir District, South Solok regency of West Sumatra.

PT Perkebunan Mitra Kerinci has a subsidiary, PT Rajawali Liki Energi (PT RLE) with direct ownership of 55%, the financial statements of PT RLE are consolidated into the financial statements of PT Perkebunan Mitra Kerinci. PT RLE's main activities are in the field of hydroelectric power generation.

8) PT GIEB Indonesia

PT GIEB Indonesia (formerly named as PT Gabungan Import Export Bali) was established on 20 August 1948 by the Deed of Deputy Notary PJV Leeuween No.12 and the Articles of Association which have been amended several times. The latest amendment was based on Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 26 dated 29 December 2020 with Notary I Gede Semester Winarno S.H regarding the change in the composition of Board of Directors of PT GIEB Indonesia.

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

8) PT GIEB Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 2 April 2012 dengan Akta No. 2 yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno SH. mengenai Berita Acara Rapat Umum Tahunan Tahun Buku 2011 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT GIEB Indonesia disetujui mengenai peningkatan modal dasar perseroan dari Rp 15.000.000.000 menjadi Rp 25.000.000.000 terbagi atas 2.500.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 10.000.

Perubahan akta terakhir adalah pada tanggal 29 Mei 2020 dengan No. 26 yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno SH mengenai Pernyataan keputusan rapat dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan susunan direksi PT GIEB Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Jl Gatot Subroto No. 66X Denpasar-Bali dengan cabang-cabangnya di Denpasar, Singaraja, Klungkung, Tabanan, dan Gianyar.

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, angkutan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

9) PT Rajawali Citramass

PT Rajawali Citramass didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, No. 2 tanggal 7 Juli 2004 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-27898.HT.01.01.TH.2004 tanggal 8 November 2004. Perusahaan awalnya bernama PT Citramass Plastik Industri yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dharminto, SH., No. 12 tanggal 10 September 1993 di Mojokerto.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

8) PT GIEB Indonesia (continued)

On April 2, 2012 with Deed No. 2 drawn up before Notary I Gede Semester Winarno SH regarding the Minutes of the 2011 Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT GIEB Indonesia, it was approved regarding the increase in the company's authorized capital from Rp. 15,000,000,000 to Rp. 25,000,000,000 divided into 2,500,000 shares, each with a nominal value of Rp. 10,000.

The latest amendment was on 29 May 2020 under No. 26 made under Notary I Gede Semester Winarno SH regarding meeting decisions statements and the Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding changes in the composition of Directors of PT GIEB Indonesia.

The Company is located at Gatot Subroto Street No 66x Denpasar - Bali, with its branches in Denpasar, Singaraja, Klungkung, Tabanan and Gianyar.

Aims and purpose of the establishment of PT GIEB Indonesia is to operate within the fields of trade, freight transport, and services. To achieve these aims and purposes, the Company carries out business activities in accordance with the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).

9) PT Rajawali Citramass

PT Rajawali Citramass was established based on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, No. 2 dated 7 July 2004 with ratification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-27898.HT.01.01.TH.2004 dated 8 November 2004. The Company was initially named PT Citramass Plastik Industri which was established based on Deed of Notary Dharminto, SH., No. 12 dated 10 September 1993 in Mojokerto.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

9) PT Rajawali Citramass (lanjutan)

Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-164666.HT.01.01.TH.94 tanggal 1 November 1994. Pada tahun 1997 diambil alih oleh Perusahaan dan di ubah menjadi Unit Usaha Pabrik Plastik Mojokerto sesuai dengan Akta Notaris Sutjipto No. 58 tanggal 3 Juli 1997 tentang perjanjian jual beli saham dengan PT Citramass Plastik Industri. Pada tanggal 31 Mei 2004 dilakukan spin-off atas unit usaha Pabrik Karung Plastik di PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi entitas badan hukum sendiri dengan nama PT Rajawali Citramass berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 2 tanggal 7 Juli 2004 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-27898.HT.01.01.TH.2004 tanggal 8 November 2004.

Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.07 tanggal 20 Agustus 2019 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059396.AH.01.02. tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019.

10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (PT RTE)

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (PT RTE) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH,M.Kn, No. 3 tanggal 8 Juli 2004. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-27946.HT.01.01.TH.2004 tanggal 8 November 2004.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

9) PT Rajawali Citramass (continued)

The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-164666.HT.01.01.TH.94 dated 1 November 1994. In 1997 it was taken over by the Company and changed to Mojokerto Plastic Factory Business Unit in accordance with Notarial Deed of Sutjipto No. 58 dated 3 July 1997 concerning a share sale agreement with PT Citramass Plastik Industri. On 31 May 2004 a spin-off of the Plastic Sack Factory business unit at PT Rajawali Nusantara Indonesia became an entity of its own legal entity under the name of PT Rajawali Citramass based on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, No. 2 dated 7 July 2004 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-27898.HT.01.01.TH.2004 dated 8 November 2004.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 07 dated August 20, 2019 before Notary Fauz Nanda Iwan, SH, M.Kn., change the articles of association. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0059396.AH.01.02. year 2019 dated 28 August 2019.

10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (PT RTE)

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (PT RTE) was established under Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, No. 3 dated 8 July 2004. The establishment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-27946.HT.01.01.TH.2004 dated 8 November 2004.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

**10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
(PT RTE) (lanjutan)**

Sebelumnya PT RTE merupakan unit usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rajawali Nusindo Unit Pabrik Tanjungsari) yang berpusat di Jl. Denpasar Raya Kav DIII Kuningan, Jakarta.

Pada tanggal 5 November 2014 Perusahaan berubah nama menjadi PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-10585.40.20.2014 dan akta notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., tanggal 3 November 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu perubahannya sesuai dengan Akta Notaris No 16 tanggal 19 Januari 2017 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai Persetujuan Peningkatan Modal Entitas dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0002106.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 26 Januari 2017.

Perubahan terakhir sesuai dengan Akta Notaris No. 6 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai Perubahan Anggaran Dasar Entitas dan Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0321573 tanggal 28 Agustus 2019 dan sesuai dengan Akta Notaris No. 45 tanggal 26 Desember 2019 oleh Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwaraatmaja, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta mengenai Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Entitas dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0043001 tanggal 24 Januari 2020.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

**10) PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
(PT RTE) (continued)**

Previously PT RTE is a business unit of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rajawali Nusindo Factory Unit of Tanjungsari) which is located at Jl. Denpasar Raya Kav DIII Kuningan, Jakarta.

On 5 November 2014 the Company has changed its name to PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-10585.40.20.2014 and notarial deed by Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., dated 3 November 2014.

The Articles of Association of the Company have undergone several changes. One of the changes is are in accordance with the Notarial Deed No 16 dated 19 of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notary in Jakarta regarding the Approval of The Increase in Entity Capital and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No AHU-0002106.AH. 01.02. year 2017 dated 26 January 2017.

The latest amendment is in accordance with Notarial Deed No. 6 dated 20 August 2019 of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., notary in Jakarta concerning Amendments to the Articles of Association and Changes in the Composition of Board of Directors and Board of Commissioners and has been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0321573 dated 28 August 2019 and in accordance with Notarial Deed No. 45 dated 26 December 2019 of Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwaraatmaja, SH, M.Kn., notary in Jakarta concerning Approval of Increase in Authorized Capital and Paid Up Capital of Entities and has been approved by the Minister of Law and Human Rights Number AHU-AH.01.03-0043001 on January 24, 2020.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

b. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

11) PT Laras Astra Kartika

PT Laras Astra Kartika didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjastya, SH No. 9 tanggal 3 Oktober 1988. Akta pendirian telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2050.HT.01.01.Th.89 tanggal 25 Februari 1989 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 732/ 1989 tanggal 12 April 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 105 tanggal 31 Desember 1991, Tambahan No. 5098.

Akta Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir merupakan susunan perubahan pengurus Perusahaan berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 02 Mei 2016 No 25/Kep.PS/RNI.01/V/2016 dengan salinan notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, Nomor 16 tanggal 13 Mei 2016 dan perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0049241 tanggal 18 Mei 2016 untuk pemberhentian dan pengangkatan Direktur Perusahaan.

Sedangkan untuk perubahan pemberhentian dan pengangkatan pengurus Komisaris Perusahaan berdasar pada No 38/Kep.PS/RNI.01/VI/2016 dengan salinan notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, Nomor 05 Juni 2016 dan perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0059120 tanggal 21 Juni 2016.

2. Investments (continued)

b. Investment in subsidiaries (continued)

11) PT Laras Astra Kartika

PT Laras Astra Kartika was established based on Notarial Deed of Mrs. Rukmasanti Hardjastya, SH No. 9 on 3 October 1988. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his Decree No. C2-2050.HT.01.01Th.89 dated 25 February 1989 and was registered in the District Court of Jakarta No. 732/1989 dated 12 April 1989 and was published in the Official State Gazette No. 105 dated 31 December 1991, Supplement No. 5098.

The Company's deed has been amended several times. The latest is regarding the change in the composition of the Company's management based on the Shareholders' Resolution outside the GMS on 2 May 2016 No 25/Kep.PS/RNI.01/V/2016 with a copy of the notary Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, Number 16 dated 13 May 2016 and this amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights with his decree No AHU-AH.01.03-0049241 dated 18 May 2016 for the dismissal and appointment of the Director of the Company.

As for changes in the dismissal and appointment of the Board of Commissioners of the Company are based on No 38/Kep.PS/RNI.01-VI/2016 with a copy of the notary Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, No 05 June 2016 and this amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights with his Decree No AHU-AH.01.03-0059120 dated 21 June 2016.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

11) PT Laras Astra Kartika (lanjutan)

Akta Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir tentang perubahan susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, Nomor 11 tanggal 13 Juli 2019 dan perubahan tersebut telah terdaftar dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.0103-0219970 tanggal 14 Mei 2020.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jl. Kol. H. Barlian KM. 9, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya berpindah ke KPP Pratama Baturaja terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu dengan Nomor NPWP 01.348.896.0-004.000, serta terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja dengan Nomor NPWP 01.348.896.0-302.001 (cabang kebun).

12) PT Rajawali Gloves Corporation (dalam proses likuidasi)

PT Rajawali Gloves Corporation didirikan pada tanggal 20 November 1991 dengan Akta No. 124 dan diubah dengan akta No.84 tanggal 28 Desember 1992. Keduanya dibuat di hadapan Raharti Sudjarjati, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 5 Januari 1993 No. C2-52.HT.01.01.TH.93 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1993 No. 21 tambahan Nomor 1078 sebagai realisasi formal atas perjanjian kerjasama (*Joint Venture Agreement*) pada tanggal 29 Agustus 1990 antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan investor asing (Amerika Serikat dan Korea Selatan). Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 89 Notaris Sutjipto, SH, tanggal 17 Mei 2005.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

11) PT Laras Astra Kartika

The Company's deed has been amended several times and the latest is regarding the change in the composition of the Company's management based on the Notary Deed of Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn, No. 11 dated July 13, 2019 and these changes have been registered and recorded in the Legal Entity Administration System at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.0103-0219970 dated 14 May 2020.

The company is domiciled and has its office at Jl. Kol. H. Barlian KM. 9, Palembang, South Sumatra Province, which previously moved to Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu with NPWP No. 01.348.896.0-004.000, and is registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Raja with NPWP No. 01.348.896.0-302.001 (branch kebun).

12) PT Rajawali Gloves Corporation (in liquidation)

PT Rajawali Gloves Corporation was established on 20 November 1991 with the Deed No. 124 and amended by Deed No.84 dated 28 December 1992. Both were made before Raharti Sudjarjati, SH, Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in accordance with his decree dated 5 January 1993 No. C2-52.HT.01.01.TH.93 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 12 March 1993 under No. 21, supplement No. 1078 as the formal realization of cooperation agreement (Joint Venture Agreement) on 29 August 1990 between PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) with foreign investors (United States and South Korea). The Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 89 of Sutjipto, SH, dated 17 May 2005.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

a. Penyertaan pada entitas anak (lanjutan)

**12) PT Rajawali Gloves Corporation (dalam
proses likuidasi) (lanjutan)**

PT Rajawali Gloves berkedudukan di Sidoarjo Jawa Timur dan bergerak dalam bidang perdagangan serta industri sarung tangan kulit.

PT Rajawali Gloves telah mengalami akumulasi kerugian dari usahanya sampai dengan 31 Desember 2018 dan tidak ada transaksi sejak tahun 2011, sehingga akumulasi kerugian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 15.910.449.045 dan Rp 12.571.901.777 yang mengakibatkan kesulitan modal kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja serta penghentian kegiatan operasional Perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 762/Pdt.P/2012PN.Sby tanggal 26 Juni 2012 PT Rajawali Gloves diputuskan/ disetujui untuk likuidasi yang selanjutnya diaktakan dengan akta RUPS-LB PT Rajawali Gloves No.7 tanggal 16 Juli 2012.

Sesuai Laporan Kemajuan Likuidator PT Rajawali Gloves Corporation No. 77/RNI.02.2/I/14, tanggal 14 Januari 2014, selama tahun 2013 telah dilaksanakan pelelangan atas aset bergerak melalui KPKNL Sidoarjo dengan hasil seluruhnya Rp 418.650.000, sedangkan aset tidak bergerak yang terdiri dari 1 unit tanah bangunan pabrik dan 1 unit tanah rumah dinas akan dijual kepada PT RNI sesuai harga NJOP sebesar Rp 5.398.920.000.

Perijinan-perijinan PT Rajawali Gloves Corporation telah dicabut di tahun 2012, diantaranya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sudah diajukan Permohonan Pencabutan NPWP kepada KPP Sidoarjo yang sampai saat ini masih menunggu selesainya Audit Perpajakan.

2. Investments (continued)

a. Investment in subsidiaries (continued)

**12) PT Rajawali Gloves Corporation (in
liquidation) (continued)**

PT Rajawali Gloves is located in Sidoarjo, East Java, and is engaged in trade and industry of leather gloves.

PT Rajawali Gloves has suffered accumulated losses in its business as of 31 December 2018 and did not have transactions since 2011, so that the accumulated loss as of 31 December 2018 and 31 December 2017 amounted to Rp 15,910,449,045 and Rp 12,571,901,777 which result in difficulty in working capital, the dismissal and termination of the Company's operation.

Based on the Surabaya District Court decision No.762/Pdt.P/2012PN.Sby dated 26 June 2012 PT Rajawali Gloves decided/ approved for liquidation which then notarized based on Extraordinary Shareholder General Meeting (ESGM) of PT Rajawali Gloves No.7 dated 16 July 2012.

According to progress Liquidator Report of PT Rajawali Gloves Corporation No.77/RNI.02.2/I/14, dated 14 January 2014, during year 2013 there has been conducted auctions for moving assets through KPKNL Sidoarjo with total amounting to Rp 418,650,000, while unmovable fixed assets which consisting of one unit of land and factory building and 1 unit of official building will be sold to PT RNI according to taxable item market value price amounting to Rp 5,398,920,000.

The licenses of PT Rajawali Gloves Corporation have been revoked in 2012, among others approval from the Investment Coordinating Board (BKPM) and the Company has submitted Request of Revocation taxpayer identification number to Sidoarjo Tax Office which is still awaiting the completion of Taxation Audit.

2. Penyertaan (lanjutan)

b. Penyertaan pada perusahaan asosiasi

1) PT Madu Baru

PT Madu Baru adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri gula, yang berlokasi di Yogyakarta. Pemerintah telah mengalihkan sahamnya di PT Madu Baru sebesar 35% atau senilai Rp 2.425.000.000 kepada Perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal Negara melalui PP No. 3 tanggal 14 Januari 2004. Dengan demikian Perusahaan mempunyai investasi pada PT Madu Baru sebesar jumlah tersebut, namun tidak memiliki kendali langsung atas manajemen Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 65% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X (lihat Catatan 15).

2) PT Padi Energi Nusantara

PT Padi Energi Nusantara berkedudukan di Kota Jakarta Selatan merupakan Perusahaan yang melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ketahanan pangan dan energi untuk membantu pendapatan petani khususnya di bidang pertanian, perdagangan dan jasa.

Modal dasar PT Padi Energi Nusantara adalah sebesar Rp 29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar rupiah) yang terbagi dalam 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 100% (seratus persen) atau sejumlah 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 29.000.000.000, dari jumlah tersebut PT RNI (Persero) mengambil bagian sebanyak Rp 4.000.000.000 atau sebesar 14,00%.

2. Investments (continued)

b. Investment in associate companies

1) PT Madu Baru

PT Madu Baru is a Company engaged in sugar industry, which is located in Yogyakarta. The government has transferred 35% of its shares at PT Madu Baru or Rp 2,425,000,000 to the Company as state additional investment through Government Regulation No. 3 dated 14 January 2004. Therefore, the Company has investments at PT Madu Baru, but does not have direct control over the management of the Company, while the remaining 65% is owned by Sri Sultan Hamengku Buwono X (see Note 15).

2) PT Padi Energi Nusantara

PT Padi Energi Nusantara domiciled in South Jakarta represents a Company to carry out and support the government policies and programs in the field of food and energy to support, the income of farmers particularly in agriculture, trade and services.

The authorized capital of PT Padi Energi Nusantara is amounting to Rp 29,000,000,000 (twenty-nine billion rupiah) divided into 29,000 (twenty nine thousand) shares with nominal value of each share is Rp 1,000,000 (one million rupiah). That capital has been subscribed and paid at 100% (one hundred percent) or consisting of 29,000 (twenty nine thousand) shares with total nominal value amounting to Rp 29,000,000,000, from the amount, PT RNI (Persero) took part amounting to Rp 4,000,000,000 or equivalent to 14.00%.

31 Desember 2020

31 December 2020

2. Penyertaan (lanjutan)

2. Investments (continued)

**b. Penyertaan pada perusahaan asosiasi
(lanjutan)**

b. Investment in associate companies (continued)

3) PT Mitra BUMDes Nusantara

3) PT Mitra BUMDes Nusantara

PT Mitra BUMDes Nusantara berkedudukan di Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, distribusi, dan transportasi sesuai akta notaris Otty H.C. Ubayani, S.H No.41 tanggal 4 April 2017 dan perjanjian pemegang saham No. 100/S.Pj/RNI.01/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang pengelolaan PT Mitra BUMDes Nusantara yang diadendum dengan perjanjian No. 29/S.Pj/RNI.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017. Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 200.000.000.000 dengan modal yang telah disetor sebesar Rp 100.000.000.000 dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pihak keempat memiliki saham sebesar Rp 10.000.000.000 atau 10% dari total saham yang disetor.

PT Mitra BUMDes Nusantara is domiciled in Jakarta, engaged in trade, distribution, and transportation according to notarial deed of Otty H.C. Ubayani, S.H No.41 dated 4 April 2017 and shareholder agreement No. 100/S.Pj/RNI.01/VIII/2017 dated 2 August 2017 about management PT Mitra BUMDes Nusantara which then amended with agreement No. 29/S.PJ/RNI.01/IX/2017 dated 18 September 2017. The authorized capital of the Company is amounting to Rp 200,000,000,000 and capital paid amounting to Rp 100,000,000,000 with nominal value per share amounting to Rp 1,000,000. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the fourth party has shares amounting to Rp 10,000,000,000 or 10% from total shares paid.

4) PT PP Sinergi Banjaratma

4) PT PP Sinergi Banjaratma

PT PP Sinergi Banjaratma berkedudukan di Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa sesuai akta Notaris Ni Nyoman Rai Sumawiti S.H, M.Kn Nomor 02 tanggal 7 Februari 2019 dan perjanjian usaha patungan Nomor : L.56.1/8/WK/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perjanjian Usaha Patungan Pengembangan Lahan Eks PG Banjaratma Rest Area Brexit KM 260B jalan tol Pejagan-Pemalang.

PT PP Sinergi Banjaratma domiciled in Jakarta is engaged in the field of development, trade and services according to the Notarial deed of Ni Nyoman Rai Sumawiti SH, M.Kn Number 02 dated 7 February 2019 and the joint venture agreement Number: L.56.1 / 8 / WK / 2018 dated 30 October 2018 concerning a Joint Venture Agreement for the Development of Ex-PG Banjaratma Rest Area Brexit KM 260B on the Pejagan-Pemalang toll road.

Modal dasar Perusahaan sebesar Rp 63.424.615.000 dan telah disetor penuh dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100,-. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pihak keenam memiliki saham sebesar Rp 4.756.846.100 atau 7% dari total saham yang disetor.

The authorized capital of the Company is amounting to Rp 63,424,615,000 and has been fully paid with nominal value per share of Rp 100,-. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the sixth party has shares amounting to Rp 4,756,846,100 or 7% of the total shares paid up.

2. Penyertaan (lanjutan)

c. Ventura bersama

PT Rajawali Stevia Indonesia

PT Rajawali Stevia Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Arif Handaya, Notaris di Jakarta, Nomor 04 tanggal 20 Desember 2018. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000019.AH.01.01 tahun 2019 tertanggal 2 Januari 2019.

PT Rajawali Stevia Indonesia bergerak dalam bidang pertanian bit gula dan pemanis tanaman bukan tebu (Stevia) berkedudukan di Padang, dengan lokasi kebun di Desa Liki, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada saat ini PT Rajawali Stevia Indonesia masih dalam tahap pengembangan.

2. Investments (continued)

c. Joint venture

PT Rajawali Stevia Indonesia

PT Rajawali Stevia Indonesia was established based on Notarial Deed of Arif Handaya, Notary in Jakarta, Number 04 dated 20 December 2018. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his letter No. AHU-0000019.AH.01.01 year 2019 dated 2 January 2019.

PT Rajawali Stevia Indonesia is engaged in sugar beet farming and non-sugarcane sweetener (Stevia) domiciled in Padang, with the location of the farm in Liki Village, Sangir District, Solok Selatan Regency, West Sumatra. Currently, PT Rajawali Stevia Indonesia is still in the development stage.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI), dan laporan keuangan konsolidasi tersebut telah disetujui oleh Direksi.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dengan konsep biaya perolehan dan dasar akrual (*accrual*), kecuali laporan arus kas dan akun-akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain seperti dijelaskan pada kebijakan akuntansi pada masing-masing akun tersebut.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mengukur transaksinya dalam mata uang fungsional tersebut.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan baru

Standar akuntansi yang telah disahkan, namun belum berlaku efektif

Standar Akuntansi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2021 adalah PSAK 22 – Kombinasi Bisnis. Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.

3. Summary of significant accounting policies

Significant accounting policies applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements are as follows:

a. Statement of compliance and basis for the preparation of the consolidated financial statements

Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared based on the Financial Accounting Standards in Indonesia, which include statements and interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board – the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI), and the consolidated financial statements were approved by the Directors.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements have been prepared on the going concern assumption with the historical cost basis and accrual basis, except for statements of cash flows and certain accounts that are based on other measurements as described in accounting policy on each of those accounts.

Presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Company and measure the transactions in the functional currency.

b. Changes to the new Statements of Financial Accounting Standards

Accounting standards that have been approved but has not effective

Accounting Standard issued and effective on 1 January 2021 is IFAS 22 - Business Combinations. This amendment clarifies the definition of a business with the aim of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition.

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

**c. Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan baru** (lanjutan)

Penerapan dari perubahan standar dan interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi kelompok usaha dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

1) PSAK 71: "Instrumen keuangan"

PSAK 71 menggantikan PSAK 55, "Instrumen Keuangan". Membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan. Sementara ini, Grup belum melakukan kajian yang terperinci atas klasifikasi dan pengukuran dari aset keuangan, instrumen utang yang sekarang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dianggap memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

2) PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Prinsip utama PSAK 72 adalah bagi entitas dalam melakukan pengakuan pendapatan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan dapat diterima dari penyelesaian kewajiban pelaksanaan.

Model ini mencakup analisis transaksi berdasarkan kontrak untuk menentukan waktu dan jumlah pendapatan yang diakui dan difokuskan pada pengalihan kendali. PSAK 72 juga mencakup pengungkapan tentang pendapatan yang disempurnakan dan memberikan panduan untuk transaksi yang sebelumnya tidak dibahas secara komprehensif.

3. Summary of significant accounting policies
(continued)

**c. Changes to the new Statements of Financial
Accounting Standards** (continued)

The application of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from 1 January 2020 and relevant for the Group, but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period financial statements:

1) SFAS 71: "Financial Instrument"

SFAS 71 replaces PSAK 55, "Financial Instruments". Discusses the classification, measurement and derecognition of financial assets and liabilities, introduces new rules for hedge accounting and new impairment models for financial assets. In the meantime, the Group has not made a detailed study on the classification and measurement of financial assets, debt instruments which are now classified as financial assets available for sale are considered to meet the requirements to be classified as financial assets at fair value through other comprehensive income.

2) SFAS 72: "Revenue from Contract with Customers"

The core principal of SFAS 72 is for entities in recognizing revenue to depict the transfer of goods or services to customers in amounts that reflect the consideration to which the entities expect to be entitled in exchange for those goods or services.

This model includes analysis of transactions based on contract to determine the time and amount of revenue to be recognized and focused on the transfer of control. SFAS 72 also includes enhanced disclosures about income and provides guidance for transactions that were not previously discussed comprehensively.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

**b. Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan baru (lanjutan)**

3) PSAK 73: "Sewa"

Memperkenalkan model tunggal untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian opsional untuk sewa jangka pendek dan sewa atas barang bernilai rendah. Akuntansi untuk lessor tetap sama dengan praktik saat ini - yaitu lessor tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

PSAK 73 menetapkan metode komprehensif untuk mengidentifikasi Perjanjian Sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 mengharuskan metode pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan.

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu terkait dengan pertimbangan imbalan, jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak kecuali dalam kasus dimana Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

**b. Changes to the new Statements of Financial
Accounting Standards (continued)**

3) SFAS 73: "Rent"

Introducing a single model for lessee accounting. The lessee recognizes the tenant asset which is the right of the lessee to use the underlying asset of the lease agreement and a lease liability which is the lessee's obligation to make lease payments. There are optional exemptions for short-term rental and rental of low-value items. Accounting for the lessor remains the same with the current practice - where the lessor continue to classify leases as finance leases or operating leases.

SFAS 73 establishes a comprehensive method for identifying Lease Agreements and the treatment in the financial statements of Lessor and Lessee. SFAS 73 requires the control method for the identification of the lease, to distinguish between the rental and service contracts based on whether there are identified assets that are controlled by the customer.

The Group assesses at the beginning of the contract if a contract is or contains a lease, that is if the contract has the right to control the use of assets identified for a period associated with reward considerations, the rental period cannot be canceled for each contract, except in cases where the Group is quite sure to exercise the contract extension option.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

**b. Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan baru (lanjutan)**

3) PSAK 73: "Sewa" (lanjutan)

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Untuk sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Kebijakan Akuntansi untuk sewa :

Grup memilih tindakan praktis yang tersedia berdasarkan pedoman transisi dalam PSAK 73 antara lain :

- a) Akuntansi untuk sewa operasi dengan sisa masa sewa kurang dari 12 (dua belas) bulan pada tanggal 1 Januari.
- b) Grup sebagai lessee
- c) Liabilitas sewa
- d) Sebagai lessor
- e) Sebagai lessee

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas anak seperti yang disebutkan pada Catatan 2, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50 persen dan dikendalikan oleh Perusahaan.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

**b. Changes to the new Statements of Financial
Accounting Standards (continued)**

3) SFAS 73: "Rent" (continued)

The determination of whether an agreement is a lease agreement or an agreement containing a lease is based on the substance of the agreement at the inception date of the lease and whether fulfillment of the agreement depends on the use of an asset and the agreement gives a right to use the asset. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset to the lessee. Leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. For an operating lease, the Company recognizes lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Accounting Policies for leases:

The Group chooses the available practical actions based on the transitional guidelines in SFAS 73, including:

- a) Accounting for operating leases with remaining lease term of less than 12 (twelve) months as of 1 January.
- b) The Group as lessee
- c) Lease obligations
- d) As lessor
- e) As lessee

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the subsidiaries as mentioned in Note 2, which are owned by the Company (directly or indirectly) with ownership of more than 50 percent and controlled by the Company.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Suatu pengendalian juga ada apabila Entitas Induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara jika terdapat:

1. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lainnya;
2. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3. Kekuasaan untuk menunjuk atau memberhentikan sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organisasi tersebut;
4. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organisasi pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan oleh Grup (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup yang mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

A control also exists when the Parent Entity has half or less of the voting power if there is:

- 1. Power in over half of the voting rights based on agreement with other investors;*
- 2. Power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or agreement;*
- 3. Power to appoint or dismiss the majority of the board of directors or equivalent governing board and control of the entity is by that board or organization;*
- 4. Power to give a majority vote at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or organization.*

Subsidiaries are entities controlled by the Group, the Group is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through the current ability to direct the relevant activities of the entity (power over the investee).

The existence and effect of potential voting rights which the Group has the practical ability to execute (substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The financial statements of the Group which include the results of operations, cash flows, assets and liabilities of the Company and all its subsidiaries that directly and indirectly controlled by the Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, i.e. the date on which the Group effectively obtained control over the acquired business, up to the date when control ceases.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh. Laporan keuangan konsolidasian harus disusun dengan basis yang sama yaitu, kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama. Kebijakan tersebut telah ditetapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dan penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah penyesuaian kepentingan non pengendali dan nilai wajar dari jumlah penerimaan atau pembayaran diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

Parent entity prepares the consolidated financial statements using the same accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All transactions, balances, income, expenses, and cash flows associated with intra group transactions between entities within the group are eliminated in full. The consolidated financial statements should be prepared on the same basis, namely, the same accounting policy for transactions, events and circumstances which are the same. The policy has been defined consistently by the Subsidiaries, unless otherwise stated.

The Group attributes income and each component and other comprehensive income to the owners of the parent entity and non-controlling interests even though it results in the non-controlling interests have a deficit balance. The Group presents the non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent entity..

Changes in the ownership of the parent entity in subsidiaries that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interests change, the Group adjusts the carrying amount of non-controlling interest and the interests to reflect changes in the relative ownership of subsidiaries. The difference between the amount by which the non-controlling interests adjusted and the fair value of the amount received or paid are recognized directly in equity and attributed to owners of the parent entity.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup :

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali;
- c) Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang tercatat di ekuitas, bila ada;
- d) Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajar;
- e) Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- f) Mereklasifikasi bagian induk atau komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba sebagaimana mestinya.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

e. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo bank berjangka dengan jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal penempatan dan digunakan sebagai jaminan serta dibatasi penggunaannya.

f. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan bukti objektif bahwa saldo piutang mengalami penurunan nilai.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

In the case of loss of a subsidiary, the Group:

- a) *Derecognizes assets (including each goodwill) and liabilities of subsidiaries;*
- b) *Derecognizes the carrying amount of each non controlling interest;*
- c) *Derecognizes the accumulated difference in translation recorded in equity, if any;*
- d) *Recognizes any remaining investment at fair value;*
- e) *Recognizes any resulting differences as gains or losses in the income statement; and*
- f) *Reclassifies parent or component parts previously recognized as comprehensive income to the income statement, or transfer directly to retained earnings as appropriate.*

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash, bank and short-term investments maturing within three months or less from the date of acquisition and are not used as collateral and not restricted in use.

e. Restricted cash and cash equivalent

Restricted cash and cash equivalent represents bank account balance with maturities of more than 3 months from the date of placement and is used as collateral and restricted in use.

f. Trade and other receivables

Trade receivables and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial, net of allowance for impairment which is established based on objective evidence that a receivable balance is impaired.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

g. Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain

Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk bila terdapat bukti objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih sesuai dengan persyaratan awal piutang karena debitur mengalami kesulitan keuangan, wanprestasi atau sudah dinyatakan pailit. Jumlah penyisihan adalah sebesar selisih antara jumlah tercatat dengan nilai kini arus kas di masa mendatang yang didiskontokan dengan bunga efektif di pasar. Indikasi penurunan nilai ditetapkan pada setiap individu secara selektif dengan mempertimbangkan risiko dari tertagihnya aset keuangan tersebut.

Setiap akhir tahun dilakukan pencadangan penghapusan piutang ragu-ragu dan dibebankan ke laba (rugi) tahun berjalan. Terhadap piutang yang sudah tidak dapat ditagih, Direksi menetapkan penghapusannya untuk dikompensasikan dengan cadangan penghapusan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

h. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban yang mempunyai masa manfaat satu tahun yang akan disajikan sebagai beban dibayar dimuka dalam kelompok aset lancar.

i. Kombinasi bisnis dan goodwill

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan pengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari aset yang diakuisisi. Pilihan dasar pengakuan dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban ketika terjadi. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

g. Allowance for trade and other receivables

Allowance for impairment of receivables is established when there is objective evidence that the Company is not able to charge in accordance with the requirements of the initial receivables because the debtor is experiencing financial difficulties, default or has been declared bankrupt. The allowance is equal to the difference between the carrying amount and the present value future cash flows discounted at the effective interest on the market. Indications of impairment are assigned to each individual selectively by considering the risk of uncollectible financial assets.

Each end of the year a backup deletion for doubtful accounts are done and charged to income (loss) for the year. For receivables that are uncollectible, the Board of Directors set the bad debt to be compensated by the elimination of reserves after gaining approval from the Board of Commissioners/General Meeting of Shareholders (RUPS).

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses represent expenses which has a useful life of one year to be presented as prepaid expenses in the current assets group.

i. Business combinations and goodwill

Business combinations accounted for by the acquisition method. Foreclosed benefits and equity instruments issued in exchange for control of the acquiree. For each business combination, the controlling interest is measured at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the identifiable net assets of the assets acquired. The choice of basis for recognition is made on the basis of each transaction. Acquisition-related costs are recorded as expenses when incurred. The acquiree's identifiable assets and liabilities are at fair value at the acquisition date.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

i. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah aset neto yang diakuisisi melebihi dari nilai agregat imbalan yang telah dialihkan, grup menilai kembali apakah asumsi aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajarnya dari aset neto yang diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diakui pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi ini diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba atau rugi atau ketika penyesuaian dicatat di luar periode pengakuan. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengeluaran yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tergantung fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

i. Business combinations and goodwill (continued)

Goodwill is initially measured at cost, which is the difference in excess of the aggregate value of the consideration transferred and the value recognized by non-controlling interests and the value of previously held equity interests over the net amount of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the fair value of the total net assets acquired exceeds the aggregate value of the consideration transferred, the group reassesses whether the assumptions of the acquired assets and the liabilities assumed were identified correctly and examines the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the results of the revaluation still result in an excess of the fair value of the net assets acquired over the aggregate value of the consideration transferred, the gain is recognized in profit or loss.

When determining the consideration of a business combination including contingent consideration, the contingent consideration is recognized at fair value at the date of acquisition. The contingent consideration is classified as equity or financial liabilities. Amounts classified as financial liabilities are subsequently remeasured at fair value where changes in fair value are recognized in profit or loss or when the adjustment is recorded outside the period of recognition. Changes in the fair value of contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively for the related adjustments to goodwill. Measurement period adjustments are adjustments arising from additional information obtained during the expenditure period which should not exceed one year from the acquisition date, depending on facts and conditions existing at the acquisition date.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

i. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan jika diketahui telah berdampak pada pengakuan jumlah yang diakui pada tanggal tersebut, periode pengakuan berakhir segera setelah perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh namun demikian periode pengakuan tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam PSAK 38 (Revisi 2012) "kombinasi bisnis entitas sepengendali" pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama, oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak menambah atau mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest*).

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku histori terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh setelah ada perhitungan dampak pajak penghasilan diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai tambahan modal disetor pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. Summary of significant accounting policies
(continued)

i. Business combinations and goodwill (continued)

If the initial accounting for the business combination was not completed at the end of the reporting period when the business combination occurred, then the group will report the number of temporary posts for the accounting process has not been completed in the consolidated financial statements. During the measurement period, the group retrospectively adjusts the provisional amount recognized at the acquisition date to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed at the acquisition date and if it is found to have impacted the recognition of the amount recognized at that date, the recognition period ends immediately after the company received the information sought about facts and circumstances that existed at the acquisition date that additional information could not be obtained, however the recognition period should not exceed one year from the acquisition date.

In SFAS 38 (Revised 2012) "business combination of entities under common control", the transfer of assets, liabilities, shares and other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the company or individual entities that are in the same group, because of the restructuring transaction between entities under common control does not add or change the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred must be recorded based on book values using the pooling of interest method.

In the implementation of pooling of interest method, the components of the financial statements during the restructuring are presented as if such restructuring has occurred since the beginning of the earliest period presentation. The difference between the consideration paid or received and the historical book value relating to the carrying value of the interest acquired after calculating the impact of income tax is recognized directly in equity and presented as additional paid-in capital in the equity section of the consolidated statement of financial position.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

i. Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012) seluruh saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali direklasifikasikan ke akun "tambahan modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pernyataan pada Entitas Asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional investor, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Aset-aset ini termasuk dalam penyertaan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Piutang pengembangan perkebunan rakyat (plasma)

Biaya-biaya yang terjadi dalam pengembangan perkebunan plasma sampai perkebunan tersebut siap diserahkan dikapitalisasi sebagai aset pada akun Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat. Pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh kredit investasi perkebunan plasma dari bank atau pembiayaan sendiri. Akumulasi biaya pengembangan perkebunan plasma disajikan dengan nilai bersih setelah dikurangi dengan kredit investasi perkebunan plasma yang diterima sebagai aset/piutang pengembangan perkebunan rakyat - bersih atau liabilitas/utang pengembangan perkebunan rakyat - bersih.

Selisih antara akumulasi biaya pengembangan perkebunan plasma dengan nilai kredit investasi perkebunan plasma yang diterima dibebankan pada laporan laba - rugi komprehensif.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

i. Business combinations and goodwill (continued)

At the time of the initial application of SFAS 38 (Revised 2012) the entire balance of the difference in value from restructuring transactions of entities under common is reclassified into "additional paid-in capital" account on the consolidated statement of financial position.

Statements to Associates

Associates are entities in which the group (as an investor) has significant influence. Significant influence is the power to participate in decisions regarding the financial and operational policies of investors, but does not include control or joint control over these operational policies. Considerations in determining the significant influence are the same considerations when determining control over its subsidiaries.

The Group calculates the investment in associates using the equity method. These assets are included in long-term investments in the consolidated statement of financial position.

j. Development of smallholder plantations (plasma) receivable

Costs incurred in the development of plasma plantations until the estate is ready for handover are capitalized as assets on receivable plasma development account. The development of plasma plantations is financed by plasma plantation investment credits from banks or finance themselves. Accumulated development costs of plasma plantations are presented net of the value of plantation investment credits received as asset/receivable plasma plantation development - net or liabilities/ debts community plantation development - net.

The difference between the accumulated development costs of plasma plantations with the value of plantation investment credits earned are charged to comprehensive income statements.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

k. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Untuk sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

l. Aset sewa

Aset tetap yang diperoleh dengan sewa guna usaha pembiayaannya disajikan sejumlah uang tunai dari pembayaran minimum sewa guna usaha ditambah dengan harga opsi pada awal periode sewa. Kewajiban yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan hutang dan pembayaran beban bunga. Aset sewa guna usaha disusutkan dengan metode yang sama dengan aset yang dimiliki, dan pada saat aset sewa guna usaha tersebut lunas dibayar, maka aset sewa guna usaha tersebut dipindahkan ke kelompok aset tetap, demikian juga dengan akumulasi penyusutan sewa guna usaha dipindahkan ke akumulasi penyusutan aset tetap.

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi dalam laporan keuangan. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

k. Lease

In determining whether an agreement is a lease agreement or agreements containing leases is based on the substance of the agreement at inception date and whether the fulfillment of the agreement depends on the use of an asset and the agreement provides a right to use the asset. A lease is classified as an operating lease, if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards associated with ownership of the asset to the lessee. Leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. For an operating lease, the Company recognizes lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

l. Lease asset

Fixed assets acquired by leasing their financing are presented as cash sum of the minimum lease payments plus the purchase option at the beginning of the lease period. Related liabilities are also recognized and each installment is allocated as debt repayment and interest payments. Leased assets are depreciated using the same method with the owned assets, and at the time of the leased asset is paid, then the assets of the lease are transferred to the group of fixed assets, as well as accumulated depreciation of lease transferred to accumulated depreciation of fixed assets.

m. Transaction with related parties

The Company adopted SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures" This revised SFAS requires disclosure of relationships, transactions and balances of related party commitments in the financial statements. There is no significant impact from the adoption of the revised SFAS to the financial statements.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies
(continued)

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)

m. Transaction with related parties (continued)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan (dalam hal ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

A related party is a person or entity related to the entity that prepares financial statements (in this case referred to as the “reporting entity”).

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut menyelenggarakan suatu program imbalan kerja karyawan untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor

1. *The person or the person’s family member is related to a reporting entity if that person:*
 - i. Have control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. Have significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. Key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.*
2. *An entity is related to a reporting entity if it meets one of the following:*
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, which the other entity is a member).*
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - v. The entity is conducting an employee benefits program for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

m. Transaction with related parties (continued)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

2. An entity is related to a reporting entity if it meets one of the following: (continued)

- vi. Entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

vi. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (1).

vii. A person identified in letter (1)(i) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

viii. An entity, or a member of a group of which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether or not made at the rate or price, terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the financial statements.

n. Transaksi dengan Petani Tebu Rakyat (PTR)

n. Transaction with Sugarcane Farmers (PTR)

Pola kerjasama antara Perseroan dengan PTR adalah bagi hasil dimana petani menanam tebu di lahan sendiri dengan dibiayai pinjaman Bank dan pinjaman dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain. Perseroan sebagai avalis (Penjamin) menyediakan sarana dan prasarana. Hasil tebu PTR digiling di pabrik gula berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan tingkat rendemen yang diperoleh.

Cooperation scheme between the Company and PTR are profit sharing where farmers grow sugarcane on their own land with a loan financed by the Bank and loans of Corporate Partnership Program and Community Development (PKBL) from other state-owned companies (BUMN). The Company as avalist (Guarantor) provides facilities and infrastructure. PTR's harvest is milled in sugar factory based on profit sharing system in accordance with the yield rate obtained.

Pencatatan transaksi pinjaman/ pelunasan kepada/ oleh PTR untuk keperluan pelaksanaan tanaman tebu dalam rangka ketahanan pangan dari pemberi dana (bank) yang dilakukan melalui Perseroan dicatat sebagai Piutang PTR pada akun piutang lain-lain. Sedangkan transaksi penerimaan/ pembayaran dana dari/ ke pemberi dana untuk keperluan pinjaman PTR disajikan sebagai Paket Kredit Modal Kerja pada akun utang lain-lain.

Recording of loan/repayment transaction to/by the PTR from the financing firms (banks) for the purpose of the planting of sugarcane crop in order to strengthen the food security, which conducted through the Company is recorded as PTR receivable on other receivable. While the transaction receipt/ payment of funds from/ to the donors for lending purposes of PTR is presented as Working Capital Loan Package on other payables.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

o. Persediaan

**1) Persediaan barang perlengkapan,
pembantu, pertanian, suku cadang, dan
distribusi**

Persediaan barang gudang adalah persediaan barang material, bahan perlengkapan/ suku cadang, bahan barang bulk/ bahan pembantu proses dan suku cadang alat pertanian untuk keperluan pabrik. Pemakaian persediaan bahan barang perlengkapan dicatat dengan menggunakan metode harga rata-rata tertimbang bergerak (*weighted moving average method*).

Setiap akhir tahun buku diadakan *stock opname* atas persediaan bahan/ barang dan apabila terdapat barang yang tidak dapat dipakai karena rusak, maka persediaan tersebut dipindahkan ke akun persediaan bahan pada kelompok aset tidak lancar lain dengan membuka akun penyesihannya. Penghapusan persediaan bahan tersebut dari pembukuan dilakukan setelah bahan/barang tersebut laku dijual dan atau telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2) Persediaan barang jadi

**Persediaan gula, tetes, minyak sawit
(CPO), inti sawit, dan teh**

Persediaan gula (gula jadi dan kemasannya), minyak sawit (CPO), inti sawit, dan teh dinilai berdasarkan harga/ nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan dikurangi biaya untuk menjual masing-masing pabrik.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

o. Inventories

**1) Inventories of equipment, supporting
equipment, agriculture, spare parts, and
distribution**

Warehouse inventory is inventory of material goods, materials equipment/ spareparts, bulk goods/ supporting material for processing and agricultural spare parts for factory/mill. The use of supplies of goods is accounted for using the weighted moving average method.

Each end of the financial year, stock taking was held on supplies of materials/ goods and if there are items that cannot be used because it is broken, then the stock is transferred to the account of inventory of materials in other noncurrent assets group by making the allowance accounts. Elimination of supplies from bookkeeping is done after the material/ goods are sold or have been approved by the Board of Commissioners/General Meeting of Shareholders (RUPS).

2) Finished goods

**Inventories of sugar, molasses, crude palm
oil (CPO), palm kernel, and tea**

Inventories of sugar (sugar finished product and packaging), crude palm oil (CPO), palm kernel, and tea are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the net realizable value, which is the average selling price per unit less costs to sell of each factory.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

o. Persediaan (lanjutan)

2) Persediaan barang jadi (lanjutan)

Persediaan gula

Persediaan gula (gula jadi dan kemasannya) dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan gula dalam proses (gula sisa) dijabarkan setara dengan gula SHS I dan dinilai sesuai harga pokok produksi rata-rata masing-masing pabrik gula.

Persediaan tetes

Persediaan tetes dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan CPO

Persediaan CPO dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan inti sawit

Persediaan inti sawit dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

o. Inventories (continued)

2) Finished goods (continued)

Inventories of sugar

Inventories of sugar (sugar finished goods and packaging) are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, i.e. the average selling price per unit.

Inventories of the work in process products are recorded equivalent to sugar SHS I and assessed according to the cost of the average production of each sugar mill.

Inventories of molasses

Inventories of molasses are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, which is the average selling price per unit.

Inventories of CPO

CPO inventories are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, which is the average selling price per unit.

Inventories of palm kernel

Inventories of palm kernel are assessed based on the price/ value of the lower of the cost of production on average compared with the average net realizable value, which is the average selling price per unit.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

o. Persediaan (lanjutan)

2) Persediaan barang jadi (lanjutan)

Persediaan teh

Persediaan teh dinilai berdasarkan harga/nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Persediaan obat-obatan, hasil bumi, alkohol, spiritus, dan arak.

Persediaan obat-obatan, hasil bumi, alkohol, spiritus, arak, dan peternakan sapi dinilai berdasarkan harga nilai yang lebih rendah antara harga pokok produksi rata-rata dibandingkan dengan nilai realisasi bersih, yaitu harga jual rata-rata per satuan.

Terhadap saldo persediaan barang dagangan, manajemen telah melakukan penelaahan atas kemungkinan terjadinya barang rusak (*expired*). Pada akhir tahun dilakukan pencadangan penghapusan persediaan barang rusak sebesar 1% dari saldo rata-rata persediaan dan pembebanannya dicatat ke laba (rugi) tahun berjalan. Setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi menetapkan penghapusannya untuk dikompensasikan dengan cadangan penghapusannya.

3) Persediaan bahan baku

Persediaan bahan baku dicatat dengan menggunakan metode buku dengan penilaian rata-rata (*moving average*).

p. Beban panen yang akan datang

Beban panen yang akan datang merupakan biaya tanaman yang telah dikeluarkan untuk tanaman tebu berupa biaya pembibitan, biaya tanaman, pemeliharaan tanaman, dan peralatan-peralatan pabrik yang digunakan dalam penanaman yang akan panen dalam satu tahun yang akan datang maupun dua tahun yang akan datang untuk siap digiling sebagai bahan baku gula.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

o. Inventories (continued)

2) Finished goods (lanjutan)

Inventories of tea

Inventories of tea are assessed based on the price/ value of the lower of the average cost of production compared with the net realizable value, which is the average selling price per unit.

Inventories of medicine, agricultural products, alcohols, spirituous, and arrack.

Medical supplies, agricultural products, alcohol, spirituous, arracks, and cattle farms are assessed based on the lower of the average cost of production compared with the net realizable value, which is the average selling price per unit.

*On the balance of net merchandise inventory, management has conducted a review of the possibility of damaged goods (*expired*). At the end of the year allowance for damaged goods inventory was made at 1% of the average balance of inventories and the expense is recorded to income (loss) for the year. After obtaining the approval in the General Meeting of Shareholders (RUPS), the Board of Directors determine the disposal to be compensated with bad debt allowance.*

2) Raw materials

Inventories of raw materials are accounted for using the perpetual method with moving average.

p. Future harvest expense

Future harvest expense is the cost of plant that has been expensed for the sugarcane crop in the form of the cost of seedling, the cost of the plant, plant maintenance, and manufacturing equipment used in planting that will be harvested in the coming year or two years to come to be ready to be processed as raw material of sugar.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

p. Beban panen yang akan datang (lanjutan)

p. Future harvest expense (continued)

Untuk masa panen satu tahun yang akan datang dicatat sebagai aset lancar dan masa panen dua tahun yang akan datang dicatat sebagai aset tidak lancar.

The coming year harvest is recorded as current assets and two years harvest is recorded as non-current assets.

Biaya tanaman yang dikeluarkan untuk tanaman tebu yang digiling dalam tahun berjalan dibukukan sebagai biaya tahun berjalan.

Costs incurred to process sugarcane pressed in the current year is recorded as expense for the year.

Sedangkan biaya pembibitan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk tanaman tebu yang akan digiling dalam tahun-tahun berikutnya dibukukan sebagai berikut :

Meanwhile, seedling fees and other costs incurred to process sugarcane in the subsequent years are recorded as follows:

- i. Beban panen satu tahun yang akan datang (kelompok aset lancar) untuk tanaman tebu yang akan digiling pada tahun berikutnya.
- ii. Beban yang ditangguhkan (kelompok aset tidak lancar) untuk biaya tanaman tebu yang akan digiling dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun.
- iii. Biaya pabrik yang dikeluarkan sampai hari giling berakhir dibukukan pada biaya pabrik berjalan. Sedangkan biaya pabrik yang dikeluarkan sejak selesai masa giling sampai dengan akhir tahun buku dibukukan sebagai biaya dibayar dimuka.

- i. Harvest expenses for the following year (group of current assets) for sugarcane to be processed in the next year.
- ii. Deferred expenses (groups of non-current assets) for the cost of sugarcane to be processed in a period of more than two years.
- iii. Factory costs incurred until the end of the processed day are recorded in the current year factory cost. While the factory costs incurred since the completion of processing period until the end of the fiscal year are recorded as a prepaid expense.

q. Properti investasi

q. Investment property

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan sewa (*lease*) atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya.

Investment property is property (land or building or part of a building or both) held to earn leases or for capital appreciation or both.

Pada tahun 2016 Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas properti investasi tanah dari model biaya menjadi model nilai wajar. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25.

In 2016 the Company and its subsidiaries made a change in accounting policy of investment property in the form of land from the cost model into the fair value model. Changes in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS 25.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

q. Properti investasi (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi properti investasi yang menggunakan model nilai wajar dikreditkan pada "Selisih Nilai Wajar Properti Investasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "Selisih Nilai wajar Properti Investasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

r. Aset tetap dan aset tanaman tahunan

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas aset tanah dari model biaya menjadi model revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK No. 25.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Semua kelompok aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan (model biaya) dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah tidak disusutkan. Beban yang timbul sehubungan perolehan hak atas tanah untuk yang pertama kali diakui sebagai bagian dari harga perolehan tanah. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut :

3. Summary of significant accounting policies (continued)

q. Investment property (continued)

The increase in the carrying amount arising from the revaluation of investment property using the fair value model is credited to "Difference in Fair Value of Investment Property" in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Decrease which offset the previous increase of the same asset is charged against "Difference in Fair Value of Investment Property" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

r. Fixed assets and annual plant assets

On 31 December 2016, the Company and its subsidiaries changes their accounting policy on asset of land from the cost model to the revaluation model. Changes in accounting policy is applied prospectively in accordance with SFAS No. 25.

Land are stated at fair value. Assessment of the land is carried out by an external independent appraiser registered with the Financial Services Authority (OJK). Assessment of these assets is conducted regularly to ensure that the fair value revaluation of assets is not materially different from their carrying values. Accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying value of the asset, and the net value is restated in the amount of revaluated fixed asset.

All groups of fixed assets are stated at acquisition cost (cost model) less accumulated depreciation, except for land which is not depreciated. Expenses incurred in respect of acquisition of land for the first time are recognized as part of the acquisition cost of land. Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives as follows:

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

r. Aset tetap dan aset tanaman tahunan (lanjutan)

r. Fixed assets and annual plant assets (continued)

Jenis aset tetap	Masa manfaat ekonomis/ Economic useful lives	Type of fixed assets
Gedung dan penataran	20 tahun/ years	Building and improvement
Jalan dan jembatan	20 tahun/ years	Road and bridge
Mesin dan Instalasi	10 tahun/ years	Machine and installation
Aset benda lain	10 tahun/ years	Other assets
Sumur dan pompa	8 tahun/ years	Deepwell and pump
Alat pengangkut	4 tahun/ years	Carrier
Alat pertanian	4 tahun/ years	Farming equipment
Inventaris kantor/rumah	4 tahun/ years	Office/home furniture & fixtures

Jenis aset tetap tanaman tahunan	Masa manfaat ekonomis/ Economic useful lives	Type of annual plants
Teh	50 tahun/ years	Tea
Kelapa sawit dan kelapa hibrida	25 tahun/ years	Palm oil and hybrid coconut
Karet	25 tahun/ years	Rubber

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan rugi laba pada saat periode berjalan, sedangkan perluasan, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi.

The costs of repairs and maintenance are charged to the income statement during the period, while the expansion, renovation and improvement of efficiency in large amounts are capitalized.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada tahun berjalan.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and related accumulated depreciation are removed from the financial statements, and the resulting gains and losses are recognized in the statement of comprehensive income for the year.

Nilai residu dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

The residual value and useful lives of the assets are reviewed and adjusted, if necessary, at each balance sheet date.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur secara handal.

Costs after the initial acquisition is recognized as part of the carrying value of fixed assets or as a separate asset only when it is possible that economic benefits with respect to those assets in the future will flow to the Company and its cost can be measured reliably.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

r. Aset tetap dan aset tanaman tahunan (lanjutan)

Perusahaan melakukan penelaahan atas kemungkinan adanya indikasi penurunan nilai aset. Apabila terdapat indikasi, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset, dan jika nilai tercatat dari aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dimana nilai tersebut ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Dalam akun ini dibukukan akumulasi beban tanaman perkebunan yang dikeluarkan mulai persiapan tanam sampai dengan tanaman tersebut menghasilkan. Tanaman yang telah menghasilkan dipindahbukukan sebagai tanaman menghasilkan dan disajikan dalam kelompok aset tetap. Umur ekonomis dari tanaman menghasilkan adalah 25 tahun. Beban yang terkait dengan tanaman tersebut yang sifatnya pemeliharaan dibebankan pada laba rugi komprehensif tahun berjalan.

s. Aset dalam penyelesaian

Biaya-biaya yang berhubungan dengan aset dalam penyelesaian yang meliputi biaya perolehan tanah, biaya konstruksi dan biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan akan dikapitalisasi. Kapitalisasi biaya pinjaman akan dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama aset dalam penyelesaian tersebut ditangguhkan atau dihentikan.

ISAK 25, "Hak atas Tanah", menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

r. Fixed assets and annual plant assets (continued)

The Company performs a review for possible indications of impairment of assets. If any such indication exists, the Company estimates the value of the recoverable amount of the asset, and if the carrying amount of the asset is greater than the recoverable amount, the carrying amount may be lowered down to a value which can be recovered, where the value is determined as the higher of the net selling price or value in use.

The accumulated expenses of plantation crops incurred starting from the preparation of planting until harvesting are recorded in this account. Plants which already harvesting are reclassified to mature plantation and are presented in the fixed asset account. The economic life of mature plantation is 25 years. Expenses related with these plants for maintenance purpose are charged to comprehensive income for the year.

s. Construction in progress

The costs associated with the construction in progress which include land acquisition costs, construction costs and loan expenses during construction will be capitalized. The capitalization of borrowing costs will be suspended if within long enough period the construction in progress may be suspended or terminated.

IFAS 25, "Land Rights", established that the cost of obtaining legal rights on land in the form of Leasehold ("HGU"), Building Rights ("HGB") and the Rights of Use ("HP") when the land acquired for the first time was recognized as part of the cost of land in the account "Fixed Assets" and was not amortized.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies
(continued)

s. Aset dalam penyelesaian (lanjutan)

Sementara biaya pengurusan atau perpanjang atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Berwujud Bersih" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

s. Construction in progress (continued)

While the cost of obtaining or renew or update legal land rights in the form of HGU, HGB and HP is recognized as part of "Net Intangible Assets" in the consolidated statements of financial position and amortized whichever is shorter between the age of legal rights and economic life of the land.

t. Aset biologis

Aset biologis terdiri atas produk agrikultur dari tanaman produktif, yang terutama terdiri atas tebu, tandan buah segar dan teh. Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang masih tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit dan karet ditentukan menggunakan pendekatan pasar (*market approach*) dengan menerapkan estimasi volume produksi dengan estimasi harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

t. Biological assets

Biological assets consist of agricultural products from productive plants, which mainly consist of sugarcane, fresh fruit bunches and tea. Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising from the initial recognition of agricultural products at fair value less costs to sell and from changes in fair value less costs to sell biological assets at each reporting date are included in profit or loss in the period in which such gains or losses occur. The fair value of agricultural products, including products that are still growing and already harvested from oil palm and rubber productive crops, is determined using a market approach by applying estimates of production volume with estimated market prices at the reporting date. The cost of selling is an incremental cost that is directly attributable to the disposal of assets, excluding financing costs and income taxes.

u. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud dicatat berdasarkan nilai perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing aset tidak berwujud, dengan penjelasan sebagai berikut :

u. Intangible asset

Intangible assets are recorded based on the acquisition cost and amortized using the straight-line method based on the useful life of the respective intangible assets, with the following explanation:

Jenis aset tidak berwujud	Masa manfaat ekonomis/ Economic useful lives	Type of intangible assets
Lisensi WARF	10 tahun/ years	WARF License
ISO 9001	3 tahun/ years	ISO 9001
ISO 14001	3 tahun/ years	ISO 14001
Hak atas tanah	30 tahun/ years	Land rights
Perangkat lunak IT MFG/PRO	5 tahun/ years	MFG/PRO IT Software
Biaya pengembangan	3 tahun/ years	Development expense

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

u. Aset tidak berwujud (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud paragraf 39, suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek intern) diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual.
2. Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya.
3. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud tersebut.
4. Cara aset tidak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan, yaitu antara lain Perusahaan harus mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud itu sendiri, atau jika aset tidak berwujud itu akan digunakan secara intern, Perusahaan harus mampu menunjukkan kegunaan aset tidak berwujud itu sendiri.
5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan menggunakan atau menjual aset tersebut.
6. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya.

v. Aset non produktif

Aset non produktif disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Akun ini digunakan untuk menampung aset-aset yang secara teknis sudah tidak mempunyai manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Pemindahbukuan nilai aset dikategorikan tidak produktif didasarkan pada Berita Acara Penghapusan Aset setelah diteliti oleh Bidang Teknis kantor Direksi dan dicatat sebesar nilai buku dengan membuka akun penyisihannya (100%).

3. Summary of significant accounting policies (continued)

u. Intangible asset (continued)

Under SFAS No. 19 on intangible assets paragraph 39, an intangible asset arising from development (or from the development stage to an internal project) is recognized if, and only if, the Company can demonstrate all of the followings:

1. The technical feasibility of completion of intangible assets so that those assets can be used or sold.
2. The intention to complete the intangible asset and use or sell it.
3. The ability to use or sell the intangible asset.
4. How the intangible asset will generate future economic benefits, among others, the Company should be able to demonstrate the existence of a market for the output of intangible assets itself, or if the intangible assets will be used internally, the Company should be able to demonstrate the usefulness of the intangible assets itself.
5. The availability of technical resources, financial and other resources to complete the development of an intangible asset and use or sell the assets.
6. The ability to measure reliably the expenditure associated with the intangible asset during its development.

v. Non-productive asset

Non-earning assets are presented at carrying value, that is acquisition cost net of accumulated amortization and impairment losses. This account is used to hold assets that are technically no longer have an economic benefit in the future. Transfer of account of unproductive asset value is based on the Minutes of the Asset Removal after investigation by the office of the Technical Division Director and recorded at book value by opening an allowance account (100%).

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

v. Aset non produktif (lanjutan)

Penghapusan aset non produktif dilakukan setelah aset tersebut laku dijual dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN melalui Dewan Komisaris.

w. Penurunan nilai aset

Aset tetap, aset tanaman dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tak berwujud ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

x. Utang usaha dan liabilitas lain-lain

Utang usaha dan liabilitas lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika efek diskontonya tidak material.

Utang yang berumur lebih dari lima tahun dan setelah dikonfirmasi berulang-ulang tidak ada jawaban, dihapuskan dan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

y. Jasa produksi

Jasa produksi bagi karyawan staf dan non staf pabrik dibukukan sebagai biaya produksi sedangkan untuk karyawan Kantor Direksi diperlakukan sebagai biaya usaha. Pencadangan jasa produksi untuk karyawan staf pabrik dan karyawan kantor Direksi didasarkan atas surat ketetapan dari Direksi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

v. Non-productive asset (continued)

Elimination of non-productive assets is made after the assets are sold and has received approval from the Minister of SOEs through Board of Commissioners.

w. Impairment of assets

Fixed assets, plant assets and other non-current assets, including intangible assets are reviewed to determine whether there has been a decline in value whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset may not be recoverable. Impairment losses are recognized as the difference between the carrying values of assets with recoverable value of these assets. Values of recoverable is the higher value between the net sale price and the value in use of assets. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which separate identifiable cash flows are generated.

x. Accounts payable and other liabilities

Accounts payable and other liabilities are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, unless the effect of discounting is immaterial.

Debt outstanding for more than five years and after confirmed repeatedly has no response, are written off and recognized as other income.

y. Bonus

Bonus for factory employees both staff and non-staff are recorded as cost of production, while for employees of the Office of Directors is treated as business expenses. Bonus allowance for the employees of the factory staff and employees of the office of Directors is based on decision letter from the Directors.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

z. Pajak penghasilan

1. Pajak penghasilan (PPh)

Perusahaan menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan".

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di entitas dimana pajak penghasilan diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang sesuai dengan kebijakan atau secara normatif ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam SPT Tahunan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban kini.

3. Summary of significant accounting policies
(continued)

z. Income tax

1. Income tax (PPh)

The Company calculates income tax based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 46, "Accounting for Income Tax".

Current tax and deferred tax are recognized as income or expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except for income tax in connection with transactions or events that are recognized directly in an entity where the income tax is recognized directly in equity.

Current tax assets and liabilities are calculated at the amount that is expected to be obtained or paid using tax rates and provisions that are in accordance with policy or normatively determined at each reporting date. Management periodically evaluates the tax treatment applied in the Annual Tax Return.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting and the tax bases of assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences, to the extent that it is probable that they can be utilized to reduce future taxable profit.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the income statement, unless the deferred tax is charged or credited directly to equity.

Deferred tax and assets are presented in the statement of financial position and the basis of compensation is in accordance with the presentation of current assets and liabilities.

31 Desember 2020

31 December 2020

4. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

z. Pajak penghasilan (lanjutan)

1. Pajak penghasilan (PPh) (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau apabila dilakukan keberatan dan banding, ketika keputusan banding sudah diputuskan. Jumlah atas tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Perubahan dikarenakan kesalahan akan disajikan berdasarkan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

4. Summary of significant accounting policies (continued)

z. Income tax (continued)

1. Income Tax (PPh) (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Changes in the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to changes in tax rates are charged during the current year, except for transactions that have previously been charged or credited directly to equity.

2. Tax audits

Examination of taxation liabilities is recorded at the time of receipt of a Tax Assessment (SKP) or if objections and appeals are made, when the appeal decision has been decided. The amount of additional principal and tax penalties determined by SKP is determined to be recognized as income or expense in the current period's profit or loss, unless further settlement is filed. The amount of additional tax principal and penalties determined by the SKP is deferred as long as it meets the criteria for asset recognition. Changes due to errors will be presented in accordance with SFAS 25: Accounting Policies Changes in Accounting Estimates and Errors.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

z. Pajak penghasilan (lanjutan)

3. Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34 : ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019. Pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan diperlakukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atau perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan pertimbangan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

aa. Dana pensiun

Perusahaan menyelenggarakan dana pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetapnya berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Pengelolaan dana pensiun di lingkungan Perusahaan ditangani oleh Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI). Perusahaan telah menerapkan penilaian terakhir sesuai dengan PSAK No. 24 revisi tahun 2013 yang dilakukan oleh PT Daya Mandiri, aktuaris independen dengan menggunakan "Project Unit Credit Cost Method".

Sampai dengan tanggal laporan, Perusahaan mempunyai program imbalan kerja karyawan berupa program Tunjangan Pesangon, Tunjangan Tanda Jasa dan Tunjangan Pensiun.

Sebelumnya Perusahaan menghitung berdasarkan metode *Attained Age Normal* dan pada tahun 2010 Perusahaan sudah menghitung berdasarkan PSAK 24 dengan metode *Projected Unit Credit* yang dilakukan oleh aktuaris independen.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

z. Income tax (continued)

3. Uncertainty in the treatment of income tax

In accordance with IFAS 34: uncertainties in income tax treatment that will be effective on January 1, 2019. The recognition and measurement of tax assets and liabilities are income tax treatment of uncertainty is treated by considering whether treated separately or together, the use of assumptions regarding the audit or uncertain tax treatment judging by the tax authorities whether it is probable that the tax authorities will receive uncertain tax treatment and the reassessment of judgments or estimates required if the facts and circumstances change.

aa. Pension fund

The Company maintains defined benefit pension plan for permanent employees based on the latest basic salary and period of employment. Pension fund management in the Company is handled by the Pension Fund Rajawali Nusantara Indonesia. The Company has implemented a final assessment in accordance with SFAS No. 24 revision in 2013 conducted by PT Daya Mandiri, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit Method".

As of the report date, the Company has a program for employee benefits in the form of Severance Allowance program, Past Service Year Appreciation and Retirement Benefits Allowance.

Previously, the Company calculates employee benefits based on the Attained Age Normal method and in 2010 the Company already calculated based on on SFAS 24 using the projected unit credit method performed by an independent actuary.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

aa. Dana pensiun (lanjutan)

Berdasarkan peraturan dana pensiun pasal 24 mengenai usia pensiun peserta ditetapkan bahwa usia pensiun normal adalah 56 tahun, usia pensiun dipercepat ditetapkan 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal, usia pensiun wajib ditetapkan 60 tahun, usia peserta untuk penetapan manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai menurut bukti-bukti yang sah.

Dana pensiun Perusahaan merupakan jenis dana pensiun pemberi kerja. Maksud dan tujuan dibentuknya Dapen RNI adalah untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya dengan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

Pengelolaan dana pensiun di lingkungan Perusahaan dan Entitas Anak ditangani oleh dua pengelolaan dana pensiun yaitu :

1. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep-014/KM.17/2000 tanggal 12 Januari 2000. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI) sejak tahun 1948 dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Mitraraga. Mitra pendiri Dapen RNI berasal dari Induk Perusahaan (PT RNI) dan cabangnya, eks karyawan staf PG Rajawali I dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
2. Dana Pensiun Rajawali Nusindo (Dapen RN) telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. Kep-067/KM.6/2003 tanggal 28 Februari 2003. Mitra pendiri Dapen RN berasal dari Induk Perusahaan (PT RNI) dan cabangnya, eks karyawan staf PG Rajawali II dan PG Madu Baru yang kepesertaannya sebelumnya dari dana pensiun perkebunan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

aa. Pension fund (continued)

Based on the pension regulation of article 24 regarding the retirement age of participants it is determined that the normal retirement age is 56 years, the retirement age is accelerated 10 years before reaching normal retirement age, the obligatory retirement age shall be determined at 60 years, the age of the participants for the determination of pension benefits are determined on the basis of date of birth mentioned for the first time as an employee according to valid evidence.

The Company's pension fund is a type of employer pension fund. The intent and purpose of the establishment pension fund RNI is to manage and develop the funds to ensure and maintain the continuity of income for participants and their families with defined benefit pension plans.

Pension fund management for the Company and Subsidiaries is handled by two pension fund managements, which are:

1. Since 1948, Pension Fund Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Pension Fund) which has been approved by the Minister of Finance under his Decree No. Kep-014/KM.17/2000 dated 12 January 2000. Pension Fund Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Pension Fund) is managed by the Pension Fund Foundation Mitraraga. RNI Pension Fund founding partners came from Parent Company (PT RNI) and its branches, the former employees of PG Rajawali I and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
2. Pension Fund Rajawali Nusindo (RN Pension Fund) has been approved by the Minister of Finance under his Decree No. Kep-067/KM.6/2003 dated 28 February 2003. Co-founders come from Parent Company (RNI) and its branches, the former employees of PG Rajawali II and PG Madu Baru whose membership are previously from the plantations pension fund.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

aa. Dana pensiun (lanjutan)

Sejak tahun 1954 Perusahaan menyelenggarakan program pensiun dengan jenis Program Manfaat Pasti, yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun Mitraraga, dan kemudian disesuaikan melalui surat permohonan No. DP/94NI/94 tanggal 17 Juni 1994 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-207/KM.17/1994 tanggal 18 Juni 1994 menjadi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia (Dapen RNI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 011/SK.DIRU/IV/2002 tentang Peraturan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. Kep-173/KM.6/2002 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, memutuskan :

Berdasarkan kontribusi dan pendanaan untuk setiap karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan dana pensiun pasal 27, besarnya iuran peserta yang wajib dibayar adalah 5% dari penghasilan dasar pensiun per bulan, yang dipungut langsung oleh pemberi kerja, sedangkan beban Perusahaan adalah sebesar selisih antara jumlah iuran yang diperlukan berdasarkan perhitungan aktuaris.

Rumus dan besarnya manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun pasal 29 dan 30 adalah sebagai berikut :

1. Besarnya manfaat pensiun normal dihitung dengan menggunakan rumus :
 $MP = MK \times F \times PHDP$, dimana
MP = Manfaat Pensiun,
MK = Masa Kerja,
F = Faktor penghargaan masa kerja per tahun,
PHDP = Penghasilan Dasar Pensiun, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan sisa pensiun normal.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

aa. Pension fund (continued)

Since 1954 the Company established pension plan with Defined Benefit Program, which is managed by the Pension Fund Foundation Mitraraga, and then adjusted through the application letter No. DP/94NI/94 dated 17 June 1994 which was approved by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-207/KM.17/1994 dated 18 June 1994 to change its name to Rajawali Nusantara Indonesia Pension Fund (RNI Pension Fund).

Based on the Decree of Director of the Company No. 011/SK.DIRU/IV/2002 on Pension Fund regulation of Rajawali Nusantara Indonesia, which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Letter No. Kep-173/KM.6/2002 on Ratification of the Pension Fund Regulation of Rajawali Nusantara Indonesia, It was decided:

Based on the contributions and funding for each employee who has met the requirements in accordance with pension regulations article 27, the amount of participants' contributions that must be paid is 5% of pensionable earnings per month, which is levied directly by the employer, whereas the expenses of the Company is equal to the difference between the amount of contributions required by the actuarial calculation.

Formula and the amount of retirement benefits in accordance with the Regulations of the Pension Fund article 29 and 30 are as follows:

1. The amount of normal pension benefits is calculated using the formula:
 $MP = MK \times F \times PHDP$, where
MP = Pension benefit,
MK = Working period,
F = Appreciation working year per annum,
PHDP = Pensionable earnings with working year calculated up to remaining normal pension period.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

aa. Dana pensiun (lanjutan)

Besarnya rumus dan manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun pasal 29 dan 30 adalah sebagai berikut : (lanjutan)

2. Besarnya manfaat pensiun dipercepat adalah pensiun yang dihitung dengan rumus seperti tersebut di atas dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan peserta berhenti bekerja.
3. Besarnya manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus seperti tersebut di atas, dengan ketentuan masa kerja.
4. Besarnya manfaat pensiun ditunda adalah nilai sekarang dari manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus tersebut di atas, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan peserta berhenti bekerja.

Faktor penghargaan per tahun masa kerja ditetapkan 2,5% (dua setengah persen) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Manfaat pensiun peserta ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan dasar pensiun per bulan.

PT Rajawali Nusantara Indonesia melalui surat No. 148/RNI.01/III/13 tanggal 31 Maret 2013 dan surat terakhir No. 109/RNI.05/IX/2014 tanggal 11 November 2014 telah mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusindo. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui Dana Pensiun Rajawali Nusindo melalui surat No. KEP-143/D.05/IX/2014 tanggal 3 Desember 2014. Selanjutnya Dapen RNI dan Dapen Nusindo digabung dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN sesuai surat No. S-691/MBU/2013 tanggal 14 November 2013 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai surat No. S-5602/NB.111/2014 tanggal 4 Desember 2014 mengenai perubahan dana pensiun RNI dan pembubaran Dapen Rajawali Nusindo.

Selain program dana pensiun manfaat pasti terdapat juga program pensiun iuran pasti yang dilaksanakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Peserta PPIP diberikan kepada karyawan yang diangkat menjadi karyawan tetap.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

aa. Pension fund (continued)

The amount of formula and retirement benefits in accordance with the Regulations of the Pension Fund of articles 29 and 30 are as follows: (continued)

2. The amount of accelerated retirement benefit is a pension calculated according to the above formula with the provisions of the working period is calculated up to the date of the resignation.
3. The amount of disability pension benefit is a retirement benefit calculated using the formula as mentioned above, with the provision of service year.
4. The amount of deferred retirement benefits is the present value of pension benefits calculated using the formula above, with working period calculated up to the date of the resignation.

Appreciation factors per working period are specified at 2.5% (two and a half percent) commencing on 1 July 2002. The pension benefits of participants assigned at maximum of 80% (eighty percent) of basic pension income per month.

PT Rajawali Nusantara Indonesia through letter No. 148/RNI.01/III/13 dated 31 March 2013 and the latest letter No. 109/RNI.05/IX/2014 dated 11 November 2014 have applied for the dissolution of the Pension Fund Rajawali Nusindo. Financial Services Authority has approved the Pension Fund Rajawali Nusindo through letter No. KEP-143/ D.05/IX/2014 dated 3 December 2014. Subsequently Pension Fund RNI and Pension Fund Nusindo are merged and has received approval from the Ministry of SOEs based on letter No. S-691/MBU/2013 dated 14 November 2013 and the Financial Services Authority (FSA) through letter No. S-5602/NB.111/2014 dated 4 December 2014 regarding changes in RNI pension fund and dissolution of Rajawali Nusindo Pension Fund.

In addition to the defined benefit pension program there is also a defined contribution pension program implemented by the Financial Institution Pension Fund (DPLK). PPIP participants are given to employees who are appointed as permanent employees.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ab. Liabilitas imbalan kerja

Grup telah mencadangkan estimasi kewajiban penghargaan masa kerja dan ganti kerugian karyawan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan No. 13 tanggal 25 Maret 2003 mengenai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, uang penggantian hak dan tanda jasa (*jubileum*). Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang.

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit cost* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Aplikasi PSAK No. 24 (Revisi 2018) mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja karyawan yang mengharuskan Perusahaan untuk mengakui kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, seterusnya merupakan beban Perusahaan jika menikmati manfaat ekonomi yang akan dihasilkan dan diberikan oleh karyawan yang berhak memperoleh imbalan kerja. Program manfaat karyawan tersebut dikelompokkan dalam akun liabilitas imbalan kerja.

Kewajiban program imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan tersebut pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode *projected unit credit*.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

ab. Employee benefit obligations

The Group has reserved the estimated appreciation and compensation liabilities in accordance with the Law of the Republic of Indonesia on Labour No. 13 dated 25 March 2003 regarding the Settlement of Work Dismissal and Determination of Severance, Compensation Pay and appreciation of past service years (*jubileum*). Liability for employee benefit is estimated using the projected unit credit method based on the long-term actuarial assumptions.

Employee benefit liabilities are estimated using the projected unit credit method based on the long-term actuarial assumptions. Application of SFAS No. 24 (revised 2018) prescribes the accounting and disclosure of employee benefits which requires the Company to recognize a liability when an employee has rendered service to the Company and the right to obtain employment benefits to be paid in the future, so it continues to become the liability for the Company if the economic benefits to be generated and given by employees entitled to employee benefits flows to the Company. Employee benefits program is grouped into employee benefits liabilities account.

Post-employment benefit plan obligations and other long-term benefits recognized in the statement of financial position is the present value of benefit obligations at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, adjustments for actuarial gains or losses and past service costs not yet recognized. The defined benefit obligation is determined based on the calculations of independent actuary on an annual basis using the projected unit credit method.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ab. Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Di negara-negara yang tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi tersebut, digunakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi, kecuali perubahan program pensiun bergantung kepada sisa masa kerja karyawan untuk jangka waktu tertentu (periode hak atau vested). Dalam kasus ini, biaya jasa lalu diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode hak.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba.

Amendemen PSAK 24 (2018) memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

Penyesuaian Tahunan 2018 diadopsi dari Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle yang berlaku 1 Januari 2019 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ab. Employee benefit obligations

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rate of high quality corporate bonds in the same currency with the currency of remuneration to be paid and similar maturity time. In countries where there is no active market for such corporate bonds, the interest rate used is the government bonds.

Past service cost is recognized immediately in profit or loss, unless the changes in the pension plan depend on the remaining working period of the employees for definite period (vested). In this case, past service costs are amortized using the straight-line method over the period of the rights.

Gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately through other comprehensive income and reported in retained earnings.

The amendments to PSAK 24 (2018) provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or program completion because they use the latest actuarial assumptions (previously used actuarial assumptions at the beginning annual reporting period). In addition, the Amendments to PSAK 24 also clarify how the accounting requirements for amendments, curtailments, or plan settlements can affect the asset ceiling requirements as seen from a reduction in the surplus that causes the effect of the asset ceiling to change.

Penyesuaian Tahunan 2018 adopted on the Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle in force January 1, 2019 with earlier application permitted option

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

ac. Transaksi mata uang asing

ac. Transactions in foreign currencies

Berdasarkan PSAK No.10 mengenai "Transaksi dalam Mata Uang Asing" semua transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan dengan kurs tengah BI. Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian atau pelaporan aset dan kewajiban moneter diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs tahun berjalan.

Under SFAS No. 10 on "Transactions in Foreign Currencies" all transactions in foreign currencies are recorded in rates of exchange prevailing at the transaction date. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using BI middle rate. Exchange differences arising on the settlement or reporting of monetary assets and liabilities are recognized as foreign exchange gains or losses for the year.

Kurs yang digunakan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The exchange rate used as of 31 December 2020 and 2019 is as follows:

	2020	2019
1 GBP	19.085	18.250
1 EURO	17.330	15.589
1 USD	14.105	13.901

ad. Pengakuan pendapatan dan biaya

ad. Revenue and expense recognition

Pada dasarnya pengakuan pendapatan dan beban menganut sistem akrual. Biaya diakui pada saat terjadinya kewajiban atau pembebanan biaya yang menyangkut beban pokok produksi/pendapatan.

Basically, the recognition of revenue and expense is using accrual system. Costs are recognized when liabilities incurred or there are, charges relating to the of production/ revenue.

Pengakuan pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Recognition of revenue can be described as follows:

- Pendapatan sewa ruangan dan kantor diakui berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu sewa.
- Pendapatan dividen tunai yang berasal dari laba Entitas Anak yang kepemilikan sahamnya dibawah 50% diakui sebagai pendapatan Perusahaan sesuai keputusan RUPS Entitas Anak yang bersangkutan.

- Lease income of office space is recognized based on a straight-line basis over the term of the lease.
- Revenue from the cash dividend of Subsidiaries' profit whose share owned by the Company is below 50% are recognized as revenue in accordance with GMS of Subsidiary concerned.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ad. Pengakuan pendapatan dan biaya (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan barang jadi diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah pelanggan.

Gula

Hasil produksi gula yang dijual dengan sistem tender diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang atau adanya pemindahan hak kepada pembeli.

Tetes

Hasil produksi tetes yang dijual dengan sistem tender diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang atau adanya pemindahan hak kepada pembeli.

Alkohol, Spiritus, Etanol, dan Arak

Pendapatan dari penjualan alkohol, spiritus, etanol dan arak diakui pada saat penyerahan barang atau adanya perpindahan hak kepada pembeli.

Minyak Sawit, Inti Sawit, dan Karet

Pendapatan dari penjualan CPO, Kernel, dan Karet diakui pada saat penyerahan berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) atau saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

1) Beban produksi

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Beban produksi untuk masa tahun berjalan yang terdiri dari biaya umum, biaya tanaman tebu, biaya tebang dan angkut, biaya pabrik, dan biaya pengolahan yang berhubungan dengan proses giling dibebankan pada tahun berjalan sebagai unsur harga pokok produksi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ad. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue from sales of finished goods is recognized when the risks and rewards of ownership of goods has significantly transferred to the customer.

Sugar

The production of sugar sold by bidding system are recognized as revenue upon delivery of the goods to the buyer.

Molasses

The production of molasses sold by bidding system are recognized as revenue upon delivery of the goods are delivered to the buyer.

Alcohol, spirituous, ethanol, and arrack

Revenues from the sales of alcohol, spirituous, ethanol and arrack are recognized when the goods or there are transfer of rights to the buyer.

CPO, Palm Kernel, and Rubber

Revenues from sales of CPO, Kernel and Rubber are recognized upon delivery based on Delivery Order or when the risks and rewards of ownership of the goods has been significantly transferred to the customer.

1) Production cost

Expenses are recognized when incurred or according to their useful lives.

Production expenses for the current year which consist of general costs, the cost of the sugarcane planting, cutting and transport costs, factory costs, and processing costs associated with the pressing process is charged to the current year as a component of cost of production.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ad. Pengakuan pendapatan dan biaya (lanjutan)

ad. Revenue and expense recognition (continued)

1) Beban produksi (lanjutan)

1) Production cost (continued)

Alokasi beban bersama (*joint Cost*) untuk gula dan tetes.

The allocation of the expenditures of Joint Cost for sugar and molasses.

Beban bersama (*joint cost*) meliputi beban untuk :

Cost sharing (*joint cost*) includes cost for:

- Pimpinan dan tata usaha
- Pembibitan
- Tebu giling
- Tebang dan angkut tebu
- Pabrik
- Pengemasan dan angkut gula
- Eksploitasi alat pengangkutan
- Eksploitasi alat pertanian
- Penyusutan/ amortisasi

- Management and administration
- Seedling
- Sugarcane pressing
- Cutting and transport of sugarcane
- Factory
- Packaging and delivery of sugar
- Exploitation means of transport
- Exploitation of agricultural equipment
- Depreciation/ amortization

Beban bersama (*joint cost*) yang terdiri dari beban pengelolaan, beban tanaman, beban tebang dan angkut tebu, beban pembuatan gula, beban pembungkusan, beban pemeliharaan, dan beban penyusutan akan dialokasikan sebagai beban terhadap hasil penjualan gula dan tetes dengan menggunakan metode alokasi beban bersama atas dasar nilai pasar hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut :

Cost sharing (*joint cost*) consisting of management cost, planting cost, the cost of cutting and transporting of sugarcane, the cost of sugar production, the cost of packing, maintenance expenses, and depreciation expenses will be allocated as expenses on the sale of sugar and molasses by using the method of allocation expenses on the basis of the market value of the hypothesis with the following conditions:

- Harga gula per unit diperoleh dengan membagi jumlah hasil penjualan selama tahun buku yang bersangkutan dengan jumlah kuantum penjualannya.
- Harga jual tetes per unit diperoleh dengan membagi jumlah hasil penjualan tetes selama tahun buku yang bersangkutan dengan jumlah kuantum yang terjual.
- Jumlah hasil produksi gula yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah gula bagian pabrik gula baik eks Tebu Sendiri (TS), eks gula sisa tahun lalu maupun eks tebu rakyat bagian pabrik gula.
- Jumlah hasil produksi tetes yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah seluruh produksi yang dihasilkan dalam tahun yang bersangkutan yang meliputi tetes dari tebu sendiri, eks tebu rakyat dan eks gula sisaan tahun lalu.

- Sugar price per unit is obtained by dividing the amount of sales revenue during the fiscal year concerned with the quantum number of sales.
- The selling price per unit of molasses obtained by dividing the amount of sales revenue of molasses during the financial year concerned by the number of quantum sold.
- Total production of sugar that is used as the basis for calculation is the sugar from either ex sugarcane factory (TS), the former residual sugars from last year or farmers' sugarcane as part of factory.
- Total production of molasses used as the basis for calculation is the whole production produced during the year which include molasses from sugarcane owned by the Company, residual sugarcane from farmers and residual sugar from last year.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ad. Pengakuan pendapatan dan biaya (lanjutan)

2) Beban usaha dan beban lain-lain

Beban usaha dan beban lain-lain Perusahaan terdiri dari biaya pegawai, biaya umum dan administrasi, biaya penjualan, beban keuangan serta pendapatan dan biaya lain-lain. Pembebanan biaya didasarkan atas tahun takwim dan eks gula sisa tahun lalu.

ae. Modal saham

Penyajian modal dalam laporan posisi keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian Perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada, modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham.

af. Laba perusahaan

Laba Perusahaan dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ag. Dividen

Pembagian kewajiban dividen final diakui ketika dividen tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian dividen interim diakui sebagai kewajiban ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Dewan Direksi dan Komisaris.

ah. Aset dan liabilitas keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (revisi 2014), Instrumen Keuangan: "Penyajian", PSAK No. 55 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ad. Revenue and expense recognition (continued)

2) Operating and other expenses

Operating expenses and other expenses of the Company consist of personnel costs, general and administrative expenses, sales costs, financial expenses and income and other costs. Expenses charged is based on the calendar year and former residual sugar last year.

ae. Share capital

Presentation of capital in the statement of financial position is done in accordance with the provisions of the deed of incorporation of the Company and applicable laws and describes financial relation that exist, the authorized, issued and paid-up capital, nominal value and number of shares for each type of stock.

af. Corporate profit

The Company's profits are calculated by dividing net income by the weighted average number of outstanding shares during the year.

ag. Dividend

Final dividend obligation is recognized when the dividends are approved in the General Meeting of Shareholders (RUPS). Interim dividend distributions are recognized as a liability when the dividends are approved based on meeting result Board of of the Directors and Commissioners.

ah. Asset and financial liabilities

Effective on 1 January 2015, the Company adopted SFAS No. 50 (revised 2014), Financial Instruments: "Presentation", SFAS No. 55 (revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and SFAS No. 60 (revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures". SFAS No. 50 is revised so that it only regulates the presentation of financial instruments, while the principle of disclosure of financial instruments were transferred to SFAS No. 60.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Revisi PSAK No. 50 tersebut tidak memberikan pengaruh bagi laporan keuangan pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan.

Aset keuangan

Pengakuan awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset tersebut pada awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek. Piutang derivatif dikategorikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai.

Tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan kecuali piutang derivatif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari biaya keuangan atau penghasilan keuangan.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Revised SFAS No. 50 did not have any impact to the financial statements upon initial adoption, while the adoption of SFAS No. 50 and SFAS No. 60 which were revised give effect to the disclosure in the financial statements.

Financial asset

Initial recognition

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose of the financial assets acquisition. Management determines the classification of such assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Financial assets are classified as financial assets held for trading if its acquisition is intended to be sold or repurchased in the near future and there is evidence of short-term profit taking. Derivative receivables are categorized as an asset held for trading unless they are designated as hedging instrument.

There are no financial assets of the Company that are classified as financial assets held for trading except for derivative receivables.

Gains and losses arising on changes in fair value of derivatives are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as part of the financial costs or financial income.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, investasi bersih dalam sewa pembiayaan, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Penurunan nilai aset keuangan - pinjaman yang diberikan dan piutang

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset (continued)

Initial recognition (continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. At the time of initial recognition, loans and receivables are measured at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Loans and receivables of the Company include cash and cash equivalents, accounts receivable, net investment in finance leases, other receivables and other assets.

Impairment of financial assets - loans and receivables

At each reporting date, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (adverse events), and the adverse events impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be estimated reliably.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Penurunan nilai aset keuangan - pinjaman
yang diberikan dan piutang (lanjutan)**

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadi wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut, dan
 - ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset (continued)

**Impairment of financial assets - loans and
receivables (continued)**

The objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired includes:

- Significant financial difficulty of the borrower or issuer of financial instruments;
- Breach of contract, such as the event of default or delinquency in principal payments or interest;
- The lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower, provides debt relief (concessions) to the borrower who might not be given if the borrower does not experience such difficulties;
- There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- The loss of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- Observable data indicating a measurable decrease in the estimated future cash flows of a group of financial assets since the initial recognition of the asset in question, although the decrease cannot be identified on individually in financial assets in the asset group, including:
 - i. The deterioration of the payment status of borrower in the group, and
 - ii. National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the group.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perusahaan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Penurunan nilai aset keuangan - pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori:

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset (continued)

The amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of the asset and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the asset. The carrying value of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If loan and receivable have a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical guidance, the Company may measure impairment of the fair value of the instrument using observable market prices.

Impairment of financial assets - loans and receivables (continued)

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the reduction can be attributed objectively on events occurring after the impairment was recognized (such as increase in debtor's credit rating), the reversal of impairment losses previously recognized is recorded in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the following category:

- (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss; and
- (ii) Financial liabilities measured at amortized cost.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ah. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Utang derivatif dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai. Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali hutang derivatif. Keuntungan dan kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar derivatif, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari penghasilan atau biaya keuangan.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain hutang usaha dan hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan obligasi.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

Derivatif pada awalnya diakui sebagai nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif disepakati dan selanjutnya diukur kembali sebesar nilai wajarnya.

3. Summary of significant accounting policies (continued)

ah. Asset and financial liabilities (continued)

Financial asset (continued)

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading. Derivative payables are classified as financial liabilities held for trading unless designated as hedging instrument. No financial liabilities are classified as financial liabilities held for trading except for derivative payables. Gains and losses arising from changes in fair value of derivatives are recognized in the statement of comprehensive income as part of income or financial costs.

(ii) Financial liabilities carried at amortized cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are classified in this category and measured at amortized cost. Financial liabilities are measured at amortized cost include trade payables and other payables, accrued expenses, loans and bonds.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities were offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Derivative financial statements and hedging activities

Derivatives are initially recognized as fair value on the date the derivative contract is agreed and subsequently measured at fair value.

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ai. Biaya pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sehingga aset tersebut selesai secara substansial. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan.

aj. Akuntansi hibah dan bantuan pemerintah

Perusahaan telah menerapkan kebijakan PSAK No. 61 tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan bantuan Pemerintah. Adapun uraian kebijakan tersebut sebagai berikut :

- a. Hibah Pemerintah yang terkait dengan aset, termasuk hibah non moneter pada nilai wajar, disesuaikan dalam laporan posisi keuangan dan disajikan sebagai kredit dalam penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai nilai tercatat aset.
- b. Penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .
- c. Pembayaran kembali hibah terkait dengan penghasilan disajikan sebagai kredit dalam laporan kredit ditangguhkan yang belum diamortisasi terkait dengan hibah. Jika pembayaran kembali melebihi saldo kredit ditangguhkan atau tidak ada lagi saldo kredit ditangguhkan maka pembayaran kembali diakui dalam laba rugi.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

ai. Loan expenses

At the time of initial recognition, loans are recognized at fair value, net of transaction costs that occur. Subsequently, loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized therefore the asset is substantially completed. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period incurred.

Loans are classified as current liabilities unless maturing in more than 12 months after the reporting period.

aj. Accounting for Government grants and assistance

The Company has implemented SFAS No. 61 on Accounting for Government Grants and Government assistance. The description of the policy is as follows:

- a. Government grants related to assets, including non-monetary grants at fair value are adjusted in the statement of financial position and presented as a credit in deferred income or recorded as the carrying value of the asset.*
- b. Presentation of grants related to income is presented as a credit in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*
- c. Repayment of a grant related to income is presented as a credit in a unamortized deferred credit report related to the grant. If the payment exceeds the deferred credit balance or no balance are available, the deferred loan repayment is recognized in profit or loss.*

31 Desember 2020

31 December 2020

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi

Penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset, liabilitas dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan secara spesifik menelaah apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang didefinisikan secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Pertimbangan, estimasi dan asumsi memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas seperti klasifikasi aset dan liabilitas, sewa, penyisihan kerugian piutang, penyisihan persediaan usang, dan lainnya.

Oleh karena adanya ketidakpastian di dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil akhir yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut.

**3. Summary of significant accounting policies
(continued)**

ak. Use of estimates

Presentation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets, liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of the reporting period.

At each balance sheet date, the Company specifically examines whether there is objective evidence that a financial asset is impaired. Allowance for impairment losses was made on accounts that are defined specifically has impaired.

Estimates and judgments are continually evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events believed to be reasonable under the circumstances. Considerations, estimates and assumptions that have a significant impact on the carrying values of assets and liabilities such as the classification of assets and liabilities, leases, provision for impairment, provision for obsolete inventory, and more.

Due to the uncertainty in making estimates, it is possible that the final results reported in the future will differ from those estimates.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

4. Kas dan setara kas

4. Cash and cash equivalents

	2020	2019	
Kas – IDR			Cash – IDR
Kas	3.816.385.577	4.225.084.087	Cash
Jumlah kas - IDR	3.816.385.577	4.225.084.087	Total cash – IDR
Bank – IDR			Bank - IDR
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	68.562.805.981	72.976.285.518	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah	51.463.029.227	74.727.763.640	PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.644.848.865	55.504.908.891	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	32.644.003.060	126.900.084.226	PT BPD Jawa Barat & Banten, Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	32.356.205.474	101.592.262.831	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.426.911.870	685.157.180	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	7.223.849.119	530.692.619	PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk
PT Bank DKI	3.140.741.630	150.198.260.267	PT Bank DKI
PT Bank BNI Syariah	557.483.826	1.153.872.198	PT Bank BNI Syariah
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	11.982.048	12.205.048	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Sumatera Barat	4.419.324	14.198.350	PT BPD Sumatera Barat
PT BPD Jawa Timur Tbk	954.895	87.916.664	PT BPD Jawa Timur Tbk
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	736.892.071	4.097.344.175	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	605.658.884	2.873.118.080	PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	197.293.657	204.835.057	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Tbk	150.059.659	138.421.109	PT Bank Danamon Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk	115.697.799	148.960.594	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	109.978.768	171.479.679	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank UOB Buana Tbk	78.147.810	78.528.515	PT Bank UOB Buana Tbk
PT Bank Mega Tbk	56.478.190	50.265.655	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Panin Tbk	53.450.369	16.349.044	PT Bank Panin Tbk
Sub jumlah bank – IDR	246.140.892.526	592.162.909.340	Subtotal bank – IDR

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

4. Kas dan setara kas (lanjutan)

4. Cash and cash equivalents (continued)

	2020	2019	
Bank – mata uang asing			Bank – foreign currencies
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (USD 325.027 di 2020 dan USD 5.784 di 2019)	4.584.511.888	79.956.899	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (USD 325,027 in 2020 and USD 5,784 in 2019)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (USD 124.922 di 2020 dan USD 2.243 di 2019)	1.762.028.481	31.177.037	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (USD 124,922 in 2020 and USD 2,243 in 2019)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD 7.319 di 2020 dan USD 35.963 di 2019)	103.232.981	473.187.310	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD 7,319 in 2020 and USD 35,963 in 2019)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (USD 2.072 di 2020 dan USD 2.294 di 2019)	29.231.928	31.893.389	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (USD 2,072 in 2020 and USD 2,294 in 2019)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Euro 6.670 di 2020 dan Euro 1.521,04 di 2019)	115.597.859	23.710.884	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Euro 6,670 in 2020 and Euro 1,521.04 in 2019)
Sub jumlah bank - mata uang asing	6.594.603.137	639.925.519	Subtotal – foreign currencies
Sub jumlah bank	252.735.495.663	592.802.834.859	Subtotal bank
Deposito – IDR			Time deposits - IDR
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.000.000.000	52.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.500.000.000	27.130.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	5.115.000.000	47.570.000.000	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank DKI	5.000.000.000	55.000.000.000	PT Bank DKI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	40.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	25.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	-	2.600.000.000	PT Bank BRI Agroniaga Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Capital Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	PT Capital Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Tbk	9.132.387.130	25.132.387.130	PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	-	95.000.000.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk
PT Bank MNC International Tbk	-	10.000.000.000	PT Bank MNC Internasional Tbk
Sub jumlah deposito	50.747.387.130	389.432.387.130	Subtotal time deposits
Jumlah kas dan setara kas	307.299.268.370	986.460.306.076	Total cash and cash equivalents

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Notes to consolidated financial statements (continued)
 For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

5. Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya

5. Restricted cash and cash equivalent

	2020	2019	
Kas yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	75.321.861.360	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	27.000.000.000	-	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	313.561.002	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Deposito berjangka (lebih dari 3 bulan)			Time deposit (more than 3 months)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	365.000.000.000	365.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	258.552.631.579	258.552.631.579	PT Bank BNI Syariah
PT Bank DKI	150.000.000.000	-	PT Bank DKI
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	115.591.000.000	40.800.000.000	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	100.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90.000.000.000	21.940.944.751	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	8.503.057.127	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah bank dibatasi penggunaannya	1.081.779.053.941	794.796.633.457	Total restricted bank account

Per 31 Desember 2020, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp 979.143.631.579 digunakan sebagai jaminan/ CCF (Cash Collateral Financing) dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. Saldo PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 365.000.000.000, PT Bank BNI Syariah total Rp 258.552.631.579 masing-masing sebesar Rp 221.052.631.579 dengan No. Seri: SAA9707771 tanggal 10 April 2019 (lihat Catatan 25) dan Rp 37.500.000.000 dengan No. Seri: SAB038800 tanggal 26 November 2019 digunakan untuk jaminan, PT Bank DKI sebesar Rp 150.000.000.000 dengan No. Agunan Tunai: 1891/GKM/XI/2019 Tanggal 27 November 2019, PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk sebesar Rp 115.591.000.000 masing-masing digunakan sebagai jaminan kredit untuk bank bersangkutan, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 90.000.000.000 dengan Nomor Perjanjian CCF :01/S.Pj-Hkm/RNI.01/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 digunakan untuk jaminan.

As of December 31, 2020, restricted cash and cash equivalents of Rp. 979,143,631,579 were used as collateral/ CCF (Cash Collateral Financing) with a period of more than 3 months. Balance of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 365,000,000,000, PT Bank BNI Syariah totaling Rp 258,552,631,579 each of Rp 221,052,631,579 with Serial Number: SAA9707771 dated 10 April 2019 (see Note 25) and Rp 37,500,000,000 with Serial Number: SAB038800 dated 26 November 2019 used for collateral, PT Bank DKI amounting to Rp 150,000,000,000 with Cash Collateral No. 1891/GKM/XI/2019 on 27 November 2019, PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk amounting to Rp 115,591,000,000 respectively used as credit collateral for the bank concerned, and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp. 90,000,000,000 with the CCF Agreement Number. 01/S.Pj-Hkm/RNI.01/I/2020 dated 9 January 2020 used for guarantee.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

**5. Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya
(lanjutan)**

Saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya tahun 2020 PT PG Rajawali I sebesar Rp 102.635.422.362 terdapat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk adalah saldo bank yang dibentuk untuk menyalurkan dana kelompok tani/koperasi dari hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani dan koperasi primer yang pengelolaannya diserahkan kepada Unit Pabrik Gula Rejo Agung Baru dan Unit Pabrik Gula Krebet Baru.

5. Restricted cash and cash equivalent (continued)

The restricted cash and cash equivalents in 2020 of PT PG Rajawali I as of Rp 102,635,422,362 which found in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT BPD Jabar and Banten Tbk. are opened for funding farmer groups/cooperation from the Kredit Usaha Rakyat (KUR) to farmers groups and premier cooperation which managed by the Unit Pabrik Gula Rejo Agung Baru and Unit Pabrik Gula Krebet Baru.

6. Piutang usaha

6. Account receivables

	2020	2019	
Piutang usaha pihak ketiga			Account receivables third parties
Piutang obat-obatan dan alat kesehatan	421.101.462.166	525.052.252.604	Medicines and healthy tools receivable
Piutang gula dan tetes	181.389.057.177	19.137.533.625	Sugar and molasses receivable
Piutang perdagangan umum	22.409.501.407	23.743.392.783	General trade receivable
Piutang teh	19.038.421.005	15.569.241.471	Tea receivable
Piutang kondom dan alat suntik sekali pakai	10.996.660.582	3.798.033.069	Condom and disposable syringe receivable
Piutang penjualan sapi	4.307.749.257	4.307.749.257	Cattle sales receivable
Piutang karung plastik	2.934.853.760	18.651.385.204	Plastic bag receivable
Piutang minyak sawit mentah	858.284.176	988.013.146	Crude palm oil receivable
Piutang asuransi	318.000.000	-	Insurance receivable
Piutang kanvas rem	-	1.727.212.300	Brake shoes receivable
Piutang spiritus/alkohol	-	491.070.000	Alcohol/spirituous receivable
Sub jumlah piutang usaha pihak ketiga	663.353.989.530	613.465.883.459	Subtotal account receivables third parties
Piutang usaha pihak berelasi			Account receivables related parties
PT Pupuk Sriwidjaja	1.885.541.175	-	PT Pupuk Sriwidjaja
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.829.145.000	-	PT Pupuk Kalimantan Timur
PK Rosella Baru	89.335.750	-	PK Rosella Baru
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	11.925.885	-	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Madu Baru	-	231.990.000	PT Madu Baru
Lain-lain	17.954.594.607	1.227.450.360	Others
Sub jumlah piutang usaha pihak berelasi	21.770.542.417	1.459.440.360	Subtotal account receivables related parties
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	(56.790.145.202)	(50.027.988.008)	Allowance for impairment of account receivables
Jumlah piutang usaha	628.334.386.745	564.897.335.811	Total account receivables

31 Desember 2020

31 December 2020

6. Piutang usaha (lanjutan)

6. Account receivables (continued)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut :

Movements of allowance for impairment of account receivables are as follows:

	2020	2019	
Saldo awal	50.027.988.008	55.420.906.481	<i>Beginning balance</i>
Penambahan/pengurangan	6.762.157.194	(5.392.918.473)	<i>Addition/deduction</i>
Saldo akhir	56.790.145.202	50.027.988.008	<i>Ending balance</i>

Piutang usaha obat-obatan dan alat kesehatan kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Rajawali Nusindo.

Account receivables of medicines and medical equipment to third parties are receivables that occurred in the subsidiaries of PT Rajawali Nusindo.

Piutang usaha gula dan tetes kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT PG Rajawali I, PT Rajawali II, dan PT PG Candi Baru.

Sugar and molasses account receivables to third parties represent receivables that occurred in the subsidiaries of PT PG Rajawali I, PT Rajawali II, and PT PG Candi Baru.

Piutang usaha teh kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Mitra Kerinci.

Tea account receivables to third parties represent receivables that occurred in the subsidiary of PT Mitra Kerinci.

Piutang karung plastik kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Rajawali Citramass pada tahun 2020 dan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring pada tahun 2019.

Receivables plastic bag to the subsidiary of third parties are receivables that occurred in PT Rajawali Citramass at 2020 and PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring at 2019.

Piutang minyak sawit mentah kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan.

Account receivables of crude palm oil to third parties represent receivables that occurred in the subsidiary of PT Perkebunan Mitra Ogan.

Piutang usaha kanvas rem kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Rajawali PG II pada tahun 2019.

Account receivables to third parties of canvas brakes represent receivables that occurred in the subsidiary of PT Rajawali PG II at 2019.

Piutang usaha kondom/ ASSP kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di entitas anak PT Mitra Rajawali Banjaran.

Account receivables of condom/ ASSP to third parties represent receivables that occurred in the subsidiary of PT Mitra Rajawali Banjaran.

Piutang penjualan sapi kepada pihak ketiga merupakan piutang yang terjadi di induk Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Cattle account receivables represent receivables to third parties that occurred in the parent Company of PT Rajawali Nusantara Indonesia.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

7. Piutang lain-lain

7. Other receivables

a. Piutang lain-lain lancar

a. Other current receivables

	2020	2019	
Pihak berelasi :			Related parties :
PT Sang Hyang Seri (Persero)	26.570.374.000	-	PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sawit Menang Sejahtera	17.790.455.585	17.790.455.586	PT Sawit Menang Sejahtera
PT Brantas Energi	10.497.694.444	10.305.583.333	PT Brantas Energi
PT PG Madu Baru	3.504.692.355	3.525.849.864	PT PG Madu Baru
Pinjaman pegawai	1.445.446.561	11.870.934.418	Employee loans
PT Phapros Tbk	772.216.911	27.985.793.581	PT Phapros Tbk
Dana Pensiun RNI	-	1.656.791.425	Pension fund of RNI
PTPN (I-XIV)	682.850.816	685.790.650	PTPN (I-XIV)
PT Rajawali Gloves	362.750.155	362.750.155	PT Rajawali Gloves
PT JIEP Pulogadung	308.224.000	-	PT JIEP Pulogadung
PT Kawasan Industri Medan	234.178.000	-	PT Kawasan Industri Medan
PT Kawasan Industri Makassar	152.908.000	-	PT Kawasan Industri Makassar
PT Kawasan Industri Wijayakusuma	149.898.000	-	PT Kawasan Industri Wijayakusuma
PT Rajawali Insurance Broker	115.788.718	99.744.065	PT Rajawali Insurance Broker
Koperasi karyawan	-	15.000.000	Employee cooperative
Lain-lain	18.955.092.558	1.944.790.044	Others
Sub jumlah pihak berelasi	81.542.570.103	76.243.483.121	Subtotal related parties
Cadangan penurunan nilai piutang pihak berelasi	(447.642.553)	(312.991.726)	Allowance for impairment of receivables of related parties
Jumlah piutang lain-lain pihak berelasi	81.094.927.550	75.930.491.395	Total other receivables related parties
Pihak ketiga :			Third parties :
Piutang KUD/PTR/Plasma	234.785.190.345	244.270.103.158	KUD/PTR/Plasma receivable
Uang muka pihak lain	154.403.098.781	210.286.687.142	Other parties advance
Piutang instansi pihak ketiga	3.751.602.437	6.105.562.737	Receivable of third parties
Piutang pegawai	1.429.743.206	-	Employees receivable
Uang muka pembelian	668.526.000	-	Down payment
KSO Particle Board	422.123.530	-	KSO Particle Board
Tebang angkut	142.734.928	207.796.953	Freight handling
Piutang promosi/klaim principal	-	6.454.095.641	Promotion/principal claim receivable
Uang muka leveransir	-	4.088.039	Supplier advance
Lain-lain	83.926.638.923	29.922.128.301	Others
Sub jumlah pihak ketiga	479.529.658.150	497.250.461.971	Subtotal third parties
Cadangan penurunan nilai piutang pihak ketiga	(3.328.337.198)	(1.193.744.362)	Allowance for impairment of receivables of third parties
Jumlah piutang lain-lain pihak ketiga	476.201.320.952	496.056.717.609	Total other receivables third parties

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

a. Piutang lain-lain lancar (lanjutan)

Pihak berelasi

Piutang berelasi kepada PT Phapros Tbk merupakan saldo klaim PT Rajawali Nusindo kepada PT Phapros Tbk.

Piutang berelasi kepada PT Sawit Menang Sejahtera merupakan tagihan atas pinjaman modal kerja yang diberikan oleh entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan.

Pinjaman pegawai merupakan fasilitas pinjaman tanpa bunga kepada pegawai, yang dilunasi melalui pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan.

Pihak ketiga

Piutang KUD/PTR/Plasma merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani tebu rakyat/ petani plasma berupa pinjaman pupuk, biaya garap, biaya tebang, dan lain-lain yang akan dilunasi pada saat pencairan gula bagian petani/ penjualan Tandan Buah Segar (TBS) plasma.

Rincian Piutang KUD/PTR/Plasma per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
PT PG Rajawali II	140.712.430.909	106.654.432.652	PT PG Rajawali II
PT PG Rajawali I	62.904.301.025	94.246.822.551	PT PG Rajawali I
PT Laras Astra Kartika	16.658.714.252	10.745.317.752	PT Laras Astra Kartika
PT Perkebunan Mitra Ogan	13.422.937.409	13.771.144.964	PT Perkebunan Mitra Ogan
PT PG Candi Baru	1.086.806.750	18.852.385.239	PT PG Candi Baru
Jumlah piutang KUD/PTR/Plasma	234.785.190.345	244.270.103.158	Subtotal account receivables KUD/ PTR/ Plasma

Piutang KUD/TRI (Tebu Rakyat Intensif) merupakan pinjaman yang diberikan berdasarkan pemberian KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi), merupakan program pemerintah untuk membantu kegiatan petani tebu. Penyaluran pinjaman dilakukan melalui Perusahaan yang pembayarannya akan diperhitungkan dengan hasil gula petani, terkait dengan utang titipan TRI KSU (Kerjasama Usaha). Piutang KUD/ TRI terdapat di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan di PT PG Candi Baru.

7. Other receivables (continued)

a. Other current receivables (continued)

Related parties

Receivables related to PT Phapros Tbk represent claim PT Rajawali Nusindo to PT Phapros Tbk.

Receivables related to PT Sawit Menang Sejahtera represent bills on working capital loans granted by subsidiary of PT Perkebunan Mitra Ogan.

Employee loan is a loan bearing no interest to employees, which is repaid through payroll deductions of related employees.

Third parties

Receivables of KUD/PTR/Plasma represent loans given to sugarcane farmers in the form of a loan of fertilizer, the cost of working, the cost of cutting, and others which will be repaid at the time of disbursement of the sugar which is part of the farmer portion/ Fresh Fruit Bunches (FFB) of plasma sales.

Details of receivables KUD/PTR/Plasma as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Receivables of KUD/TRI (Smallholders' Sugarcane Intensification) represent loan granted by giving KKPE (Energy and Food Resistance Loan), a government program to assist the sugarcane farmers. Corporate lending is done through the payment will be taken into account by the sugar results of farmers, associated with loan entrusted on TRI KSU (Joint Business). Receivables of KUD/TRI contained in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, and PT PG Candi Baru.

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

a. Piutang lain-lain lancar (lanjutan)

Pihak ketiga (lanjutan)

Piutang plasma di PT Perkebunan Mitra Ogan merupakan bagian piutang jangka panjang yang jatuh tempo atas pembiayaan kebun KKPA seluas 397,17 Ha, piutang pupuk dan pemeliharaan jalan/ tanaman petani plasma di kebun PPL melalui KUD yang akan diperhitungkan dengan pembayaran TBS dan piutang pemeliharaan kebun petani KKPA di kebun RL yang akan diperhitungkan dengan pembayaran TBS.

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang plasma per tanggal laporan posisi keuangan yang berasal dari pengalihan HGU Inti berikut tanamannya seluas 1.172,59 Ha dan terjadi ganti rugi oleh Perusahaan seluas 523,89 Ha sehingga mulai April 2013 menjadi seluas 648,7 Ha. Pengembalian piutang adalah dipotong dari hasil penjualan Tandan Buah Segar kelapa sawit para petani plasma setiap bulan berdasarkan pengikatan (perjanjian) antara masing-masing petani yang berhak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Di dalam perjanjian tersebut para petani dinyatakan berhutang untuk biaya pembangunan kebun plasma kepada perusahaan inti sebesar Rp 10.500.000 per hektar dan dibebani bunga pinjaman sebesar 14% per tahun.

Piutang plasma merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani plasma untuk pemeliharaan kebun kelapa sawit yang akan diperhitungkan pada saat petani menyerahkan hasil produksi TBS kepada entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Laras Astra Kartika.

Piutang lain-lain lancar pihak berelasi kepada PT Madu Baru merupakan piutang modal kerja untuk keperluan operasional.

7. Other receivables (continued)

a. Other current receivables (continued)

Third parties (continued)

Receivables plasma of PT Perkebunan Mitra Ogan represent part of long-term receivables maturing on financing of KKPA plantation in the area of 397.17 Ha, accounts receivables on fertilizer and maintenance of roads/ plasma farmers at PPL through KUD which will be taken into account by the payment of TBS receivables and plantation maintenance of KKPA farmer in the RL plantation to be accounted for FFB payment.

The amount represents the outstanding amounts of plasma per the statement of financial position date are derived from the plant following the transfer of HGU core area of 1,172.59 Ha and occur indemnification by the Company covering an area of 523.89 Ha and began in April 2013, into an area of 648.7 Ha. Payment of receivables is deducted from the sale of fresh fruit bunches of oil palm from smallholders every month based on the binding (agreement) between each farmer is entitled under Decision Regent of Ogan Komering Ulu Timur. The new agreement is declared that farmers owed for plasma plantation development costs to the Company's core amounting to Rp 10,500,000 per hectare and bears interest rate at 14% per year.

Plasma receivables present loans given to farmers for maintenance of oil palm plantations that will be taken into account when farmers deliver their yields of FFB to subsidiaries of PT Perkebunan Mitra Ogan and PT Laras Astra Kartika.

Other current receivables from related parties to PT Madu Baru represent working capital receivables for operational purposes.

31 Desember 2020

31 December 2020

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

7. Other receivables (continued)

b. Piutang lain-lain tidak lancar

b. Other non current receivables

	2020	2019	
Pihak berelasi			Related parties
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	49.298.819.712	49.298.819.712	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
Jumlah pihak berelasi	49.298.819.712	49.298.819.712	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
PT Abadi Guna Papan	96.955.083.602	97.150.952.455	PT Abadi Guna Papan
Plasma Sawit	71.108.338.026	71.130.499.329	Plasma of oil palm
Pajak KSO Waskita	16.800.000.000	-	KSO Waskita Tax
PT PG Gorontalo	4.822.002.679	4.822.002.679	PT PG Gorontalo
PBSTA Loka	2.841.789.509	2.841.789.509	PBSTA Loka
Lain-lain	135.200.000	135.200.000	Others
Sub jumlah pihak ketiga	192.662.413.816	176.180.443.972	Subtotal third parties
Penyisihan penurunan nilai	(27.577.230.240)	(27.383.320.073)	Provision for impairment value
Jumlah pihak ketiga	165.085.183.576	148.797.123.899	Total third parties

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain tidak lancar sebagai berikut :

The movement for allowance for impairment of non current receivables as follows :

	2020	2019	
Saldo awal	27.383.320.073	27.383.320.073	Beginning balance
Penambahan penyisihan	193.910.167	-	Additional provision
Saldo akhir	27.577.230.240	27.383.320.073	Ending balance

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Piutang PT Perkebunan Nusantara X (Persero) awalnya merupakan piutang KSO-BPPG yang merupakan piutang modal kerja dan piutang hubungan rekening koran PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan KSO-BPPG, berdasarkan persetujuan pelaksanaan kerjasama operasi peningkatan kinerja Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Receivables of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) was originally receivables of KSO-BPPG which is working capital receivable and cash standing loan of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) with KSO-BPPG, based on Joint Operation Agreement on Implementation of Performance Improvement on Sugar Factory of PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) of the State Minister for State-Owned Enterprises.

31 Desember 2020

31 December 2020

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
(lanjutan)

Sejak September 2009 KSO ini telah diubah dengan mengikutsertakan PTPN X untuk mengelola PG Camming dan PG Bone sehingga Perusahaan hanya mengelola PG Takalar. Sebagai realisasi dari perubahan ini kredit modal kerja dari Bank BRI kepada Perusahaan akan dilakukan novasi sebagian kepada PTPN X dengan adanya addendum perjanjian pinjaman KMK No. 26 tanggal 12 April 2010 dan KI No. 27 tanggal 12 April 2010.

PT RNI telah menandatangani Perjanjian Transisi pada tanggal 27 Desember 2011 dengan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) untuk Pengalihan Pengelolaan Pabrik Gula Takalar. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2012, perjanjian tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Pabrik Gula Takalar yang dibuat PT RNI, PTPN X dan PTPN XIV, untuk mengalihkan Pengelolaan PG Takalar dari PT RNI kepada PT Perkebunan Nusantara X.

1. Di dalam perjanjian pengalihan pengelolaan tersebut disyaratkan untuk membuat: pengalihan/ pembaharuan (novasi) kredit Bank BRI dari PT RNI kepada PTPN X, dan
2. Perjanjian penyelesaian dana talangan yang telah dikeluarkan PT RNI untuk Pabrik Gula Bone, Camming dan Takalar, sebesar lebih dari Rp 47.862.863.556.

Pengalihan/ pembaharuan (novasi) kredit Bank BRI telah dilakukan didalam Akta No. 38 untuk novasi Kredit Investasi dan No. 39 untuk novasi Kredit Modal Kerja, tanggal 17 September 2012.

Sampai saat ini perjanjian penyelesaian tersebut masih belum dibuat, karena sesuai kesepakatan Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara X akan dilakukan reviu oleh BPKP Pusat atas validitas dana talangan tersebut.

7. Other receivables (continued)

b. Other non current receivables (continued)

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
(continued)

Since September 2009 KSO has been amended to include PTPN X for managing PG Camming and PG Bone so the Company only manages PG Takalar. As the realization of this change in working capital loan from BRI to the Company will do part of novation to PTPN X with their loan agreement under Working Capital Loan Addendum No. 26 dated 12 April 2010 and Investment Loan No. 27 dated 12 April 2010.

PT RNI has signed a transition agreement on 27 December 2011 with PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) for Management Transfer of Pabrik Gula Takalar. Furthermore, on 23 April 2012, the agreement was followed by the Management Transfer Agreement of Pabrik Gula Takalar made to PT RNI, PTPN X and PTPN XIV, to transfer the management of PG Takalar from PT RNI to PT Perkebunan Nusantara X.

1. In the management transfer agreement it is required to make: the renewal (renovation) of Bank BRI loan from PT RNI to PTPN X, and
2. The bailout settlement agreement issued by PT RNI for Pabrik Gula Bone, Camming and Takalar amounted to more than Rp 47,862,863,556.

The transfer/ renewal (novation) of Bank BRI's loan has been done in the Deed No. 38 for the credit investment and No. 39 for the novation of Working Capital Loan, 17 September 2012.

Until now the settlement agreement is still not amended, because according to the agreement of the Company and PT Perkebunan Nusantara X it will be reviewed by the BPKP on the validity of the bailout funds.

31 Desember 2020

31 December 2020

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

7. Other receivables (continued)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

b. Other non current receivables (continued)

KSO PT Waskita Karya Realty

KSO PT Waskita Karya Realty

Piutang KSO Waskita merupakan piutang pajak atas KSO Waskita pada saat mendirikan Gedung Waskita Rajawali Tower. Penyertaan pada KSO RNI - Waskita ("KSO") merupakan kontribusi penyertaan modal Perusahaan dalam KSO berupa tanah milik Perusahaan seluas 7.025 m2 yang berlokasi di Jl MT. Haryono Kav. 12-13 Jakarta Timur berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 128/S.Pj/RNI.01/X/2016 dan PT Waskita Karya Realty No. 001/KSO/WKR/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 dalam rangka kerjasama proyek pengembangan properti pada aset tanah milik PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

KSO Waskita receivables represent tax receivables from KSO Waskita at the time of establishing the Waskita Rajawali Tower Building. Participation in KSO RNI - Waskita ("KSO") represents the Company's equity contribution in the KSO in the form of the Company's land area of 7,025 m2 located on Jl MT. Haryono Kav. 12-13 East Jakarta based on the Joint Operation Agreement between PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 128/S.Pj/RNI.01/X/2016 and PT Waskita Karya Realty No.001/KSO/WKR/X/2016, dated 10 October 2016 in the framework of a joint property development project on land assets owned by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

PT Abadi Guna Papan (AGP)

PT Abadi Guna Papan (AGP)

Piutang lain-lain tidak lancar pihak ketiga atas PT Abadi Guna Papan (AGP) merupakan piutang atas terjadinya pembubaran Badan Kerjasama Proyek Pengembangan Lingkungan Kuningan (BKS-PPLK) Jakarta dengan AGP yang sebelumnya didirikan berdasarkan pada Persetujuan Kerjasama antara Perusahaan dengan AGP yang tertuang dalam akta Notaris Ny. H. A. Prajitno Nitisastro, SH, No. 27 tanggal 20 Maret 1989, yang dirubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH, No. 155 tanggal 23 April 1996.

Other non-current receivables from third parties on PT Abadi Guna Papan (AGP) represent receivable for the dissolution of the Jakarta Joint Agreement of Environmental Development Project (BKS-PPLK) with AGP which was established based on the Agreement of Cooperation between the Company and AGP as stipulated in the deed of Notary Mrs. H. A. Prajitno Nitisastro, SH, No. 27 dated 20 March 1989, which was amended by notarial deed of Sutjipto, SH, No. 155 dated 23 April 1996.

Besarnya modal dalam rangka pembiayaan proyek BKS-PPLK sesuai dengan akta Notaris Ny. H.A Prajitno Nitiastro, SH sebesar Rp 63.281.163.750 dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:

The amount of capital in the framework of project financing of BKS-PPLK in accordance with notarial deed of Mrs. H.A Prajitno Nitiastro, SH amounting to Rp 63,281,163,750 with the following composition of ownership:

Investor	Penyertaan (Rp)/ Investments (Rp)	% Kepemilikan/ % Ownership	Investor
PT Abadi Guna Papan	32.284.207.000	51	PT Abadi Guna Papan
PT Rajawali Nusantara Indonesia	30.996.956.750	49	PT Rajawali Nusantara Indonesia
Jumlah	63.281.163.750	100	Total

31 Desember 2020

31 December 2020

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

PT Abadi Guna Papan (AGP) (lanjutan)

Pada tahun 2010, Badan Kerjasama PPLK telah dibubarkan dan telah dibuat perhitungannya tentang aset bersih yang harus diterima masing-masing pendiri, baik Perusahaan maupun AGP dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak Independen yaitu KAP Roebiandini dan Rekan dan dituangkan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati pada tanggal 22 Juni 2010 tentang nota kesepahaman skema pengakhiran Badan Kerjasama Proyek Pengembangan Lingkungan Kuningan dengan harga pengalihan hak penyertaan Perusahaan dari AGP pada tanggal 31 Agustus 2010.

Atas pengalihan hak kepenyertaan Perusahaan, Perusahaan akan menerima sisa saldo laba BKS-PPLK sebesar Rp 171.423.555.793 yang merupakan porsi kepemilikan Perusahaan sebesar 49% dari total saldo laba sebesar Rp 349.843.991.413. Dengan demikian, Perusahaan telah mengakhiri BKS-PPLK dengan AGP, dengan cara pengalihan seluruh hak penyertaan Perusahaan dalam BKS-PPLK kepada AGP dan AGP akan memberikan kompensasi pembayaran atas nilai penyertaan Perusahaan serta menyelesaikan seluruh hutang BKS-PPLK kepada Perusahaan.

Dengan demikian Perusahaan dari hasil pembubaran BKS-PPLK menerima pendapatan penyerahan aset bersih sebesar Rp 171.423.555.793 dan tagihan kepada AGP per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94.430.300.089.

Berdasarkan surat No. 123/RNI.02/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan perhitungan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman non pokok PT Abadi Guna Papan memiliki saldo piutang sebesar Rp 97.649.548.867 termasuk denda di tahun 2018.

7. Other receivables (continued)

b. Other non current receivables (continued)

PT Abadi Guna Papan (AGP) (continued)

In 2010, the PPLK Cooperation Agency has been dissolved and has made calculations about net assets that must be received by each of the founders, both the Company and AGP with audited financial statements by the independent party that is KAP Roebiandini and Partners and set forth in the memorandum of understanding that has been agreed on 22 June 2010 on the memorandum of understanding of the termination scheme of the Kuningan Development Project Cooperation Agency with the price of the transfer of the Company's share of investment rights from AGP as of 31 August 2010.

Upon the transfer of the Company's share of ownership, the Company will receive the remaining balance of BKS-PPLK's income amounting to Rp 171,423,555,793 which represents 49% of the Company's total retained earnings amounting to Rp 349,843,991,413. Accordingly, the Company has terminated BKS-PPLK with AGP, by transferring all of the Company's entitlements in BKS-PPLK to AGP and AGP will compensate the Company's investment value and settle all the debts of the BKS-PPLK to the Company.

Therefore, the Company's result from the dissolution of BKS-PPLK received net asset revenues amounting to Rp 171,423,555,793 and billing to AGP as of 31 December 2016 amounting to Rp 94,430,300,089.

Based on letter No. 123/RNI.02/VII/2017 on 17 July 2017 and loan calculation of PT Abadi Guna Papan own receivable balance of Rp 97,649,548,867 include penalty 2018.

31 Desember 2020

31 December 2020

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

Plasma sawit

Saldo piutang plasma sebesar Rp 71.108.338.026 dan Rp 71.130.499.329 pada tahun 2020 dan 2019 merupakan piutang eks KKPA tahun 2001 dan 2003 atas areal seluas 397,17 Ha di kebun Rambang Lubai. Untuk piutang petani plasma (didanai perbankan) merupakan angsuran Pokok dan Bunga atas KI Plasma yang akan dipotong dari hasil produksi TBS petani plasma yang dikelola oleh Perusahaan, terdapat di kebun Muba dan kebun Sebidang Aji PT Perkebunan Mitra Ogan.

PT PG Gorontalo (eks PT PG Rajawali III)

Piutang pada PT PG Gorontalo (eks PT PG Rajawali III) merupakan pinjaman yang diberikan untuk kepentingan modal kerja dan lainnya. Namun pada akhir tahun 2008 saham milik PT RNI di PT PG Rajawali III Gorontalo dengan kepemilikan saham sebesar 33,33% telah dijual dan saldo piutang menjadi piutang lain-lain pihak ketiga. Saldo piutang lain-lain sebesar Rp 4.822.002.679 telah dilakukan penyisihan penurunan nilai piutang tersebut sebesar 100%.

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA"
(PBSTA Loka)**

Berdasarkan perjanjian kerjasama operasi antara Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yaitu Perjanjian Kerjasama No. 57 tanggal 11 April 1987, dari notaris Soehartono, di Surabaya, bahwa Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perseroan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk Kontrak Manajemen, untuk melaksanakan rehabilitasi dan pengelolaan Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Unit Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA" (PD PBSTA Loka) di Surabaya.

Perjanjian berlaku 5 tahun, dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya. Selanjutnya perjanjian tersebut diperpanjang dengan perjanjian No. 65, tanggal 26 Februari 1992 dengan masa berlaku 5 tahun atau sampai dengan dibentuknya oleh kedua belah pihak suatu perusahaan patungan.

7. Other receivables (continued)

b. Other non current receivables (continued)

Plasma of oil palm

The balance of plasma receivables amounted to Rp 71,108,338,026 and Rp 71,130,499,329 in 2020 and 2019 were ex-KKPA accounts in 2001 and 2003 for an area of 397.17 Ha in the Rambang Lubai estate. Receivables for plasma farmers (bank-funded) represent principal and interest installments on plasma KI which will be deducted from the plasma farmers' FFB production managed by the Company, located in Muba plantation and Sebidang Aji plantation at PT Perkebunan Mitra Ogan.

PT PG Gorontalo (ex PT PG Rajawali III)

Receivables of PT PG Gorontalo (formerly PT PG Rajawali III) represent loans granted for working capital purpose and others. However, at the end of 2008 shares owned by PT RNI in PT PG Rajawali III Gorontalo with ownership at 33.33% have been sold and the balance of receivables became other third parties receivables. The balance of other receivables amounting to Rp 4,822,002,679 has provided an allowance for impairment of the receivables of 100%.

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA"
(PBSTA Loka)**

Based on the cooperation agreement between the Company of Regional Building Facilities of East Java Province, namely Cooperation Agreement No. 57 dated 11 April 1987, from notary Soehartono, in Surabaya, that the Company of Regional Building Facilities of East Java Province and the Company agreed to enter into a cooperation agreement in the form of Management Contract, in order to carry out the rehabilitation and management of Regional Company of Building Facilities of Pabrik Batu and Semen Tahan Api "LOKA" (PD PBSTA Loka) in Surabaya.

The agreement is valid for 5 years, can be extended for the next 5 years. Furthermore, the agreement was extended by agreement No. 65, dated 26 February 1992 with a validity period of 5 years or until the establishment of a joint venture by both parties.

31 Desember 2020

31 December 2020

7. Piutang lain-lain (lanjutan)

b. Piutang lain-lain tidak lancar (lanjutan)

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA"
(PBSTA Loka) (lanjutan)**

Kemudian diperpanjang lagi, terakhir dengan Perjanjian Kerjasama No. 16 tanggal 10 Maret 1999 yang akan berakhir pada 26 Februari 2000. Kemudian di tahun 2000 Perusahaan mengirimkan surat No. Dir/2000/06/MPM tanggal 4 Januari 2000 kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya membawahi Pabrik Batu dan Semen Tahan Api Loka untuk menghentikan KSO.

PT Panca Wira Usaha berdasarkan surat No. 009/PWU/02/2000 tanggal 25 Januari 2000 menyetujui penghentian KSO serta akan membuat surat pengakuan utang. Berdasarkan memorandum No. AKT/M/OONIII/16, saldo piutang RNI kepada PT Panca Wira Usaha atas PBSTA Loka berdasarkan hasil rekonsiliasi adalah sebesar Rp 2.820.023.038. Perusahaan telah mencadangkan penyisihan piutang KSO PBSTA Loka sebesar Rp 2.841.789.509.

7. Other receivables (continued)

b. Other non current receivables (continued)

**Pabrik Batu dan Semen Tahan Api "LOKA"
(PBSTA Loka) (continued)**

Then extended again, most recently with the Cooperation Agreement No. 16 dated 10 March 1999 which will expire on 26 February 2000. Then in 2000 the Company sent a letter No. Dir/2000/06/MPM dated 4 January 2000 to PT Panca Wira Usaha East Java which subsequently oversees Pabrik Batu and Semen Tahan Api Loka to stop KSO operation.

PT Panca Wira Usaha based on letter No. 009/PWU/02/2000 dated 25 January 2000 approved the termination of KSO and will make a letter of debt recognition (promissory note). Based on memorandum No. AKT/M/OONIII/16, the balance of RNI receivables to PT Panca Wira Usaha on PBSTA Loka based on the reconciliation result amounted to Rp 2,820,023,038. The Company has reserved an allowance of KSO PBSTA Loka amounting to Rp 2,841,789,509.

8. Persediaan

8. Inventories

	2020	2019	
Barang jadi	1.407.561.900.007	570.327.068.096	Finished goods
Bahan pembantu	63.960.104.839	52.327.047.707	Sporting materials
Alat-alat/suku cadang	34.159.096.668	34.462.788.804	Tools/spare parts
Bahan pertanian	13.813.938.127	25.734.171.434	Agricultural materials
Barang dalam proses	13.770.064.652	12.693.620.785	Goods in process
Bahan baku	3.875.800.308	5.859.166.217	Raw materials
Bahan lain-lain	8.007.992.083	5.941.435.860	Other materials
Subjumlah persediaan	1.545.148.896.684	707.345.298.903	Sub total inventories
Cadangan penghapusan persediaan barang	(53.185.403.032)	(46.450.064.093)	Allowance for inventories obsolescence
Jumlah persediaan	1.491.963.493.652	660.895.234.810	Total inventories

Cadangan penghapusan persediaan barang untuk periode per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 53.185.403.032 dan Rp 46.450.064.093 yang terutama merupakan cadangan penurunan nilai persediaan barang jadi atas persediaan kanvas rem di PT PG Rajawali II dan persediaan pupuk di PT Rajawali Nusindo sehubungan dengan pencadangan persediaan barang rusak yang disisihkan pada periode berjalan.

Allowance for inventories obsolescence for the period of 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 53,185,403,032 and Rp 46,450,064,093 which mainly represents reserves of decline in value of finished goods inventories of brake canvas inventories at PT PG Rajawali II and fertilizer inventories at PT Rajawali Nusindo in connection with the provision of inventories of damaged goods disposed in the current period.

31 Desember 2020

31 December 2020

8. Persediaan (lanjutan)

8. Inventories (continued)

Rincian persediaan barang jadi, barang dalam proses,
bahan baku, dan bahan pembantu, sebagai berikut:

*Details of finished goods inventory, goods in-
process, raw materials and auxiliaries, are as
follows:*

	2020	2019	
Persediaan barang jadi			Finished goods
Gula	711.039.354.169	64.581.159.641	Sugar
Obat-obatan dan alat kesehatan	541.089.077.706	373.512.543.370	Medicines and healthy tools
Barang dagangan	84.017.940.099	92.434.344.864	Merchandises
Tetes	12.029.994.874	270.319.802	Molasses
Alkohol/spiritus	9.408.273.047	11.209.179.880	Alcohol/spirituous
Karung plastik	7.280.402.808	7.257.496.201	Plastic bags
Teh	6.936.078.137	1.265.909.860	Tea
Minyak kelapa sawit	6.917.664.480	2.241.273.640	Palm oil
Kulit hewan dan barang-barang dari kulit	6.329.377.217	8.623.276.523	Animal leather and leather goods
Arak	5.721.126.420	4.314.365.727	Arracks
Ampas	2.239.076.042	2.234.239.982	Dregs
Hand sanitizer gel	440.010.799	-	Hand sanitizer gel
Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP)	308.399.600	-	Disposable syringe (ASSP)
Barang apotik	162.585.780	142.561.046	Pharmacies
Kondom	54.773.614	-	Condoms
Lain-lain	13.587.765.215	2.240.397.560	Others
Jumlah persediaan barang jadi	1.407.561.900.007	570.327.068.096	Total finished goods
Persediaan barang dalam proses			Goods in process
Kulit hewan dan barang-barang dari kulit	8.007.947.627	5.573.464.526	Animal leather and leather goods
Karung plastik	4.052.829.653	7.120.156.259	Plastic bags
Kondom	1.132.570.000	-	Condoms
Alat suntik sekali pakai (ASSP)	576.717.372	-	Disposable syringe (ASSP)
Jumlah persediaan barang dalam proses	13.770.064.652	12.693.620.785	Total goods in process

31 Desember 2020

31 December 2020

8. Persediaan (lanjutan)

Rincian persediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pembantu, sebagai berikut (lanjutan):

8. Inventories (continued)

Details of finished goods inventory, goods in-process, raw materials and auxiliaries, are as follows (continued):

	2020	2019	
Persediaan bahan baku			Raw materials
Bahan baku kulit	1.823.698.318	1.095.371.384	Raw leather materials
Bahan baku minyak kelapa sawit (TBS)	1.286.044.318	1.350.332.934	Raw materials of palm oil (TBS)
Bahan baku plastik	766.057.672	3.237.437.787	Raw plastic materials
Bahan baku tetes	-	176.024.112	Raw molasses materials
Jumlah persediaan bahan baku	3.875.800.308	5.859.166.217	Total raw materials inventory
Persediaan bahan pembantu			Auxiliary materials
Bahan-bahan kimia dan pabrikasi	41.059.814.803	39.159.682.990	Chemical and processing materials
Bahan produksi	8.791.971.073	-	Production materials
Bahan pembungkus	7.967.886.551	3.392.317.787	Packaging materials
Bahan bakar/pelumas	3.739.916.939	6.865.068.904	Fuel/lubricants
Bahan pembantu	2.400.515.473	2.909.978.026	Auxiliary materials
Jumlah persediaan bahan pembantu	63.960.104.839	52.327.047.707	Total inventory of auxiliary materials

Persediaan barang jadi berupa gula per 31 Desember 2020 sebesar Rp 711.039.354.169 merupakan persediaan gula yang terdapat di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan PT PG Candi Baru. Persediaan tersebut telah diasuransikan terhadap semua resiko kerusakan atau kebakaran.

The supply of finished products in the form of sugar as of 31 December 2020 amounting to Rp 711,039,354,169 represent sugar inventories in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, and PT PG Candi Baru.. The inventories are covered by insurance against any risk of damage or fire.

Persediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 541.089.077.706 terdiri dari produk kesehatan, diagnostik laboratorium, dan barang dagangan produk kesehatan diseluruh cabang PT Rajawali Nusindo, Persediaan tersebut telah diasuransikan terhadap semua resiko kerusakan atau kebakaran.

The supply of medicines and medical equipment as of 31 December 2020 amounting to Rp 541,089,077,706 consists of healthcare product, diagnostic lab, and healthcare trading product in all branches of PT Rajawali Nusindo, The inventories are covered by insurance against any risk of damage or fire.

Persediaan barang dalam proses, bahan baku, alat-alat suku cadang, bahan pertanian dan bahan pembungkus telah diasuransikan dari kemungkinan adanya kerugian atau bencana alam kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk dan PT Asuransi Jasindo (Persero). Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul.

Inventories of goods in process, raw materials, spare parts, agricultural materials and packaging materials are covered by insurance against possible losses or natural disasters to PT Asuransi Jasa Tania Tbk and PT Asuransi Jasindo (Persero). Management believes that the sum insured is sufficient to cover occurred possible losses.

31 Desember 2020

31 December 2020

8. Persediaan (lanjutan)

Persediaan barang dagangan merupakan persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT Rajawali Nusindo dan PT GIEB Indonesia.

Persediaan bahan bangunan merupakan persediaan bahan bangunan untuk keperluan perkebunan dan pabrik-pabrik gula.

Persediaan bahan pertanian merupakan persediaan bahan pertanian keperluan perkebunan dan pabrik-pabrik gula.

Persediaan barang distribusi utamanya persediaan gula, tekstil, pakaian dinas, minyak tanah, teh, kopi, beras, dan garam serta persediaan obat-obatan untuk keperluan karyawan Perusahaan, disamping juga untuk memenuhi kebutuhan di luar Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan cukup memadai untuk menutup kerugian karena penurunan nilai persediaan.

8. Inventories (continued)

Merchandise inventories represent merchandise inventories in PT Rajawali Nusindo and PT GIEB Indonesia.

Building materials inventories represent supply of building materials for plantation and sugar factories.

The supply of agricultural materials represent the supply of agricultural materials for plantation and sugar factories.

Inventories of distribution goods are mainly sugar, textile, uniform, kerosene, tea, coffee, rice and salt supplies as well as medical supplies for the Company's employees, as well as to meet the needs outside of the Company.

Management believes that the allowance for inventories is sufficient to cover losses due to decline in value of inventories.

9. Beban panen satu tahun yang akan datang

Beban panen satu tahun yang akan datang merupakan biaya tanaman tebu dan biaya pemeliharaan mesin-mesin dalam rangka persiapan musim giling tebu panen tahun 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

9. Future one year's harvest expense

The one year's harvest expense represents the cost of sugarcane crops and machine maintenance costs in preparation for the pressing season of sugarcane harvest in 2020 and 2019 with details as follows:

	2020	2019	
Tanaman	75.348.054.648	64.671.086.741	Plantation
Pemeliharaan	7.794.308.818	8.941.898.472	Maintenance
Pembuatan gula pasir	1.001.139.921	1.586.920.466	Sugar production
Tebang dan angkut	142.488.788	400.408.163	Cutting and transport
Pengelolaan	41.274.000	-	Management
Eksplorasi alat pertanian	74.000	(36.240.167)	Exploitation of agricultural equipment
Jumlah beban panen satu tahun yang akan datang	84.327.340.175	75.564.073.675	Total future one year's harvest expense

31 Desember 2020

31 December 2020

10. Aset biologis

Aset biologis terdiri atas produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif yang disajikan dalam akun "Aset Lancar - Aset Biologis" dalam laporan posisi keuangan. Mutasi aset biologis adalah sebagai berikut:

10. Biological assets

Biological assets consist of agricultural products that grow on productive plants which are presented in the account "Current Assets - Biological Assets" in the statement of financial position. Mutations of biological assets are as follows:

	2020	2019	
Nilai Wajar			Fair value
Saldo Awal	64.145.640.041	56.333.774.074	Beginning balance
Laba (rugi) bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual yang diakui pada laba rugi	17.865.899.638	7.811.865.967	Gain (loss) arising from changes in fair value less costs to sell that are recognized in profit or loss
Saldo akhir	82.011.539.679	64.145.640.041	Ending balance

Produk agrikultur yang tumbuh berupa tebu panen, tandan buah segar dan teh. Nilai wajar atas produk agrikultur ditentukan menggunakan pendekatan pasar berdasarkan harga pasar dari produk sebagaimana diterapkan pada estimasi volume produk.

Agricultural products that grow are sugarcane harvesting, fresh fruit bunches and tea. The fair value of agricultural products is determined using a market approach based on the market price of the product as applied to the estimated volume of the product.

11. Pendapatan yang akan diterima

11. Accrued income

	2020	2019	
Bonus jasa pemasaran	2.538.356.164	-	Marketing bonus
Sewa gedung	515.030.731	856.104.617	Building lease
Lain-lain	1.352.205	1.106.768.957	Others
Jumlah pendapatan yang akan diterima	3.054.739.100	1.962.873.574	Accrued income

31 Desember 2020

31 December 2020

12. Uang muka

12. Advances

	2020	2019	
Uang muka pembelian obat dan alat kesehatan	197.859.979.660	107.087.774.757	Medicines and healthy tools purchasing advance
Uang muka pemborong/leveransir	5.707.309.788	3.521.747.005	Supplier advance
Lain-lain	9.429.136.537	10.553.660.951	Others
Jumlah uang muka	212.996.425.985	121.163.182.713	Total advances

Uang muka pembelian obat dan alat kesehatan serta impor mesin-mesin merupakan pemberian uang muka kepada pemborong pemasok terkait pengadaan barang impor atau bahan baku obat impor oleh entitas anak PT Rajawali Nusindo.

Advance payment of medicines and healthy tools and machines import represents the advance payment to leveransir wholesaler related to the procurement of imported goods or raw materials of imported drugs by subsidiaries of PT Rajawali Nusindo.

Uang muka pemborong/leveransir merupakan pemberian uang muka kepada pemborong atau leveransir terkait pengadaan barang investasi/ eksploitasi oleh entitas anak PT Mitra Ogan dan PT GIEB Indonesia.

Advance payment of the supplier represents an advance payment to the contractor or supplier related to the procurement of investment goods/ exploitation by the subsidiary of PT Mitra Ogan and PT GIEB Indonesia

13. Biaya dibayar dimuka

13. Prepaid expenses

	2020	2019	
Biaya sewa rumah, gedung dan tanah	25.958.240.518	28.360.655.199	House, building, and land lease expenses
Biaya sewa kendaraan	2.471.832.234	1.167.607.001	Rent vehicle expenses
Premi asuransi	2.471.523.901	3.317.250.261	Insurance premium
Biaya alat tulis kantor dan barang cetak	-	394.403.026	Office stationery & printing expenses
Biaya dibayar dimuka lainnya	6.158.369.336	7.645.607.369	Other prepaid expense
Jumlah biaya dibayar dimuka	37.059.965.989	40.885.522.856	Total prepaid expenses

Biaya dibayar dimuka sewa rumah, gedung dan tanah merupakan pembayaran dimuka atas sewa rumah, gedung dan tanah untuk keperluan operasional PT Rajawali Nusindo, PT Laras Astra Kartika dan PT GIEB Indonesia.

Prepaid expenses for lease of houses, buildings and land represent advance payments on the rent of houses, buildings and land for operations of PT Rajawali Nusindo, PT Laras Astra Kartika dan PT GIEB Indonesia.

31 Desember 2020

31 December 2020

14. Perpajakan

14. Taxations

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

Akun ini merupakan uang muka pajak yang dipungut oleh pihak ketiga dan pajak yang dibayar sendiri, serta kelebihan setor dari tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

This account represents tax advances imposed by third parties and taxes paid on their own, as well as the excess of payments from last year with details as follows:

	2020	2019	
Pajak Pertambahan Nilai	440.923.326.275	358.610.893.029	Value Added Tax
Pajak Penghasilan pasal 28 A	36.309.335.668	34.125.467.815	Income tax art 28 A
Pajak Penghasilan pasal 22	2.035.716.847	1.785.330.784	Income tax art 22
Pajak Penghasilan pasal 25	1.620.311.870	632.082.311	Income tax art 25
Pajak Penghasilan pasal 23	46.406.347	231.107.606	Income tax art 23
Pajak Penghasilan pasal 21	107.186	122.412.949	Income tax art 21
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	-	23.959.091	Income tax art 4(2)
Lain-lain	1.401.433.064	1.533.671.113	Others
Jumlah pajak dibayar dimuka	482.336.637.257	397.064.924.698	Total prepaid taxes

SKPKB PPN tahun 2018

Tax Assessment of Underpayment for VAT year 2018

Pada tahun 2020, Entitas menerima beberapa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018 senilai total Rp 21.491.438.446 dan mencatat pembayarannya sebagai beban pajak pada laba rugi tahun berjalan.

On 2020, the Entity received several Tax Collection Letters and Tax Assesment Letter of Underpayment of Value Added Tax Year 2018 with the total amount of Rp 21,491,438,446 and recorded the payment as tax expense on the current year's profit or loss.

SKPKB PPh 21 tahun 2018

Tax Assessment of Underpayment for Income Tax Art 21 year 2018

Pada tahun 2020, Entitas menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 senilai total Rp 3.105.547.426 dan mencatatnya sebagai beban pajak pada laba rugi tahun berjalan.

On 2020, the Entity received several Tax Collection Letters and Tax Assesment Letter of Underpayment of Value Added Tax Year 2018 with the total amount of Rp 3,105,547,426 and recorded the payment as tax expense on the current year's profit or loss.

SKPLB PPh Badan tahun 2018

Tax Assessment of Underpayment for Corporate Income Tax year 2018

Pada tanggal 21 April 2020, Entitas menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00011/406/18/051/20 sebesar Rp 17.244.877.886 atas lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2018 sebesar Rp 17.381.036.536. Atas selisih antara piutang pajak yang tercatat dan Surat Ketetapan Pajak yang diterima dibebankan sebagai beban pajak pada laba rugi tahun berjalan.

On 21 April 2020, the Entity received Tax Assesment Letter of Overpayment of Corporate Income Tax No. 00011/406/18/051/20 amounted to Rp 17,244,877,886 of overpayment corporate income tax for the year 2018 amounted to Rp 17,381,036,536. For the differences between the recorded tax receivables and the Tax Assesment Letter received are expensed on the current year's profit or loss.

31 Desember 2020

31 December 2020

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2020	2019	
Pajak Penghasilan pasal 23	64.240.643.429	41.135.035.409	Income tax art 23
Utang pajak yang belum disetor	21.127.612.807	891.400	Unpaid tax payable
Pajak Pertambahan Nilai	14.945.660.975	64.357.379.636	Value Added Tax
Pajak PBB	11.672.357.814	6.517.822.790	Land & building tax
Pajak Pertambahan Nilai (Kepres No. 56/1988)	7.987.840.312	-	Value Added Tax (President decision No. 56/1988)
Pajak Penghasilan pasal 21	5.725.628.289	7.978.866.810	Income tax art 21
Pajak Penghasilan pasal 29	4.327.534.600	40.512.302.067	Income tax art 29
Pajak Penghasilan pasal 25	2.019.451.766	2.469.817.593	Income tax art 25
Pajak Penghasilan pasal 22	1.577.677.810	787.048.033	Income tax art 22
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	477.011.941	649.942.598	Income tax art 4(2)
Jumlah utang pajak	134.101.419.743	164.409.106.336	Total taxes payable

Pada tahun 2018 terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN atas masa pajak Oktober 2016 terkait penyerahan penyertaan kepada KSO Waskita berupa tanah (Catatan 2c) dengan nilai PPN dan denda sebesar Rp 23.211.814.688. Atas nilai PPN dan denda tersebut telah dibayarkan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2019.

In 2018 there was a VAT Tax Assessment Letter (SKPKB) for the October 2016 tax period related to the submission of participation to KSO Waskita in the form of land (Note 2c) with VAT value and a fine of Rp. 23,211,814,688. The VAT value and a fine has been pay out on 27 and 28 March 2019.

c. Piutang pajak

c. Tax receivables

Piutang pajak terdiri dari:

Tax receivables consisted of:

	2020	2019	
Pajak penghasilan badan	15.982.715.704	21.806.496.924	Corporate income tax
PPH pasal 28A	1.570.161.518	-	Income tax art 28A
PPH pasal 29	993.635.335	-	Income tax art 29
Pajak Pertambahan Nilai	850.061.529	-	Value Added Tax
Jumlah	19.396.574.086	21.806.496.924	Total

d. Pajak kini

d. Current tax

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan menurut laporan laba (rugi) adalah sebagai berikut:

The reconciliation income before income tax of the Company according to the statements of income (loss) is as follows:

	2020	2019	
Laba (rugi) konsolidasi sebelum pajak penghasilan	88.303.816.938	(56.465.806.141)	Consolidated profit (loss) before income tax
Laba (rugi) entitas anak dan eliminasi	168.974.937.586	171.568.317.754	Subsidiaries profit (loss) and elimination
Laba (rugi) induk Perusahaan sebelum pajak penghasilan	257.278.754.524	115.102.511.613	Parent entity profit (loss) before income tax

31 Desember 2020

31 December 2020

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxations (continued)

d. Pajak kini (lanjutan)

d. Current tax (continued)

	2020	2019	
Beda Temporer			Temporary differences
Kewajiban imbalan paska kerja	2.854.223.777	(2.653.859.311)	Post employment benefits obligation
Jasa produksi karyawan	1.012.067.196	(2.957.816.703)	Production service of employee
Penyisihan piutang	1.805.860.739	-	Allowance for accounts receivable
Penyusutan aset tetap	(7.132.654.235)	(2.541.524.309)	Depreciation of fixed asset
Jumlah beda temporer	(1.460.502.523)	(8.153.200.323)	Total temporary differences
Beda Tetap			Permanent differences
Tunjangan PPh/PPh ditanggung Perusahaan	5.683.134.974	5.262.789.600	Income tax borne by the Company
Olahraga dan hubungan industrial	474.750.891	1.186.657.898	Sports and industrial relations
Jamuan dan representasi	474.302.155	537.141.569	Entertainment & representation
Sumbangan, bingkisan dan cinderamata	292.660.900	926.113.497	Souvenir gifts and, donations
Beban ONH	-	8.746.820	Cost of pilgrimage to Mecca
Beban PPh jasa giro	1.712.110.445	370.040.735	Income tax of current account
Beban premi asuransi (JPKI DOL)	4.398.041.950	2.944.324.497	Insurance premium expenses (JPKI DOL)
Beban kerohanian	121.125.107	734.434.684	Spiritual expenses
Beban koordinasi keamanan	-	14.384.500	Security coordination expenses
Beban sosial/CSR	3.402.372.461	6.936.762.212	Social/ CSR expenses
Dividen entitas anak	(109.615.337.705)	(122.315.651.540)	Dividend of subsidiaries
Bunga deposito dan jasa giro	(39.215.839.443)	(48.046.133.305)	Interest on deposits and checking services
Sewa gedung	(26.780.088.379)	(25.476.232.053)	Building lease
Lain-lain	1.661.470.312	33.668.625.428	Others
Jumlah beda tetap	(157.391.296.332)	(143.247.995.458)	Total permanent differences
Laba (rugi) fiskal Induk Perusahaan	98.426.955.000	(36.298.684.168)	Parent entity fiscal profit (loss)
Laba (rugi) kena pajak	98.426.955.000	(36.298.684.168)	Taxable profit (loss)
Pajak kini Induk Perusahaan	(21.717.712.720)	-	Current tax – Parent entity
Pajak kini Entitas Anak	(33.987.684.582)	(73.839.475.043)	Current tax – subsidiaries
Jumlah pajak kini	(55.705.397.302)	(73.839.475.043)	Total current tax

31 Desember 2020

31 December 2020

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxations (continued)

e. Pajak tangguhan

e. Deferred tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara perhitungan aset dengan akuntansi yang meliputi akun-akun beban cadangan penghapusan (penurunan) persediaan, beban amortisasi serta pajak tangguhan atas kerugian aset yang dapat dikompensasikan. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between assets accounting and accounting calculations which include inventory losses, amortization expenses and deferred tax expense of the assets that can be utilized. The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	2020	2019*)	
Induk Perusahaan	64.683.119.126	69.957.632.574	Holding Company
Entitas Anak	436.260.917.208	428.265.269.910	Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	500.944.036.334	498.222.902.484	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(54.407.551.867)	(54.806.614.950)	Deferred tax liabilities
Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan	446.536.484.467	443.416.287.534	Total deferred tax assets
Rincian dari manfaat (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut :			Detail of deferred tax assets (liabilities) are as follows:
Induk Perusahaan			Holding company
Aset (kewajiban) pajak tangguhan :			Deferred tax assets (liabilities):
Jasa produksi	(222.654.783)	(739.454.176)	Production service
Penyusutan aset tetap	1.569.183.932	(635.381.077)	Fixed assets depreciations
Penurunan nilai piutang	(397.289.363)	-	Impairment of accounts receivable
Provisi diestimasi imbalan kerja karyawan	627.929.231	(663.464.828)	Estimated provision of employee benefits
Taksiran (beban) penghasilan pajak tangguhan	1.577.169.017	(2.038.300.081)	Estimated deferred income tax (expense)
Dikurangi :			Less :
Penyesuaian pajak tangguhan	(1.208.664.276)	(1.750.203.409)	Deferred tax adjustment
Jumlah manfaat (beban) pajak tangguhan tahun berjalan	368.504.741	(3.788.503.490)	Total deferred tax benefit (expenses) for current year
Aset pajak tangguhan awal tahun	66.298.512.649	66.222.220.584	Deferred tax assets at the beginning of the period
Manfaat pajak tangguhan tahun berjalan	368.504.741	(3.788.503.490)	Deferred tax benefit of current year
Pendapatan komprehensif lain	4.646.631.467	3.864.795.555	Other comprehensive income
Aset pajak tangguhan akhir tahun	71.313.648.857	66.298.512.649	Deferred tax assets at the end of period
Entitas anak:			Subsidiaries:
Beban pajak tangguhan	(21.679.801.380)	(26.898.487.918)	Deferred tax expense
Manfaat pajak tangguhan	34.352.844.015	107.323.208.666	Deferred tax benefit
Jumlah – neto Entitas Anak	12.673.042.635	80.424.720.748	Total – net subsidiaries
Manfaat (beban) pajak tangguhan Induk Perusahaan	(8.026.411.168)	(3.788.503.490)	Deferred tax income (expense) Parent company
Manfaat (beban) pajak tangguhan konsolidasian – bersih	4.646.631.467	76.636.217.258	Consolidated deferred tax benefit (expense) – net

Disajikan kembali. *)

Restated. *)

31 Desember 2020

31 December 2020

15. Investasi jangka panjang

15. Long term investment

	2020	2019	
Saham PT Madu Baru	36.979.623.916	32.916.716.238	Shares of PT Madu Baru
Saham PT Mitra BUMDes Nusantara	10.000.000.000	10.000.000.000	Shares of PT Mitra BUMDes Nusantara
Saham PT PP Sinergi Banjaratma	4.756.846.100	4.756.846.100	Shares of PT PP Sinergi Banjaratma
Saham PT Padi Energi Nusantara	4.000.000.000	4.000.000.000	Shares of PT Padi Energi Nusantara
Saham PT GIEB Indonesia pada perusahaan lain	47.530.800	48.961.800	Shares of PT GIEB Indonesia in other companies
Saham PT Rajawali Insurance Brokers – Nusindo	3.717.472	3.717.472	Shares PT Rajawali Insurance Brokers - Nusindo
Saham PT Jakarta Bio Vaksin – Nusindo	-	15.000.000.000	Shares of PT Jakarta Bio Vaksin - Nusindo
Saham PT Rajawali Stevia Indonesia	-	60.830.771	Shares of PT Rajawali Stevia Indonesia
Saham entitas anak pada perusahaan lain	-	2.000.000	Shares of subsidiaries in other companies
Jumlah investasi jangka panjang	55.787.718.288	66.789.072.381	Total long term investments

Saham PT PG Madu Baru

Shares of PT PG Madu Baru

PT PG Madu Baru adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri gula yang berlokasi di Yogyakarta. Pada tahun 2004, pemerintah telah mengalihkan sahamnya di PT PG Madu Baru sebesar 35% atau senilai Rp 2.425.000.000 kepada Perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal Negara melalui PP No. 3 tanggal 14 Januari 2004. Dengan demikian Perusahaan mempunyai investasi pada PT PG Madu Baru sebesar jumlah tersebut, namun tidak memiliki kendali langsung atas manajemen Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 65% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.

PT PG Madu Baru is a Company engaged in the sugar industry located in Yogyakarta. In 2004, the government transferred its stake in PT PG Madu Baru at 35% or amounting to Rp 2,425,000,000 to the Company in addition to state capital through PP No. 3 dated 14 January 2004. Therefore, the Company has investments in PT PG Madu Baru at that amount, but does not have direct control over the Company's management, while the remaining at 65% is owned by Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Nilai penyertaan Perusahaan atas kepemilikan saham PT PG Madu Baru sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

The Company's investment value of PT PG Madu Baru's share ownership up to 31 December 2020 is as follows:

Komponen	Nilai/ Value	% Kepemilikan/ % Ownership	Hak RNI/ RNI's rights	Components
Modal saham	10.000.000.000	35%	3.500.000.000	Share capital
Agio saham	4.081.670.000	35%	1.428.584.500	Additional paid-in capital
Cadangan umum	75.260.437.472	35%	26.341.153.115	General reserve
Selisih penilaian kembali aset tetap	448.255.504	35%	156.889.426	Difference in fixed assets revaluation
Laba tahun berjalan	15.865.705.356	35%	5.552.996.875	Net profit of current year
Nilai Penyertaan Saham	105.656.068.332		36.979.623.916	The value of investments

15. Investasi jangka panjang (lanjutan)

Saham PT PP Sinergi Banjaratma

PT PP Sinergi Banjaratma berkedudukan di Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa sesuai akta Notaris Ni Nyoman Rai Sumawiti S.H, MKn Nomor 02 tanggal 7 Februari 2019 kemudian perjanjian usaha patungan Nomor: L.56.1/8/WK/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perjanjian Usaha Patungan Pengembangan Lahan Eks PG Banjaratma Rest Area Brexit KM 260B jalan tol Pejagan-Pemalang.

Modal dasar perusahaan sebesar Rp 63.424.615.000 dan telah disetor penuh dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100,- selanjutnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai pihak keenam memiliki saham sebesar Rp 4.756.846.100 atau 7% dari total saham yang disetor.

Saham PT Padi Energi Nusantara

PT Padi Energi Nusantara berkedudukan di Kota Jakarta Selatan merupakan Perusahaan yang melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ketahanan pangan dan energi pada umumnya, antara lain pendapatan petani dan khususnya di bidang perdagangan dan jasa. Modal dasar PT Padi Energi Nusantara adalah sebesar Rp 29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar rupiah) yang terbagi dalam 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 100% (seratus persen) atau sejumlah 29.000 (dua puluh sembilan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 29.000.000.000 dari jumlah tersebut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengambil bagian sebanyak Rp 4.000.000.000 atau sebesar 14,00%.

15. Long term investment (continued)

Shares of PT PP Sinergi Banjaratma

PT PP Sinergi Banjaratma domiciled in Jakarta is a company engaged in the field of development, trade and services according to the notary deed of Ni Nyoman Rai Sumawiti SH, MKn Number 02 dated 7 February 2019 then the joint venture agreement Number: L.56.1 / 8 / WK / 2018 date 30 October 2018 concerning a Joint Venture Agreement for the Development of Ex-PG Banjaratma Rest Area Brexit KM 260B on the Pejagan-Pemalang toll road.

The authorized capital of the company is Rp 63,424,615,000 and has been fully paid with a nominal value per share of Rp 100,- then PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the sixth party has shares of Rp 4,756,846,100 or 7% of the total shares paid up.

Shares of PT Padi Energi Nusantara

PT Padi Energi Nusantara based in South Jakarta municipality represents a Company that implement and support Government policies and programs in the field of food and energy security in general, among others the income of farmers and especially in the field of trade and services. The authorized capital of PT Padi Energi Nusantara amounting to Rp 29,000,000,000 (twenty nine billion rupiah) divided into 29,000 (twenty nine thousand) shares with par value of each share amounting to Rp 1,000,000 (one million rupiah). Of such capital has been issued and paid up at 100% (one hundred percent) or 29,000 (twenty nine thousand) shares with a nominal value of Rp 29,000,000,000 from the amount, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) taking part amounting to Rp 4,000,000,000 or at 14.00%.

15. Investasi jangka panjang (lanjutan)

Saham PT Rajawali Stevia Indonesia

PT Rajawali Stevia Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Arif Handaya, Notaris di Jakarta, Nomor 04 tanggal 20 Desember 2018. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000019.AH.01.01 TAHUN 2019 tanggal 2 Januari 2019.

PT Rajawali Stevia Indonesia bergerak dalam bidang pertanian bit gula dan pemanis tanaman bukan tebu (Stevia) berkedudukan di Padang, dengan lokasi kebun di Desa Liki, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Pada saat ini PT Rajawali Stevia Indonesia masih dalam tahap pengembangan.

Saham PT Mitra Kerinci pada PT Rajawali Liki Energi

PT Rajawali Liki Energi merupakan badan usaha patungan (*joint venture*) yang dibentuk oleh PT Mitra Kerinci dan PT Brantas Energi dengan kepemilikan saham 55% : 45%. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha ketenagalistrikan guna menghasilkan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan berusaha dalam bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan, jasa serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan. PT Rajawali Liki Energi akan membangun proyek PLTA dengan kapasitas beban yang dihasilkan sebesar 15,6 MW dengan konsep menyatukan 4 titik lokasi PLTM yang dinaikkan ke grid 150 kV. 4 lokasi PLTM yang akan disatukan yaitu PLTM Lambai 1 (5 MW), PLTM Lambai 2 (4,4 MW), PLTM Belangir 1 (2,4 MW) dan PLTM Belangir 2 (3,8 MW).

PT Mitra Kerinci memberikan kontribusi penyertaan modal pada PT Rajawali Liki Energi berupa tanah senilai Rp 5.130.000.000 yang terletak di Kebun Liki, Solok Selatan, Sumatera Barat.

Pada tahun 2017 laporan PT Rajawali Liki Energi dikonsolidasi sebagai entitas anak PT Mitra Kerinci.

15. Long term investment (continued)

Shares of PT Rajawali Stevia Indonesia

PT Rajawali Stevia Indonesia was established based on Notary Deed Arif Handaya, Notary in Jakarta, Number 04 dated 20 December 2018. The notarial deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000019.AH.01.01 YEAR 2019 dated 2 January 2019.

PT Rajawali Stevia Indonesia is engaged in sugar beet farming and non-sugarcane sweetener (Stevia) domiciled in Padang, with the location of the garden in Liki Village, Sangir District, Solok Selatan Regency, West Sumatra. At this time PT Rajawali Stevia Indonesia is still in the development stage.

Shares of PT Mitra Kerinci at PT Rajawali Liki Energi

PT Rajawali Liki Energi represent a joint venture formed by PT Mitra Kerinci and PT Brantas Energi with ownership interest at 55% : 45%. The Company is engaged in electricity business to generate electricity for public interest and strive in the fields of development, industry, trade, services and pursuit of profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of the company. PT Rajawali Liki Energi will build a hydroelectric project with a load capacity of 15.6 MW with the concept of uniting the 4 points of the location of the PLTM raised to grid of 150 kV. 4 locations of PLTM to be incorporated which are PLTM Lambai 1 (5 MW), PLTM Lambai 2 (4.4 MW), PLTM Belangir 1 (2.4 MW) and PLTM Belangir 2 (3.8 MW).

PT Mitra Kerinci contributed capital investment to PT Rajawali Liki Energi in the form of land amounting to Rp 5,130,000,000 located in Liki Plantation, South Solok, West Sumatera.

On 2017 PT Rajawali Liki Energi is consolidated as subsidiary of PT Mitra Kerinci.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

16. Tanaman tahunan

Akun ini merupakan aset tanaman tahunan yang ada di entitas anak PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci dan PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

16. Annual plantation

This account represents annual crops assets in subsidiaries of PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci and PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2020 and 2019 consist of:

2020					
	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 2020	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanaman menghasilkan	243.295.531.467	171.125.697.606	-	414.421.229.073	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	722.437.456.622	-	(114.319.027.597)	608.118.429.025	Immature plantations
Pembibitan	2.940.477.006	18.476.975.258	-	21.417.452.264	Nursery
Sub jumlah	968.673.465.095	189.602.672.864	(114.319.027.597)	1.043.957.110.362	Subtotal
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanaman menghasilkan	101.603.958.573	22.976.684.897	-	124.580.643.470	Mature plantations
Sub jumlah	101.603.958.573	22.976.684.897	-	919.376.466.892	Subtotal
Cadangan penurunan nilai pembibitan	-	18.476.975.258	-	18.476.975.258	Allowance for Impairment of Nurseries
Nilai buku	867.069.506.522			900.899.491.634	Book value
2019					
	1 Januari/ January 2019	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 2019	
Harga perolehan					Acquisition cost
Tanaman menghasilkan	243.295.531.467	-	-	243.295.531.467	Mature plantations
Tanaman belum menghasilkan	682.591.091.633	39.846.364.989	-	722.437.456.622	Immature plantations
Pembibitan	21.417.452.264	-	18.476.975.258	2.940.477.006	Nursery
Sub jumlah	947.304.075.364	39.846.364.989	18.476.975.258	968.673.465.095	Subtotal
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanaman menghasilkan	92.131.736.897	9.472.221.676	-	101.603.958.573	Mature plantations
Sub jumlah	92.131.736.897	9.472.221.676	-	101.603.958.573	Subtotal
Nilai buku	855.172.338.467			867.069.506.522	Book value

Pada tahun 2020, penambahan jumlah tanaman tahunan sebesar Rp 150.172.190.260 merupakan penambahan biaya tanaman kelapa sawit yang ada di kebun pengembangan PT Perkebunan Mitra Ogan, penambahan tersebut termasuk kapitalisasi bunga pinjaman kredit investasi yang digunakan untuk pengembangan kebun inti maupun plasma kelapa sawit.

In 2020, the addition of annual crops amounting to Rp 150,172,190,260 represents an increase in the cost of oil palm crops in the plantation development of PT Perkebunan Mitra Ogan, such increments include capitalization of interest on investment credit loans used for the development of core or plasma oil palm plantations.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

16. Tanaman tahunan (lanjutan)

Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan yang berlokasi di Desa Lubuk Buah dan Tanjung Bali, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan seluas 5.850 Ha dan Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing petani peserta Re-Bun anggota koperasi Mitra Batanghari Leko yang berlokasi di Desa Lubuk Buah dan Tanjung Bali, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan total seluas 3.150 Ha dijadikan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

16. Annual plantation (continued)

Land along with everything above HGU land on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan located in Lubuk Buah and Tanjung Bali Village, Batanghari Leko Subdistrict, Musi Banyuasin Regency of South Sumatera in the area of 5,850 Ha and Land and everything on the land with Certificate of Property Rights on behalf of each famers of Re-Bun member of Mitra Batanghari Leko cooperative which is located in Lubuk Buah and Tanjung Bali Village, Batanghari Leko Subdistrict, Musi Banyuasin Regency, South Sumatera with total area of 3,150 Ha used as collateral to obtain credit investment facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

17. Aset tetap

17. Fixed assets

2020

	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 2020	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Persil dan bangunan	2.918.989.358.871	50.966.656.836	39.869.298	(505.749.740.652)	2.464.166.405.757	Plots and buildings
Pabrik dan mesin	2.569.024.022.245	170.404.322.076	4.002.213.262	(309.117.848.421)	2.426.308.282.638	Plants and machines
Kendaraan	126.359.809.973	5.547.466.520	161.293.461	(14.608.102.955)	117.137.880.077	Vehicles
Inventaris	145.842.005.604	11.307.731.466	26.640.680	(22.963.992.056)	134.159.104.334	Furniture & fixtures
Alat pertanian	124.947.396.678	12.304.952.429	-	(10.190.607.548)	127.061.741.559	Farming tools
Jalan dan jembatan	136.540.937.035	-	-	(2.447.327.423)	134.093.609.612	Road and bridges
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	Cattle farm
Lain-lain	11.449.010.210	1.426.982.127	-	(6.066.837.991)	6.809.154.346	Others
Sub jumlah	6.034.565.953.277	251.958.111.454	4.230.016.701	(871.144.457.046)	5.411.149.590.984	Subtotal
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	15.685.073.436	1.020.062.580	-	(1.580.866.322)	15.124.269.694	Vehicles leased
Aset dalam						
Penyelesaian	401.667.420.179	13.558.131.696	497.611.610	(61.341.041.022)	353.386.899.243	Construction in progress
Jumlah harga perolehan	6.451.918.446.892	266.536.305.730	4.727.628.311	(934.066.364.390)	5.779.660.759.921	Total acquisition cost
Akumulasi						Accumulated depreciation
<u>Penyusutan</u>						<u>Direct ownership</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Persil dan bangunan	206.330.297.078	30.114.764.541	1.256.485.041	(30.119.020.320)	205.069.556.257	Plots and buildings
Pabrik dan mesin	1.587.335.053.884	122.335.540.200	64.352.418	(51.144.112.680)	1.658.462.128.986	Plants and machines
Kendaraan	112.141.362.613	3.503.210.532	5.316.395.003	(1.418.861.523)	108.909.316.619	Vehicles
Inventaris	124.741.063.234	9.179.704.461	39.301.330	(23.278.060.635)	110.603.405.730	Furniture & fixtures
Alat pertanian	107.294.553.701	5.678.064.560	-	1.005.557.354	113.978.175.615	Farming tools
Jalan dan jembatan	73.519.340.580	5.236.094.926	-	(1.771.561.292)	76.983.874.213	Road and bridges
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	Cattle farm
Lain-lain	9.243.719.546	1.152.422.490	-	(4.490.827.060)	5.905.314.976	Others
Sub jumlah	2.222.018.803.297	177.199.801.710	6.676.533.792	(111.216.886.156)	2.281.325.185.057	Subtotal
Sewa pembiayaan						
kendaraan	5.439.218.641	2.658.007.623	-	(673.626.169)	7.423.600.095	Vehicles leased
Jumlah akumulasi						Total accumulated depreciation
Penyusutan	2.227.458.021.938	179.857.809.333	6.676.533.792	(111.890.512.325)	2.288.748.785.152	
Cadangan penurunan nilai aset dalam pelaksanaan	10.852.051.314	-	-	-	10.852.051.314	Allowance for impairment of asset in progress
Nilai buku	4.213.608.373.640				3.480.059.923.455	Book value

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

17. Aset tetap (lanjutan)

17. Fixed assets (continued)

2019						
	1 Januari/ January 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Persil dan bangunan	3.013.810.420.250	282.285.322.154	425.671.027.585	48.564.644.053	2.918.989.358.872	Plots and buildings
Pabrik dan mesin	2.742.159.992.272	97.378.206.757	330.946.905.805	60.432.729.020	2.569.024.022.244	Plants and machines
Kendaraan	137.684.236.386	3.941.063.934	16.584.577.704	1.319.087.358	126.359.809.974	Vehicles
Inventaris	171.632.544.399	6.964.913.549	36.175.452.345	3.420.000.000	145.842.005.603	Furniture & fixtures
Alat pertanian	123.107.330.205	2.013.118.362	271.791.388	98.739.500	124.947.396.679	Farming tools
Jalan dan jembatan	136.477.192.708	63.744.326	-	-	136.540.937.034	Road and bridges
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	Cattle farm
Lain-lain	11.172.136.647	276.873.564	-	-	11.449.010.211	Others
Sub jumlah	6.337.457.265.528	392.923.242.646	809.649.754.827	113.835.199.931	6.034.565.953.278	Subtotal
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	12.417.975.860	3.267.097.576	-	-	15.685.073.436	Vehicles leased
Aset dalam Penyelesaian	248.414.693.970	268.617.465.875	115.364.739.666	-	401.667.420.179	Construction in progress
Jumlah harga perolehan	6.598.289.935.358	664.807.806.097	925.014.494.493	113.835.199.931	6.451.918.446.893	Total acquisition cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Persil dan bangunan	222.437.510.571	19.583.091.086	35.689.659.471	645.109	206.330.297.077	Plots and buildings
Pabrik dan mesin	1.590.341.318.153	130.595.661.404	133.601.925.673	-	1.587.335.053.884	Plants and machines
Kendaraan	118.229.973.921	3.660.481.738	11.458.501.037	1.709.407.990	112.141.362.612	Vehicles
Inventaris	143.442.856.410	4.705.489.907	23.433.566.940	26.283.858	124.741.063.235	Furniture & fixtures
Alat pertanian	101.830.338.287	5.399.352.167	-	64.863.249	107.294.553.703	Farming tools
Jalan dan jembatan	68.246.592.683	5.272.747.896	-	-	73.519.340.579	Road and bridges
Peternakan sapi	1.413.412.661	-	-	-	1.413.412.661	Cattle farm
Lain-lain	8.516.965.461	137.584.850	-	589.169.235	9.243.719.546	Others
Sub jumlah	2.254.458.968.147	169.354.409.048	204.183.653.121	2.389.079.223	2.222.018.803.297	Subtotal
Sewa pembiayaan kendaraan	4.327.029.152	1.112.189.490	-	-	5.439.218.642	Vehicles leased
Jumlah akumulasi Penyusutan	2.258.785.997.299	170.466.598.538	204.183.653.121	2.389.079.223	2.227.458.021.939	Total accumulated depreciation
Cadangan penurunan nilai aset dalam pelaksanaan	-	10.852.051.314	-	-	10.852.051.314	Allowance for impairment of asset in progress
Nilai buku	4.339.503.938.059				4.213.608.373.640	Book value

Aset Perusahaan berupa bangunan kantor, pabrik, mesin dan instalasi, kendaraan dan lain-lain tahun 2020 dan 2019 telah diasuransikan dari risiko kebakaran/ kerusakan dan gempa bumi dengan nilai pertanggungan yang cukup. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah nilai pertanggungan tersebut di atas cukup memadai untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian karena risiko kebakaran, gempa bumi dan sebagainya.

Company's assets in the form of office buildings, factories, machineries and installations, vehicles and others in 2020 and 2019 are covered by insurance against risks of fire/ damage and earthquakes with sufficient coverage. Management believes that the above sum insured is sufficient to cover possible losses due to fire, earthquake and other risks.

31 Desember 2020

31 December 2020

17. Aset tetap (lanjutan)

17. Fixed assets (continued)

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the underlying assets as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Tanah dan bangunan	301.338.418.962	295.144.427.084	Land and building
Bangunan pabrik, mesin, dan instalasi	36.381.260.849	29.449.773.551	Factory, machine, and instalation
Perabot dan sarana IT	14.524.244.539	77.073.219.544	Furniture and IT equipments
Penyisipan	1.142.974.893	-	Insertion
Jumlah aset dalam penyelesaian	353.386.899.243	401.667.420.179	Total construction in progress

Aset dalam penyelesaian tahun 2020 dan 2019 terutama sebagian besar berasal dari:

Construction in progress in 2020 and 2019 primarily come mainly from:

- Aset tetap dalam pelaksanaan pabrik dan perluasan merupakan investasi mesin pabrik pada PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci, serta PT PG Rajawali I.
- Di PT Mitra Kerinci aset dalam penyelesaian merupakan pekerjaan dalam pelaksanaan yang dibayarkan untuk biaya perijinan, pengurusan *feasibility study*, biaya infrastruktur dan jasa proyek.
- Di PT PG Rajawali II terdapat penambahan saldo aset dalam penyelesaian sebesar Rp 268.617.465.875 yang merupakan saldo *reclass* dari uang muka atas penyediaan calon areal lahan pengganti PG Jatitujuh seluas ± 3.986,40 Ha dengan nilai Rp 976.790.785.000. Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli antara Perusahaan dengan PT Perkebunan Nusantara VIII tentang penyediaan Calon Areal lahan pengganti Hak Guna Usaha (HGU) PG Jatitujuh No.SP/III.5/220/III/2019 dan No.029/SPJ/RW-II.01/III/2019 yang di tanda tangani pada tanggal 11 Maret 2019, perjanjian ini telah direvisi dengan Addendum No.ADD/III.5/561/VI/2019 dan No.49/S.PJ/RW-II.01/VI/2019 pada tanggal 18 Juni 2019. Penggantian lahan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui hasil penelitian Tim Terpadu yang ditetapkan.

- Fixed assets in plant implementation and expansion are investment in factory machinery at PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci, and PT PG Rajawali I.
- In PT Mitra Kerinci, assets under construction are work in progress paid for licensing fees, processing of *feasibility studies*, infrastructure costs and project services.
- At PT PG Rajawali II, there is an additional balance of assets in progress of Rp 268,617,465,875 which is a reclass balance of advances for the provision of a potential replacement area for PG Jatitujuh area ± 3,986.40 Ha with a value of Rp. 976,790,785,000. Based on the sale and purchase agreement between the Company and PT Perkebunan Nusantara VIII concerning the provision of potential land areas for replacement of land use rights (HGU) PG Jatitujuh No.SP / III.5 / 220 / III / 2019 and No.029 / SPJ / RW-II.01 / III / 2019 which was signed on March 11, 2019, this agreement has been revised with Addendum No.ADD / III.5 / 561 / VI / 2019 and No.49 / S.PJ / RW-II.01 / VI / 2019 on 18 June 2019. The replacement of the land has not received approval from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) through the results of a designated Integrated Team research.

31 Desember 2020

31 December 2020

17. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian tahun 2020 dan 2019 terutama sebagian besar berasal dari: (lanjutan)

- Di PT Perkebunan Mitra Ogan terdapat saldo pembebasan tanah sebesar Rp 12.619.363.566 merupakan biaya pembebasan tanah dan pengurusan tanah di kebun pengembangan Muba 2. Dengan saldo pengurusan SHGU sebesar Rp 11.241.807.826 merupakan biaya pengurusan SHGU untuk areal pengganti di kebun PIN Peninjauan. Saldo pabrik dan perlengkapan mesin sebesar Rp 11.423.211.909 merupakan biaya pembangunan PKS-3 yang telah dilakukan penurunan nilai sebesar Rp 10.852.051.314.
- Aset tetap dalam pelaksanaan perabot dan sarana IT merupakan investasi di RNI holding dan PT Rajawali Nusindo.

Pada tahun 2020, aset mesin dari unit PG Jatitujuh yang berasal dari aset titipan sebesar Rp 46.521.000.000 di reklasifikasi ke aset tetap tidak produktif disebabkan oleh aset tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai mesin produksi.

Tanah Hak Guna PT PG Rajawali II

Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional, pada tahun 1976 Departemen Pertanian yang pada waktu itu masih membawahi bidang kehutanan, mengeluarkan areal kawasan hutan di wilayah Jatitujuh dan sekitarnya seluas 12.022,5 Ha (Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976) yang kemudian ditambah lagi seluas 8.156,30 Ha (Surat Keputusan Menteri No. 107/Kpts/Um/2/1983 tanggal 18 Februari 1983) untuk dicadangkan sebagai lahan tanaman tebu dalam rangka membangun Pabrik Gula milik PTPN XIV (Persero). Selanjutnya atas lahan seluas 12.022,5 Ha tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PTPN XIV (Persero).

Dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut, mensyaratkan liabilitas yang harus dipenuhi oleh PTPN XIV (Persero) sebagai berikut :

- a. Mengganti areal hutan secara bertahap selama 10 tahun.
- b. Membayar ganti rugi tanaman.
- c. Membayar biaya pengukuran batas.

17. Fixed assets (continued)

Construction in progress in 2020 and 2019 primarily come mainly from: (continued)

- At PT Perkebunan Mitra Ogan, there is a balance of land acquisition of IDR 12,619,363,566 which represents the cost of land acquisition and land management in the Muba 2 development garden. With a balance of SHGU management of Rp. 11,241,807,826 represents the fee for obtaining a SHGU for the replacement area in the gardening PIN. The balance of plant and machine equipment amounting to Rp. 11,423,211,909 represents the cost of building the PKS-3, which was impaired by Rp. 10,852,051,314.
- Fixed assets in the implementation of furniture and IT facilities represent investments in RNI holding and PT Rajawali Nusindo.

In 2020, machine assets from the PG Jatitujuh unit originating from entrusted assets amounting to Rp 46,521,000,000 were reclassified to non-productive fixed assets because these assets were no longer used as production machines.

Rights on land of PT PG Rajawali II

In order to fulfill the national sugar requirement, in 1976 the Department of Agriculture, which at that time was still in charge of forestry, issued forest area in Jatitujuh and surrounding in the area of 12,022.5 Ha (Minister of Agriculture Decree No.481/Kpts/Um/8/ 1976 dated 9 August 1976), which was further supplemented with an area of 8,156.30 Ha (Ministerial Decree No. 107/Kpts/Um/2/1983 dated 18 February 1983) to be reserved as sugarcane field in order to build Sugar Factory owned by PTPN XIV (Persero). Furthermore, on land in area of 12,022.5 Ha has been issued Leasehold on behalf of PTPN XIV (Persero).

The Decree of the Minister of Agriculture required liability which must be fulfilled by PTPN XIV (Persero) as follows:

- a. Replacing forest area gradually over 10 years.
- b. Pay for plant compensation.
- c. Pay a borderline measurement fee

17. Aset tetap (lanjutan)

Tanah Hak Guna PT PG Rajawali II (lanjutan)

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 129/Kpts/Ekku/2/1978 tanggal 28 Februari 1978, ditetapkan besarnya ganti rugi atas tanaman dan aset yang berada diatas lahan sebesar Rp 397.500.000 sesuai dengan persyaratan dalam SK Menteri Pertanian tersebut. PTPN XIV (Persero) telah melaksanakan liabilitas sebagai berikut:

- a. Upaya Penggantian Lahan.
PTPN XIV (Persero) mengajukan lahan penggantian seluas 7.000 Ha, akan tetapi hanya 4.000 Ha yang dianggap memenuhi syarat oleh Departemen Pertanian, sehingga akhirnya belum sempat diserahkan.
- b. Membayar ganti rugi tanaman dan aset lainnya yang berada di atas lahan sebesar Rp 397.500.000 sesuai dengan SK Menteri Pertanian tersebut.

Pada tahun 1984, Perum Perhutani meminta kepada PTPN XIV (Persero) untuk segera menyelesaikan areal pengganti dan membayar ganti rugi sebesar Rp 24.000.000.000 (Surat No.044.2/III tanggal 29 November 1984). Dalam perkembangan selanjutnya, mulai tahun 1989 manajemen PTPN XIV diserahkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang kemudian pada tahun 1993 kepemilikan sahamnya oleh Pemerintah dialihkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), sehingga sejak saat itu PTPN XIV (Persero) menjadi entitas anak PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan namanya diubah menjadi PT PG Rajawali II.

Departemen Kehutanan (yang sudah terpisah dengan Departemen Pertanian) dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 343/Kpts/1989 tanggal 7 Juli 1989 membatalkan pencadangan lahan seluas 8.156,30 Ha, atas lahan yang telah dicadangkan itu diantaranya telah ditanami tebu seluas 1.402,50 Ha.

17. Fixed assets (continued)

Rights on land of PT PG Rajawali II (continued)

Based on the Decree of the Minister of Agriculture No. 129/Kpts/Ekku/2/1978 dated 28 February 1978, stipulated the amount of compensation for plants and assets located on land amounting to Rp 397,500,000 in accordance with the requirements of the Minister of Agriculture Decree. PTPN XIV (Persero) has performed the following liabilities:

- a. Land Replacement Efforts.
PTPN XIV (Persero) proposed a replacement land of 7,000 Ha, but only 4,000 Ha were deemed eligible by the Ministry of Agriculture, and so had not yet been delivered.
- b. Pay compensation for crops and other assets located on the land amounting to Rp 397,500,000 in accordance with the Minister of Agriculture's decree.

In 1984, Perum Perhutani requested PTPN XIV (Persero) to immediately complete the replacement area and pay compensation amounting to Rp 24,000,000,000 (Letter No.044.2/III dated 29 November 1984). In further events, starting in 1989 the management of PTPN XIV was handed over to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), which later in 1993 its share ownership by the Government was transferred to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), so that PTPN XIV (Persero) became a subsidiary of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its name was changed to PT PG Rajawali II.

Ministry of Forestry (which has been separated from the Ministry of Agriculture) by Decree of the Minister of Forestry No. 343/Kpts/1989 dated 7 July 1989 cancelled land reserves covering an area of 8,156.30 Ha, on the reserved land, which has been planted with sugarcane in area of 1,402.50 Ha.

17. Aset tetap (lanjutan)

Tanah Hak Guna PT PG Rajawali II (lanjutan)

Menteri Kehutanan dengan suratnya No.666/Menhut-II/1998 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang meminta lahan penggantian dan pembayaran ganti rugi. Menteri Keuangan dalam Suratnya No.S-1204/MK.013/1989 tanggal 28 November 1989 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menyampaikan pendapatnya bahwa:

- a. Tanah di kawasan hutan seluas 13.425 Ha (12.022,5 dan 1.402,5 Ha) dihibahkan atau dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PTPN XIV (Persero).
- b. PTPN (Persero) tidak perlu membayar ganti rugi yang diusulkan Perum Perhutani sebesar Rp 24.000.000.000 karena PTPN (Persero) sudah membayar ganti rugi tanaman dan biaya pengukuran.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dengan surat No.S-213/M.EKUIIN/1989 tanggal 18 Desember 1989 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan memberikan persetujuan kepada Menteri Keuangan tersebut.

Menteri Keuangan dengan Surat No.S-213/MK.013/1990 tanggal 2 Maret 1990 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan menyampaikan persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang isinya sebagai berikut:

- a. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menyetujui pengibahan lahan seluas 13.425 Ha kepada PTPN XIV (Persero).
- b. Tagihan sebesar Rp 24.000.000.000 tidak dapat dipenuhi karena telah dilunasi berdasarkan dengan SK Menteri Pertanian No.129/Kpts/Ekku/2/1978.
- c. Hibah tersebut sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah dalam PTPN XIV (Persero).
- d. Lahan seluas 1.091 Ha (Semula 1.402,50 Ha dan sudah diserahkan seluas ± 300 Ha) agar tetap ditanami tebu.

17. Fixed assets (continued)

Rights on land of PT PG Rajawali II (continued)

Minister of Forestry in his letter No. 666/Menhut-II/1998 addressed to the Coordinating Minister for Economic Affairs who requested replacement land and compensation payments. Minister of Finance in his Letter No.S-1204/MK.013/1989 dated 28 November 1989 addressed to Coordinating Minister of Economy expressed his opinion that:

- a. Land in forest area of 13,425 Ha (12,022.5 and 1,402.5 Ha) was granted or inserted as Government Equity Participation (PMP) to PTPN XIV (Persero).
- b. PTPN (Persero) does not have to pay the compensation proposed by Perum Perhutani amounting to Rp 24,000,000,000 because PTPN (Persero) has paid plant compensation and cost of measurement.

Coordinating Minister for Economic Affairs with letter No.S-213/M.EKUIIN/1989 dated 18 December 1989 addressed to the Minister of Finance has approved to the Minister of Finance.

Minister of Finance with Letter No.S-213/MK.013/1990 dated 2 March 1990 addressed to the Minister of Forestry conveyed approval from the Coordinating Minister for Economy, which is as follows:

- a. Coordinating Minister of Economic Affairs approved the grant of 13,425 hectares of land to PTPN XIV (Persero).
- b. The claim amounting to Rp 24,000,000,000 cannot be fulfilled because it has been paid based on the Minister of Agriculture Decree No.129/Kpts/Ekku/2/1978.
- c. The grant was in addition to the Government's investment in PTPN XIV (Persero).
- d. Land area of 1,091 Ha (originally 1,402.50 Ha and already handed over an area of ± 300 Ha) to remain planted with sugarcane.

17. Aset tetap (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU

- a. Sertifikat tanah:
- Seluas 5.729,08 Ha dengan status kepemilikan Hak Guna Usaha dengan sertifikat HGU No.1 Desa Sumber, Jatiraga, Pilangsari, Penyingkiran, Pasiripis, Iyawak dan Bantarjati tertanggal 26 Juli 1979.
 - Seluas 6.328,15 dengan status kepemilikan Hak Guna Usaha dengan Sertifikat HGU No.1 Kerticala dan Rajasinga tertanggal 27 Juli 1979.
 - Seluas ± 1.091 Ha dengan status kepemilikan Kerjasama Operasi dengan Perum Perhutani.

Sertifikat HGU habis masa berlakunya pada tahun 2004.

- b. Proses pembaruan sertifikat tidak dapat berjalan dengan lancar karena adanya hambatan dari pihak Departemen Kehutanan, namun mendapat dukungan dari BPN, Pemerintah Daerah Jawa Barat dan DPR-RI.
- c. Lahan tersebut terdiri dari areal untuk tanaman tebu seluas ± 8.309 Ha dan sisanya untuk prasarana jalan dan sarana lainnya, termasuk aliran sungai dan tanah marginal lain (lereng dan bukit) yang tidak bisa ditanami tebu.
- d. Tanah atau lahan yang tidak dapat ditanami tebu (pinggiran sungai dan lereng/bukit) telah dibudidayakan dengan menghutankan kembali dengan tanaman keras dan buah mangga. Penghutanan ini sudah sesuai dengan maksud dari Perum Perhutani untuk menjaga kelestarian alam sebagaimana yang selama ini dibahas secara bersama-sama. Disamping penanaman tebu, tanaman keras dan tanaman buah, di atas sebagian lahan tersebut telah pula dikembangkan tanaman *agro medicine* (tanaman bahan baku obat herbal) yang pada saat ini dan kedepannya mempunyai prospek sangat baik.

17. Fixed assets (continued)

Rights on Business Rights extention process (continued)

Rights on Business Rights extention process

- a. Land certificates:
- An area of 5,729.08 Ha with ownership status of Business Rights with HGU Certificate No. 1 Sumber Village, Jatiraga, Pilangsari, Penyingkiran, Pasiripis, Iyawak and Bantarjati dated 26 July 1979.
 - An area of 6,328.15 with ownership status of Business Rights with HGU Certificate No.1 Kerticala and Rajasinga dated 27 July 1979.
 - An area of ± 1,091 Ha with ownership status of Joint Operation with Perum Perhutani.

The HGU certificate expired in 2004.

- b. The certificate renewal process cannot run smoothly due to obstacles from the Department of Forestry, but has received support from National Land Agency, West Java Regional Government and Parliament of the Republic of Indonesia.
- c. The land consists of area for sugarcane in the area of ± 8,309 Ha and the rest for road infrastructure and other facilities, including river and other marginal land (slope and hill) that cannot be planted with sugarcane.
- d. Land that can not be planted with sugarcane (riverbanks and slopes/hills) has been cultivated with reforestation with hard plants and mango. This forestry is in accordance with the intent of Perum Perhutani to preserve nature as it has been discussed together. Besides the planting of sugarcane, hard plants and fruit crops, on the land has also been developed with *agro-medicine* plant (plant raw material of herbal medicine), which at the moment and the future has a very good prospect.

31 Desember 2020

31 December 2020

17. Aset tetap (lanjutan)

17. Fixed assets (continued)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

**Rights on Business Rights extention process
(continued)**

- e. Berkaitan dengan proses pembaharuan sertifikat HGU yang sedang berjalan pada saat itu, Menteri Kehutanan dengan surat No.S-205/Menhut-11/2004 tertanggal 18 Juni 2004, meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mencabut dan tidak memperpanjang sertifikat HGU dan menyerahkan kepada Departemen Kehutanan untuk dikembalikan menjadi kawasan hutan.
- f. Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Masyarakat sangat mendukung keberadaan lahan PG Jatitujuh yang telah nyata-nyata memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat sekitar, sehingga sangat keberatan apabila lahan tersebut tersebut ditarik kembali oleh pihak Kehutanan.
- g. Kunjungan kerja Komisi V DPR RI tanggal 10-11 Juli 2004.
Pada tanggal 10-11 Juli 2004, Anggota Komisi V DPR yang dipimpin oleh DR. HM Azwir Daimy Tara, MBA dengan 10 anggota dan 2 orang staf sekretariat Komisi V DPR RI melihat secara langsung kinerja PG Jatitujuh yang mengelola lahan HGU seluas kurang lebih 12.000 Ha dan lahan Kerjasama Operasional (KSO) seluas 1.091 Ha Setelah mendengar paparan dari Direksi PT PG Rajawali II dan *General Manager* PG Jatitujuh dilanjutkan dengan diskusi yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Wakil Petani sekitar PG, pengurus DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) Jawa Barat, staf PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Dari hasil diskusi seluruh anggota Komisi V dan peserta diskusi sependapat agar areal HGU maupun KSO tetap dikelola seperti semula demi terjaminnya kelangsungan produksi gula oleh PG Jatitujuh. PG Jatitujuh diharapkan tetap membangun kemitraan dengan petani dan masyarakat sekitar dengan prinsip saling menguntungkan.

- e. *In relation to the process of renewal of the current HGU certificate, the Minister of Forestry by letter No.S-205/Menhut-11/2004 dated 18 June 2004, requested the National Land Agency (BPN) to revoke and not renew the HGU certificate and submit to the Department of Forestry to be returned to forest areas.*
- f. *Local Government of West Java and Community strongly supports the existence of PG Jatitujuh land which has obviously provide benefits to the region and the surrounding community, so they have objection if the land is returned to the Forestry department.*
- g. *Working visit of House of Representatives Commission V on 10-11 July 2004.
On 10-11 July 2004, a member of Commission V of the House of Representatives led by DR. HM Azwir Daimy Tara, MBA with 10 members and 2 staffs of the secretariat of Commission V DPR RI saw directly the performance of PG Jatitujuh which manages HGU area of approximately 12,000 Ha and Land Cooperation Operations (KSO) of 1,091 Ha. After hearing the exposure from the Board of Directors of PT PG Rajawali II and General Manager of PG Jatitujuh followed by a discussion attended also by the Head of Plantation Office of West Java, Representative of Farmers surrounding of PG, DPP Board of Association of Smallholder Farmer (APTRI) West Java, staff of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
From the discussion of all members of Commission V and discussion participants agreed that the HGU and KSO areas will be managed as they were for the sustainability of sugar production by PG Jatitujuh. PG Jatitujuh is expected to keep having partnerships with farmers and surrounding communities on the principle of mutual benefit.*

17. Aset tetap (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

- h. Tindak lanjut hasil kunjungan DPR
Proses perpanjangan sertifikat HGU yang berakhir pada bulan Desember 2004 yang semula mengalami hambatan karena Departemen Kehutanan mengajukan pengembalian lahan, mulai diproses kembali dengan dukungan berbagai pihak termasuk anggota DPR.
- i. Pihak BPN tetap akan memperpanjang 2 (dua) sertifikat HGU tersebut, dengan pertimbangan bahwa permasalahan lahan tersebut bukan masalah yang menyangkut kepemilikan hak, tetapi semata-mata masalah yang menyangkut ganti rugi (Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional) dengan Surat No. 540.1-523 tanggal 16 Februari 1999). BPN juga menegaskan bahwa permasalahan lahan pengganti tersebut telah diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri Keuangan untuk dihibahkan kepada PT PG Rajawali II. Pelaksanaan hibah tersebut telah berkali-kali diajukan oleh PT Rajawali Nusantara (Persero), namun sampai saat ini belum dapat direalisasikan.
- j. Setelah dilakukan berbagai langkah koordinasi dan pembicaraan yang intensif dengan Menteri Kehutanan dengan dukungan dari berbagai instansi terkait di Pusat maupun di Daerah, Menteri Kehutanan dengan suratnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. S - 410/Menhut -VII/2004 tanggal 8 Oktober 2004 menyetujui perpanjangan HGU tersebut disertai persyaratan:
 1. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) membuat pernyataan kesanggupan secara tertulis di depan notaris untuk menyediakan calon lahan pengganti seluas 12.022,50 Ha di Propinsi Jawa Barat selambat-lambatnya 10 tahun (1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2014).
 2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melaporkan proses perolehan calon pengganti kepada Menteri Kehutanan secara berkala 3 (tiga) bulan.

17. Fixed assets (continued)

Rights on Business Rights extention process (continued)

- h. Follow-up of the results of the DPR visit
The process of extending the HGU certificate which ended in December 2004 which was initially has obstruction by the Ministry of Forestry which required to return the land, it began to be processed again with the support of various parties including members of the House of Representative.
- i. The BPN will continue to extend the 2 (two) HGU certificates, considering that the land issue is not a matter of ownership of rights, but merely a matter of compensation (Letter of the Head of the National Land Agency) by letter No. 540.1-523 dated 16 February 1999). BPN also confirmed that the replacement land issue has been decided by the Coordinating Minister for Economy and Finance to be granted to PT PG Rajawali II. The implementation of the grant has been repeatedly filed by PT Rajawali Nusantara (Persero), but until now it has not been able to be realized.
- j. Following various coordination and intensive discussions with the Minister of Forestry with support from various relevant agencies at the Central and Regional, the Minister of Forestry with his letter to the Head of the National Land Agency (BPN) No. S-410/Menhut-VII/2004 dated 8 October 2004 approved the extension of the HGU with the following requirements:
 1. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) shall make a statement of its ability in writing in front of a notary to provide a prospective replacement land of 12,022.50 Ha in West Java Province not later than 10 years (1 January 2005 until 31 December 2014).
 2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) reports the process of obtaining a prospective replacement land to the Minister of Forestry periodically every 3 (three) months.

17. Aset tetap (lanjutan)

Proses Perpanjangan HGU (lanjutan)

- k. Pernyataan kesanggupan di depan Notaris sebagaimana disebutkan dalam butir (a) di atas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) karena menyangkut masalah finansial yang sangat besar dan ketersediaan lahan. Sehingga memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat tentang keberadaan calon lahan pengganti dan persetujuan anggaran dan pemegang saham dan komisaris dalam kedudukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai BUMN.
- l. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui surat No. 280/RNI.01/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 yang ditunjukan kepada BPPN pusat menyatakan kesediaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) memenuhi ketentuan yang diajukan Departemen Kehutanan sebagai persyaratan perpanjangan HGU.
- m. Atas dasar persetujuan perpanjangan HGU dari Menteri Kehutanan tersebut dan setelah prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam bidang pertanahan dipenuhi, Kepala BPN Pusat telah menerbitkan SK Perpanjangan HGU atas tanah tersebut masing-masing:
 - 1. SK No. 152/HGU/BPN/2004 tanggal 8 November 2004 untuk tanah di Kabupaten Majalengka.
 - 2. SK No. 153/HGU/BPN/2004 tanggal 8 November 2004 untuk tanah di Kabupaten Indramayu.

Kedua SK tersebut berlaku untuk perpanjangan HGU selama 25 tahun sejak 31 Desember 2004, SK tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu dan telah terbit sertifikatnya, masing-masing HGU No. 00001 tanggal 7 Desember 2004 dan HGU No. 00002 tanggal 14 Desember 2004.

17. Fixed assets (continued)

**Rights on Business Rights extention process
(continued)**

- k. The statement of the ability before the Notary as mentioned in point (a) above has not been fully implemented by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) because it involves a very large financial problem and the availability of land. So it requires coordination with the Governor of West Java about the existence of prospective replacement land candidates and approval of the budget and shareholders and commissioners in the position of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as State-Owned Company.
- l. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) through letter No. 280/RNI.01/X/2004 dated 14 October 2004 which was shown to The Indonesian Bank Restructuring Agency stated that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) complied with the provisions of the Ministry of Forestry as a condition of extension of HGU.
- m. On the basis of approval of the extension of HGU from the Minister of Forestry and after the applicable procedures and requirements in the field of land are met, the Head of the Central BPN has issued a Decree of HGU Extension on the respective land:
 - 1. Decision letter No. 152/HGU/BPN/2004 dated 8 November 2004 for land in Majalengka Regency.
 - 2. Decision letter No. 153/HGU/BPN/2004 dated 8 November 2004 for land in Indramayu Regency.

Both decisions were valid to the extension of HGU for 25 years since 31 December 2004, the decree has been registered in the Land Office of Majalengka Regency and Regency of Indramayu and has been issued their respective certificates, No. 00001 dated 7 December 2004 and HGU No. 00002 dated 14 December 2004 respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

17. Aset tetap (lanjutan)

Terbitnya Sertifikat HGU

- a. Dalam upaya untuk dapat dilaksanakannya hibah lahan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan peng arahan. Dalam RUPS tanggal 7 Januari 2005, Pemegang Saham akan mengupayakan penyelesaian masalah lahan tersebut dengan instansi terkait.
- b. Disamping itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) juga menyampaikan permohonan kepada Menko Perekonomian dengan surat No.32/RNI.01/II/05 tanggal 7 Februari 2005 agar Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri Keuangan tentang hibah dapat dilaksanakan.
- c. Atas dasar Surat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Menko Perekonomian melalui Sekretaris Menteri dengan Surat No. S-83/SES.M.EKON/03/2005 tanggal 9 Maret 2005 menginstruksikan kepada Menteri BUMN agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.
- d. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam penerbitan sertifikat HGU yang baru, oleh karena PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) belum menyampaikan "Pernyataan Tertulis" tentang kesediaan menyediakan lahan pengganti, maka Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dengan Surat No. S.109NII-PW/2005 tanggal 22 Februari 2005 memberikan "Peringatan I" kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) agar segera menyampaikan "Pernyataan Tertulis".
- e. Berkaitan dengan peringatan I tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menyampaikan jawaban kepada Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dengan Surat No. 47/RNI.01/III/05 tanggal 3 Maret 2005 yang intinya belum disampaiakannya Pernyataan Tertulis tersebut, semata-mata karena masih berkonsultasi dengan instansi-instansi terkait maupun Menteri BUMN selaku Pemegang Saham.

17. Fixed assets (continued)

The issuance of Business Rights Certificate

- a. In an effort to enable the grant of land, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) has submitted to Shareholders for a briefing. In the Shareholders General Meeting dated 7 January 2005, Shareholders will seek to resolve the land issue with the relevant agencies.
- b. In addition, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) also submitted an application to the Coordinating Minister for Economy Affairs with letter No.32/RNI.01/II/05 dated 7 February 2005 in order that the Decree of the Coordinating Minister for Economy Affairs and Minister of Finance on grant can be implemented.
- c. Based on Letter of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Coordinating Minister of Economy through Secretary of Minister by letter No. S-83/SES.M.EKON/03/2005 dated 9 March 2005 instructed the Minister of SOE to take immediate steps in order to solve the problem.
- d. In accordance with the requirements stipulated by the Minister of Forestry in the issuance of the new HGU certificate, since PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) has not submitted a "Written Statement" concerning the willingness to provide replacement land, the Head of the Planology Agency of the Ministry of Forestry in his letter No. S.109NII-PW/2005 dated 22 February 2005 gave "First Warning" to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) to promptly submit "Written Statement".
- e. In connection with the first warning, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) conveyed the answer to the Head of Planology Agency of the Ministry of Forestry in his letter No. 47/RNI.01/III/05 dated 3 March 2005 which essentially has not submitted the Written Statement, solely because it was still in consultation with the related agencies and the Minister of SOEs as the Shareholder.

17. Aset tetap (lanjutan)

Terbitnya Sertifikat HGU (lanjutan)

Sampai saat itu Departemen Kehutanan tetap meminta agar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menyerahkan lahan pengganti dengan luas yang sama dan sama sekali tidak memberikan peluang untuk dilaksanakannya Penyertaan Modal Pemerintah atas Lahan HGU PG Jatitujuh sesuai Keputusan Menko Ekuin dan Menteri Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPS tanggal 30 Januari 2007, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan Surat No. 155/RNI.01N/07 tanggal 30 Mei 2007 telah menyampaikan usulan kepada Menteri BUMN tentang rencana penyelesaian lahan HGU PG Jatitujuh dengan pola penyelesaian sebagai berikut :

1. Sebagai penambahan penyertaan modal Negara dalam PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagaimana persetujuan Menteri Ekuin No. S-613/M.EKUIIN/1989 tanggal 18 Desember 1989 atas usulan Menteri Keuangan dengan Surat No. S-1204/MK.013/1989 tanggal 28 November 1989.
2. Dengan Program Penghijauan areal hutan kritis milik Departemen Kehutanan atau Pemerintah Daerah Jawa Barat seluas 12.000 Ha.

Usulan kepada Menteri BUMN tersebut masih belum mendapat persetujuan dan/atau arahan, sehingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) belum dapat melakukan pendekatan dengan pihak Departemen Kehutanan, karena menyangkut aspek hukum maupun finansial yang sangat besar yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pemegang Saham.

Tahun 2008 telah dibentuk tim survei Rencana Pengadaan Lahan Pengganti Tanah HGU PG Jatitujuh sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 422/RNI.01.1/Tim-Hgu/IV/08 tanggal 11 Juni 2008.

17. Fixed assets (continued)

**The issuance of Business Rights Certificate
(continued)**

Until then, the Forestry Department has requested that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) handed over replacement land in the same width and did not at all provide an opportunity for the implementation of Government Capital Investment on HGU PG Jatitujuh Land according to the Decree of the Coordinating Minister for Economy and Finance.

As a follow up to the resolutions of the GMS on 30 January 2007, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) with letter No. 155/RNI.01N/07 dated 30 May 2007 has submitted a proposal to the Minister of State-Owned Enterprises regarding the proposed settlement of HGU PG Jatitujuh land with the pattern of completion as follows:

1. In addition to the participation of State capital in PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as approved by the Coordinating Minister of Economy Affairs No. S-613/M.EKUIIN/1989 dated 18 December 1989 on the proposal of the Minister of Finance with letter No. S-1204/MK.013/1989 dated 28 November 1989.
2. With reforestation program of critical forest area owned by Ministry of Forestry or Local Government of West Java in the area of 12,000 Ha.

The proposal to the Minister of State-Owned Enterprises has not been approved and/or directed so that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) has not been able to approach the Ministry of Forestry, because it involves the big legal and financial aspects of which must be approved by the Shareholders.

In 2008, a survey team of Acquisition Land replacement of HGU PG Jatitujuh has been formed in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Rajawali Nusantara Indonesia. (Persero) No. 422/RNI.01.1/Tim-Hgu/IV/08 dated 11 June 2008.

17. Aset tetap (lanjutan)

Terbitnya Sertifikat HGU (lanjutan)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2009 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. RIS 12/DA.MBU/2009 bahwa adanya persetujuan penyediaan lahan pengganti kawasan hutan yang telah dialih fungsikan sebagai HGU PG Jatitujuh seluas 12.000 Ha di Jawa Barat secara bertahap sampai akhir tahun 2014.

Kementerian BUMN secara prinsip menyetujui penyelesaian masalah PT RNI melalui pola kerjasama secara *Bussiness to Bussiness*, dimana lahan cadangan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dapat digunakan untuk mengganti kewajiban PT PG Rajawali II dan untuk merealisasikan kerjasama tersebut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) pada tanggal 27 Juli 2009 telah menandatangani MoU No. NKIIV.02/260NII/2009 dan No. 30/MoU/RNI.01NII/09 yang menyatakan telah dilakukan perubahan pada tanggal 25 Januari 2010.

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) melalui surat Direktur Utama No. SBN.3/2990/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui lahan seluas ± 5.250 Ha untuk dikerjasamakan sebagai lahan pengganti HGU Jatitujuh. Lahan tersebut berdasarkan penilaian sementara oleh Tim Perhutani secara teknis layak untuk dijadikan sebagai lahan pengganti HGU Jatitujuh.

Progres sampai dengan 31 Desember 2014

Sesuai hasil rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Aset Komisi VI DPR Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Komisi VI Gedung Nusantara DPR RI, merumuskan bahwa proses rencana pembelian lahan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk kepentingan penggantian lahan HGU PG Jatitujuh diminta untuk dihentikan.

17. Fixed assets (continued)

**The issuance of Business Rights Certificate
(continued)**

Based on the Minutes of Shareholders' General Meeting on Ratification of the Company's Working Plan and 2009 Budget of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. RIS 12/DA.MBU/2009 that the approval of substitution of forest area that has been converted function as HGU PG Jatitujuh area of 12,000 Ha in West Java gradually until the end of 2014.

The Ministry of State-Owned Enterprises in principle approved the settlement of PT RNI issues through the cooperation pattern of *Bussiness to Bussiness*, where the reserved land of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) can be used to replace PT PG Rajawali II obligations and to realize the cooperation of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) on 27 July 2009 has signed MoU No. NKIIV.02/260NII/2009 and No. 30/MoU/RNI.01NII/09 stated that the change was made on 25 January 2010.

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) through the letter of President Director No. SBN.3/2990/X/2009 dated 6 October 2009 has approved an area of ± 5,250 Ha for cooperation as a replacement land for HGU Jatitujuh. The land is based on a temporary assessment by Perhutani Team technically feasible to be used as replacement land for HGU Jatitujuh.

Progress until 31 December 2014

In accordance with the result of the hearing with the Committee of Asset Work Committe VI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia on 15 September 2014 held at the Meeting Room of Commission VI of the Nusantara Building of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, formulated that the process of land purchase plan by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) from PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the purpose of replacement of land HGU PG Jatitujuh was requested to be stopped.

31 Desember 2020

31 December 2020

17. Aset tetap (lanjutan)

17. Fixed assets (continued)

Progres sampai dengan 31 Desember 2020

Progress until 31 December 2020

Proses rencana pembelian lahan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dari PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk kepentingan penggantian lahan HGU PG Jatitujuh belum ada kemajuan secara signifikan sampai dengan saat laporan keuangan ini diterbitkan.

The process of land purchase plan by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) from PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) for the purpose of replacement of HGU PG Jatitujuh land no significant progress until the time of this financial report is published.

18. Beban panen dua tahun yang akan datang

18. Future two years harvest expense

Akun ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik gula yang menjadi beban panen dua tahun yang akan datang (dua atau lebih) yang terdiri atas biaya produksi tanaman tebu sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 yang beban panen dua tahun yang akan datang (dua atau lebih) yang terdiri dari :

This account represents costs incurred by sugar mills subject to future two-years harvest (two or more) expense comprising the costs of producing sugarcane up to 31 December 2020 and 2019 with future two-years' harvest expense (two or more) consisting of :

	2020	2019	
Biaya produksi tanaman tebu	21.545.363.060	21.392.567.640	Sugarcane production cost
Jumlah beban panen dua tahun yang akan datang	21.545.363.060	21.392.567.640	Total future two years' harvest expense

31 Desember 2020

31 December 2020

19. Properti investasi

Akun ini merupakan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku properti investasi dengan rincian sebagai berikut :

19. Investment property

This account represents the cost, accumulated depreciation and book value of investment property with details as follows :

2020						
	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 2020	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	3.197.707.946.331	644.113.200.000	-	-	3.841.821.146.331	Land
Bangunan	40.231.331.293	-	-	24.912.417.977	65.143.749.270	Buildings
Jumlah	3.237.939.277.624	644.113.200.000	-	24.912.417.977	3.906.964.895.601	Subtotal
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	31.513.481.910	1.741.503.033	-	15.638.961.910	48.893.946.854	Buildings
Jumlah	31.513.481.910	1.741.503.033	-	15.638.961.910	48.893.946.854	Total
Nilai buku	3.206.425.795.714				3.858.070.948.747	Book value

2019						
	1 Januari/ January 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 2019	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	3.212.532.713.076	57.421.005.855	71.966.772.600	-	3.197.707.946.331	Land
Bangunan	39.976.785.839	254.545.454	-	-	40.231.331.293	Buildings
Jumlah	3.252.509.498.915	57.675.551.309	71.966.772.600	-	3.237.939.277.624	Subtotal
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan	30.223.379.803	1.290.102.107	-	-	31.513.481.910	Buildings
Jumlah	30.223.379.803	1.290.102.107	-	-	31.513.481.910	Total
Nilai buku	3.222.286.119.112				3.206.425.795.714	Book value

Nilai properti investasi merupakan tanah dan bangunan milik Perusahaan yang terdapat di beberapa daerah. Nilai tersebut juga termasuk aset milik PT PG Rajawali II yang merupakan hak tanah dan bangunan Gedung Gula yang berlokasi di Jl. H. Fachrudin No. 14, Jakarta, dimana kepemilikan atas aset tersebut diberikan kepada 4 (empat) perusahaan yaitu PT PG Rajawali II, PTPN IX (Persero), PTPN X (Persero) dan PTPN XI (Persero) dengan porsi kepemilikan yang sama masing-masing sebesar 25% atas nilai tanah dan bangunan Gedung Gula.

The value of investment property represents the Company's land and buildings located in several areas. The value also includes assets owned by PT PG Rajawali II which is the right of land and building of Sugar Building located on Jl. H. Fachrudin No. 14, Jakarta, where the ownership of such assets is given to 4 (four) companies namely PT PG Rajawali II, PTPN IX (Persero), PTPN X (Persero) and PTPN XI (Persero) with the same ownership at 25% of the value of land and building of Sugar Building.

31 Desember 2020

31 December 2020

19. Properti investasi (lanjutan)

Berdasarkan surat pernyataan direksi tentang pencatatan properti investasi berupa tanah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak dalam penyajian nilai properti investasi pada laporan keuangan tahun buku 2020 menyatakan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menyajikan nilai wajar atas properti investasi berupa tanah pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dicatat sama dengan nilai wajarnya pada tahun buku 2019.

Adapun pertimbangan manajemen menyajikan nilai wajar properti investasi berupa tanah pada laporan keuangan tahun buku 2020 terhadap entitas tersebut masih sama dengan nilai wajar pada tahun buku 2019 adalah karena selama tahun 2020 belum terealisasinya pengembangan yang signifikan terhadap properti investasi tersebut dan mempengaruhi kenaikan nilai properti investasi.

20. Aset non operasional

Nilai buku aset tetap mesin dan instalasi PT PG Rajawali II merupakan aset tetap mesin-mesin yang tidak dioperasikan, dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019	
Nilai perolehan mesin	448.554.328.077	361.225.814.332	Acquisition cost of machine
Penyisihan aset non operasional	(196.822.763.987)	(215.391.773.022)	Allowance for non-operating assets
Nilai buku	251.731.564.090	145.834.041.310	Book value

Aset non operasional merupakan nilai bersih atas mesin pabrik dan bangunan unit bisnis Mitra Cane Top yang sudah tidak beroperasi lagi dan dialihkan ke PG Jatitujuh. Penghentian operasional unit bisnis pakan ternak Mitra Cane Top berdasarkan keputusan Direksi No XX SURKP/UM/010.012A tanggal 1 November 2010.

Mesin Pabrik Gula Subang dialihkan ke unit PG Jatitujuh. Pengalihan tersebut berdasarkan Keputusan Direksi No. 10.1/SK/RW-II.01/V/2018 tentang Penggabungan PG Subang ke PG Jatitujuh menjadi Unit Pabrik Gula Hak Guna Usaha (Jatitujuh dan Subang) tanggal 17 Mei 2018.

19. Investment property (continued)

Based on the directors' statement regarding the recording of investment property in the form of land of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its subsidiaries in the presentation of investment property values in the financial statements of 2020 declare that PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its subsidiaries for the year ended 31 December 2020 presents the fair value of investment property in the form of land in PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and its subsidiaries recorded the same as its fair value in fiscal year 2019.

As for management's consideration, presenting the fair value of investment property in the form of land in the financial statements of 2020 for the entity is still the same as the fair value in fiscal year 2019, because during 2020 significant developments have not been realized for the investment property and affected the increase in investment property values.

20. Non-operational assets

The book value of machinery and installation assets of PT PG Rajawali II represent fixed asset of non-operational machinery, with details as follows :

Non-operating assets represent the net value of the factory machinery and the building of the business unit of Mitra Cane Top that is no longer in operations and transferred to PG Jatitujuh. The termination of operational business unit of Mitra Cane Top's cattle feed business based on Board of Directors decision No. XX SURKP/UM/010.012A dated 1 November 2010.

Subang Sugar Factory Machine which was transferred to the Jatitujuh PG unit. The transfer was based on the decision of the Company's Board Directors No. 10.1/SK/RW-II.01/V/2018 concerning the merger of PG Subang to PG Jatitujuh to become a Sugar Factory unit for Business Use Right (Jatitujuh and Subang) dated 17 May 2018.

31 Desember 2020

31 December 2020

20. Aset non operasional (lanjutan)

Mesin pabrik gula Karangsuwung yang sudah tidak beroperasi lagi, dan dialihkan ke unit PG Sindang Laut. Penghentian atas mesin operasional unit PG. Karangsuwung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Nomor :012/SK/RW-II.01/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 dengan nilai bersih sebesar Rp 29.682.411.806. Posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp 32.018.009.864 sehubungan dengan dijualnya aset turbin ke PG Candi Baru.

Mesin pabrik gula Sindanglaut yang sudah tidak beroperasi lagi dialihkan ke unit PG Tersana Baru. Penghentian atas mesin operasional PG Sindanglaut berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan No. 06/SK/RW-II.01/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai bersih sebesar Rp 78.969.049.492.

Pada tahun 2020, Mesin pabrik gula Sindanglaut yang sudah tidak beroperasi lagi dialihkan ke unit PG Tersana Baru. Pengalihan tersebut berdasarkan Keputusan Direksi No. 06/SK/RW-II.01/III/2020 tentang Beku Operasi Pabrik Gula Sindang Laut pada Musim Giling 2020 tanggal 9 Maret 2020 dan Keputusan Direksi No. 07/SK/RW-II.01/III/2020 tentang Pabrik Gula Sindang Laut sebagai Rayon dari PG Tersana Baru tanggal 17 Maret 2020.

21. Uang Jaminan

Akun ini merupakan uang jaminan kerjasama distribusi alat kesehatan, disamping penggunaan jasa pihak ketiga berupa telepon, gas, air minum, PLN, cukai alkohol dan arak, jaminan fasilitas kredit serta *Corporate Members* (keanggotaan) Golf di Finna Golf Surabaya, dan bank garansi PT GIEB Indonesia. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 2.240.259.906 dan Rp 3.529.491.709.

20. Non-operational assets (continued)

The Karangsuwung sugar factory machines are no longer operating, and have been transferred to the Sindang Laut PG unit. Termination of PG unit operational machines. Karangsuwung based on the Decree of the Directors of the Company Number: 012/SK/RW-II.01/V/2015 dated 5 May 2015 with a net value of Rp 29,682,411,806. The position as of 31 December 2018 was Rp 32,018,009,864 in connection with the sale of turbine assets to PG Candi Baru.

The machine for the Sindanglaut sugar factory, which was no longer in operation, was transferred to the Tersana Baru PG unit. Termination of the PG Sindanglaut operational machine based on the decision of the Board of Directors of the Company No. 06/SK/RW-II.01/III/2020 dated 9 March 2020 with a net value of Rp 78,969,049,492.

In 2020, the machine of the Sindanglaut sugar factory, which is no longer operating, will be transferred to the PG Tersana Baru unit. The transfer is based on the Decree of the Board of Directors No. 06/SK/RW-II.01/III/2020 concerning Freeze Operation of the Sindang Laut Sugar Factory during the 2020 Milling Season, 9 March 2020 and Decree of the Board of Directors No. 07/SK/RW-II.01/III/2020 concerning Sindang Laut Sugar Factory as Rayon from PG Tersana Baru on 17 March 2020.

21. Security deposits

This account represents security deposit for guarantee distribution of medical devices The third-party deposit represents a security deposit for the use of services in the form of telephone, gas, drinking water, electricity, customs duty of alcohol and arrack, credit facility and Corporate Members (Golf Membership) at Finna Golf Surabaya, and bank guarantee of PT GIEB Indonesia. The balance as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 2,240,259,906 and Rp 3,529,491,709, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

22. Aset tidak berwujud

22. Intangible assets

	2020	2019	
Selisih lebih nilai perolehan terhadap nilai wajar - akuisisi saham PT Sumber Wangi Alam	30.770.279.590	30.770.279.590	The excess of acquisition over fair value – stock acquisition PT Sumber Wangi Alam
Hak atas tanah (HGU)	14.370.782.755	14.233.706.155	Land rights
Biaya pengembangan	13.259.052.727	15.112.929.283	Development costs
Perangkat lunak IT	6.797.604.417	6.013.005.249	Software
Lisensi Microsoft	3.424.018.636	3.424.018.636	Microsoft Licence
Sertifikasi HGB dan lain-lain	38.609.225	622.585.653	Building rights certificate and others
Goodwill	-	665.943.251	Goodwill
Sub jumlah	68.660.347.350	70.842.467.817	Subtotal
Akumulasi amortisasi	(16.828.164.244)	(15.465.384.992)	Accumulated amortization
Jumlah aset tidak berwujud	51.832.183.106	55.377.082.825	Total intangible assets

Pada tahun 2019 selisih perubahan nilai buku terhadap nilai wajar akuisisi saham milik PT Sumber Wangi Alam atas PT Laras Astra Kartika merupakan selisih perubahan nilai buku aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai selisih lebih nilai buku terhadap nilai wajar. Penilaian atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dilakukan oleh manajemen, dengan hasil sebagai berikut:

In 2019, The difference between changes in book value to the fair value of the acquisition of shares owned by PT Sumber Wangi Alam on PT Laras Astra Kartika is the difference in the book value changes of assets and liabilities that can be identified are recognized as differences in book value over fair value. An assessment of the fair value of identifiable assets and liabilities is carried out by management, as follows:

	2020	2019	
Aset lancar	6.799.888.576	6.799.888.576	Current assets
Aset tidak lancar	40.581.211.323	40.581.211.323	Non-current assets
Sub jumlah	47.381.099.899	47.381.099.899	Subtotal
Liabilitas lancar	5.424.418.716	5.424.418.716	Current liabilities
Liabilitas tidak lancar	226.960.773	226.960.773	Non-current liabilities
Sub jumlah	5.651.379.489	5.651.379.489	Subtotal
Aset bersih	(41.729.720.410)	(41.729.720.410)	Net asset
Nilai wajar	72.500.000.000	72.500.000.000	Fair value
Selisih lebih nilai buku terhadap nilai wajar	30.770.279.590	30.770.279.590	The excess of book value over fair value

Manajemen berpendapat tidak terdapat penurunan nilai atas Goodwill sehubungan dengan transaksi akuisisi saham PT Laras Astra Kartika milik PT Sumber Wangi Alam oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). PT Laras Astra Kartika sampai saat ini terus melakukan investasi atas tanaman kebun dan lahan yang diharapkan nilai ekuitas PT Laras Astra Kartika akan meningkat dimasa yang akan datang.

Management believes that there is no impairment in value of Goodwill regarding with the acquisition of PT Laras Astra Kartika shares owned by PT Sumber Wangi Alam by PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). PT Laras Astra Kartika continues to invest in garden plants and land, so it is expected that the equity value of PT Laras Astra Kartika will increase in the future.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

22. Aset tidak berwujud (lanjutan)

22. Intangible assets (continued)

Biaya pengembangan piranti lunak merupakan biaya pengembangan IT di entitas anak yaitu PT Rajawali Nusindo.

Software development costs represents the cost of developing IT in subsidiaries that is PT Rajawali Nusindo.

Hak atas tanah (HGU) merupakan biaya pengurusan HGU di entitas anak PT PG Rajawali II yang merupakan pengurusan yang kedua dan tidak bisa dikapitalisasi.

Building rights (HGU) represents the cost of obtaining HGU in a subsidiary of PT PG Rajawali II which is the second arrangement and cannot be capitalized.

23. Aset lain-lain

23. Other assets

	2020	2019	
Investasi mesin – PT RNI	24.141.010.000	24.141.010.000	Machine investment – PT RNI
Aset Kerjasama Operasi laboratorium PT Rajawali Nusindo	15.334.679.083	11.794.154.890	Laboratory cooperation of PT Rajawali Nusindo
Biaya investasi tanaman PT Mitra Kerinci	12.054.637.159	11.470.813.377	Plantation investment cost of PT Mitra Kerinci
Bank Garansi	6.832.978.584	10.505.444.328	Guarantee Bank
Aset non produktif PG RW II dan PT RW I	2.883.337.431	-	Non-productive assets of PG RW II and PT RW I
Investasi Konsultan RJPP	1.877.804.040	-	Investment Consultants RJPP
Biaya pengembangan PT RNI Holding	1.732.326.934	1.732.326.935	Development cost of PT RNI Holding
Transformasi Bisnis	1.203.931.186	549.845.882	Business transformation
Aset Non Operasional	630.954.784	-	Non Operational Assets
Investasi sawah	516.909.100	-	Field investment
Biaya Hak Guna Usaha	438.658.886	438.658.886	Business rights cost
Investasi pada PT Rajawali Citramass	1.000.000	-	Investments in PT Rajawali Citramass
Investasi pada PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	1.000.000	-	Investments in PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
Hak Penggunaan Lahan PT Rajawali Liki Energi	-	17.270.000.000	Rights on land of PT Rajawali Liki Energi
Uang muka penggantian lahan HGU	-	12.427.909.300	Advance of replacement HGU land
Biaya pengembangan PT Phapros Tbk	-	-	Development cost of PT Phapros Tbk
Biaya pengalihan mesin PT Mitra Rajawali Banjaran	-	652.572.541	Machine transfer costs of PT Mitra Rajawali Banjaran
Lain-lain	32.939.469.687	40.675.716.068	Others
Sub jumlah	100.588.696.874	131.658.452.207	Subtotal
Akumulasi amortisasi	(17.480.301.501)	(14.052.454.290)	Accumulated amortization
Jumlah aset lain-lain	83.108.395.373	117.605.997.917	Total other assets

31 Desember 2020

31 December 2020

**24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang
diklasifikasikan aset dalam penghentian**

**a. Aset tidak lancar yang diklasifikasikan
sebagai aset dalam penghentian**

Posisi aset dan liabilitas PT Rajawali Gloves

Berdasarkan rapat umum pemegang saham pada tanggal 21 Desember 2011 yang telah dituangkan dalam akta No. 3 tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan SH MKn notaris di Jakarta diantaranya berisi pembubaran PT Kebun Grati Agung, penunjukan likuidator, dan persetujuan atas kerugian PT Kebun Grati Agung akan ditanggung oleh PT PG Rajawali I. RUPS-LB tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dengan No. AHU-AH.01.10-02409 Tanggal 24 Januari 2012, dan telah diumumkan dalam 2 surat kabar tanggal 12 Januari 2012.

PT Rajawali Gloves berdasarkan Surat Permohonan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 selaku pemegang saham terbesar Perusahaan untuk meminta persetujuan atas perubahan pola divestasi saham dengan cara dilikuidasi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan pemegang saham sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Sampai dengan 31 Desember 2016, PT Rajawali Gloves masih dalam tahap proses likuidasi.

PT Rajawali Gloves merupakan entitas yang dihentikan usahanya dengan akun-akunnya yang disajikan terpisah dalam Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan PSAK 58 (Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan).

**24. Non current assets and liabilities classified as
discontinued assets**

**a. Non current assets and classified as
discontinued assets**

**Asset and liability position of PT Rajawali
Gloves**

Based on the general meeting of shareholders on 21 December 2011 which has been documented in the deed No. 3 dated 23 December 2011 made in front of Nanda Fauz Iwan SH MKn notary in Jakarta regarding the dissolution of PT Kebun Grati Agung, liquidator appointment, and approval for loss of PT Kebun Grati Agung will be borne by PT PG Rajawali I. The Extraordinary Shareholders General Meeting has been notified to the Minister of Justice with No. AHU-AH.01.10-02409 dated 24 January 2012, and was published in 2 newspapers dated 12 January 2012.

PT Rajawali Gloves pursuant to the application letter of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 dated 17 December 2009 as the Company's largest shareholder to seek approval of changes in the pattern of the shares divestment by liquidation to the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) of the Republic of Indonesia. This indicates that shareholders no longer have the intention to continue their business activities. As of 31 December 2016, PT Rajawali Gloves is still in the process of liquidation process.

PT Rajawali Gloves is a discontinued entity whose accounts are presented separately in the Consolidated Financial Statements in accordance with SFAS 58 (Non-current assets held for sale and discontinued operations).

31 Desember 2020

31 December 2020

24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang diklasifikasikan aset dalam penghentian (lanjutan)	24. Non current assets and liabilities classified as discontinued assets (continued)		
a. Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian (lanjutan)	a. Non current assets and classified as discontinued assets (continued)		
Posisi aset dan liabilitas PT Rajawali Gloves (lanjutan)	Asset and liability position of PT Rajawali Gloves (continued)		
	2020	2019	
Laporan posisi keuangan PT Rajawali Gloves	Statements of financial position PT Rajawali Gloves		
Aset tetap	431.725.891	431.725.891	Fixed assets
Jumlah aset tidak lancar	431.725.891	431.725.891	Total non-current assets
Jumlah aset	431.725.891	431.725.891	Total assets
Jumlah aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian	431.725.891	431.725.891	The amount of non-current assets classified as discontinued asset in termination
b. Liabilitas tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai liabilitas dalam penghentian	b. Non current liabilities and classified as discontinued liabilities		
	2020	2019	
Utang usaha	18.433.750	18.433.750	Trade payables
Utang pajak	15.000.000	15.000.000	Tax payables
Biaya yang masih harus dibayar	5.077.636	5.077.636	Accrued expenses
Jumlah liabilitas lancar	38.511.386	38.511.386	Total current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dalam penghentian	38.511.386	38.511.386	Non current liabilities classified as discontinued assets
c. Investasi tersedia untuk dijual	c. Available for sales investments		
	2020	2019	
PT Sawit Menang Sejahtera	15.000.000.000	15.000.000.000	PT Sawit Menang Sejahtera
PT Rajawali Gloves Corporation	431.725.891	431.725.891	PT Rajawali Gloves Corporation
Jumlah investasi tersedia untuk dijual	15.431.725.891	15.431.725.891	Total available for sales security

31 Desember 2020

31 December 2020

**24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang
diklasifikasikan aset dalam penghentian (lanjutan)**

c. Investasi tersedia untuk dijual (lanjutan)

Pada tanggal 1 Mei 2011, PT Perkebunan Mitra Ogan melakukan penggabungan usaha berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan antara Perusahaan dengan PT Sawit Menang Sejahtera yang diaktakan dengan Akta Notaris Anwar Junaidi, SH No. 63 tanggal 18 April 2011, masing-masing pihak sepakat untuk selanjutnya mengelola, mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta menyediakan dana permodalan yang diperlukan Perusahaan. Untuk menindaklanjuti Perjanjian Usaha Patungan tersebut, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sawit Menang Sejahtera yang diaktakan dengan Akta Notaris Anwar Junaidi, SH No. 61 tanggal 18 April 2011 diantaranya telah memutuskan dan menyetujui Pengeluaran Saham dalam simpanan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 15.000.000.0000 (lima belas milyar rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Perkebunan Mitra Ogan.

Sesuai Risalah Hasil Pertemuan Para Pemegang Saham PT Sawit Menang Sejahtera pada tanggal 6 Juli 2012 para pemegang saham menyepakati :

1. Kerjasama antara Bapak Dedek Pranata dengan PT Perkebunan Mitra Ogan dalam pengelolaan PT Sawit Menang Sejahtera sepakat untuk diakhiri.
2. Seluruh saham PT Perkebunan Mitra Ogan dikembalikan kepada Bapak Dedek Pranata dengan harga sesuai hasil penilaian *Appraisal Independent*.

Sehubungan dengan rencana pelepasan saham milik PT Perkebunan Mitra Ogan dengan nilai nominal sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar), telah dilakukan kajian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan atas nilai pasar tanah seluas 5.300 Ha berikut tanaman kelapa sawit (kebun inti dan plasma), bangunan, infrastruktur, kendaraan, alat berat, dan peralatan kantor di desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

**24. Non current assets and liabilities classified as
discontinued assets (continued)**

c. Available for sales investments (continued)

On 1 May 2011, PT Perkebunan Mitra Ogan entered into a merger based on a Joint Venture Agreement between the Company and PT Sawit Menang Sejahtera which was notarized by Deed of Anwar Junaidi, SH No. 63 dated 18 April 2011, each party agreed to further manage, develop and improve their performance and provide capital funding required by the Company. To follow up the Joint Venture Agreement, an Extraordinary General Shareholders Meeting of PT Sawit Menang Sejahtera was conducted which was notarized by Notarial Deed of Anwar Junaidi, SH No. 61 dated 18 April 2011 of which has decided and approved the issue of 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of Rp 15,000,000,000 (fifteen billion rupiahs) which is entirely subscribed by PT Perkebunan Mitra Ogan.

According to the Minutes of Meeting of Shareholders of PT Sawit Menang Sejahtera on 6 July 2012 the shareholders agreed :

1. Cooperation between Mr. Dedek Pranata and PT Perkebunan Mitra Ogan in the management of PT Sawit Menang Sejahtera agreed to be terminated.
2. All shares of PT Perkebunan Mitra Ogan Plantation are returned to Mr. Dedek Pranata at a price as per Independent Appraisal valuation.

In relation to the plan to release the shares owned by PT Perkebunan Mitra Ogan with a nominal value amounting to Rp 15,000,000,000 (fifteen billion), an assessment has been made by Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan, Public Service Assessment Office (KJPP) for the market value of 5,300 Ha Oil palm plantation (core and plasma plantations), buildings, infrastructure, vehicles, heavy equipment and office equipment in Sungai Menang village, Sungai Menang subdistrict, Ogan Komering Ilir district, South Sumatra.

31 Desember 2020

31 December 2020

**24. Aset dan liabilitas tidak lancar yang
diklasifikasikan aset dalam penghentian (lanjutan)**

c. Investasi tersedia untuk dijual (lanjutan)

Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai pasar atau estimasi sejumlah uang yang diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau kewajiban pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang beminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan. Penilaian aset dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 dan sesuai laporan dari KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan dan Rekan No. 035-2014/LP/SIG tanggal 3 April 2014 diperoleh perhitungan analisis nilai pasar sebesar Rp 48.032.830.000.

Berdasarkan nilai pasar tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa rencana pelepasan saham PT Perkebunan Mitra Ogan pada PT Sawit Menang Sejahtera sebesar Rp 15.000.000.000 dapat terealisasi. Namun sampai dengan tanggal laporan, proses pelepasan saham pada PT Sawit Menang Sejahtera belum selesai. Berdasarkan pernyataan Manajemen per 31 Desember 2018, Manajemen berkomitmen untuk tetap melepas investasi pada PT Sawit Menang Sejahtera meskipun terjadi kemunduran dalam realisasinya.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Januari 2017, RUPS menyetujui rencana penjualan aset tanah dan gedung kantor direksi dan sesuai surat pembayaran kewajiban PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. DIR-MO/RNI/243/VIII/2017, maka perusahaan melepas aset tanah dan penjualan gedung sebesar Rp 79.970.100.000 sesuai hasil penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

**24. Non current assets and liabilities classified as
discontinued assets (continued)**

c. Available for sales investments (continued)

The basis of the valuation used is the market value or the estimated amount of money derived from the exchange of an asset or liability on the date of valuation, between the buyer who is interested in buying with the seller who is interested in selling, in a non-binding transaction. Asset valuation was conducted on 22 March 2014 and according to report from KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan and Partners No. 035-2014/LP/SIG dated 3 April 2014 obtained the calculation of market value analysis amounting to Rp 48,032,830,000.

Based on the market value, management believes that the plan to release the shares of PT Perkebunan Mitra Ogan in PT Sawit Menang Sejahtera amounting to Rp 15,000,000,000 can be realized. But until the report date, the share release process at PT Sawit Menang Sejahtera has not been completed. Based on Management's statement as of 31 December 2018, Management is committed to continue releasing investment in PT Sawit Menang Sejahtera despite a setback in its realization.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders dated 24 January, 2017, the GMS approved the plan to sell the assets of the land and office buildings of the directors and according to the letter of payment of obligations. PT Perkebunan Mitra Ogan to PT. Rajawali Nusantara Indonesia No. DIR-MO/RNI/243/VIII/2017, the company releases land assets and building sales of Rp 79,970,100,000 according to the results of the assessment from KJPP (Appraisal firm).

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank

25. Bank loans

	2020	2019	
Induk Perusahaan			Holding Company
PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	601.965.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	365.000.000.000	365.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	210.000.000.000	210.000.000.000	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	157.654.206.346	121.191.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	175.521.161.131	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah induk Perusahaan	1.334.619.206.346	871.712.161.131	Total holding Company
Entitas Anak			Subsidiaries
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Rajawali Nusindo	426.410.960.847	442.403.209.298	PT Rajawali Nusindo
Sub jumlah	426.410.960.847	442.403.209.298	Subtotal
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Mitra Ogan	60.000.000.000	60.000.000.000	PT Perkebunan Mitra Ogan
PT PG Candi Baru	29.747.712.978	15.008.696.299	PT PG Candi Baru
PT Rajawali Citramass	24.181.780.667	-	PT Rajawali Citramass
PT Mitra Kerinci	3.021.359.866	2.994.722.215	PT Mitra Kerinci
PT PG Rajawali I	-	13.375.885	PT PG Rajawali I
Sub jumlah	116.950.853.511	78.016.794.399	Subtotal
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT GIEB Indonesia	30.366.763.088	32.094.744.651	PT GIEB Indonesia
Sub jumlah	30.366.763.088	32.094.744.651	Subtotal
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Laras Astra Kartika	6.993.369.007	6.993.369.007	PT Laras Astra Kartika
Sub jumlah	6.993.369.007	6.993.369.007	Subtotal
PT Bank BNI Syariah Tbk			PT Bank BNI Syariah Tbk
PT Rajawali Nusindo	465.542.162.971	439.823.698.079	PT Rajawali Nusindo
PT Mitra Rajawali Banjaran	-	9.850.908.738	PT Mitra Rajawali Banjaran
PT PG Rajawali II	-	8.596.334.304	PT PG Rajawali II
Sub jumlah	465.542.162.971	458.270.941.121	Subtotal
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten			PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten
PT Rajawali Nusindo	30.000.000.000	-	PT Rajawali Nusindo
PT Mitra Rajawali Banjaran	7.600.000.000	7.600.000.000	PT Mitra Rajawali Banjaran
PT Laras Astra Kartika	2.000.000.000	2.000.000.000	PT Laras Astra Kartika
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	-	2.000.000.000	PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
Sub jumlah	39.600.000.000	11.600.000.000	Subtotal
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Rajawali Nusindo	-	95.000.000.000	PT Rajawali Nusindo
Sub jumlah	-	95.000.000.000	Subtotal
PT Bank DKI			PT Bank DKI
PT Rajawali Nusindo	195.000.000.000	150.000.000.000	PT Rajawali Nusindo
Sub jumlah	195.000.000.000	150.000.000.000	Subtotal
Jumlah entitas anak	1.280.864.109.424	1.274.379.058.476	Total subsidiaries
Jumlah utang bank	2.615.483.315.770	2.146.091.219.607	Total bank loan

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta**

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK PT Bank DKI berdasarkan SPPK dengan No 2332/SPPK/910/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020 dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp 700.000.000.000 dengan sifat kredit *revolving* dengan ketentuan sebagai berikut :

Keperluan	: Pembiayaan pokok fasilitas KMK di BNI maksimal sebesar Rp 587.617.000.000. Tambahan modal kerja usaha perdagangan gula dan impor gula dan fasilitas ini dapat juga digunakan untuk anak perusahaan atas nama PT Pabrik Gula Rajawali I.
Jenis Kredit	: KMK – Pinjaman tetap berjangka
Jangka Waktu	: 12 bulan dihitung mulai tanggal perjanjian kredit.
Provisi	: 0,25 % per annum dari limit kredit dan dibayar selambat-lambatnya saat penandatanganan perjanjian kredit.
Suku Bunga	: 8,00% per annum. Suku bunga dapat berubah dengan no surat terakhir 2359/SPPK/910/XII/2020.
Biaya Administrasi	: Rp 100.000.000

Jangka waktu penggunaan dana sejak pencarian fasilitas kredit dengan diterima pembayaran *Delivery Order* (DO) di rekening *escrow*, maksimum 3 bulan dan dapat diperpanjang dalam hal belum terjadi pembayaran atas DO yang diterbitkan. Apabila jangka waktu penggunaan dana diperpanjang maka debitur menyerahkan promes baru disertai bukti belum dibayarkan *delivery order*. Denda 2% berdasarkan surat No. 2359/SPPK/910/XII/2020 diatas tingkat suku bunga yang berlaku untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban. Penerimaan atas pembayaran DO gula PT PG Rajawali I disalurkan ke rekening *escrow* di Bank DKI. Pembayaran pokok sesuai dengan tanggal pembayaran DO, maksimal sampai dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit dan pembayaran bunga setiap bulan paling lambat tanggal 25.

25. Bank loans (continued)

Holding company

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta**

The Company obtained KMK facility from PT Bank DKI based on SPPK No. 2332/SPPK/910/XII/2020 on 22 December 2020 with a credit facility limit of Rp 700,000,000,000 with a revolving credit character with the following conditions:

Purpose	: The principal financing for KMK facilities at BNI is a maximum of Rp 587,617,000,000. Additional working capital for the sugar trading and sugar import business and this facility can also be used for a subsidiary on behalf of PT Pabrik Gula Rajawali I.
Type of credit	: KMK – Fixed term loans
Time period	: 12 months from the date of the credit agreement.
Provision	: 0.25% per annum of credit limit and to be paid no later than the signing of the credit agreement.
Interest rate	: 8.00% per annum. Interest rates can change with the last letter number 2359/SPPK/910/XII/2020.
Administration expense:	Rp 100.000.000

The period of use of funds since the search for a credit facility by receiving a *Delivery Order* (DO) payment in an *escrow* account, is a maximum of 3 months and can be extended in the event that there has been no payment for issued DO. If the period for using the funds is extended, the debtor submits a new promissory note, accompanied by proof that the delivery order has not been paid. 2% fine based on letter No. 2359/SPPK/910/XII/2020 above the interest rate applicable to any late payment of obligations. Proceeds from the payment of DO sugar from PT PG Rajawali I are channeled to an *escrow* account at Bank DKI. The principal payment is in accordance with the DO payment date, up to the due date of the credit facility and the monthly interest payment no later than the 25th.

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (lanjutan)**

1. Agunan utama
Delivery Order (DO) an PT PG Rajawali I dengan nilai minimal 111% dari limit fasilitas kredit. Agunan utama diikat fiducia dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fiducia. reuiu atas agunan utama dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali dan dilakukan pendaftaran ulang ke kantor pendaftaran fiducia.
2. Agunan Tambahan
Agunan *fixed asset* dengan nilai pengikatan minimal sebesar 100% dari limit fasilitas kredit. Agunan tambahan diikat hak tanggungan I dengan nilai pengikatan sebesar nilai pasar sesuai hasil penilaian KJPP rekanan PT Bank DKI.

Asuransi untuk pinjaman ini, selama belum lunas, agunan yang insurable harus diasuransikan minimal asuransi kebakaran pada perusahaan asuransi rekanan PT Bank DKI dengan syarat *banker's clause* PT Bank DKI dengan nilai pertanggungan minimal sebesar nilai wajar dengan jangka waktu asuransi minimal selama 12 (dua belas) bulan. Biaya penutupan asuransi menjadi beban debitur. Apabila agunan kredit yang dapat diasuransikan (*insurable*) tersebut telah ditutup di perusahaan asuransi yang bukan rekanan di Bank DKI maka harus dilakukan endorsement dengan *Banker's Clause* PT Bank DKI dan setelah jatuh tempo harus diasuransikan pada perusahaan asuransi rekanan PT Bank DKI.

Saldo utang bank jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 601.965.000.000 dan nihil.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (continued)**

1. The main collateral
Delivery Order (DO) of PT PG Rajawali I with a minimum value of 111% of the credit facility limit. The main collateral is tied to fiducia and registered with the fiducia registration office. The main collateral review is carried out every 6 (six) months and a re-registration is carried out at the fiduciary registration office.
2. Additional Collateral
Fixed asset collateral with a minimum binding value of 100% of the credit facility limit. Additional collateral is tied to mortgage I with a binding value equal to the market value according to the assessment results of the KJPP partner of PT Bank DKI.

Insurance for this loan, as long as it has not been paid off, insurable collateral must be insured for a minimum of fire insurance at the insurance company partner PT Bank DKI with the condition that the banker's clause is PT Bank DKI with a minimum coverage value of fair value with a minimum insurance period of 12 (twelve) months. . Insurance closing costs are borne by the debtor. If the insurable credit collateral has been closed at an insurance company that is not a partner at Bank DKI, then it must be endorsed with Banker's Clause PT Bank DKI and after maturity must be insured with an insurance company partner PT Bank DKI.

Balance of short-term bank loan to PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 601,965,000,000 and Nil ,respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit agunan surat berharga dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian kredit agunan surat berharga No. CRO.KP/214/KASB/2019 Tanggal 17 Juni 2019. Perjanjian kredit bank terdapat penambahan limit fasilitas kredit berdasarkan Addendum I (Pertama) dengan No. TIO.CRO/CCL.538/ADD/2019 Tanggal 8 Oktober 2019. Pada tahun 2020 terdapat addendum II (Kedua) berdasarkan perjanjian kredit agunan No. OPT.WCO/CCL.415/ADD/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan syarat dan ketentuan :

Limit kredit : Rp 365.000.000.000
Keperluan : Untuk tambahan modal kerja usaha perusahaan
Jenis Kredit : Kredit agunan surat berharga
Jangka Waktu : 12 bulan terhitung mulai tanggal perjanjian kredit.
Provisi : 0% per annum dari limit kredit
Suku Bunga : 0,6% per annum diatas tingkat suku bunga deposito tertinggi yang menjadi agunan, dibayar setiap bulan.
Agunan kredit : No rekening 070-02-0609795-3 No seri 737743 atas nama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp 365.000.000.000 dan diikat secara gadai dengan nomor WCO.CCL/115/PGD/2020

Pelunasan kredit dilaksanakan satu kali sebesar baki debit/kredit yang ditarik, paling lambat pada saat fasilitas kredit jatuh tempo. Denda terhadap tunggakan pokok dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan biaya keterlambatan pembayaran kewajiban kredit, dikenakan denda sebesar 5% diatas suku bunga yang berlaku.

Saldo utang bank jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 365.000.000.000 .

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company obtained a securities collateral credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk based on the securities collateral credit agreement No. CRO.KP/214/KASB/2019 Dated 17 June 2019. The bank credit agreement has an additional credit facility limit based on Addendum I (First) with No. TIO.CRO/CCL.538/ADD/2019 8 October 2019. In 2020 there is an addendum II (Second) based on the collateral credit agreement No. OPT.WCO/CCL.415/ADD/2020 dated 15 June 2020 with terms and conditions:

Credit line : Rp 365,000,000,000
Purpose : For additional working capital of company group
Type of Credit : Collateral credit securities
Time period : 12 Month starting from the date of agreement
Provision : 0% per annum on credit limit
Interest Rate : 0,6% per annum above the highest deposito interest rate for which collateral is paid every month.
Collateral credit : Account number 070-020609795-3 serial number 737743 in the name of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) in the amount of Rp 365,000,000,000 and is pledged as a lien with the number WCO.CCL/115/PGD/2020

Repayment of credit is carried out once for debit/credit tray withdrawn no later than when the facility is due. Fines for arrears and other costs incurred in connection with late payment fees for credit obligation are subject to a penalty of 5%

Balance of short-term bank loan to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 365,000,000,000, respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia Syariah

Tahun 2020 terdapat addendum atas perjanjian kredit dengan PT BNI Syariah sesuai dengan surat perjanjian no 064/MSY800/884/IV/2020 Tanggal 9 April 2020 atas perjanjian tahun 2019 sesuai dengan surat perjanjian kredit no BNISy/CRD/138/R Tanggal 8 April 2019 dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp 210.000.000.000. Jenis fasilitas pembiayaan ini adalah *Cash Collateral Financing*. Tujuan dari perjanjian kredit untuk penambahan modal kerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Total Nilai Syirkah atau *share* untuk pembiayaan ini pada tahun 2020 dan 2019 adalah Rp 7.106.295.513.943 dan Rp 1.322.904.883.174.

Perjanjian kredit dengan PT BNI Syariah ini memiliki jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan akad pembiayaan yaitu terhitung sejak 10 April 2019 sampai dengan 10 April 2020 dan diperpanjang menjadi 10 April 2020 sampai dengan 10 April 2021. Akad yang digunakan adalah akad Musyarakah dengan nisbah bagi hasil untuk PT BNI Syariah tahun 2019 sebesar 1,70% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar 98,30% sedangkan pada tahun 2020 PT BNI Syariah mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 00,91% dan PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar 99,09%. Agunan pada perjanjian kredit berupa *Cash Collateral*/Uang tunai sebesar Rp 221.052.631.579 dalam bentuk deposito di Bank Syariah yang akan diikat gadai. Pelunasan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo fasilitas.

Saldo utang bank jangka pendek kepada PT Bank Negara Indonesia Syariah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 210.000.000.000.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

PT Bank Negara Indonesia Syariah

In 2020 there is extended with credit agreement PT BNI Syariah in accordance with letter no 064/MST800/884/IV/2020 dated 9 April 2020 on 2019 credit agreement with BNI Syariah in accordance with letter no BNISy/CRD/138/R dated 8 April 2019 with maximum financing of Rp 210,000,000,000. This type of financing facility is cash guarantee financing. The purpose of the credit agreement is to increase the working capital of PT Rajawali Nusantara (Persero). Total value of syirkah or share for financing as of 2020 and 2019 amounting to Rp 7,106,295,513,943 and Rp 1,322,904,883.17.

This credit agreement with PT BNI Syariah has a period of 12 months from the signing of the financing agreement, starting from 10 April 2019 to 10 April 2020 and extending from 10 April 2020 to 10 April 2021. The contract used is the Musyarakah contract with a profit sharing ratio for PT BNI Sharia in 2019 was 1.70% and PT Rajawali Nusantara Indonesia was 98.30%, while in 2020 PT BNI Syariah received a profit sharing ratio of 00.91% and PT Rajawali Nusantara Indonesia was 99.09%. Collateral in the credit agreement is in the form of Cash Collateral / cash amounting to Rp 221,052,631,579 in the form of a deposit at a Sharia Bank which will be tied with a pledge. The principal is paid in full at the maturity date of the facility.

Balance of short-term bank loan to PT Bank Negara Indonesia Syariah as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 210,000,000,000 respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

Tahun 2020 terdapat addendum perjanjian dengan no 0056/PK-CC/KOM/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas perjanjian kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan akta No 914 tanggal 09 Agustus 2019. Jenis fasilitas kredit yang diberikan adalah *Cash Collateral* maksimal Rp 1.000.000.000.000 (1 Triliun). Tujuan penambahan kredit tersebut untuk modal kerja debitur dan grup usaha. Pencairan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan, dengan *Loan to Value* sebesar 100% dari nilai penempatan giro yang dijadikan agunan. Sifat kredit pada perjanjian kredit ini bersifat *Revolving* dengan ketentuan tidak melebihi plafond yang telah ditetapkan.

Pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk jaminannya dalam bentuk deposito, tabungan dan/atau giro pada PT Bank BJB dimana apabila debitur melakukan wanprestasi maka agunan akan dicairkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Jangka waktu perjanjian kredit mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan 19 April 2020 dan diperpanjang mulai tanggal 19 April 2020 sampai dengan 19 April 2021 dengan bunga yang dibayarkan tanggal 23 setiap bulannya. Pokok akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Debitur akan membayar angsuran bunga tersebut sesuai dengan jadwal angsuran yang telah diberikan. Nilai Provisi dan Administrasi masing-masing sebesar Rp 2.000.000 dengan comitment 0,5% dari plafon kredit dan spread 0,5% diatas tingkat suku bunga giro yang menjadi jaminan dibayar efektif setiap bulan.

Terdapat penambahan pinjaman untuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tahun 2020 dengan perjanjian No. 144/KKO-KO2/SPPK/2020 tanggal 1 April 2020 dengan limit fasilitas sebesar Rp 300.000.000.000 maksimum. Jenis fasilitas KMK R/C Terbatas. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 bulan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2021. Bunga untuk fasilitas kredit ini adalah 9,75% p.a . biaya provisi sebesar 0,25%. Biaya administrasi dibayarkan sekaligus pada saat penandatanganan perjanjian kredit sebesar Rp 30.000.000.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

In 2020 there is an agreement addendum with number 0056/PK-CC/KOM/VIII/2020 dated 27 August 2020 on a credit agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk with deed No. 914 dated 9 August 2019. The types of credit facilities provided are *Cash Collateral* maximum Rp 1,000,000,000,000 (1 Trillion). The purpose of this additional credit is for the working capital of the debtor and business group. Disbursements can be made in stages as needed, with a *Loan to Value* of 100% of the value of the demand deposit as collateral. The nature of credit in this credit agreement is revolving in nature, provided it does not exceed the predetermined ceiling.

The financing provided by PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk guarantees in the form of deposits, savings and/or demand deposits at Bank BJB where debtor payments are made in default, then collateral will be disbursed to pay off all debtors needs. Period of time the agreement of credit start form 19 April 2019 to 19 April 2020 and extended from 19 April 2020 to 19 April 2021 with interest paid on the 23rd of every month. The loan principal will be paid at once when due. The debtor will pay interest installment schedule that has been given. The provision and administration fees value is Rp 2,000,000 each with a commitment of 0,5% of the credit plafond and 0,5% spread over the interest rate on demand deposits that are guaranteed to be received effectively every month.

There is an additional loan for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk in 2020 with agreement No. 144/KKO-KO2/SPPK/2020 dated 1 April 2020 with a facility limit of Rp 300,000,000,000 maximum. Types of KMK R/C facilities are limited. The term of the credit facility is 12 months from 1 April 2020 to 1 April 2021. Interest for this credit facility is 9.75% p.a. provision fee of 0.25%. The administration fee is paid at once at the signing of the credit agreement amounting to Rp 30,000,000.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (lanjutan)**

Apabila terdapat tunggakan atas pembayaran pokok dan bunga, bank akan mengenakan denda sebesar 3% per tahun atau 0,25% untuk tunggakan pokok dan bunga. Tidak terdapat denda untuk pelunasan dipercepat. *Commitment fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit apabila selama jangka waktu fasilitas kredit tidak terdapat penarikan fasilitas kredit dan dibayarkan sekaligus pada saat jangka waktu fasilitas kredit tersebut berakhir. Pembayaran pokok proporsional berdasarkan termin dan dilunasi selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo *promissory notes*. Pembayaran bunga pinjaman dilakukan setiap bulan setiap tanggal 23.

Agunan berupa piutang usaha yang ada dan/atau yang akan ada minimal sebesar 100% dari outstanding kredit. Piutang tidak boleh sedang dalam keadaan dijaminkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain, tidak akan dijadikan agunan pada pihak lain, apabila nilai piutang yang dijaminkan kurang dari yang diperyaratkan maka debitur wajib menambah piutang lainnya atau dilakukan penurunan fasilitas kredit sampai dengan nilai piutang sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Saldo pinjaman bank jangka pendek kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 157.654.206.346 dan Rp 121.191.000.000.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (continued)**

If there are arrears on principal and interest payments, the bank will impose a fine of 3% per annum or 0.25% for principal and interest arrears. There are no fines for early repayment. Commitment fee is 0.25% of the credit limit if during the credit facility period there is no withdrawal of the credit facility and is paid at once when the credit facility period ends. Proportional principal payments based on terms and paid no later than the maturity date of the promissory notes. Loan interest payments are made every month on the 23rd.

Collateral in the form of existing and / or existing trade receivables is at least 100% of the outstanding credit. Receivables must not be in a condition as collateral and / or authorized to other parties, will not be used as collateral to other parties, if the value of the receivables that are guaranteed is less than required, the debtor is required to add other receivables or decrease the credit facility to the value of the receivables in accordance with what is required.

Balance of short-term bank loan to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 157,654,206,346 and Rp 121,191,000,000, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta pinjaman kredit No.29 tahun 2010 dengan plafon kredit Rp 387.617.000.000 diperbaharui dengan Akta pinjaman kredit No. 31 tanggal 27 Juni 2011, dengan tambahan fasilitas KMK Rp 200.000.000.000, sehingga total plafon kredit menjadi Rp 587.617.000.000.

Pada tahun 2017, Perusahaan sepakat mengadakan penggabungan atas fasilitas kredit tersebut menjadi fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum Rp 587.617.000.000 sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 39/BIN/PK/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2018. Suku bunga per tahun sebesar 10%. Pada tanggal 13 November 2018 pinjaman tersebut telah diperpanjang sampai dengan 14 April 2019 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2)039/BIN/PK/2017. Pada tanggal 24 Juni 2019 pinjaman tersebut telah diperpanjang sampai 14 April 2020 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No: (3)039/BIN/PK/2017 dengan suku bunga per tahun sebesar 9,75%.

Saldo utang bank jangka pendek kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp 175.521.161.131.

25. Bank loans (continued)

Holding companies (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company obtained Working Capital Loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in accordance with the Deed No.29 in 2010 with maximum credit of Rp 387,617,000,000 renewed by Deed No. 31 dated 27 June 2011, with additional working capital facility amounted to Rp 200,000,000,000, so the total credit limit amounted to Rp 587,617,000,000.

In 2017, the Company agreed to consolidate the credit facility into a Working Capital facility with maximum of Rp 587,617,000,000 in accordance to the Agreement No. 39/BIN/PK/2017 dated 4 August 2017 with a maturity of 12 months effective from 15 April 2017 up to 15 April 2018. Annual interest rate is 10%. On 13 November 2018 the loan has been extended to 14 April 2019 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number: (2)039/BIN/PK/2017. On 24 June 2019 the loan has been extended to 14 April 2020 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number: (3)039/BIN/PK/2017 with annual rate is 9,75% .

Balance of short-term bank loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounting to Nil and Rp 175,521,161,131, respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Rajawali Nusindo

- a. Kredit Modal Kerja (07)
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 07 tertanggal 15 April 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 07 tertanggal 26 April 2017, perihal perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 14 April 2018 dan perubahan tingkat bunga efektif menjadi 10% per tahun. Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (13) 07 pada tanggal 28 September 2018. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit No (14) 07 tanggal 24 Juni 2019, jangka waktu perjanjian diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (15) 16 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Penurunan tingkat suku bunga efektif menjadi 9.25% per tahun sesuai surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/3.3/667 tanggal 26 November 2020.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Rajawali Nusindo

- a. Working Capital Loan (07)
The Company obtained a Working Capital Loan facility (KMK) with credit limit amounted to Rp 90,000,000,000 in accordance to Credit Agreement No. 07 dated 15 April 2010. The provisions of the agreement have been amended several times, based on the approval of credit agreement amendment No. 07 dated 26 April 2017, regarding extension of credit terms up to 14 April 2018 and effective interest rate changes at 10% per annum. The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number: (13) 07 on 28 September 2018. Based on the approval of credit agreement amendment No 7 dated 24 June 2019 The credit period has been extended for 12 month from 15 April 2019 to 14 April 2020 and effective interest rate changes at 9,75% per annum. Based on agreement No. (15) 07 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Reducing the effective interest rate to 9.25% per year in accordance with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk letter No. BIN/3.3/667 dated 26 November 2020.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- b. Kredit Modal Kerja (16)
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 25.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 16 tertanggal 11 Juni 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (13) 16 pada tanggal 28 September 2018. Perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (14) 16 tanggal 24 Juni 2019 dengan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit yaitu sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian No. (15) 16 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Penurunan tingkat suku bunga efektif menjadi 9.25% per tahun sesuai surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/3.3/667 tanggal 26 November 2020.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- b. Working Capital Loan (16)
The Company obtained a Working Capital Loan (KMK) facility with a loan limit of Rp 25,000,000,000 in accordance to Credit Agreement No. 16 dated 11 June 2010. The provisions in the agreement have been amended several times, The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April .2019 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number: (13) 16 on 28 September 2018. Based on the approval of credit agreement amendment No 16 dated 24 June 2019, The credit period has been extended for 12 month from 15 April 2019 to 14 April 2020 and effective interest rate changes at 9,75% per annum.

Based on agreement No. (15) 16 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Reducing the effective interest rate to 9.25% per year in accordance with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk letter No. BIN/3.3/667 dated 26 November 2020.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

c. Kredit Modal Kerja (35)

Pada tanggal 27 Juni 2011, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon pinjaman sebesar Rp 150.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit Nomor 35. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.35, tertanggal 26 April 2017, perihal perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan tanggal 14 April 2018 dan perubahan tingkat bunga efektif menjadi 10% per tahun. Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019. Berdasarkan perubahan perjanjian No.(13) 35, tanggal 24 Juni 2019, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2020 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,75% per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (15) 16 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Penurunan tingkat suku bunga efektif menjadi 9.25% per tahun sesuai surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/3.3/667 tanggal 26 November 2020.

d. Kredit Modal Kerja (21)

Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 235.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 21. perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (5) 21 tanggal 24 Juni 2019 dengan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit atau sejak 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% (sembilan koma lima persen) per tahun.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

c. Working Capital Loan (35)

On 27 June 2011, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 150,000,000,000 under the Credit Agreement Number 35. The terms of the agreement have been amended several times, based on the final approval of the amendment No.35 credit agreement, on 26 April 2017, regarding the extension of the period credit until the date of 14 April 2018 and change in interest rates effective at 10 % per year. The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019. Based on the amendments No.(13) 35, dated 24 June 2019, the loan period was extended until 14 April 2020 and the effective interest rate became 9.75% per annum. Based on agreement No. (15) 16 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Reducing the effective interest rate to 9.25% per year in accordance with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk letter No. BIN/3.3/667 dated 26 November 2020.

d. Working Capital Loan (21)

On 26 October 2016, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 235,000,000,000 under the Loan Agreement No. 21. last amendment with Approval of Amendment to Credit Agreement (5) 21 dated 24 June 2019 with credit term extended for 12 (twelve) months from the due date of the credit or from 15 April 2019 until 14 April 2020 with an effective interest rate of 9.75% per year.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- d. Kredit Modal Kerja (21)
Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 235.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit No. 21. perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (5) 21 tanggal 24 Juni 2019 dengan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit atau sejak 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 9,75% (sembilan koma lima persen) per tahun. Berdasarkan Perjanjian No. (6) 21 tanggal 28 Mei 2020, jangka waktu kredit diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan tingkat bunga efektif menjadi 9,25% per tahun. Penurunan tingkat suku bunga efektif menjadi 9.25% per tahun sesuai surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/3.3/667 tanggal 26 November 2020.
- e. Kredit Modal Kerja (22)
Pada tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. 22. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.22, tertanggal 24 Juni 2019 perihal perpanjangan jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai 14 April 2020 dengan tingkat bunga 9,75% per tahun. Penurunan tingkat suku bunga efektif menjadi 9.25% per tahun sesuai surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/3.3/667 tanggal 26 November 2020.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- d. Working Capital Loan (21)
On 26 October 2016, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 235,000,000,000 under the Loan Agreement No. 21. last amendment with Approval of Amendment to Credit Agreement (5) 21 dated 24 June 2019 with credit term extended for 12 (twelve) months from the due date of the credit or from 15 April 2019 until 14 April 2020 with an effective interest rate of 9 , 75% per year. Based on agreement No. (6) 21 dated 28 May 2020, the loan period was extended to 14 April 2021 and the effective interest rate was 9.25%. Reducing the effective interest rate to 9.25% per year in accordance with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk letter No. BIN/3.3/667 dated 26 November 2020.
- e. Working Capital Loan (22)
On 26 October 2016, the Company obtained again the Working Capital Loan (KMK) facility with a credit limit amounted to Rp 100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) under the Loan Agreement No. 22. The terms of the agreement have been amended several times, based on the final approval of the amendment No. 22 credit agreement, dated on 24 June 2019 regarding the extension of the credit for period extended for 12 month from 15 April 2019 to 14 April 2020 with an interest rate of 9,25% per annum. Reducing the effective interest rate to 9.25% per year in accordance with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk letter No. BIN/3.3/667 dated 26 November 2020.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- f. Penerbitan Garansi Bank
Perusahaan juga memperoleh fasilitas Penerbitan Garansi Bank (PGB) dengan nilai maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 sesuai Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) No. 07 tertanggal 14 Mei 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No.7, tertanggal 15 April 2018 perihal perpanjangan jangka waktu kredit dengan jangka waktu dari tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2019. Jangka waktu kredit tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (13) 07 pada tanggal 28 September 2018. Perubahan terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (P4GB) Nomor (14) 07 tanggal 24 Juni 2019 maksimum Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dengan batas waktu penerbitan Garansi Bank diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020. Perubahan terakhir perjanjian penerbitan fasilitas garansi bank Nomor (15) 07 tanggal 28 Mei 2020 dengan jangka waktu yang diperpanjang selama 12 bulan dari tanggal 15 april 2020 sd 14 april 2021.

- g. *Letter of Credit (L/C)*
Perusahaan memperoleh fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* (PLC) dengan nilai maksimum sebesar USD 3.315.650 sesuai Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* (P4LC) No. 08 tertanggal 14 Mei 2010. Ketentuan dalam perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No.8, tertanggal 26 April 2017 perihal perpanjangan jangka waktu kredit dari 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2018.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- f. *Issuance of Bank Guarantee*
The Company also obtained a Bank Guarantee Issuance Facility (PGB) with a maximum amount of Rp 100,000,000,000 under the Bank Guarantee Issuance Agreement (PPGB) No. 07 dated 14 May 2010. The term of the agreement have been amended several times, the latest based on approval the amendment of the Bank Guarantee Issuance Agreement No.7, dated 15 April 2017 regarding the extension of the period a loan with the tenor from 15 April 2017 until the date of 14 April 2019. The credit period has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019 based on the Agreement to Amend the Credit Agreement Number: (13) 07 on 28 September 2018. The latest amendment to the Approval to Amendment of the Bank Guarantee Issuance Agreement (P4GB) Number (14) 07 dated 24 June 2019 a maximum of Rp 100,000,000,000 (one hundred billion rupiahs) with the deadline for issuing Bank Guarantees extended for 12 (twelve) months from the due date or from 15 April 2019 to 14 April 2020. The latest amendment to the agreement for the issuance of bank guarantee facility Number (15) 07 dated 28 May 2020 with a period extended for 12 months from 15 April 2020 to 14 April 2021.

- g. *Letter of Credit (L/C)*
The Company obtained an Opening Letter of Credit (PLC) facility with maximum value of USD 3,315,650 in accordance with Opening Letter of Credit Agreement (P4LC) No. 08 dated 14 May 2010. The term of the agreement have been amended several times, the latest based on approval of the amendment of the Bank Guarantee Issuance Agreement No. 8, dated 26 April 2017 regarding the extension of the period a loan with the tenor from 15 April 2017 until the date of 14 April 2018.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

- g. *Letter of Credit (L/C) (lanjutan)*
Batas waktu pembukaan L/C tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019, termasuk perpanjangan sementara 3 bulan sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan L/C Nomor : (12) 08 tanggal 28 September 2018. Jangka waktu fasilitas LC diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit yaitu sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2020. Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Plafond LC impor atau SKBDN No.BIN/3.3/272/R tanggal 15 April 2020, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2021.
Berdasarkan perubahan perjanjian pemberian fasilitas pembukaan *letter of credit* (LC) Nomor (15) 08 tanggal 28 Mei 2020 senilai maksimal USD 3.315.650 diperpanjang sampai sampai dengan 14 April 2021.

Jaminan atas fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut di atas (jaminan silang) berupa tanah dan bangunan kantor serta gudang yang terletak di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi yang telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama senilai Rp 41.749.240.000, piutang usaha senilai Rp 577,372,734,591, persediaan barang senilai Rp 369.985.040.456 serta jaminan perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), sebagai induk Perusahaan.

Saldo Pinjaman Modal Kerja tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 426.410.960.847 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 442.403.209.298.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

- g. *Letter of Credit (L/C) (continued)*
The deadline for opening L/C has been extended for 12 months from 15 April 2018 to 14 April 2019, including a temporary extension of 3 months from 15 April 2018 to 14 July 2018 based on the Agreement to Amend the L/C Opening Facility Agreement. Number : (12) 08 dated 28 September 2018. The term of the LC facility has been extended for 12 (twelve) months since the credit due date on 15 April 2019 until 14 April 2020. Based on the Import LC Ceiling Extension Agreement or SKBDN No.BIN/3.3/272/R dated 15 April 2020, the loan period will be extended until 14 April 2021.

Based on the amendment to the agreement for the granting of letter of credit (LC) number (15) 08 opening facility dated 28 May 2020, with a maximum value of USD 3,315,650, extended until 14 April 2021.

Collaterals for the loan facilities mentioned above (cross collaterals) consist of land and office buildings and warehouses located in Bogor City and Bekasi Regency, which have been charged with the first rank mortgages valued at Rp. 41,749,240,000, trade receivables valued at Rp 577,372,734,591, inventory valued at Rp. 369,985,040,456 and corporate guarantee from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the parent company.

The balance of working capital loan dated 31 December 2020 amounting Rp 426,410,960,847 and 31 December 2019 amounting to Rp 442,403,209,298.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Perjanjian Kredit KMK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beberapa kali mengalami perpanjangan sedangkan Fasilitas KI MUBA I dan MUBA II tidak mengalami perubahan. Pada tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : R.II.05-OKD/DKR-2/01/2018 terkait perubahan syarat-syarat dan ketentuan fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

Plafon kredit	: Rp 60.000.000.000
Keperluan	: Untuk tambahan modal kerja PT Perkebunan Mitra Ogan dalam rangka mendukung operasional 2 PMKS dengan total kapasitas 90 Ton TBS/Jam
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 24 November 2017 s.d 24 November 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019, tidak ada perjanjian baru atau perpanjangan.
Provisi	: 0,1% dari total plafon dan dipungut sekaligus pada saat penandatanganan kredit
Suku Bunga	: 10,5% per tahun, dibayarkan secara tertib setiap bulan setiap tanggal realisasi. Suku bunga ini bersifat akan direviu (reviewable) setiap saat ketentuan suku bunga berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan suku bunga diberitahukan secara tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit serta mengikat debitur.

Saldo utang bank jangka pendek PT Perkebunan Mitra Ogan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 60.000.000.000.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Loan Agreement from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for several times experienced extensions while MUBA I and MUBA II credit investment facility has not been changed. On 8 January 2018 based on a letter from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Number : R.II.05-OKD/DKR-2/01/2018 regarding changes to the terms and conditions of credit facilities as follows :

Credit line	: Rp 60,000,000,000
Purpose	: For additional working capital of PT Perkebunan Mitra Ogan in order to support 2 PMKS operations with total capacity of 90 Ton TBS/Hour
Type of Credit	: Working Capital Loan
Time period	: 24 November 2017 up to 24 November 2018. As of December 31, 2019, there are no new agreements or extensions.
Provision	: 0.1% of the total plafond and collected at the same time at the signing of the credit
Interest Rate	: 10.5% per annum, paid on an orderly manner every month on every realization date. This interest rate will be reviewed at any time the interest rate provisions applied at PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Interest rate changes are notified in writing and constitute a unity with the credit agreement and bind the debtor.

The balance of short-term bank loan of PT Perkebunan Mitra Ogan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 60,000,000,000, respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT PG Rajawali I

Entitas memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian No : R.II 079-ADK/DKR-2/03/2014 tanggal 26 Maret 2014 dan telah diperpanjang melalui Akta Notaris H. Raden Ibnu Arly, S.H, M.kn, tentang persetujuan perpanjangan waktu kredit modal kerja No. 03 tanggal 5 Juni 2020.

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja
Plafon : Rp 260.000.000.000
Bunga : 9,50% pa
Jangka waktu : Hingga 6 Maret 2021

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman rekening koran yang dikhususkan sebagai tambahan modal kerja operasional industri gula.

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Piutang dagang senilai Rp 50.500.000.000.
- Persediaan senilai Rp 85.000.000.000.
- Tanah, bangunan dan mesin-mesin yang berlokasi di unit-unit Entitas (Unit Krebet Baru dan Unit Rejo Agung Baru) senilai Rp 356.544.000.000.

Saldo utang bank jangka pendek PT PG Rajawali I kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar nihil dan Rp 13.375.885.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT PG Rajawali I

The Entity obtained the facility of working capital loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on the agreement No : R.II 079-ADK/DKR-2/03/2014 dated 26 March 2014 and has been extended by Notary Deed of H. Raden Ibnu Arly, S.H, M.kn, regarding the approval of working capital credit extension No. 03 dated 5 June 2020:

Types of credit : Working Capital Loan
Credit line : Rp 260,000,000,000
Interest : 9,50% pa
Time period : Until 6 March 2021

The loan facility granted in the form overdraft loan which is intended to additional working capital for operational sugar industry.

The loan is guaranteed by:

- Accounts receivable amounted to Rp 50,500,000,000.
- Inventory amounted to Rp 85,000,000,000.
- Land, building and machineries which are located on Entity's business units (Unit Krebet Baru and Unit Rejo Agung Baru) amounted to Rp 356,544,000,000.

The balance of short-term bank loan of PT PG Rajawali I from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounted to nil and Rp 13,375,885, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT PG Candi Baru

Entitas memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek berupa tambahan modal kerja industri gula dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 23 Juni 2016, dengan Perjanjian Fasilitas Kredit No. B.4073KC/IX/ADK/06/2016, atas perjanjian tersebut telah diperpanjang dengan perjanjian kredit No. B.1662/KW-IX/ADK/07/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Jenis kredit	: Kredit Modal Kerja
Plafon	: Rp 40.000.000.000
Bunga	: 12% per tahun
Provisi kredit	: 0,25%
Administrasi	: Rp 25.000.000
Jangka waktu	: 12 bulan terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 5 Juni 2021.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan :

- Agunan pokok berupa Piutang yang dimiliki oleh PG Candi Baru diikat secara fidusia sebesar Rp26.906.786.000 dan Persediaan yang berada di lokasi usaha di Jalan Raya Candi No. 10 Kabupaten Sidoarjo diikat secara fidusia sebesar Rp 15.000.993.000 dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- Agunan tambahan berupa tanah dan bangunan Pabrik dengan luas tanah sebesar 44.240 m² yang berlokasi di Jl Raya Candi No. 5 Kabupaten Sidoarjo dengan bukti kepemilikan SHGB No. 5 berlaku sampai 21 Agustus 2028 yang telah diikat dengan HT I sebesar Rp 10.000.000.000 dan HT II sebesar Rp 28.000.000.000 diteruskan selanjutnya diikat dengan HT III sebesar Rp 12.000.000.000.

Saldo utang bank jangka pendek PT PG Candi Baru ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 29.747.712.978 dan Rp 15.008.696.299.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT PG Candi Baru

The entity obtained a short-term loan facility in the form of additional working capital for the sugar industry from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk on 23 June 2016, with a Credit Facility Agreement No. B.4073KC/IX/ADK/06/2016, the agreement has been extended with a credit agreement No. B.1662/KW-IX/ADK/07/2020 dated 1 July 2020.

Types of credit	: Working Capital Loan
Credit line	: Rp 40,000,000,000
Interest	: 12% per annum
Credit provision	: 0.25%
Administration	: Rp 25,000,000
Time period	: 12 months starting from 5 June 2020 until 5 June 2021.

The above loans are secured by :

- The principal collateral in the form of accounts receivable owned by PG Candi Baru is bound in a fiducia amounting to Rp 26,906,786,000 and Inventory located at the business location on Jalan Candi No. 10 Sidoarjo Regency is bound by fiducia in the amount of Rp 15,000,993,000 and registered with the Fiducia Registration Office.
- Additional collateral in the form of land and factory buildings with a land area of 44,240 sqm located on Jl Raya Candi No. 5 Sidoarjo Regency with proof of ownership of SHGB No. 5 until 21 August 2028 which has been bound with HT I in the amount of Rp 10,000,000,000 and HT II in the amount of Rp 28,000,000,000, it is then further bound with HT III of Rp 12,000,000,000.

The balance of PT PG Candi Baru's short-term bank loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 29,747,712,978 and Rp 15,008,696,299, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Mitra Kerinci

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 tanggal 16 November 2019. Pada tahun 2019 telah dilakukan Addendum suspensi perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan akta perjanjian No. 50 tanggal 29 November 2019 Fasilitas kredit modal kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja
Plafon : Rp 1.900.000.000
Bunga : 9,95% - 13,5% per tahun
Jangka waktu : 29 November 2019 sampai dengan 29 November 2020

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 tanggal 16 November 2019. Pada tahun 2019 telah dilakukan Addendum suspensi perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan akta perjanjian No. 50 tanggal 29 November 2019 Fasilitas kredit investasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis kredit : Kredit Investasi
Plafon : Rp 1.900.000.000
Bunga : 9,95 - 13,5% per tahun
Jangka waktu : 29 November 2019 sampai dengan 29 November 2020
Agunan : Invoice mesin ECP DRYER 4 Feet (lengkap HE Tungku) diikat dengan Feduciare Eigendom Overdracht No. 01 sebesar Rp 671.000.000

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. B-296-KC.III/ADK/12/2016 tanggal 27 Desember 2016. Pada tahun 2019 telah dilakukan Addendum suspensi perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan akta perjanjian No. 40 tanggal 28 November 2019 Fasilitas kredit investasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja
Plafon : Rp 2.400.000.000
Bunga : 9,5% per tahun
Jangka waktu : 27 November 2018 sampai dengan 27 November 2019

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Mitra Kerinci

Based on Credit Agreement No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 dated 16 November 2019. In 2019 an Addendum was suspended for the credit agreement, in accordance with the agreement deed No. 50 dated 29 November 2019 Working capital credit facilities with the following conditions:

Types of credit : Working Capital Loan
Credit line : Rp 1,900,000,000
Interest : 9.95% - 13.5% per annum
Time period : 29 November 2019 up to 29 November 2020

Based on Credit Agreement No. B-350-KC.III / ADK / 11/2019 dated 16 November 2019. In 2019 an Addendum was suspended for the credit agreement, in accordance with the agreement deed No. 50 dated 29 November 2019 Investment credit facility with the following conditions:

Types of credit : Investment Loan
Credit line : Rp 1,900,000,000
Interest : 9.95 - 13.5% per annum
Time period : 29 November 2019 up to 29 November 2020
Guarantee : ECP DRYER 4 Feet machine invoice (complete HE Furnace) tied with Feduciare Eigendom Overdracht No. 01 amounting to Rp. 671,000,000

Based on Credit Agreement No. B-296-KC.III/ADK/12/2016 dated 27 December 2016. In 2019 the Addendum has been suspended for credit agreements, namely in accordance with the agreement deed No. 40 dated 28 November 2019. Investment Credit facilities with the following conditions :

Types of credit : Working Capital Loan
Credit line : Rp 2,400,000,000
Interest : 9.5% per annum
Time period : 27 November 2018 until 27 November 2019

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Mitra Kerinci

Berdasarkan Perjanjian No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 tanggal 29 November 2019, fasilitas Kredit Investasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit : Kredit Investasi
Bunga : 9,95 - 13,5% per tahun
Jangka waktu : 29 November 2019 sampai dengan 29 November 2020.
Agunan : 2 unit kendaraan, yaitu merek Toyota, tipe Kijang Innova G DSL, tahun 2011, warna silver metalik, nomor polisi BA 1097 RV atas nama PT Mitra Kerinci diikat secara Fidusia Notariil dan didaftarkan pada lembaga fidusia sebesar Rp 160.000.000. dan merek Isuzu, type NMR 71 T HD 5,8, tahun 2016, warna putih, nomor polisi BA 9658 QU diikat dengan Feduciare Eigendom Overdracht No. 01 sebesar Rp 671.000.000.

Berdasarkan Perjanjian No. 108-III/ADK/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016, fasilitas Kredit Investasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis kredit : Kredit Investasi
Bunga : 9,95% per tahun
Jangka waktu : 16 Agustus 2016 sampai dengan 16 Agustus 2018
Agunan : Invoice mesin ECP DRYER 4 Feet (lengkap HE Tungku) diikat dengan Feduciare Eigendom Overdracht No. 01 sebesar Rp 671.000.000

Saldo utang bank jangka pendek PT Mitra Kerinci ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.021.359.866 dan Rp 2.994.722.215.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Mitra Kerinci

Based on Agreement No. B-350-KC.III/ADK/11/2019 dated 29 November 2019, Investment Credit facilities with the following conditions :

Types of credit : Investment Loan
Interest : 9.95 – 13.5% per annum
Time period : 29 November 2019 up to 29 November 2020.
Guarantee : 2 units of vehicles, namely the Toyota brand, type Kijang Innova G DSL, 2011, metallic silver color, police number BA 1097 RV under the name of PT Mitra Kerinci tied to a Notary Fiduciary and registered with a fiduciary institution for Rp. 160,000,000. and the Isuzu brand, type NMR 71 T HD 5.8, 2016, white color, police number BA 9658 QU tied with Feduciare Eigendom Overdracht No. 01, amounting to Rp 671,000,000.

Based on Agreement No. 108-III/ADK/08/2016 dated 16 August 2016, Investment Credit facilities with the following conditions :

Types of credit : Investment Loan
Interest : 9,95% per annum
Time period : 16 Agustus 2016 until 16 Agustus 2018
Guarantee : ECP DRYER 4 Feet machine invoice (complete HE Furnace) tied with Feduciare Eigendom Overdracht No. 01 amounting to Rp. 671,000,000

The balance of PT Mitra Kerinci's short-term bank loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 3,021,359,866 and Rp 2,994,722,215, respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Citramass

Berdasarkan *Offering Letter* BRI No.B808/KW-IX/ADK/04/2019 tanggal 26 April 2019 dan akta notaris No.02 tanggal 29 April 2019 dihadapan Notaris Indra Istiningsih, S.H., M.Kn., Entitas melakukan restrukturisasi pinjaman Kredit Modal Kerja pada tanggal 29 April 2019 yang mulai berlaku pada bulan Mei 2019.

Jenis pinjaman Kredit Modal Kerja berubah dari KMK W/A menjadi KMK Co. Menurun. Fasilitas Kredit Modal Kerja diturunkan dari Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 24.677.128.821. Bunga pinjaman diturunkan dari 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun menjadi 7% (tujuh persen) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 3% (tiga persen) dibayar tertib tiap bulan sesuai tanggal realisasi restrukturisasi kredit.
- b. 4% (empat persen) ditunda. Akumulasi bunga yang ditunda sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dibayar pada bulan Desember tahun yang bersangkutan, dan pada akhir periode restrukturisasi.

Jangka waktu pinjaman berubah dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad kredit restrukturisasi, dengan jadwal angsuran pokok pinjaman sebagai berikut:

- a. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 1 (satu) sampai dengan bulan 12 (dua belas) dari tanggal akad restrukturisasi sebesar Rp25.000.000 per bulan.
- b. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 13 (tiga belas) sampai dengan bulan 23 (dua puluh tiga) dari tanggal akad restrukturisasi sebesar Rp50.000.000 per bulan.
- c. Pembayaran pokok pinjaman bulan 24 (dua puluh empat) dari tanggal akad restrukturisasi sebesar Rp 23.827.128.821.

Saldo utang bank jangka pendek PT Rajawali Citramass ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 24.181.780.667 dan Nihil.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Citramass

Based on BRI's *Offering Letter* No.B808/KW-IX/ADK/04/2019 dated 26 April 2019 and notarial deed No. 02 dated 29 April 2019 before Notary Indra Istiningsih, SH, M.Kn., the entity restructured its Working Capital Loan. on 29 April 2019 which came into effect in May 2019.

The type of working capital loan changed from KMK W / A to KMK Co. Decreasing. The Working Capital Credit Facility was reduced from Rp 25,000,000,000 to Rp 24,677,128,821. Loan interest is reduced from 9.75% (nine point seven five percent) per annum to 7% (seven percent) per annum, with the following conditions:

- a. 3% (three percent) is paid orderly every month according to the date of the credit restructuring realization.
- b. 4% (four percent) was postponed. Accumulated interest which is postponed until December of the current year is paid in December of the current year, and at the end of the restructuring period.

The loan term has changed from 12 (twelve) months to 24 (twenty four) months since the restructuring credit agreement, with the principal loan installment schedule as follows:

- a. Payment of loan principal from 1 (one) month to 12 (twelve) months from the date of the restructuring agreement amounting to Rp25,000,000 per month.
- b. Payment of loan principal from 13 (thirteen) months to 23 (twenty three) months from the date of the restructuring agreement amounting to Rp.50,000,000 per month.
- c. The principal repayment of the loan for 24 (twenty four) months from the date of the restructuring agreement amounting to Rp 23,827,128,821.

The balance of PT Rajawali Citramass's short-term bank loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 24,181,780,667 and Nil, respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT GIEB Indonesia

Utang Bank PT GIEB Indonesia merupakan utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Non Cash Loan* Bank Garansi berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Non Cash Loan* Bank Garansi No. CRO.DPS/0076/NCL/2012 Akta No. : 116 tanggal 26 April 2012 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sesuai dengan Addendum X yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2020 dengan limit fasilitas sebesar Rp12.850.000.000 dan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 25 April 2021.
- b. Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.DPS/0075/KMK/2012 Akta No. 114 tanggal 26 April 2012 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sesuai dengan Addendum IX yang ditandatangani tanggal 24 April 2020 dengan limit fasilitas sebesar Rp 30.000.000.000 dan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 25 April 2021.
- c. Fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.DPS/0046/KMK/2014 Akta Nomor : 66 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sesuai dengan Addendum V yang ditandatangani pada tanggal 24 April 2020 dengan limit fasilitas sebesar Rp 10.000.000.000 dan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 25 April 2023.

Saldo utang bank jangka pendek PT GIEB Indonesia kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 30.366.763.088 dan Rp 32.094.744.651.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT GIEB Indonesia

Bank Loans of PT GIEB Indonesia represent payable to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with details as follows:

- a Bank Guarantee Non Cash Loan Facility based on Non Cash Loan Facility Agreement Bank Guarantee No. CRO.DPS/0076/NCL/2012 Deed No.116 dated 26 April 2012 which has undergone several changes, most recently in accordance with Addendum X signed on 26 April 2020 with a facility limit of Rp. 12,850,000,000 and a facility period up to 25 April 2021.
- b Credit facility based on Working Capital Loan Agreement No. CRO.DPS/0075/KMK/2012 Deed No.114 dated 26 April 2012 which has undergone several changes, most recently in accordance with Addendum IX signed on 24 April 2020 with facility limit amounting to Rp 30,000,000,000 and the facility period up to 25 April 2021.
- c Credit facility based on Working Capital Loan Agreement Number: CRO.DPS/0046/KMK/2014 Deed Number : 66 which has undergone several changes, most recently in accordance with Addendum V signed on 24 April 2020 with a facility limit amounting to Rp 10,000,000,000 and the facility period up to 25 April 2023.

The outstanding balance of PT GIEB Indonesia's short-term bank loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 30,366,763,088 and Rp 32,094,744,651, respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

PT Laras Astra Kartika

Pada tanggal 26 Desember 2019 sesuai dengan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit No. B.055/SPPK/ADK-PLG/08/2019 telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT Bank BRI Agroniaga Tbk.

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja-Pinjaman Rekening Koran
Plafon : Rp 7.000.000.000
Bunga : 12% per tahun
Jangka waktu : 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2020

Pada tanggal 30 Juni 2020 telah dilakukan perpanjangan fasilitas kredit modal kerja dengan nomor B.070 - OL/KC/PLG/06/2020 telah ditandatangani perjanjian fasilitas kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT BRI Agro Niaga Tbk.

Jenis kredit : Kredit Modal Kerja-Pinjaman Rekening Koran
Plafon : Rp 7.000.000.000
Bunga : 12% per tahun
Jangka waktu : 9 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2021

Saldo utang bank jangka pendek PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 6.993.369.007.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

PT Laras Astra Kartika

On 26 December 2019 based on loan facilities agreement No. B.055/SPPK/ADK-PLG/08/2019 point to the letter has been sign Credit Agreement between PT Laras Astra Kartika and PT Bank BRI Agroniaga Tbk.

Types of credit : Working Capital Loan-Account Statement Loan
Credit line : Rp 7,000,000,000
Interest : 12% per annum
Time period : 9 August 2019 until 9 August 2020

On 30 June 2020 has been extended a working capital credit facility with a number B.070-OL/KC/PLG/06/2020 signed a credit facility agreement between PT Laras Astra Kartika and PT BRI Agro Niaga Tbk.

Types of credit : Working Capital Loan-Account Statement Loan
Credit line : Rp 7,000,000,000
Interest : 12% per annum
Time period : 9 August 2020 until 9 August 2021.

The balance of short-term bank loan of PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 6,993,369,007.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah Tbk

PT Rajawali Nusindo

Berdasarkan akad plafon No. 06 tanggal 24 april 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Arminawan, SH, Notaris di jakarta, Perusahaan telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT Bank BNI Syariah Tbk dengan maksimum plafond sebesar Rp 250.000.000.000.

Berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 11 Juli 2019 Notaris Arminawan, SH. perihal Perubahan Plafon Pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan ditingkatkan menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 24 April 2019 sampai dengan 23 April 2020.

Berdasarkan Adendum Akad Plafon Pembiayaan Nomor 190/ADD-ADMP/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dibawah tangan dengan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 24 april 2020 sampai dengan 23 april 2021.

Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut diatas berupa piutang senilai Rp 150.000.000.000, persediaan barang senilai 150 M , tanah terletak di Minahasa, Sulawesi utara yang telah dibebankan diperingkat pertama, tanah terletak di Denpasar serta Lampung dan diikat gadai.

Saldo utang Bank PT Rajawali Nusindo dari PT Bank BNI Syariah pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 465.542.162.971 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 439.823.698.079.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank BNI Syariah Tbk

PT Rajawali Nusindo

Based on the ceiling agreement No. 06 dated 24 April 2018 made by and before Arminawan, SH, a Notary in Jakarta, the Company has received a financing facility from PT Bank BNI Syariah Tbk with a maximum ceiling of Rp. 250,000,000,000.

Based on Deed Number 03 dated 11 July 2019 Notary Arminawan, SH. Regarding the Change in Financing Ceiling, the value of the financing facility is increased to Rp 500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) with a facility period of 12 (twelve) months starting from 24 April 2019 to 23 April 2020.

Based on the Financing Ceiling Agreement Addendum Number 190/ADD-ADMP/2020 dated 9 September 2020 which was made under hand with an extension of the period of 12 months from 24 April 2020 to 23 April 2021.

Collateral for the loan facility is in the form of receivables worth Rp 150,000,000,000, inventory of goods worth 150 billion, land is in Minahasa, North Sulawesi, which has been charged at the first rank, land is in Denpasar and Lampung and tied up with pawns.

The balance of PT Rajawali Nusindo short-term bank loans from PT Bank Bank BNI Syariah per 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 465,542,162,971 and Rp 439,823,698,079, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah Tbk (lanjutan)

PT Mitra Rajawali Banjaran

Sesuai surat dari PT BNI Syariah No.BNISya/CRD/422/SKP.I/093/R mengenai Surat Keputusan Pencairan Pembiayaan Batch 6 dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 330/MSY800/884/XI/19.

Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Modal Kerja
Plafon : Rp 2.413.032.920 (80%)
Keperluan : Pembiayaan Musyarakah modal kerja dari PT RNI kepada PT Mitra Rajawali Banjaran Objek

Pembiayaan : Laba kotor atas pembiayaan modal kerja produksi ADS oleh PT Mitra Rajawali Banjaran.

Share
Pembiayaan : Bank Rp 2.413.032.930 (80%)
Nasabah Rp 603.258.232 (20%)

Jangka waktu : 6 bulan sejak penandatanganan akad. Sampai dengan saat ini belum diperpanjang.

Jaminan : Tanah dan bangunan kantor PG Rajawali II, 12 bidang tanah dengan bangunan Pabrik Gula Tersana Baru di Babakan Kabupaten Cirebon bersertifikat SHGB, 9 bidang tanah dan bangunan Ciampel dan Kersana atas nama PT Pabrik Gula Rajawali II.

Saldo utang bank jangka pendek PT Mitra Rajawali Banjaran dari PT Bank BNI Syariah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Nihil dan Rp 9.850.908.738.

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank BNI Syariah Tbk (continued)

PT Mitra Rajawali Banjaran

In accordance with a letter from PT BNI Syariah No.BNISya / CRD / 422 / SKP.I / 093 / R regarding Decision of Batch 6 Financing Agreement and Musyarakah Funding Agreement No. 330 / MSY800 / 884 / XI / 19.

*Type of Financing : Working Capital Financing
Ceiling : Rp 2,413,032,920 (80%)
Used for : Musyarakah capital financing worked from PT RNI to PT Mitra Rajawali Banjaran*

*The object
Funding : Gross profit on working capital financing for ADS production by PT Mitra Rajawali Banjaran.*

*Share it
Funding : Bank Rp 2,413,032,930 (80%)
Customer Rp. 603,258,232 (20%)*

Duration : 6 months from signing the contract. Until now it has not been extended.

Collateral : Land and office building of PG Rajawali II, 12 plots of land with the building of the Tersana Baru Sugar Factory in Babakan, Cirebon Regency, certified by SHGB, 9 plots of land and Ciampel and Kersana buildings on behalf of PT Gula Rajawali II Factory.

PT Mitra Rajawali Banjaran's short-term bank loan balances from PT Bank BNI Syariah as of December 31, 2020 and 2019, Nil and Rp 9,850,908,738, respectively.

25. Utang bank (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

PT Mitra Rajawali Banjaran

Berdasarkan Perjanjian Kredit *Back to Loan* No. 914 tanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Widawati, SH, Mkn, Tangerang Selatan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) dengan PT Perusahaan Pengembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Mitra Rajawali Banjaran dan disetujui untuk memberikan Kredit Modal Kerja Debitur dan Grup Usaha maksimal sebesar Rp 1.000.000.000.000.

Jangka waktu pembayaran angsuran kredit 12 bulan terhitung dari 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Agustus 2020. Biaya bunga dibayarkan tanggal 23 setiap bulan dan pokok pinjaman bias dibayarkan pada saat jatuh tempo. Agunan kredit di atas berupa penempatan giro PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan grup usaha nominal minimal 100% dari jumlah penarikan dan dilakukan pemblokiran. Bunga yang dikenakan atas *Floating rate* tergantung tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BJB.

Saldo utang bank jangka pendek PT Mitra Rajawali Banjaran dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp 7.600.000.000.

PT Laras Astra Kartika

Surat PT RNI (Persero) Tbk No 495/Spmh.RNI.01/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 perihal permohonan penarikan fasilitas KMK – *Cash collateral* PT Laras Astra Kartika dengan nilai kredit Rp 2.000.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki agunan pokok berupa penempatan giro PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan grup usaha dengan nominal minimal sebesar 100% dari jumlah penarikan dan dilakukan pemblokiran; LTV sebesar 100% dari nilai penempatan giro yang dijadikan agunan dan penempatan dana yang dijadikan agunan kredit dapat dilakukan secara bertahap.

Saldo utang bank jangka pendek PT Laras Astra Kartika dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp 2.000.000.000.

25. Bank loans (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk**

PT Mitra Rajawali Banjaran

Based on the *Back to Loan* No. Credit Agreement. 914 dated 9 August 2019 made before Notary Widawati, SH, Mkn, South Tangerang between PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten, Tbk (BJB) with PT Rajawali Nusantara Indonesia National Economic Development Company (Persero), PT Mitra Rajawali Banjaran and were approved to provide Capital Credit The work of the Debtor and Business Group is a maximum of Rp 1,000,000,000,000.

The repayment period is 12 months from 9 August 2019 to 9 August 2020. The interest fee is paid on the 23rd of the month and the principal can be paid on due date. The credit collateral is in the form of demand deposits of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and the group nominal business must be at least 100% of the amount drawn and blocked. The interest charged on the floating rate depends on the interest rate set by the BJB.

PT Mitra Rajawali Banjaran's short-term bank loan balances from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk as of 31 December 2020 and 2019, Rp 7,600,000,000, respectively.

PT Laras Astra Kartika

Letter of PT RNI (Persero) Tbk No. 495 / Spmh.RNI.01 / X / 2019 dated 2 October 2019 regarding the request for withdrawal of the KMK Cash Collateral facility of PT Laras Astra Kartika with a credit value of Rp 2,000,000,000. The loan facility has principal collateral in the form of demand deposits of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and a business group with a nominal nominal of at least 100% of the total withdrawal and blocked; LTV of 100% of the value of the demand deposits placed as collateral and the placement of funds used as credit collateral can be done in stages.

PT Laras Astra Kartika's short-term bank loan balances from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk as of 31 December 2020 and 2019, Rp 2,000,000,000.

25. Utang bank (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (lanjutan)**

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring

Entitas menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) sesuai dengan salinan akta perjanjian kredit Nomor 914 tanggal 9 Agustus 2019. Batas pinjaman fasilitas KMK - Cash Collateral sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan bunga berkisar 2,5% per tahun yang jatuh tempo sampai tanggal 9 Agustus 2020. Fasilitas ini telah dipakai entitas pada tahun 2019.

Fasilitas pinjaman tersebut memiliki agunan pokok berupa penempatan giro PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan grup usaha dengan nominal minimal sebesar 100% dari jumlah penarikan dan dilakukan pemblokiran; LTV sebesar 100% dari nilai penempatan giro yang dijadikan agunan dan penempatan dana yang dijadikan agunan kredit dapat dilakukan secara bertahap.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan SP3K 0625/KJA-KOM/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 telah menyetujui perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan SP3K 0625/KJA-KOM/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 telah menyetujui untuk mengeluarkan PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring dari Co-Debitur (grup usaha).

Saldo utang bank jangka pendek PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing nihil dan Rp 2.000.000.000.

25. Bank loans (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (continued)**

PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring

The Entity has obtained loan facilities from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk in the form of working capital loan (KMK) in accordance with the loan agreement deed number 914 dated on 9 August 2019. The limit of the loan facility for KMK – Cash collateral amount to Rp 1.000.000.000.000 with interest loan is exempted 2.5% per annum due until 9 August 2020. This facility has been used in 2019.

The loan facility has principal collateral in form of demand deposits of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and business group with a nominal of at least 100% of total withdrawal and blocked, LTV of 100% of the value of the demand deposits placed as collateral and the placement of funds used as collateral for loans can be done in stages.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk based on SP3K 0625/KJA-KOM/VIII/2020 dated 4 August 2020 has agreed to extend the credit facility to PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk based on SP3K 0625/KJA-KOM/VIII/2020 dated 4 August 2020 has agreed to issue PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring from the Co-Debtor (business group).

The balance of PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring short-term bank loans from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk per 31 December 2020 and 2019 amounted to Nil and Rp 2,000,000,000, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (lanjutan)**

PT Rajawali Nusindo

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dr. Agung Iriantoro, SH., MH., PT Rajawali Nusindo mendapatkan fasilitas *corporate financing* dengan tingkat bunga 9.75% per tahun dan limit kredit sebesar Rp 280.000.000.000,- dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Rajawali Nusindo

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Swadana Lembaga (KSL) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 95.000.000.000 (sembilan puluh lima miliar rupiah) sesuai Perjanjian Kredit Nomor 0000101402305191 tanggal 23 Mei 2019 dengan kewajiban membayar provisi sebesar 0,50% dari plafond pinjaman atau sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) diatas suku bunga deposito.

Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut di atas (*cross collateral*) berupa deposito berjangka yang diblokir atas nama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan senilai Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang ditempatkan pada Bank yang diikat secara gadai. Saldo utang bank jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Nihil dan Rp 95.000.000.000

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk (continued)**

PT Rajawali Nusindo

Based on the Deed of Credit Agreement No. 23 dated 18 May 2020 made by and before the Notary Dr. Agung Iriantoro, SH., MH., PT Rajawali Nusindo obtained a corporate financing facility with an interest rate of 9.75% per annum and a credit limit of Rp 280,000,000,000, - within 12 (twelve) months from the date of signing the credit agreement.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Rajawali Nusindo

On 23 May 2019, the Company again obtained a Self-Loan Institution (KSL) loan facility with a loan ceiling of Rp 95,000,000,000 (ninety-five billion rupiah) in accordance with Credit Agreement Number 0000101402305191 dated 23 May 2019 with an obligation to pay a provision of 0.50% from the loan ceiling or in the amount of Rp 475,000,000 (four hundred seventy million rupiah) with a credit period of 12 (twelve) months from 23 May 2019 to 24 May 2020 with an effective interest rate of 0.75 % (zero point seven five percent) above the deposit rate.

Collateral for the above loan facility (*cross collateral*) in the form of time deposits that are blocked on behalf PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the holding company obtained Rp 100,000,000,000 (Rupiah) provided by the Bank that was officially bound by a pawn. Short-term bank loan balances at 31 December 2020 and 2019 amounted to Nil and Rp 95,000,000,000

31 Desember 2020

31 December 2020

25. Utang bank (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

PT Bank DKI

PT Rajawali Nusindo

Pada tanggal 27 Mei 2019, Perusahaan kembali memperoleh fasilitas pinjaman Kredit *Cash Collateral* dengan plafond pinjaman sebesar Rp 140.000.000.000 sesuai Perjanjian Kredit Nomor 0784/GKM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan kewajiban membayar biaya administrasi kredit sebesar Rp 105.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 dengan tingkat bunga efektif sebesar 1,00% p.a diatas suku bunga deposito yang dijaminakan dan dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku di Bank ekuivalen sebesar 8,75% yang dapat berubah sewaktu waktu, dan ditinjau setiap saat dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah kredit.

Berdasarkan adendum perjanjian kredit No. 2016/GKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, plafon sebesar Rp 140.000.000.000 telah diubah menjadi Rp 150.000.000.000. Jaminan atas fasilitas pinjaman tersebut di atas (*cross collateral*) berupa giro senilai Rp 150.000.000.000 atas nama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan yang diikat secara gadai dan dilengkapi surat kuasa mencairkan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Modal Kerja Nomor 07 tanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. Agung Iriantoro, SH.,MH., perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk tambahan modal kerja transaksional Covid 2019 dengan plafon sebesar Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah). Fasilitas kredit diberikan untuk jangka waktu sejak tanggal Akta Perjanjian Kredit sampai dengan 31 Januari 2021 dengan jaminan berupa deposito, aset tanah bangunan di semarang dan solo serta piutang dan potensi piutang atas proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.

Saldo utang bank jangka pendek PT Rajawali Nusindo dari PT Bank DKI pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 195.000.000.000 dan Rp 150.000.000.000

25. Bank loans (continued)

Subsidiaries(continued)

PT Bank DKI

PT Rajawali Nusindo

On 27 May 2019, the Company again obtained a Cash Collateral Loan facility with a loan ceiling of Rp 140,000,000,000 in accordance with Credit Agreement Number 0784 / GKM / V / 2019 dated 27 May 2019 with the obligation to pay credit administration fees in the amount of Rp. 105,000,000 with a credit period of 12 months from 27 May 2019 to 28 May 2020 with an effective interest rate of 1.00% pa above the guaranteed deposit rate and can be reviewed at any time in accordance with the applicable interest rate at the Bank equivalent to 8.75% that can change at any time, and is reviewed at any time from the withdrawal date to the date repayment of credit amount.

Based on the deed of debt recognition No. 2016/GKM/XII/2019 tanggal 13 December 2019, the plafond of Rp 140,000,000,000 has been changed to Rp 150,000,000,000 The collateral for the above loan facility (*cross collateral*) is in giro of Rp 150,000,000,000 in the name of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the holding company which is bound by pledge and is equipped with a power of attorney to withdraw.

Based on the Working Capital Agreement Deed No. 07 dated 14 September 2020 drawn up by and in front of Dr. Agung Iriantoro, SH., MH., The company obtained a financing facility for additional Covid 2019 transactional working capital with a ceiling of Rp 80,000,000,000 (eighty billion rupiah). The credit facility is provided for a period from the date of the Credit Agreement to 31 January 2021 with collateral in the form of deposits, building land assets in Semarang and Solo as well as receivables and potential receivables for projects financed by Bank DKI.

The balance of PT Rajawali Nusindo short-term bank loans from PT Bank DKI per 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 195.000.000.000 and Rp 150,000,000,000, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

26. Utang usaha

26. Trade payables

	2020	2019	
Pihak berelasi			Related parties
PT Phapros Tbk	-	181.485.115.962	PT Phapros Tbk
PT Madu Baru	-	700.001	PT Madu Baru
Lain-lain	105.723.003	-	Others
Sub jumlah pihak berelasi	105.723.003	181.485.815.963	Subtotal related parties
Pihak ketiga			Third parties
Utang barang lokal	721.626.628.617	83.505.775.927	Local goods payables
Utang leveransir, pemborong dan pemasok	165.880.827.211	127.811.670.220	Wholesalers and suppliers payables
Utang kulit dan bahan kimia	16.814.936.467	8.021.070.864	Leathers and chemicals payables
Utang barang impor	3.831.531.851	-	Imported goods payable
Utang peternakan sapi	-	1.511.409.223	Cattle payables
Lain-lain	3.650.816	3.040.666	Others
Sub jumlah pihak ketiga	908.157.574.962	220.852.966.900	Subtotal third parties
Jumlah utang usaha	908.263.297.965	402.338.782.863	Total trade payables

Utang barang lokal tahun 2020 sebesar Rp 721.626.628.617 diantaranya sebesar Rp 620.711.278.997 merupakan utang atas pembelian tebu.

Local goods payables in 2020 amounted to Rp 721,626,628,617 which Rp 620,711,278,997 is a debt for purchasing sugar cane.

31 Desember 2020

31 December 2020

27. Utang lain-lain

27. Other payables

a. Utang lain-lain lancar

b. Other current payables

	2020	2019	
Pihak berelasi terdiri dari :			Related parties consist of :
Dividen (minoritas			Dividend (minority interest of
PT Phapros Tbk dan			PT Phapros Tbk and
PT Perkebunan Mitra Ogan)	12.211.498.926	12.211.498.927	PT Perkebunan Mitra Ogan)
PT Madu Baru	439.339.843	439.339.843	PT Madu Baru
Utang karyawan	433.301.150	-	Employee loan
PT Phapros Tbk	32.931.611	32.931.611	PT Phapros Tbk
PT Perkebunan Nusantara			PT Perkebunan Nusantara
III (Persero)	-	24.569.751.683	III (Persero)
Sub jumlah pihak berelasi	13.117.071.530	37.253.522.064	Subtotal related parties
Pihak ketiga terdiri dari :			Third parties consist of :
Utang KUD dan Pengembangan			KUD and Development of
Perkebunan Rakyat	534.329.970.381	373.637.745.559	Smallholder Plantations
Uang muka pembelian	62.403.451.955	-	Down payment
Utang pembelian aset	13.825.770.410	-	Debt asset purchases
Utang DOC BJB	11.800.000.000	-	BJB DOC debt
Uang jaminan pekerjaan	5.363.811.638	16.036.100.472	Job security deposit
Jamsostek/ premi pensiun	2.925.926.318	3.111.214.284	Jamsostek/ pension premium
Utang dana pensiun	2.893.370.175	2.506.033.561	Pension fund liabilities
Utang penyertaan PT Tirta Marta	2.746.422.008	1.014.710.371	PT Tirta Marta debt equity
Titipan dan retribusi	917.067.482	-	Deposit and retribution
Utang dana PUKK dan			Partnership and environmental
bina lingkungan	71.324.438	107.704.438	guidance payables
PT Pasir Tengah	-	344.020.786	PT Pasir Tengah
Lain-lain	90.936.354.042	46.873.507.142	Others
Sub jumlah pihak ketiga	728.213.468.847	443.631.036.613	Subtotal third parties
Jumlah utang lain-lain	741.330.540.377	480.884.558.677	Total other payables

31 Desember 2020

31 December 2020

27. Utang lain-lain (lanjutan)

27. Other payables (continued)

a. Utang lain-lain lancar

a. Other current payables

Rincian utang kepada KUD/petani terdapat pada
Entitas Anak sebagai berikut :

*Details of loan to KUD/farmers are in the
Subsidiaries as follows :*

	2020	2019	
PT PG Rajawali II	305.808.479.455	243.115.072.563	PT PG Rajawali II
PT PG Rajawali I	167.464.638.749	92.033.040.791	PT PG Rajawali I
PT PG Candi Baru	56.320.877.590	33.863.500.500	PT PG Candi Baru
PT Perkebunan Mitra Ogan	4.735.974.587	4.626.131.705	PT Perkebunan Mitra Ogan
Jumlah utang kepada KUD	534.329.970.381	373.637.745.559	Total loans to KUD

Utang KUD adalah dana kelompok tani I koperasi yang merupakan dana hasil pencairan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE-Tebu) Kemitraan MT 2013/2014 sampai dengan MT 2014/2015 dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya kepada Kelompok Tani dan Koperasi Primer yang pengelolaannya diserahkan kepada Unit-unit pabrik gula di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru dan PT Perkebunan Mitra Ogan.

KUD payable is a fund of farmer group I cooperative which is fund of disbursement of Credit of Food Resistance and Energy (KKPE-Sugarcane) Partnership of MT 2013/2014 until MT 2014/2015 from Bank or other Financial Institution to Farmer Group and Primary Cooperative whose management is handed over to Sugar factory units in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru dan PT Perkebunan Mitra Ogan.

b. Utang lain-lain tidak lancar

b. Other non current payables

	2020	2019	
Pihak berelasi terdiri dari :			Related parties consist of :
PT Phapros Tbk	140.015.571.287	-	PT Phapros Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	26.232.666.749	-	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Lain-lain	699.199	-	Others
Sub jumlah pihak berelasi	166.248.937.235	37.253.522.064	Subtotal related parties

31 Desember 2020

31 December 2020

28. Biaya yang masih harus dibayar

28. Accrued expenses

	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	29.619.977.004	23.644.811.776	Salary and allowance
Jasa produksi karyawan, Direksi dan Komisaris	14.744.482.071	45.868.297.018	Employees', Director and Commissioner production service
Beban pengangkutan dan distribusi	8.631.046.906	4.362.911.327	Freight and distribution expenses
Kantor, umum dan administrasi	6.559.288.090	24.879.116.147	Office, general and administrative
Biaya produksi	2.061.402.630	34.662.171.352	Production expenses
Premi pensiun	1.950.531.164	1.866.936.401	Pension premium
Jamsostek	988.758.940	1.292.528.638	Jamsostek
Beban lainnya	14.829.073.791	27.107.314.023	Other expenses
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	79.384.560.596	163.684.086.682	Total accrued expenses

Rincian biaya yang masih harus dibayar lain-lain diantaranya merupakan akumulasi saldo biaya yang masih harus dibayar lain-lain di beberapa entitas anak PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk.

The details of accrued expenses include the accumulated balance of other accrued expenses in the subsidiaries PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk.

29. Pendapatan diterima dimuka

29. Unearned revenues

	2020	2019	
Uang muka penjualan CPO dan PK	22.332.432.155	18.784.427.732	Unearned revenue of CPO and PK
Sewa gedung/ gudang dan lainnya	6.345.655.042	3.263.746.051	Lease building/ warehouses etc.
Uang muka penjualan gula Tetes, alkohol dan lain-lain	-	32.000.000.000	Unearned revenue sugar molasses, alcohol and etc
Pendapatan diterima di muka lainnya	4.745.099	1.335.481.141	Other unearned revenue
Jumlah pendapatan diterima dimuka	28.682.832.296	55.383.654.924	Total unearned revenues

31 Desember 2020

31 December 2020

30. Surat berharga jangka menengah (MTN)

30. Medium Term Notes (MTN)

Saldo MTN sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah :

The balance of MTN until 31 December 2020 and 2019 is :

	2020	2019	
Utang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Current maturity of liability
PT PG Rajawali I (MTN I)	250.000.000.000	-	PT PG Rajawali I (MTN I)
PT PG Rajawali I (MTN II)	250.000.000.000	-	PT PG Rajawali I (MTN II)
PT RNI (MTN I)	-	77.000.000.000	PT RNI (MTN I)
PT RNI (MTN II)	-	388.000.000.000	PT RNI (MTN II)
Diskonto atas MTN			Discounted of MTN of
PT PG Rajawali I	(2.321.766.684)	-	PT PG Rajawali I
Utang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	497.678.233.316	465.000.000.000	Current maturity of liability
Utang jangka panjang setelah Dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term bank loans -net of current portion
PT PG Rajawali I (MTN I)	-	250.000.000.000	PT PG Rajawali I (MTN I)
PT PG Rajawali I (MTN II)	-	250.000.000.000	PT PG Rajawali I (MTN II)
Diskonto atas MTN			Discounted of MTN of
PT PG Rajawali I	-	(7.012.446.319)	PT PG Rajawali I
Utang jangka panjang setelah Dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	-	492.987.553.681	Long-term bank loans -net of current portion

Induk Perusahaan

Perusahaan menerbitkan MTN dengan pokok sebesar Rp 77.000.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu tanggal 13 April 2017 dan bunga 9,75% per tahun dan Rp 388.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar rupiah) dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu tanggal 9 Juni 2017 bunga 10% per tahun.

MTN tersebut dipergunakan untuk *refinancing* hutang dan modal kerja Entitas Anak serta investasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan perusahaan kepada PT Pefindo dalam rangka rating surat utang perusahaan sesuai dengan surat No. 186/RNI.02/XI/2016.

Holding Company

The Company issued MTN at principal amount of Rp 77,000,000,000 (seventy seven billion rupiah) with 3 years period since the issuance date of MTN that is 13 April 2017 and interest at 9.75% and Rp 388,000,000,000 (three hundred and eighty eight billion rupiah) with 3 years period since the issuance date of MTN that is 9 June 2017 and interest at 10%.

The MTN are used for refinancing, its debt and working capital of subsidiaries, and investment. This is in line with statement of the company to PT Pefindo in order to notes rating of the Company under the letter No. 186/RNI.02/XI/2016.

31 Desember 2020

31 December 2020

30. Surat berharga jangka menengah (MTN) (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan surat permohonan Direksi ke Komisaris No. 34/RNI.01/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 diusulkan penerbitan *Medium Term Notes* PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan total Rp 465.000.000.000 untuk keperluan *refinancing* Kredit Modal Kerja (KMK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan modal kerja giling PT PG Rajawali II dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui surat No. S-06/RNI.00/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Kemudian berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017, RUPS menyetujui secara prinsip atas pendanaan investasi dari perbankan atau pihak ketiga khusus untuk investasi pengembangan usaha sebesar maksimal Rp 1.138.000.000.000 dengan rencana pendanaan melalui penerbitan obligasi, MTN, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) ataupun pinjaman perbankan baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

Kemudian setelah menerbitkan MTN, terdapat perubahan peruntukkan MTN dari sebelumnya *refinancing* KMK dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan modal kerja PT PG Rajawali II menjadi ditambah *refinancing* utang bank (BNI, BRI, & BRI Agro) untuk PT PG Rajawali II dan PT Perkebunan Mitra Ogan serta modal kerja PT Perkebunan Mitra Ogan dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sesuai dengan surat Direksi ke Dewan Komisaris No. 180.1/RNI.01/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris melalui surat No. S-24/RNI.00/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

Surat Utang Jangka Menengah I (MTN I) diterbitkan dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun dengan periode jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 13 April 2020. Sedangkan MTN II diterbitkan dengan tingkat suku bunga 10,00% per tahun dengan periode jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 9 Juni 2020.

30. Medium Term Notes (MTN) (continued)

Holding Company (continued)

Based on the Application Letter of Director to Commissioner No. 34/RNI.01/II/2017 dated 23 February 2017 it was proposed of issued Medium Term Notes of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) amounting to Rp 465,000,000,000 for the purpose of *refinancing* Working Capital Loans from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and working capital mills of PT PG Rajawali II and have been approved by Board of Commissioners through letter No. S-06/RNI.00/III/2017 dated 7 March 2017.

Then based on Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) about Approval of Working Plan and Corporate Budget (RKAP) and Corporate Partnership Program and Community Development (RKA-PKBL) in 2017 dated 10 January 2017, RUPS approved principally that investment of funding from banking or third party especially for business development investment with maximum of Rp 1,138,000,000,000 with investment plan through bond issuance, MTN, Limited Participation Fund (RDPT) or bank loans either partial or as a whole.

Then after the issuance of MTN, there are changes in purpose of MTN from previously for *refinancing* working capital loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and working capital of PT PG Rajawali II to added bank loans *refinancing* (BNI, BRI, & BRI Agro) for PT PG Rajawali II and PT Perkebunan Mitra Ogan and also working capital of PT Perkebunan Mitra Ogan and PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) under the Director's Letter to Board of Commissioners No. 180.1/RNI.01/VIII/2017 dated 18 August 2017 and has been approved from Board of Commissioner through letter No. S-24/RNI.00/VIII/2017 dated 23 August 2017.

Medium Term Debt I (MTN I) issued at an interest rate of 9.75% per annum with a maturity period of 3 (three) years until 13 April 2020. While MTN II was issued at an interest rate of 10.00% per a year with a maturity period of 3 (three) years up to 9 June 2020.

31 Desember 2020

31 December 2020

30. Surat berharga jangka menengah (MTN) (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

Di tahun 2020 telah dilakukan pelunasan MTN I sebesar Rp 77.000.000.000 dan II sebesar Rp 388.000.000.000.

Entitas Anak

PT PG Rajawali I

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) I PT PG Rajawali I Tahun 2018 yang diaktakan di hadapan Notaris I Made Kartijaya, S.H, dalam aktanya No. 24 tanggal 15 Mei 2018, Entitas telah menerbitkan MTN dengan informasi sebagai berikut:

Agen pemantau : PT Astra Kapital Asia
Arranger : PT Bank Bukopin Tbk
Agen pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Nilai pokok MTN yang diterbitkan adalah Rp 500.000.000.000 yang diterbitkan secara berseri yaitu masing-masing MTN I dengan nilai pokok Rp 250.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu tanggal 17 Mei 2018 dengan bunga sebesar 8,25% per tahun, serta MTN II dengan nilai pokok Rp 250.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu tanggal 31 Mei 2018 dengan bunga sebesar 8,25% per tahun.

Bunga atas MTN dibayarkan setiap 6 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan, kecuali bunga MTN terakhir yang akan dibayarkan bersamaan dengan tanggal jatuh tempo MTN. Pelunasan seluruh pokok MTN dilakukan pada tanggal jatuh tempo.

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbit baik barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Per 31 Desember 2020, utang MTN dicatat sebagai liabilitas jangka pendek karena akan jatuh tempo pada 31 Mei 2021. Sedangkan per 31 Desember 2019, utang ini dicatat sebagai liabilitas jangka panjang karena jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun.

30. Medium Term Notes (MTN) (continued)

Holding Company (continued)

In 2020, MTN I paid in full of Rp 77,000,000,000 and II in the amount of Rp 388,000,000,000.

Subsidiaries

PT PG Rajawali I

Based on the Issuance and Appointment Monitoring Agents Appointment of Medium Term Notes (MTN) I Agreement, which were notarized on Notary I Made Kartijaya, S.H, in its deed No. 24 dated 15 May 2018, the Entity has issued MTN with information as follows:

Monitoring agents : PT Astra Kapital Asia
Arranger : PT Bank Bukopin Tbk
Paying agents : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

The principal value of MTN issued was Rp 500,000,000,000 which are issue in series, that are MTN I with a principal value of Rp 250,000,000,000 with 3 years period since the issuance date of MTN that is 17 May 2018 and an interest rate of 8.25% per annum, and MTN II with a principal value of MTN that is 31 May 2018 and an interest are of 8.25% per annum.

The interest of MTN will be paid every 6 months period since the date of issuance, except the last interest of MTN which will be paid together with the maturity date of the MTN. Repayment of all MTN principal is made on the due date.

The MTN is not guaranteed with special guarantees, but is guaranteed by the issuer's both movable and immovable properties, both existing and those which are acquired in the future.

As of December 31, 2020, MTN debt was recorded as a short-term liability because it will mature on 31 May 2021. Meanwhile, as of 31 December 2019, this debt was recorded as a long-term liability because it was due in more than one year.

31 Desember 2020

31 December 2020

31. Sukuk Ijarah

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menerbitkan Sukuk Ijarah dengan pokok sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu tanggal 2 August 2017. Setiap 6 (enam) bulan sekali perusahaan memberikan imbalan hasil sebesar 10%. Obyek sukuk ini adalah biaya tebang angkut gula PT PG Rajawali II.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah melunasi Sukuk Ijarah.

31. Sukuk Ijarah

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) issued Sukuk Ijarah at principal amount of Rp 200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) with terms of 3 (three) years period since the issuance date of MTN that is 2 August 2017. Every 6 (six) months the company provides benefit at 10%. The objection of this Sukuk is freight and cutting cost of PT PG Rajawali II.

As of 31 December 2020, the Company has paid the Sukuk Ijarah.

32. Utang Rekening Dana Investasi

Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.189.619.753.527 dan Rp 1.190.968.682.523 disajikan dalam konsolidasian Perusahaan sebagai berikut :

32. Investment fund account

The outstanding loan balance as of 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 1,189,619,753,527 and Rp 1,190,968,682,523, respectively, is presented in the consolidated terms of the Company as follows :

	2020	2019	
Utang RDI yang telah jatuh tempo	22.381.291.446	2.400.547.119	Mature investment fund account
Utang RDI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.167.238.462.081	1.188.568.135.404	Long term investment fund account
Jumlah utang Rekening Dana Investasi	1.189.619.753.527	1.190.968.682.523	Total investment fund account
Utang RDI yang telah jatuh tempo :			Mature investment fund account :
Utang RDI PT RNI	22.083.980.569	2.103.236.245	Investment fund account of PT RNI
Utang RDI PT PG Rajawali II	297.310.877	297.310.874	Investment fund account of PT PG Rajawali II
Jumlah	22.381.291.446	2.400.547.119	Total
Utang RDI PT RNI yang telah jatuh tempo :			Mature investment fund account of PT RNI :
RDI-265/DP3/1994 :			RDI-265/DP3/1994 :
Kewajiban	5.227.979.000	1.742.659.665	Liabilities
Pembayaran	(1.568.393.715)	(1.394.127.732)	Payment
Sub jumlah	3.659.585.285	348.531.933	Subtotal
RDI-302/DP3/1996 :			RDI-302/DP3/1996 :
Kewajiban	3.808.055.125	1.269.351.708	Liabilities
Pembayaran	(1.142.416.507)	(1.015.481.366)	Payment
Sub jumlah	2.665.638.618	253.870.342	Subtotal
RDI-330/DP3/1998 :			RDI-330/DP3/1998 :
Kewajiban	22.512.509.546	7.504.169.850	Liabilities
Pembayaran	(6.753.752.880)	(6.003.335.880)	Payment
Sub jumlah	15.758.756.666	1.500.833.970	Subtotal
Jumlah utang RDI PT RNI yang telah jatuh tempo	22.083.980.569	2.103.236.245	Total mature investment fund account of PT RNI

31 Desember 2020

31 December 2020

32. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

32. Investment fund account (continued)

	2020	2019	
Utang RDI PT PG Rajawali II yang telah jatuh tempo :			Mature investment fund account of PT PG Rajawali II :
RDI-213/DP3/1993 :			RDI-213/DP3/1993 :
Pokok pinjaman	179.091.000	39.798.000	Principal loan
Kewajiban lainnya	(90.043.767)	49.249.230	Other liabilities
Sub jumlah	89.047.233	89.047.230	Subtotal
RDI-218/DP3/1993 :			RDI-218/DP3/1993 :
Pokok pinjaman	402.163.720	80.432.744	Principal loan
Kewajiban lainnya	(193.900.076)	127.830.900	Other liabilities
Sub jumlah	208.263.644	208.263.644	Subtotal
Jumlah utang RDI PT PG Rajawali II yang telah jatuh tempo	297.310.877	297.310.874	Total mature investment fund account of PT PG Rajawali II
Jumlah utang RDI yang telah jatuh tempo	22.381.291.446	2.400.547.119	Total mature investment fund account
Utang RDI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun :			Long term investment fund account
Utang RDI PT RNI	1.020.069.578.692	1.041.101.941.139	Investment fund account of PT RNI
Utang RDI PT PG Rajawali II	147.168.883.389	147.466.194.265	Investment fund account PT PG Rajawali II
Jumlah	1.167.238.462.081	1.188.568.135.404	Total
RDI-265/DP3/1994 :			RDI-265/DP3/1994 :
Pokok pinjaman	174.265.966.667	174.265.966.667	Principal loan
Pembayaran	(1.742.659.682)	(1.394.127.732)	Payment
Dipindah ke utang jatuh tempo	(3.485.319.333)	(348.531.933)	Transferred to maturity liabilities
Sub jumlah	169.037.987.652	172.523.307.002	Subtotal
RDI-302/DP3/1996 :			RDI-302/DP3/1996 :
Pokok pinjaman	126.935.170.833	126.935.170.833	Principal loan
Pembayaran	(1.269.351.727)	(1.015.481.367)	Payment
Dipindah ke utang jatuh tempo	(2.538.703.417)	(253.870.341)	Transferred to maturity liabilities
Sub jumlah	123.127.115.689	125.665.819.125	Subtotal
RDI-330/DP3/1998 :			RDI-330/DP3/1998 :
Pokok pinjaman	750.416.984.862	750.416.984.862	Principal loan
Pembayaran	(7.504.169.814)	(6.003.335.880)	Payment
Dipindah ke utang jatuh tempo	(15.008.339.697)	(1.500.833.970)	Transferred to maturity liabilities
Sub jumlah	727.904.475.351	742.912.815.012	Subtotal
Jumlah utang RDI PT RNI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.020.069.578.692	1.041.101.941.139	Long-term investment fund account of PT RNI

31 Desember 2020

31 December 2020

32. Utang Rekening Dana Investasi (lanjutan)

32. Investment fund account (continued)

	2020	2019	
Utang RDI PT PG Rajawali II yang jatuh tempo lebih dari satu tahun :			Long-term Investment fund account of PT PG Rajawali II :
RDI No: AMA-213/DP3/2008 :			RDI No: AMA-213/DP3/2008 :
Pokok angsuran	44.167.426.496	44.523.615.417	Principal installment
Dipindahkan ke utang jatuh tempo	(89.047.230)	(356.188.920)	Transferred to maturity liabilities
Sub jumlah	44.078.379.266	44.167.426.497	Subtotal
RDI No: AMA-218/DP3/2008 :			RDI No: AMA-218/DP3/2008 :
Pokok angsuran	103.298.767.767	104.131.822.344	Principal installment
Dipindahkan ke utang jatuh tempo	(208.263.644)	(833.054.576)	Transferred to maturity liabilities
Sub jumlah	103.090.504.123	103.298.767.768	Subtotal
Jumlah utang RDI PT PG Rajawali II yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	147.168.883.389	147.466.194.265	Total long-term Investment fund account of PT PG Rajawali II
Jumlah utang RDI yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.167.238.462.081	1.188.568.135.404	Total long-term Investment fund account

33. Utang sewa pembiayaan

33. Lease payable

	2020	2019	
Bagian sewa jatuh tempo dalam satu tahun:			Current lease payables
ACC Finance	5.959.755.770	2.498.099.203	ACC Finance
BCA Finance	95.645.326	147.947.232	BCA Finance
PT Toyota Astra Motor	-	129.131.298	PT Toyota Astra Motor
PT Astra Sedaya Finance	28.169.148	-	PT Toyota Astra Motor
Jumlah utang sewa bagian jatuh tempo dalam satu tahun	6.083.570.244	2.775.177.733	Total current lease payables
Bagian sewa jangka panjang			Long-term lease payables
BCA Finance	627.646.559	178.243.352	BCA Finance
PT Astra Sedaya Finance	-	4.788.163.433	PT Astra Sedaya Finance
ACC Finance	-	28.169.148	ACC Finance
Jumlah utang sewa bagian jangka panjang	627.646.559	4.994.575.933	Total long-term lease payables
Jumlah utang sewa pembiayaan	6.711.216.803	7.769.753.666	Total lease payables

Utang sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset yang bersangkutan (Lihat Catatan 17). Perjanjian sewa ini membatasi Entitas Anak PT GIEB Indonesia, dan PT Mitra Kerinci untuk melakukan penjualan dan pemindahan hak atas aset sewa pembiayaan.

These lease payables were secured by the related asset (See Note 17). The lease restricted Subsidiaries of PT GIEB Indonesia and PT Mitra Kerinci for the sale and transfer of rights on the lease asset.

Tidak ada klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi. Tidak ada pembatasan signifikan yang ditetapkan oleh perusahaan sewa guna usaha (lessor) dalam perjanjian sewa pembiayaan dengan entitas anak terkait dengan penggunaan.

There are no clauses relating to extension or purchase and escalation options. There are no significant restrictions imposed by the lessor in the finance lease agreement with the subsidiary in connection with the use.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries
Notes to consolidated financial statements (continued)
 For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

34. Utang bank jangka panjang

34. Long term bank loans

	2020	2019	
Induk Perusahaan			Holding Company
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	459.000.000.000	459.250.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	139.383.227.701	83.122.290.001	PT Bank BNI Syariah
Jumlah utang bank induk Perusahaan	598.383.227.701	542.372.290.001	Total bank loan of holding Company
Entitas Anak			Subsidiaries
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Mitra Ogan	266.463.118.215	254.348.367.811	PT Perkebunan Mitra Ogan
PT Rajawali Citramass	9.738.281.729	34.640.444.117	PT Rajawali Citramass
Sub jumlah	276.201.399.944	288.988.811.928	Subtotal
PT Bank BNI Syariah			PT Bank BNI Syariah
PT PG Rajawali II	128.980.698.943	71.369.372.795	PT PG Rajawali II
PT Laras Astra Kartika	18.146.311.833	15.549.105.259	PT Laras Astra Kartika
Sub jumlah	147.127.010.776	86.918.478.054	Subtotal
PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk
PT Laras Astra Kartika	10.450.000.000	11.750.000.000	PT Laras Astra Kartika
Sub jumlah	10.450.000.000	11.750.000.000	Subtotal
Jumlah utang bank entitas anak	433.778.410.720	387.657.289.982	Total bank loan of subsidiaries
Dikurangi jumlah yang jatuh tempo satu tahun	(67.904.892.701)	(35.660.760.104)	Less current maturity
Jumlah utang bank jangka panjang	964.256.745.720	894.368.819.879	Total long term bank loan

Induk Perusahaan

Holding Company

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tahun 2018, Perusahaan menerima pinjaman kredit transaksi khusus dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Khusus No. 22 tanggal 22 Nopember 2018 dengan fasilitas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp 460.000.000.000 dengan jangka waktu 84 bulan dan suku bunga 9,5% per tahun dibayar efektif tiap bulan setiap tanggal 23 dan *reviewable* setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di bank. Perubahan suku bunga cukup diberitahukan secara tertulis dan bersifat mengikat. Pinjaman ini tidak dikenakan biaya provisi. Pinjaman ini digunakan untuk pelunasan pinjaman KMK BRI anak perusahaan atas nama PT PG Rajawali II.

In 2018, the Company received a special transaction credit loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in accordance with the Deed of Special Credit Agreement No. 22 dated 22 November 2018 with a special transaction loan facility of Rp 460,000,000,000 with a period of 84 months and an interest rate of 9.5% per year paid effectively every month on the 23rd and reviewable at any time according to the applicable interest rates in the bank. Changes in interest rates are simply notified in writing and are binding. This loan is not subject to provision fees. This loan was used to repay BRI subsidiary KMK loans on behalf of PT PG Rajawali II.

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Agunan atau jaminan kredit debitur menyerahkan tanah dan bangunan pabrik gula di Subang desa Pasir Bungur atas sertifikat guna usaha No 2 dengan uraian:

- Tanah seluas 23.595.140 m2
- Bangunan seluas 33.066 m2
- Berikut mesin dan peralatan pabrik seluruhnya diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 300.000.000.000

Tanah dan bangunan pabrik gula di Subang desa Pasir Muncang dengan uraian :

- Tanah seluas 16.095.690 m2
- Seluruhnya akan diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 180.000.000.000

Tanah dan bangunan pabrik gula di Subang di desa Sidajaya Cipunegara dengan uraian :

- Tanah seluas 3.405.200 m2
- Seluruhnya diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 30.000.000.000

Tanah dan bangunan pabrik gula di Subang di desa Manyingsal Cipunegara dengan uraian :

- Tanah seluas 11.509.353 m2
- Bangunan 1.673 m2
- Seluruhnya diikat hak tanggungan peringkat I dengan nilai Rp 60.000.000.000.

Saldo utang bank jangka panjang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 459.000.000.000 dan Rp 459.250.000.000.

PT Bank BNI Syariah Tbk

Pada tahun 2018, Perusahaan menerima pinjaman baru dari PT Bank BNI Syariah berdasarkan Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor 17 tanggal 24 Agustus 2018 dengan maksimum Rp 345.000.000.000 dan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak ditandatangani Akad Plafond untuk KMK dan investasi atau *refinancing* maksimal 84 bulan.

34. Long term bank loans (continued)

Holding Company (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

Collateral or credit guarantees from the debtor submitting land and sugar factory buildings in Subang, Pasir Bungur village on a certificate of use No. 2 with a description:

- *Land area of 23,595,140 m2*
- *Building area of 33,066 m2*
- *Following this, all machines and factory equipment are bound with mortgage rights rank I with a value of Rp 300,000,000,000*

Land and sugar factory building in Subang, Pasir Muncang village with the following description:

- *Land area of 16,095,690 m2*
- *All rights will be tied to rank I with a value of Rp 180,000,000,000*

Land and sugar factory building in Subang in the village of Sidajaya Cipunegara with descriptions:

- *Land area of 3,405,200 m2*
- *Entirely tied with security rights rank I with a value of Rp 30,000,000,000*

Land and sugar factory buildings in Subang in Manyingsal Cipunegara village with descriptions:

- *Land area of 11,509,353 m2*
- *Building 1,673 m2*
- *Entirely tied with security rights rank I with a value of Rp 60,000,000,000.*

The balance of long-term bank loans to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp 459,000,000,000 and Rp 459,250,000,000 respectively.

PT Bank BNI Syariah Tbk

In 2018, the Company receives a new loan from PT Bank BNI Syariah based on the Fund Facility Ceiling Agreement Number 17 dated 24 August 2018 with a maximum of Rp 345,000,000,000 and a period of 12 months from the signing of the Ceiling Agreement for working capital and investment or refinancing maximum 84 month.

31 Desember 2020

31 December 2020

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Induk Perusahaan (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah Tbk (lanjutan)

Atas fasilitas kredit tersebut, Perusahaan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan kantor dengan luas tanah 20.710 m² dan luas bangunan 6.801 m², terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46, Kel. Sukapura, Kec. Kejaksana, Kota Cirebon; 8 bidang tanah satu hamparan dengan bangunan Pabrik Gula Tersana Baru terletak di Jl. Pangeran Sutajaya Babakan Desa Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon; 8 bidang tanah satu hamparan terletak di Jl. Raya Kersana, Brebes, Desa Ciampel, Cigendong, dan Kersana.

Saldo utang bank jangka panjang kepada PT Bank BNI Syariah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 139.383.227.701 dan Rp 83.122.290.001

Entitas Anak

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Perjanjian kredit KI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beberapa kali mengalami perpanjangan dan perubahan.

Perubahan fasilitas Kredit Investasi (KI) sebagai berikut:

KI MUBA 1 INTI

Plafond KI Pokok : Rp 80.553.000.000
Plafond KI IDC : Rp 11.739.000.000
Keperluan : Pembangunan PMKS di MUBA I kapasitas 30 ton/jam.

Bentuk kredit : Pseudo RIC dengan maksimum Co. menurun.

Jenis kredit : Kredit Investasi.

Jangka waktu : 17 tahun 10 bulan terhitung sejak penandatanganan addendum pertama (4 Februari 2010) (termasuk *grace period*) atau sampai dengan Desember 2027.

34. Long term bank loans (continued)

Holding Company (continued)

PT Bank BNI Syariah Tbk (continued)

For the credit facility, the Company handed over collateral in the form of land and office buildings with a land area of 20,710 sqm and a building area of 6,801 sqm, located on Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46, Kel. Sukapura, Kec. Kejaksana, Cirebon; 8 plots of land in one stretch with the Tersana Baru Sugar Factory building located on Jl. Pangeran Sutajaya Babakan Desa Babakan Kec. Babakan Kab. Cirebon; 8 plots of land one stretch is located on Jl. Raya Kersana, Brebes, Desa Ciampel, Cigendong, and Kersana.

The balance of long-term bank loans to PT Bank BNI Syariah as of 31 December 2020 and 31 December 2019 amounted to Rp 139,383,227,701 and Rp 83,122,290,001 respectively.

Subsidiaries

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Perkebunan Mitra Ogan

Working capital credit and investment credit of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has been amended several times.

Amend to the Investment Credit facility (KI) as follows:

KI MUBA 1 INTI

Credit line : Rp 80,553,000,000
Amount of credit : Rp 11,739,000,000
Purposes : Construction of PMKS in MUBA I capacity of 30 tons / hour.

Category : Pseudo RIC with maximum Co. decreased.

Type of credit : Investment Loan

Time period : 17 years 10 months from the signing of the first addendum (4 February 2010) (including the grace period) or up to December 2027

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

Suku bunga : 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditangguhkan.

KI MUBA 2 INTI

Plafond KI Pokok : Rp 22.185.000.000
Plafond KI IDC : Rp 8.008.000.000
Jangka waktu : 16 tahun terhitung sejak tanggal akad kredit (termasuk *grace period* 4 tahun 6 bulan) atau sampai dengan Mei 2028.
Suku bunga : 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditangguhkan.

KI MUBA 2 KARET

Plafond KI Pokok : Rp 14.078.000.000
Plafond KI IDC : Rp 6.043.000.000
Jangka waktu : 17 tahun terhitung sejak tanggal akad kredit (termasuk *grace period* 6 tahun 6 bulan) atau sampai dengan Mei 2029.
Suku bunga : 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditangguhkan.

34. Long term bank loans (continued)

Subsidiaries (continued)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

Interest rate : 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

KI MUBA 2 INTI

Credit line : Rp 22,185,000,000
Amount of credit : Rp 8,008,000,000
Time period : 16 years from the signing of the first addendum (including the *grace period* 4 years 6 months) or up to May 2028.
Interest rate : 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

KI MUBA 2 RUBBER

Credit line : Rp 14,078,000,000
Amount of credit : Rp 6,043,000,000
Time period : 17 years from the date of credit agreement (including a *grace period* of 6 years 6 months) or until May 2029.
Interest rate : 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

KI SEMIDANG AJI INTI

Plafond KI Pokok	: Rp 78.198.000.000
Plafond KI IDC	: Rp 21.019.000.000
Jangka waktu	: 16 tahun terhitung sejak tanggal akad kredit (termasuk <i>grace period</i> 4 tahun 6 bulan) atau sampai dengan Mei 2028.
Suku bunga	: 9% per tahun dan dibayar secara tertib setiap tanggal 23 dengan ketentuan kewajiban bunga yang dibayarkan sebesar selisih antara beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang ditangguhkan.

Agunan kredit berupa:

1. Agunan pokok proyek MUBA I

- Kebun inti, HGU inti seluas 4.430 Ha (saat ini seluas 1.852,56 Ha telah terbit HGU dan seluas 2.577,44 Ha masih dalam proses sertifikasi),
- Kebun plasma, SHM masing-masing petani Plasma (saat ini telah terbit sebanyak 1.369 Ha sertifikasi) untuk luasan 2.900 Ha,
- Persediaan, berupa fidusia persediaan bahan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 31.810.000.000.
- Kebun inti, HGU inti seluas 4.430 Ha (saat ini seluas 1.852,56 Ha telah terbit HGU dan seluas 2.577,44 Ha masih dalam proses sertifikasi).
- Kebun plasma, SHM masing-masing petani untuk luasan 2.900 Ha masih dalam proses sertifikasi.
- Persediaan, berupa fidusia persediaan bahan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 74.755.000.000.

34. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

KI SEMIDANG AJI INTI

Credit line	: Rp 78,198,000,000
Amount of credit	: Rp 21,019,000,000
Time period	: 16 years from the date of credit agreement (including a <i>grace period</i> of 4 years 6 months) or until May 2028.
Interest rate	: 9% per annum and paid in an orderly manner on the 23rd with the provisions of interest obligations paid in the amount of the difference between the interest expense determined with the deferred interest expense.

Credit collateral are:

1. Principal collateral of MUBA I

- Core plantations, HGU covering 4,430 Ha (currently covering 1,852.56 Ha late in the issuance of HGU and covering an area of 2,577.44 Ha still in the process of certification),
- Plasma plantations, SHM for each Plasma farmer (currently 1,369 Ha certifications have been issued) for an area of 2,900 Ha,
- Inventories, in the form of fiduciary material inventory with a guarantee value of Rp 31,810,000,000.
- Core plantations, HGU covering 4,430 Ha (currently covering 1,852.56 Ha late in the issuance of HGU and covering an area of 2,577.44 Ha still in the process of certification),
- Plasma plantations, SHM for each farmer for an area of 2,900 Ha are still in the process of certification.
- Inventories, in the form of fiduciary material inventory with a guarantee value of Rp 74,755,000,000.

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

2. Agunan tambahan proyek MUBA I

Tanah beserta segala sesuatu yang ada di HGU No. 2 seluas 2.513,6 Ha yang terletak di desa Pagar Gunung dan Kota Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan. Atas tanah tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 76.625.000.000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp 79.375.000.000.

3. Agunan pokok proyek MUBA 2 dan Semidang Aji serta PMKS:

Kebun inti :

- MUBA tahap 2 (kelapa sawit), HGU inti (saat ini masih izin lokasi) seluas 585 Ha,
- MUBA tahap 2 (karet), HGU inti (saat ini masih izin lokasi) seluas 294,18 Ha,
- Semidang Aji (kelapa sawit), HGU inti (saat ini sudah HGU seluas 532,27 Ha dan lainnya masih berupa ijin lokasi) kelapa sawit seluas 2.070 Ha,

Kebun plasma :

- MUBA tahap 2 (kelapa sawit), SHM masing-masing petani plasma (saat ini masih berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah) untuk seluas 1.210 Ha.

4. Agunan tambahan proyek PT Perkebunan Mitra Ogan

- Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU No. 1 seluas 1.173,30 Ha yang terletak di Desa Peninjau, Kec. Peninjau, Kab. OKU, Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan, telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp35.000.000.000.
- Tanah beserta segala sesuatu yang ada di atas HGU No. 1 seluas 2.103,72 Ha yang terletak di Desa Lunggaian, Kec. Peninjau, Kab. OKU, Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Perkebunan Mitra Ogan, telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 65.000.000.000.

34. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

2. Addition collateral of MUBA I

Land and everything in HGU No. 2 covering 2,513.6 Ha located in Pagar Gunung and Kota Baru villages, Lubai District, Muara Enim Regency, South Sumatra on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan. The land has been bound with the First Rank Mortgage of Rp 76,625,000,000 and the Second Rank Obligation Certificate is Rp 79,375,000,000.

3. The principal collateral for the MUBA 2 and Semidang Aji projects and PMKS:

Core plantations :

- MUBA stage 2 (oil palm), core HGU (currently location permits) covering 585 Ha,
- MUBA stage 2 (rubber), HGU core (currently still licensed location) covering an area of 294.18 Ha,
- Semidang Aji (oil palm), core HGU (currently HGU covering an area of 532.27 Ha and the other is still a location permit) for oil palm covering an area of 2,070 Ha,

Plasma plantations :

- MUBA stage 2 (oil palm), the SHM of each plasma farmer (currently still in the form of Recognition of Land Rights) for an area of 1,210 Ha.

4. Addition collateral of PT Perkebunan Mitra Ogan

- Land and everything above HGU No. 1 covering an area of 1,173.30 Ha located in the Peninjau Village, Peninjau Sub-district, OKU, South Sumatra Province on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan, the First Rank Mortgage has been placed in the amount of Rp 35,000,000,000.
- Land and everything above HGU No. 1 covering an area of 2,103.72 Ha located in Lunggaian Village, Peninjau Sub-district, OKU, South Sumatra Province on behalf of PT Perkebunan Mitra Ogan, the First Rank Mortgage has been placed in the amount of Rp 65,000,000,000.

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Perkebunan Mitra Ogan (lanjutan)

Saldo utang bank jangka panjang PT Perkebunan Mitra Ogan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 266.463.118.215 dan Rp 254.348.367.811.

PT Rajawali Citramass

Utang modal kerja BRI terdiri dari Kredit Investasi II yang mengacu pada Surat Penawaran BRI tanggal 7 Juni 2012 No. B.22-KC-IX/ADK/06/2012; adapun Kredit Investasi IV dan Kredit Modal Kerja (KMK) mengacu pada Offering Letter BRI no. B.1187-KC-IX/ADK/08/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang kemudian di addendum syarat kredit dalam Offering Letter No. B.1364-KC-IX/ADK/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Selanjutnya kembali di addendum perjanjian kredit pada tanggal 11 April 2017 No. B.609-KC-IX/ADK/04/2017. Dana hasil pencairan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Pseudo Rekening Koran dengan ketentuan pembayaran pokok pinjaman dibayar secara angsuran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan *Offering Letter* BRI No.B808/KW-IX/ADK/04/2019 tanggal 26 April 2019 dan akta notaris No.02 tanggal 29 April 2019 dihadapan Notaris Indra Istiningsih, S.H., M.Kn., Entitas melakukan restrukturisasi pinjaman Kredit Investasi IV pada tanggal 29 April 2019 yang mulai berlaku pada bulan Mei 2019. Fasilitas Kredit Investasi IV diturunkan dari Rp 14.000.000.000 menjadi Rp 11.221.480.378. Bunga pinjaman diturunkan dari 11% (sebelas persen) per tahun menjadi 7% (tujuh persen) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 3% (tiga persen) dibayar tertib tiap bulan sesuai tanggal realisasi restrukturisasi kredit.
2. 4% (empat persen) ditunda. Akumulasi bunga yang ditunda sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dibayar pada bulan Desember tahun yang bersangkutan, dan pada akhir periode restrukturisasi.

34. Long term bank loan (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Perkebunan Mitra Ogan (continued)

The balance of long-term bank loans of PT Perkebunan Mitra Ogan as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 266,463,118,215 and Rp 254,348,367,811, respectively.

PT Rajawali Citramass

BRI's working capital loan consists of Investment Credit II which refers to Offering Letter dated 7 June 2012 No. B.22-KC-IX/ADK/06/2012; As for Investment Credit IV and Working Capital Credit (KMK) refers to BRI's Offering Letter no. B.1187-KC-IX/ADK/08/2016 dated 27 July 2016 which was later in the addendum to the credit terms in Offering Letter No. B.1364-KC-IX/ADK/08/2016 dated 24 August 2016. Then again at the addendum of the credit agreement on 11 April 2017 No. B.609-KC-IX/ADK/04/2017. Funds from the disbursement of investment credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of a Pseudo Current Account with the terms of payment of loan principal paid in installments, with the following conditions:

Based on the BRI Offering Letter No.B808 / KW-IX / ADK / 04/2019 dated 26 April 2019 and notarial deed No.02 dated 29 April 2019 before Notary Indra Istiningsih, SH, M.Kn., the Entity restructured its Investment Credit IV loan on 29 April 2019 which came into force in May 2019. The Investment Credit IV facility was reduced from Rp 14,000,000,000 to Rp 11,221,480,378. Loan interest is reduced from 11% (eleven percent) per year to 7% (seven percent) per year, with the following conditions:

1. 3% (three percent) are paid in an orderly manner each month according to the date of credit restructuring realization.
2. 4% (four percent) is postponed. Accumulated interest deferred until December of the current year is paid in December of the year concerned, and at the end of the restructuring period.

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Citramass (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman tidak mengalami perubahan, yaitu 54 (dua puluh empat) bulan sejak akad kredit restrukturisasi, tetapi jadwal angsuran pokok pinjaman per bulan mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 1 (satu) sampai dengan bulan 46 (empat puluh enam) sebesar Rp 200.000.000 per bulan berubah menjadi pembayaran pokok pinjaman dari bulan 1 (satu) sampai dengan bulan 12 (dua belas) sebesar Rp 25.000.000 per bulan.
2. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan bulan 54 (lima puluh empat) sebesar Rp 225.000.000 per bulan berubah menjadi pembayaran pokok pinjaman dari bulan 13 (tiga belas) sampai dengan bulan 42 (empat puluh dua) sebesar Rp 50.000.000 per bulan.
3. Pembayaran pokok pinjaman dari bulan 55 (lima puluh lima) sebesar Rp 72.359.184 berubah menjadi pembayaran pokok pinjaman dari bulan 43 (empat puluh tiga) sampai dengan bulan 54 (lima puluh empat) sebesar Rp 785.123.365 per bulan.

Jenis Kredit : Kredit Investasi IV
Plafon : Rp 13.847.359.184
Bunga : 11% pa, ditinjau setiap ada perubahan suku bunga bank dan dibayar setiap bulan.

Jangka waktu: Sampai dengan bulan Juli tahun 2023.
Bentuk : Pseudo Rekening koran.
Agunan : Mesin-mesin milik PT Rajawali Citramass yang berkedudukan di Dusun Sidolegi, Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Tujuan : Kredit investasi pembiayaan pembelian mesin dan peralatan produksi karung plastik, dengan TPC sebesar Rp 21.352.905.450 dengan sharing dana debitur sebesar Rp 7.505.546.266 atau 35,17%.

34. Long term bank loan (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Citramass (continued)

The loan period has not changed, which is 54 (twenty four) months since the restructuring credit agreement, but the principal installment schedule per month has changed as follows:

1. The principal repayment of loans from 1 (one) month to 46 (forty six) in the amount of Rp. 200,000,000 per month is changed to the principal repayment of loans from 1 (one) to 12 (twelve) months in the amount of Rp 25,000,000 per month.
2. Principal loan repayments from 47 (forty seven) months to 54 (fifty four) months amounting to Rp 225,000,000 per month are changed to principal loan payments from 13 (thirteen) to 42 (forty two) months in the amount of Rp 50,000,000 per month.
3. The principal loan payment from month 55 (fifty five) in the amount of Rp 72,359,184 changed to principal loan payment from month 43 (forty three) to month 54 (fifty four) in the amount of Rp 785,123,365 per month.

Type of Credit : Credit investment IV
Credit line : Rp 13,847,359,184
Interest : 11% pa, reviewed at every change in bank interest rate and paid monthly.

Time period : Up to July 2023.
Category : Pseudo cash standing loan.
Collateral : Machinery owned by PT Rajawali Citramass which is located in Sidolegi village, Parengan Village, Jetis subdistrict, Mojokerto regency.

Purpose : Investment credit financing for the purchase of plastic sack machines and production equipment, with TPC amounting to Rp 21,352,905,450 sharing debtor funds in the amount of Rp7,505,546,266 or 35.17%.

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Rajawali Citramass (lanjutan)

Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja W/A
Plafon : Rp 25.000.000.000
Bunga : 12,5% pa, ditinjau setiap ada perubahan suku bunga bank dan dibayar setiap bulan.
Jangka waktu: 12 bulan.
Bentuk : Pseudo Rekening koran.
Agunan : Mesin-mesin milik PT Rajawali Citramass yang berkedudukan di Dusun Sidolegi, Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
Tujuan : Untuk tambahan modal kerja produksi dan perdagangan karung dan plastik berdasarkan kontrak/ PO dari perusahaan BUMN dan perusahaan grup PT RNI.

Saldo utang bank jangka panjang PT Rajawali Citramass per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 9.738.281.729 dan Rp 34.640.444.117.

PT Bank BNI Syariah Tbk

PT PG Rajawali II

Pada tanggal 30 Juli 2018 perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 160.000.000.000 dengan tingkat bunga 10,75%. Dalam jangka waktu 144 bulan pinjaman ini dijamin dengan hamparan bangunan PG Tersana Baru di Jl. Pangeran Sutajaya, Babakan dengan tanah SHGB seluas 292.695 m2 dan di Jl. Raya Kersana, Brebes, Desa Ciampel, Cigedong dan Kersana dengan tanah SHGB seluas 209.035 m2.

34. Long term bank loan (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

PT Rajawali Citramass (continued)

Type of Credit : Working Capital Loan W/A
Credit line : Rp 25,000,000,000
Interest : 12.5% pa, reviewed at every change in bank interest rate and paid monthly.
Time period : 12 months.
Category : Pseudo cash standing loan.
Collateral : Machinery owned by PT Rajawali Citramass which is located in Sidolegi village, Parengan Village, Jetis subdistrict, Mojokerto regency.
Purpose : For additional working capital, the production and trade of sacks and plastics is based on contracts/ Purchase order from state-owned companies and PT RNI group.

The balance of long-term bank loans of PT Citramass as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 9,738,281,729 and Rp 34,640,444,117 respectively.

PT Bank BNI Syariah Tbk

PT PG Rajawali II

On 30 July 2018 the company obtained a loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk with a maximum credit of Rp 160,000,000,000 at an interest rate of 10.75%. Within 144 months the loan was secured by a stretch of the PG Tersana Baru's building on Jl. Pangeran Sutajaya, Babakan with a land of SHGB covering an area of 292,695 sqm and on Jl. Raya Kersana, Brebes, Ciampel Village, Cigedong and Kersana with SHGB land covering an area of 209,035 sqm.

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah Tbk (lanjutan)

PT PG Rajawali II (lanjutan)

Pada tanggal 29 Jan 2019 perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank BNI Syariah dengan maksimum kredit sebesar Rp 345.000.000.000 dengan tingkat misbah/ margin 10,75%. Dalam jangka waktu pembiayaan 144 bulan ini dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan kantor dengan luas bangunan seluas 6.801 m2, delapan bidang tanah satu hamparan dengan bangunan PG Tersana Baru terletak di Jl. Pangeran Sutajaya Babakan. Desa Babakan, Kec. Babakan, Kab Cirebon dan delapan bidang tanah satu hamparan terletak di Jl. Raya Kersana – Brebes, Desa Ciampel, Cigedong dan Kersana.

Saldo utang bank jangka panjang PT PG Rajawali II per 31 Desember 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp 128.980.698.943 dan Rp 71.369.372.795.

PT Laras Astra Kartika

Utang Bank PT BNI Syariah pada PT Laras Astra Kartika memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah produktif dalam 4 tahap dengan jenis akad mutanaqisah, untuk keperluan pembiayaan *refinancing* untuk penerusan pembiayaan PT Laras Astra Kartika. Bentuk dan sifat kredit *Non revolving* dengan angsuran yang dibayarkan setiap bulan. Suku bunga untuk tahap 1 dan 2 sebesar 10,75% per zz, sedangkan tahap 3 dan 4 sebesar 12% per tahun. Jangka waktu masing-masing tahap kredit yaitu 114 hari. Jumlah untuk masing-masing kredit antara lain :

1. Tahap I = Rp 3.500.000.000
2. Tahap II = Rp 5.192.616.250
3. Tahap III = Rp 6.934.495.009
4. Tahap IV = Rp 2.726.201.574

34. Long term bank loan (continued)

PT Bank BNI Syariah Tbk (continued)

PT PG Rajawali II (continued)

On 29 January 2019 the company obtained a loan from PT Bank BNI Syariah with a maximum credit of Rp 345,000,000,000 with a misbah / margin of 10.75%. Within a period of 144 months this financing is guaranteed with a plot of land and office buildings with a building area of 6,801 m2, eight parcels of land one overlay with PG Tersana Baru building located on Jl. Prince Sutajaya Babakan. Desa Babakan, Kec. Babakan, Cirebon Regency and eight one-layered parcels of land are located on Jl. Raya Kersana - Brebes, Ciampel, Cigedong and Kersana Villages.

The balance of long-term bank loan of PT PG Rajawali II as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 128,980,698,943 and Rp 71,369,372,795, respectively.

PT Laras Astra Kartika

Bank Loan of PT BNI Syariah on PT Laras Astra Kartika obtained productive financing facilities for *mutanaqisah musyarakah* in four stages with *mutanaqisah contract types*, for *refinancing financing purposes* for the continued financing of PT Laras Astra Kartika. The form and nature of *Non revolving credit* with installments paid every month. The interest rates for stages 1 and 2 are 10.75% per annum while stages 3 and 4 are 12% per annum. The duration of each credit phase is 114 days. The amount for each credit includes:

1. Phase I = Rp 3,500,000,000
2. Phase II = Rp 5,192,616,250
3. Phase III = Rp 6,934,495,009
4. Phase IV = Rp 2,726,201,574

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah Tbk (lanjutan)

PT Laras Astra Kartika (lanjutan)

Saldo utang bank jangka panjang PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp 18.146.311.833 dan Rp 15.549.105.259.

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk

PT Laras Astra Kartika

Pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai dengan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit nomor B.038/SPPK/OPK/VIII/2017 menggantikan surat nomor B.072/SPPK/OPK/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015, menunjuk surat PT Laras Astra Kartika nomor DIR/LAK/X/125/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT BRI Agro Niaga Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

Tipe fasilitas : Kredit Modal Kerja - Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA)
Jangka waktu : Sampai dengan 31 Desember 2020
Plafon : Rp 1.500.000.000,-
Tujuan : Pembiayaan kebun dan pengolahan kelapa sawit

Tingkat Bunga : 12 % per tahun
Biaya Provisi : 0,5% dari plafon kredit

Saldo atas hutang bank KMK-KI PTA ini telah dilunasi di tahun 2020.

Tipe fasilitas : Kredit Modal Kerja - Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA)
Jangka waktu : Sampai dengan 31 Desember 2022
Plafon : Rp 15.250.000.000,-
Tujuan : Pembiayaan kebun dan pengolahan kelapa sawit

Tingkat Bunga : 12 % per tahun
Biaya Provisi : 0,5% dari plafon kredit

34. Long term bank loan (continued)

PT Bank BNI Syariah Tbk (continued)

PT Laras Astra Kartika (continued)

The balance of long-term bank loan of PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 18,146,311,833 and Rp 15,549,105,259 respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk

PT Laras Astra Kartika

On 22 August 2017 according to approval credit letter No. B.038/SPPK/OPK/VIII/2017 replaced letter No. B.072/SPPK/OPK/VIII/2015 dated 7 August 2015, designating a letter PT Laras Astra Kartika No. DIR/LAK/X/125/V/2017 dated 24 May 2017 has been signed a credit agreement between PT Laras Astra Kartika with PT BRI Agro Niaga Tbk with the following conditions:

Facility Type : Working Capital Loan – fixed installments (KMK-PTA)
Time period : until 31 December 2020

Credit line : Rp 1.500,000,000, -
Purpose : Financing plantation and maintenance costs of oil palm plantations

Interest Rate : 12% per annum
Provision Fee : 0.5% of the credit limit.

The balance of this KMK-KI PTA bank loan has been paid in 2020.

Facility Type : Working Capital Loan – fixed installments (KI-PTA)
Time period : Until 31 December 2022

Credit line : Rp 15,250,000,000, -
Purpose : Financing plantation and maintenance costs of oil palm plantations

Interest Rate : 12% per annum
Provision Fee : 0.5% of the credit limit

34. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk (lanjutan)

PT Laras Astra Kartika (lanjutan)

Pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai dengan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit nomor B.038/SPPK/OPK/VIII/2017 menggantikan surat nomor B.061/SPPK/OPK/06/2015 tertanggal 7 April 2015, menunjuk surat PT Laras Astra Kartika nomor DIR/LAK/X/125/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara PT Laras Astra Kartika dengan PT BRI Agro Niaga Tbk dan telah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan perjanjian No. B.070 - OL/KC/PLG/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tipe fasilitas : Kredit Modal Kerja - Pinjaman Tetap Angsuran (KI-PTA)
Jangka waktu : Sampai dengan 31 Desember 2025
Plafon : Rp 10.750.000.000,-
Tujuan : Pembiayaan kebun dan pengolahan kelapa sawit

Tingkat Bunga : 11 % per tahun

- Persediaan CPO, PK dan bahan kimia pertanian atas nama PT Laras Astra Kartika dengan nilai pengikatan Rp 3.600.000.000.
- Lahan perkebunan kelapa sawit berikut tanah, tanaman, mesin pengolahan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap yang melekat di atasnya dengan bukti kepemilikan SHGU nomor 01/ Desa Pandan Jaya, Kota Negara, Sri Mulyo/Kecamatan Buay Madang/Kabupaten Ogan Komering Ulu/Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT Laras Astra Kartika dengan luas tanah 963,5 hektar dengan nilai pengikatan sebesar Rp43.750.000.000.

Saldo utang bank jangka panjang PT Laras Astra Kartika per 31 Desember 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp 10.450.000.000 dan Rp 11.750.000.000.

34. Long term bank loans (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk (continued)

PT Laras Astra Kartika (continued)

On 22 August 2017 according to approval credit letter No. B.038/SPPK/OPK/VIII/2017 replaced letter No. B.061/SPPK/OPK/06/2015 dated 7 April 2015, designating a letter PT Laras Astra Kartika No. DIR/LAK/X/125/V/2017 dated 24 May 2017 has been signed a credit agreement between PT Laras Astra Kartika with PT BRI Agro Niaga Tbk and has been restructured in accordance with agreement No. B.070 - OL/KC/PLG/06/2020 dated June 30, 2020 with the following conditions:

Facility Type : Working Capital Loan – fixed installments (KI-PTA)
Time period : Until 31 December 2025
Credit line : Rp 10,750,000,000, -
Purpose : Financing plantation and maintenance costs of oil palm plantations
Interest Rate : 11% per annum

- Inventory of CPO, PK and agricultural chemicals in the name of PT Laras Astra Kartika with a binding value of Rp 3,600,000,000.
- Oil palm plantation land including land, plants, palm oil processing machinery, buildings and complementary facilities attached to it with ownership number 01/Pandan Jaya Village, Kota Negara, Sri Mulyo/Buay Madang District/Ogan Komering Ulu District/Province South Sumatra on behalf of PT Laras Astra Kartika with a land area of 963.5 hectares with a binding value of Rp 43,750,000,000.

The balance of long-term bank loan of PT Laras Astra Kartika as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 10,450,000,000 and Rp 11,750,000,000, respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

35. Pendapatan yang ditangguhkan

35. Deferred income

Akun pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Deferred income accounts as of 31 December 2020 and 2019 are as follows :

	2020	2019	
Nilai perolehan aset hibah Kemenperin pada PT PG Rajawali II	50.952.400.000	50.952.400.000	Acquisition value of grant assets of the Ministry of Industry at PT PG Rajawali II
PT Mitra Kerinci atas investasi LIKI	17.270.000.000	17.270.000.000	PT Mitra Kerinci on LIKI investment
Jumlah	68.222.400.000	68.222.400.000	Total
Amortisasi aset hibah yang sudah dibukukan sebagai aset tetap	-	-	Amortization of grant assets recorded as fixed assets
Saldo akhir	68.222.400.000	68.222.400.000	Ending balance

Sehubungan dengan adanya program bantuan langsung dari Kementerian Perindustrian dalam rangka melakukan revitalisasi pabrik gula di Indonesia sejalan dengan program swasembada gula yang dicanangkan oleh pemerintah, maka Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Industri Agro memberikan bantuan kepada pabrik-pabrik gula dalam meningkatkan kinerja produksi dengan cara memberikan bantuan pemerintah melalui dana APBN yang telah disetujui dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan aset. PT PG Rajawali II merupakan salah satu Perusahaan yang menerima bantuan tersebut berdasarkan surat pengajuan bantuan No. 543/1A.3/10/2011 tertanggal 28 Oktober 2012 dan No. 04/IA.3/BAST/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 kepada Kementerian Perindustrian.

In connection with the direct assistance program of the Ministry of Industry in order to revitalize the sugar factory in Indonesia in line with the sugar self-sufficiency program proclaimed by the government, the Ministry of Industry through the Directorate of Agro Industry provides assistance to sugar mills in improving production performance by providing government assistance through state budget funds that have been approved in the form of cash assistance and asset assistance. PT PG Rajawali II is one of the company that received such assistance based on the letter of appeal No. 543/1A.3/10/2011 dated 28 October 2012 and No. 04/IA.3/BAST/12/2011 to the Ministry of Industry.

Atas pengajuan yang telah disampaikan, PT PG Rajawali II telah menerima bantuan Hibah mesin sebesar Rp 50.952.400.000 yang diimplementasikan di unit PG Subang dari Kementerian Perindustrian. Selain daripada itu Perusahaan telah turut serta menandatangani pakta integritas program revitalisasi industri gula tersebut dengan No 10-GG/INSIP/12001 tertanggal 4 Januari 2012.

Upon submission, PT PG Rajawali II has received grant machine which is amounting to Rp 50,952,400,000 implemented in PG Subang unit from the Ministry of Industry. In addition, the Company has also signed the integrity pact of the sugar industry revitalization program with No. 10-GG/INSIP/12001 dated 4 January 2012.

Atas bantuan hibah aset tersebut, PT PG Rajawali II akan mengamortisasikan pendapatan yang akan ditangguhkan menjadi pendapatan berdasarkan estimasi umur penyusutan aset hibah yang telah digunakan dan telah direklasifikasikan menjadi aset tetap yang sebelumnya dicatat sebagai aset titipan.

Under the grant asset, PT PG Rajawali II will amortized the deferred revenue to income based on the estimated useful life of the depreciation of the used grant assets and has been reclassified to the property, plant and equipment previously recorded as entrusted assets.

31 Desember 2020

31 December 2020

36. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawannya sesuai dengan undang-undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Besarnya liabilitas dan beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan kerja karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

36. Employee benefits liability

The Company records employee benefits liability for its employees in accordance with Law No. 13/2003 on manpower. The amount of liabilities and expenses incurred in connection with the employee benefits plan is as follows:

	2020	2019	
Perubahan Liabilitas/ Aset Imbalan Pasti Neto :			Changes in Liabilities/ Assets of Net Defined Benefit
Saldo awal	(499.471.336.681)	(430.749.523.091)	Beginning balance
Pembayaran iuran Perusahaan	49.355.837.699	20.977.129.222	Contributions made by the Company
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan (selain terminasi)	36.816.040.193	115.972.560.484	Benefits paid by the Company (excluding termination)
Pendapatan (beban) yang diakui pada laporan laba/ rugi	(65.050.091.651)	(58.467.282.256)	Income (expense) recognized in profit/ loss statement
Pendapatan (beban) yang diakui pada OCI	(34.274.810.080)	(147.204.221.040)	Income (expense) recognized in other comprehensive income
Liabilitas/ (aset) imbalan pasti netto akhir tahun	(512.624.360.520)	(499.471.336.681)	Net defined Liability/ (Asset) at end of year
Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti			Changes in of Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)
Nilai kini kewajiban awal periode	955.080.882.081	858.859.502.662	PVDBO at beginning of period
Biaya jasa lalu	-	(1.692.594.774)	
Biaya jasa kini	32.971.662.879	30.135.407.051	Current service cost
Dampak kuartilment	-	(5.744.291.206)	Quartilement effect
Biaya bunga dari nilai kini kewajiban imbalan pasti	67.018.017.286	71.513.292.007	Interest cost on PVDBO
Pembayaran imbalan dari program pendanaan	(9.916.468.531)	(8.850.139.092)	Benefit payment from funding program
Pembayaran imbalan Perusahaan (selain imbalan terminasi)	(83.896.745.753)	(162.190.806.668)	Benefit payment from Company (excluding termination benefit)
Liabilitas atas <i>transfer in</i> karyawan	2.486.925.985	18.028.310.715	Liability assumed due to employee transferred in
Liabilitas atas <i>transfer out</i> karyawan (Keuntungan)/kerugian aktuarial	(4.113.613.400) 14.869.401.794	(16.947.438.755) 171.969.640.139	Liability released due to employee transferred out Actuarial (gains)/losses
Nilai kini kewajiban akhir periode	974.500.062.341	955.080.882.079	PVDBO at end of period

31 Desember 2020

31 December 2020

36. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

36. Employee benefits liability (continued)

	2020	2019	
Perubahan aset program			Changes in of plan assets
Nilai wajar aset program pada awal periode	455.609.545.398	438.870.846.145	Fair value of plan assets at beginning of period
Iuran Perusahaan pada periode berjalan	49.355.837.699	20.977.129.222	Company contributions during period
Iuran karyawan pada periode berjalan	2.954.466.237	3.184.411.910	Employee contributions during period
Pembayaran manfaat pensiun dari aset program	(56.997.174.041)	(55.068.385.299)	Benefits payment from plan assets
Bunga neto atas kewajiban (aset)	33.321.373.861	38.234.593.393	Net interest income on liabilities (assets)
Imbalan hasil atas aset program tidak termasuk bunga neto	(22.368.347.333)	9.410.950.027	Return on plan assets excluding net interest income
Nilai wajar aset program pada akhir periode	461.875.701.821	455.609.545.398	Fair value of plan assets at end of period
Penetapan jumlah yang diakui di laporan keuangan			Amounts recognized in the statement of financial position
Nilai masa kini liabilitas imbalan paska kerja	(974.500.062.341)	(955.080.882.079)	Present value of post employment benefit obligation (PVDBO)
Nilai wajar aset program	461.875.701.821	455.609.545.398	Fair value of plan assets
Kewajiban/aset imbalan pasti neto	(512.624.360.520)	(499.471.336.681)	Net defined benefit liability/ asset

37. Modal saham

37. Share capital

Pada tanggal 31 Mei 2017 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. SK-291/MBU/05/2017 tanggal 8 Mei 2017 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 11 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011956.AH.01.02 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 yang di antaranya meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp 600.000.000.000 menjadi Rp 4.100.000.000.000 terbagi atas 4.100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.027.425 lembar saham atau sebesar Rp 1.027.425.000.000.

On 31 May 2017, the Company amended the Articles of Association under Decree of the Minister of State Owned Enterprises as the Shareholder No. SK-291/MBU/05/2017 dated 8 May 2017 which is notarized under Deed No. 11 by Notary Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0011956.AH.01.02 year 2017 dated 2 June 2017 which amongst others increased the Company's Authorized Capital from Rp 600,000,000,000 to Rp 4,100,000,000,000 divided into 4,100,000 shares at par value of Rp 1,000,000 per share. From that the authorized capital stock has been issued and fully paid which are 1,027,425 shares or Rp 1,027,425,000,000.

31 Desember 2020

31 December 2020

37. Modal saham (lanjutan)

Pada tanggal 22 Mei 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham No. S-302/MBU/04/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011424.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 yang diantaranya menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia kedalam saham Perseroan berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian sebesar Rp 24.141.010.000 dan sebesar Rp 990.000 berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan/ disetor PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang semula Rp 1.027.425.000.000 menjadi sebesar Rp 1.051.567.000.000.

37. Share capital (continued)

On 22 May 2018 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) amended the Articles of Association based on the Decree of the Minister of BUMN as Shareholder No. S 302/MBU/04/2018 dated 4 May 2018 which was notarized by Notary Deed Number 14 dated 22 May 2018 made by Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Letter Decree Number AHU-0011424.AH.01.02 year 2018 dated 23 May 2018 which among others approved the addition of the State capital of the Republic of Indonesia into the Company's shares in the form of transfer of State Property to the Ministry in the amount of Rp 24,141,010,000 and Rp 990,000 from the capitalization of part of the reserves of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). With the addition of the capital, the issued/ paid-up capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) which was originally Rp 1,027,425,000,000 became Rp 1,051,567,000,000.

	2020	2019	
Modal Dasar	4.100.000.000.000	4.100.000.000.000	Authorized capital
Modal ditempatkan dan disetor	1.051.567.000.000	1.051.567.000.000	Issued and paid up capital

Nilai saham Pemerintah Negara Republik Indonesia pada Perusahaan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

The value of Government's shares of the Republic of Indonesia in the Company in 2020 and 2019 are as follows :

2020 dan/and 2019				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Total shares (lembar/ share)	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	Shareholder
Negara Republik Indonesia	1.051.567	100%	1.051.567.000.000	Republic of Indonesia

38. Tambahan modal disetor

a. Penyertaan modal negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), memutuskan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 24.141.010.000.
2. Penambahan tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

Pada tanggal 4 Mei 2018 Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Republik Indonesia melalui Surat No. S-302/MBU/04/2018 melakukan penambahan modal disetor atas penyertaan modal negara tersebut di atas.

b. Pengampunan pajak

Entitas Anak

PT Pabrik Gula Rajawali II

Pada tanggal 20 April 2017, perusahaan melaporkan surat pernyataan harta kepada Direktorat Jenderal pajak dengan nomor KET-620/PP/WPJ.19/2017 dan mendapatkan surat pengampunan pajak sebesar Rp 28.849.000 berupa aset tetap. Perusahaan mencatat tambahan modal disetor sebesar Rp 28.849.000 dan mencatat uang tebusan sebesar Rp 1.442.450 sebagai beban pajak pada laba rugi komprehensif tahun berjalan.

38. Additional paid up capital

a. State capital

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 Year 2017 concerning Addition of Government share Capital of the Republic of Indonesia Into Share Capital of Limited Liability Company of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), decides that the Republic of Indonesia shall increase the capital into share capital of PT Rajawali Nusantara Indonesia is as follows:

1. The value of the addition of state capital participation as referred to in Article 1 amounting to Rp 24,141,010,000.
2. The addition is derived from the transfer of state-owned goods at the Ministry of Industry that its procurement is derived from the State Budget in 2010.

On 4 May 2018 the Minister of State for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia through Letter No. S-302/MBU/04/2018 make additional paid-in capital for the state capital participation mentioned above.

b. Tax amnesty

Subsidiary

PT Pabrik Gula Rajawali II

On 20 April 2017, the Company reported the statement of property to the Directorate General of Taxes with KET-620/PP/WPJ.19/2017 and obtained a tax amnesty of Rp 28,849,000 in the form of fixed assets. The Company recorded an additional paid-in capital of Rp 28,849,000 and recorded a ransom of Rp 1,442,450 as tax expense in the current year's comprehensive income.

31 Desember 2020

31 December 2020

38. Tambahan modal disetor (lanjutan)

b. Pengampunan pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Pabrik Gula Candi Baru

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk program Pengampunan Pajak pada tanggal 28 Desember 2016. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-1550/PP/WPJ.19/2016 tanggal 31 Desember 2016, aset pengampunan pajak yang telah disetujui oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebesar Rp 400.000.000 dengan uang tebusan sebesar Rp 12.000.000.

PT Mitra Kerinci

Saldo tambahan modal disetor sebesar Rp 33.000.000 pada tahun 2017 merupakan transaksi pengampunan pajak atas persediaan barang jadi teh *low grade* dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dengan No. KET-336/PP/WPJ.19/2017 tanggal 5 April 2017.

39. Saldo laba

a. Saldo laba telah ditentukan penggunaannya

Akun ini merupakan saldo yang dibentuk dari sisa laba (rugi) yang ditahan untuk tujuan tertentu dan tujuan pengembangan usaha. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.056.633.742.444 dan Rp 1.126.779.889.526.

b. Saldo laba belum ditentukan penggunaannya

Saldo laba (rugi) yang belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 57.608.686.290 dan Rp (76.042.058.967).

38. Additional paid up capital (continued)

b. Tax amnesty (continued)

Subsidiary (continued)

PT Pabrik Gula Candi Baru

The Company has submitted the Letter of Declaration of Property to the Tax Amnesty program on 28 December 2016. Based on Tax Remission Certificate Number KET-1550/PP/WPJ.19/2016 dated 31 December 2016, tax amnesty assets approved by the DGT Regional Office of East Java I amounting to Rp 400,000,000 with a ransom of Rp 12,000,000.

PT Mitra Kerinci

The additional paid-in capital balance of Rp 33,000,000 in 2017 represents a tax amnesty transaction on low grade finished goods of tea stocks with Tax Amnesty Letter with No. KET-336/PP/WPJ.19/2017 dated 5 April 2017.

39. Retained earnings

a. Appropriated

This account represents the balance that is formed from the remaining retained earnings (losses) for a particular purpose and business development purposes. The appropriate retained earnings as of 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp 1,056,633,742,444 and Rp 1,126,779,889,526, respectively.

b. Unappropriated

Unappropriated retained earnings (losses) as of 31 December 2020 and 2019 amounting to Rp 57,608,686,290 and Rp (76,042,058,967), respectively.

31 Desember 2020

31 December 2020

40. Penjualan

40. Sales

Rincian pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of revenue for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
<u>Industri gula dan lainnya</u>			<u>Sugar industries etc.</u>
Gula dan tetes	3.138.969.376.252	3.021.761.832.382	Sugar and molasses
Alkohol, spiritus, dan arak	19.634.441.086	13.317.865.308	Alcohol, spirituous, arrack
Jumlah industri gula dan lainnya	3.158.603.817.338	3.035.079.697.690	Total sugar industries and others
<u>Perkebunan</u>			<u>Plantation</u>
Minyak kelapa sawit	65.994.076.361	91.275.445.113	Crude Palm Oil
Teh	64.568.190.466	79.792.111.664	Tea
Tandan Buah Segar	32.804.342.808	1.604.552.658	Fresh fruit bunches
Inti kelapa sawit	8.657.705.660	12.212.114.149	Palm kernel
Karet	4.972.422.748	1.029.607.393	Rubber
Jumlah perkebunan	176.996.738.043	185.913.830.977	Total plantations
<u>Obat-obatan dan alat kesehatan</u>			<u>Medicines and healthy tools</u>
Alat kesehatan	1.690.893.141.385	935.453.297.245	Healthy tools
Obat-obatan	750.553.115.742	1.125.609.095.776	Medicines
ASSP	30.841.090.673	23.592.113.626	Disposable syringe
Kondom	12.691.826.913	558.218.336	Condom
Jumlah obat-obatan dan alat kesehatan	2.484.979.174.713	2.085.212.724.983	Total medicines and healthy tools
<u>Perdagangan</u>			<u>Tradings</u>
Barang konsumen	912.375.487.827	784.794.694.133	Consumer goods
Karung plastik	142.408.183.363	154.728.864.345	Plastic bags
Beras	19.065.868.880	47.903.608.104	Rice
Pupuk	19.043.021.321	29.003.214.853	Fertilizer
Obat-obatan dan bahan kimia	15.839.530.431	17.109.745.565	Medicines and chemical
Kulit hewan dan barang jadi kulit	1.786.152.941	1.034.360.856	Animal leather and Finished goods leather
Jumlah perdagangan	1.110.518.244.763	1.034.574.487.856	Total tradings
<u>Pendapatan usaha lainnya</u>			<u>Other incomes</u>
Pendapatan properti MT Haryono	25.000.000.000	25.000.000.000	Property income of MT Haryono
Sewa gedung dan kantor	16.167.979.270	13.242.080.065	Building and office lease
Pendapatan strata title (KSO WRT)	-	78.944.705.882	Strata title revenue (KSO WRT)
Dividen	-	52.583.199.084	Devidend
Barang dan jasa lainnya	1.817.990.872	12.782.551.306	Other goods and services
Jumlah pendapatan usaha lainnya	42.985.970.142	182.552.536.337	Total other incomes
Jumlah pendapatan	6.974.083.944.999	6.523.333.277.843	Total revenue

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

40. Penjualan (lanjutan)

40. Sales (continued)

Gula dan tetes

Sugar and molasses

	Kuantum/ Quantum	Harga per ku/ Price per ku	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
<u>PT PG Rajawali I</u>			<u>PT PG Rajawali I</u>		
<u>Gula:</u>			<u>Sugar:</u>		
Penjualan tahun 2020	1.100.856	1.097.182	1.207.838.821.255	-	Sales in 2020
Penjualan tahun 2019	1.993.915	1.043.352	-	2.080.355.888.079	Sales in 2019
Subjumlah			1.207.838.821.255	2.080.355.888.079	Subtotal
<u>Tetes:</u>			<u>Molasses:</u>		
Penjualan tahun 2020	1.276.534	281.276	304.984.650.674	-	Sales in 2020
Penjualan tahun 2019	687.543	170.717	-	117.375.327.137	Sales in 2019
Subjumlah			304.984.650.674	117.375.327.137	Subtotal
<u>PT PG Rajawali II</u>			<u>PT PG Rajawali II</u>		
<u>Gula:</u>			<u>Sugar:</u>		
Penjualan tahun 2020	1.215.188	1.063.698	1.292.593.352.247	-	Sales in 2020
Penjualan tahun 2019	449.277	1.040.152	-	467.316.709.759	Sales in 2019
Subjumlah			1.292.593.352.247	467.316.709.759	Subtotal
<u>Tetes:</u>			<u>Molasses:</u>		
Penjualan tahun 2020	225.350	237.140	53.439.603.926	-	Sales in 2020
Penjualan tahun 2019	153.638	155.661	-	23.915.411.728	Sales in 2019
Subjumlah			53.439.603.926	23.915.411.728	Subtotal
<u>PT PG Candi Baru</u>			<u>PT PG Candi Baru</u>		
<u>Gula:</u>			<u>Gula:</u>		
Penjualan tahun 2020	212.678	1.092.039	232.252.425.133	-	Sales in 2020
Penjualan tahun 2019	306.944	1.048.497	-	321.829.771.815	Sales in 2019
Subjumlah			232.252.425.133	321.829.771.815	Subtotal
<u>Tetes:</u>			<u>Molasses:</u>		
Penjualan tahun 2020	165.917	288.461	47.860.523.017	-	Sales in 2020
Penjualan tahun 2019	64.649	169.667	-	10.968.780.401	Sales in 2019
Subjumlah			47.860.523.017	10.968.780.401	Subtotal
Jumlah penjualan gula			2.732.684.598.635	2.869.502.369.653	Total sugar sales
Jumlah penjualan tetes			406.284.777.617	152.259.462.729	Total molasses sales
Jumlah			3.138.969.376.252	3.021.761.832.382	Total

31 Desember 2020

31 December 2020

40. Penjualan

40. Sales

Alkohol, spiritus dan arak

Alcohol, spirituous, and arrack

	2020 (Liter)	2019 (Liter)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
Alkohol	943.800	734.340	12.440.394.961	7.396.403.546	Alcohol
Arak	184.000	161.000	7.194.046.125	5.921.461.762	Arrack
Jumlah	1.127.800	895.340	19.634.441.086	13.317.865.308	Total

Penjualan teh

Tea sales

	2020 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
Ekspor	103.805	70	2.351.332.534	1.481.351.480	Export
Lokal	3.250.658	3.947	62.216.857.932	78.310.760.184	Local
Jumlah	3.354.463	4.017	64.568.190.466	79.792.111.664	Total

Kelapa sawit dan karet

Crude Palm oil and rubber

	2020 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
Minyak sawit mentah	8.688.470	14.399	65.994.076.361	91.275.445.113	Crude Palm Oil
Inti sawit	2.171.230	3.824	8.657.705.660	12.212.114.149	Palm kernel
Tandan Buah Segar	20.012.819	1.377	32.804.342.808	1.604.552.658	Fresh fruit bunches
Karet	320.099	66	4.972.422.748	1.029.607.393	Rubber
Jumlah	31.192.618	19.666	112.428.547.577	106.121.719.313	Total

Penjualan karung

Sales of sack

	2020 (Lembar/ Sheet)	2019 (Lembar/ Sheet)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
Karung	46.782.448	46.008.081	142.408.183.363	154.728.864.345	Sack
Jumlah	46.782.448	46.008.081	142.408.183.363	154.728.864.345	Total

Kulit hewan dan barang jadi kulit

Animal leather and finished goods leather

	2020 (sq.ft/ pcs)	2019 (sq.ft/ pcs)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
Kulit hewan dan barang jadi kulit	161.869	101.660	1.786.152.941	1.034.360.856	Animal leather and finished goods leather
Jumlah	161.869	101.660	1.786.152.941	1.034.360.856	Total

Kondom dan alat suntik sekali pakai

Condom and disposable syringe

	2020 (gross/ pcs)	2019 (gross/ pcs)	2020 (Rp)	2019 (Rp)	
Kondom lokal	124.078	3.710	12.691.826.913	558.218.336	Local condom
Alat Suntik Sekali Pakai	36.775.900	23.647.200	30.841.090.673	23.592.113.626	Disposable syringe
Jumlah	36.899.978	23.647.200	43.532.917.586	23.592.113.626	Total

31 Desember 2020

31 December 2020

41. Beban pokok penjualan

41. Cost of sales

	2020	2019	
Industri gula, tetes dan lainnya			<u>Sugar industri, molasses, and others</u>
<u>Gula</u>			<u>Sugar</u>
Beban produksi :			Production expenses:
Tanaman	1.667.331.602.739	1.861.720.119.290	Plantations
HPP gula putih	345.856.195.476	-	- Cost of good sales of white sugar
HPP gula mentah	209.390.181.511	1.950.445.032	Cost of good sales of raw sugar
Pembuatan gula	154.027.178.482	167.141.568.508	Sugar manufacture
Beban penyusutan	103.078.569.515	121.481.695.825	Depreciation expense
Pengelolaan	99.933.235.238	111.112.891.762	Management
Pemeliharaan	87.909.516.500	131.353.606.493	Maintenance
Tebang dan angkut	49.789.505.429	62.779.991.263	Cutting and transport
Pembungkusan dan pengangkutan	345.739.511.649	27.982.300.575	Packaging and transportation
Jumlah	3.063.055.496.539	2.485.522.618.748	Total
Persediaan awal	37.647.670.546	97.883.899.758	Beginning inventory
Persediaan akhir	(706.753.477.653)	(37.647.670.546)	Ending inventory
Jumlah beban pokok penjualan gula	2.393.949.689.432	2.545.758.847.960	Total cost of sugar sold
<u>Tetes</u>			<u>Molasses</u>
Tanaman	203.875.085.618	125.303.698.454	Plantations
Tebang dan angkut	46.263.746.885	4.674.794.121	Cutting and transport
Pembuatan tetes	24.976.668.632	11.304.647.405	Molasses manufacture
Beban penyusutan	17.511.475.945	8.061.799.456	Depreciation expense
Pengelolaan	17.482.566.323	7.637.527.263	Management
Pemeliharaan	17.466.809.033	9.392.777.496	Maintenance
Jumlah	327.576.352.436	166.375.244.195	Total
Persediaan awal	270.319.802	5.376.599.742	Beginning inventory
Persediaan akhir	(12.029.706.613)	(270.319.802)	Ending inventory
Jumlah beban pokok penjualan tetes	315.816.965.625	171.481.524.135	Total cost of molasses sold
<u>Alkohol, spiritus, arak & lainnya</u>			<u>Alcohol, spirituous, arrack and others</u>
Alkohol, spiritus dan arak	17.293.827.815	10.912.384.102	Alcohol, spirituous, and arrack
Jumlah beban pokok penjualan alkohol, spiritus dan arak	17.293.827.815	10.912.384.102	Total cost of goods sold of alcohol, spirituous, and arrack
Total jumlah beban pokok industri gula, tetes, alkohol, spiritus, dan arak	2.727.060.482.872	2.728.152.756.198	Total cost of goods sold af sugar, molasses, alcohol, spirituous, and arrack

31 Desember 2020

31 December 2020

41. Beban pokok penjualan (lanjutan)

41. Cost of sales (continued)

	2020	2019	
<u>Perkebunan</u>			<u>Plantation</u>
Minyak kelapa sawit	71.587.452.554	113.251.751.860	Crude palm oil
Teh	49.888.448.795	62.258.328.081	Tea
Tandan buah segar	25.810.191.173	9.053.676.452	Fresh Fruit Bunches
Inti kelapa sawit	9.350.064.581	16.050.324.056	Palm kernel
Karet	1.787.386.251	5.376.405.188	Rubber
Jumlah beban pokok penjualan perkebunan	158.423.543.354	205.990.485.637	Total cost of sales of plantation
<u>Obat-obatan dan alat kesehatan</u>			<u>Medicines and medical tools</u>
Alat kesehatan	1.239.417.331.246	644.811.984.034	Medical equipments
Obat-obatan	651.401.741.522	983.576.076.050	Medicines
ASSP	20.869.412.567	18.549.500.875	ASSP
Kondom	9.316.779.700	340.435.878	Condom
Jumlah beban pokok penjualan farmasi dan kesehatan	1.921.005.265.035	1.647.277.996.837	Total cost of goods sold of pharmaceuticals and healthcare
<u>Perdagangan</u>			<u>Trading</u>
Barang konsumen	873.636.370.746	622.330.207.691	Consumer goods
Karung plastik	137.068.515.220	137.007.566.831	Plastic bags
Beras	18.197.235.816	45.816.150.279	Rice
Pupuk	16.675.090.662	26.333.154.799	Fertilizer
Obat-obatan dan bahan kimia	13.877.870.107	15.552.947.324	Medicines and chemical material
Kulit hewan dan barang jadi kulit	2.119.214.502	800.535.708	Animal leather and finished goods leather
Jumlah beban pokok penjualan perdagangan	1.061.574.297.053	847.840.562.632	Total cost of sales of trading
<u>Beban pokok penjualan usaha lainnya</u>			<u>Cost of other business sales</u>
Barang dan jasa lainnya	3.584.394.950	14.579.201.566	Other goods and services
Jumlah beban pokok penjualan usaha lainnya	3.584.394.950	14.579.201.566	Total cost of other business sales
Jumlah beban pokok penjualan	5.871.647.983.264	5.443.841.002.869	Total cost of goods sold

Beban pokok penjualan gula dan tetes merupakan beban pokok penjualan gula dan tetes di PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, dan PT PG Candi Baru.

The cost of selling sugar and molasses represent the cost of sugar and molasses sales in PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II and PT PG Candi Baru.

Beban pokok penjualan perkebunan merupakan beban pokok penjualan CPO, PK, karet, teh, dan TBS di PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci, dan PT Laras Astra Kartika.

The cost of sales of plantations represent the cost of sales of CPO, PK, rubber, tea and FFB in PT Perkebunan Mitra Ogan, PT Mitra Kerinci and PT Laras Astra Kartika.

Beban pokok penjualan obat-obatan dan alat kesehatan merupakan beban pokok penjualan obat-obatan dan alat kesehatan di PT Rajawali Nusindo, PT Mitra Rajawali Banjarnan dan PT PG Rajawali II.

Cost of sales of medicines and medical equipment represent the cost of sales of medicines and medical equipment at PT Rajawali Nusindo, PT Mitra Rajawali Banjarnan and PT PG Rajawali II.

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

41. Beban pokok penjualan (lanjutan)

Beban pokok penjualan alkohol, spiritus dan arak merupakan beban pokok penjualan alkohol, spiritus dan arak PT PG Rajawali II.

Beban pokok penjualan kondom dan ASSP merupakan beban pokok penjualan PT Mitra Rajawali Banjaran dan PT Rajawali Nusindo

Beban pokok penjualan pupuk merupakan beban pokok penjualan pupuk PT Rajawali Nusindo kepada pihak ketiga.

Beban pokok penjualan obat-obatan, dan bahan kimia merupakan beban pokok penjualan di PT Rajawali Nusindo.

Beban pokok penjualan karung plastik merupakan beban pokok penjualan karung plastik PT Rajawali Citramass, PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

Beban pokok penjualan kulit hewan merupakan beban pokok penjualan di PT Rajawali Tanjungsari.

41. Cost of sales (continued)

The cost of sales of alcohol, spirituous and arrack represent the cost of sales of alcohol, spirituous and arrack at PT PG Rajawali II.

The cost of condom and ASSP sales represent the cost of sales of PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Rajawali Nusindo

Cost of sales of fertilizer represent the cost of sales of fertilizer at PT Rajawali Nusindo to a third party.

Cost of sales of medicines and chemicals represent cost of goods sold in PT Rajawali Nusindo.

The cost of selling plastic bags represent cost of goods sold of plastic bags at PT Rajawali Citramass PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring.

Cost of sale of animal leather represent the cost of goods sold in PT Rajawali Tanjungsari.

42. Beban usaha

42. Operating expenses

	2020	2019	
<u>Beban umum dan administrasi</u>			<u>General and administrative expense</u>
Beban kantor dan umum	51.843.076.334	62.240.067.337	General and office expenses
Beban penyusutan	34.786.022.608	18.902.459.957	Depreciation expenses
Beban pemeliharaan gedung , mess dan sewa	27.865.836.861	28.014.495.288	Building maintenance, mess and rent expenses
Beban konsultan (yuridis dan audit)	15.572.780.959	11.316.481.204	Consultant (juridical and audit) expenses
Beban jamuan dan sumbangan	13.361.004.025	7.803.875.795	Representation and donations expenses
Beban pajak dan PBB	10.879.302.491	41.068.952.149	Tax expenses
Beban pengangkutan/ perjalanan	10.128.352.887	23.982.485.310	Travelling/ transportation expenses
Biaya penjualan gula dan tetes	8.472.969.975	-	The cost of sugar and molasses sales
Beban asuransi	7.563.578.963	4.217.045.897	Insurance expenses
Beban rapat, seminar, riset dan Pengembangan	5.384.703.202	11.576.226.555	Meeting, seminar, research and development expenses
Biaya koreksi perpajakan	3.564.994.017	-	Tax correction fee
Beban bank/ iklan/ komputerisasi	2.502.598.164	8.083.821.330	Bank / advertisement/ computerization expenses
Beban iuran, retribusi, perijinan dan keamanan	893.827.929	5.172.963.266	Contribution, retribution license, security expenses
Beban lainnya	14.273.259.617	25.141.736.378	Other expenses
Jumlah beban umum dan administrasi	207.092.308.032	247.520.610.466	Total general and administrative expenses
<u>Beban pegawai</u>			<u>Employee expenses</u>
Jaminan sosial pegawai	237.639.582.478	200.753.453.675	Employees social security
Beban gaji, pengobatan, dan premi pensiun	175.152.416.881	224.587.994.933	Salary, medical and pension premium expenses
Sub jumlah beban pegawai	412.791.999.359	425.341.448.608	Subtotal employee expenses

31 Desember 2020

31 December 2020

42. Beban usaha (lanjutan)

42. Operating expenses (continued)

	2020	2019	
<u>Beban penjualan</u>			<u>Selling expenses</u>
Beban promosi dan distribusi produk	18.838.713.653	28.038.942.324	Promotion and product distribution expenses
Beban pemeliharaan kendaraan	14.457.032.602	18.462.933.206	Vehicle maintenance expenses
Beban kirim dan asuransi	13.603.014.226	14.215.141.198	Delivery and insurance expenses
Sponsor dan seminar	10.915.854.731	20.028.886.881	Sponsorship and seminar
Dinas karyawan	10.707.241.835	17.348.012.099	Employee travel expenses
Beban distribusi kulit	563.277.740	452.208.009	Leather distribution expenses
Beban distribusi minyak sawit	316.530.048	2.334.836.981	Palm oil distribution expenses
Brosur, buku, dan lain-lain	221.147.880	462.680.136	Brochures, books, and others
Iklan dan pameran	93.607.499	561.320.156	Advertisement and exhibition
Promosi BM Diagnostic			BM Diagnostic promotion
Beban penjualan lainnya	8.160.529.928	7.203.076.732	Other selling expenses
Jumlah beban penjualan	77.876.950.142	109.108.037.722	Total selling expenses

43. Pendapatan (beban) lain-lain

43. Other income (expenses)

	2020	2019	
<u>Pendapatan lain-lain</u>			<u>Other income</u>
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	46.987.453.327	53.677.795.684	Deposits interest income and account income
Pendapatan lain-lain dari selisih nilai wajar aset biologis	17.386.232.959	7.469.073.666	Other income from differences in fair value of biological assets
Laba penjualan aset tetap	5.528.713.741	2.169.102.720	Gain on sales of fixed assets
Penjualan barang bekas	1.866.296.722	6.528.512.077	Sales of second-hand goods
Pendapatan klaim/ denda impor	312.764.577	5.634.921.283	Income claim/ import penalty
Denda keterlambatan pengambilan gula dan tetes	296.412.574	934.200.410	Delay penalty of taking sugar and molasses
Pendapatan sewa mesin	224.579.482	812.494.920	Machine rental income
Sewa gudang dan rumah dinas	169.269.522	4.998.945.245	Warehouse and official house lease
Pendapatan holtikultura	150.195.652	1.036.563.635	Horticultural income
Pemulihan piutang	103.672.020	103.241.408	Recovery of receivables
Penjualan cangkang	52.727.273	254.987.784	Shell sales
Pendapatan hak laba Perusahaan Asosiasi dan Anak	4.764.000	1.833.004.207	Earnings revenue of Associates and Subsidiaries Companies
Lain-lain	89.047.968.129	60.381.241.602	Others
Jumlah pendapatan lain-lain	162.131.049.978	145.834.084.641	Total other income

31 Desember 2020

31 December 2020

43. Pendapatan (beban) lain-lain (lanjutan)

43. Other income (expenses) (continued)

	2020	2019	
<u>Beban lain-lain</u>			<u>Other expenses</u>
Penyisihan dan penurunan nilai piutang	22.059.487.846	2.479.757.260	Allowance and impairment of receivables
Penyisihan dan penurunan persediaan	14.941.897.302	3.465.064.369	Allowance and impairment of inventories
Beban pajak penghasilan dan denda	10.056.617.804	55.298.685.515	Income tax expenses and penalty
Beban keamanan	6.446.212.972	14.304.669.268	Security cost
Selisih kurs	3.926.902.689	58.252.853	Forex difference
Beban non operasi	3.168.824.426	989.064.944	Non-operating expenses
Biaya jasa kontrak manajemen	799.924.301	299.665.190	Contract management service fees
Beban cadangan penurunan nilai aset dalam pelaksanaan	-	35.990.829.595	Allowance for impairment of asset in progress
Kerugian atas areal gagal panen	-	18.476.975.258	Loss from growth failure
Beban penyesuaian aktuarial	-	2.778.060.464	Actuarial adjustment expense
Lain-lain	39.246.036.165	47.983.793.588	Others
Jumlah beban lain-lain	100.645.903.505	182.124.818.304	Total other expenses

Beban gagal panen untuk tahun 2019 sebesar Rp 18.476.975.258 merupakan beban tanaman atas tebu yang terbakar dengan luas areal 2.818,98 Ha pada lahan PT PG Rajawali II Jatitujuh, Subang dan Puslitagro.

Harvest failure costs for 2019 amounted to Rp 18,476,975,258 representing the burden of plants on burning sugarcane with an area of 2,818.98 Ha on PT PG Rajawali II Jatitujuh land, Subang and Puslitagro.

44. Beban keuangan

44. Finance costs

	2020	2019	
<u>Beban keuangan</u>			<u>Finance costs</u>
Biaya bunga pinjaman	377.856.033.739	376.818.337.518	Bank interest expense
Jumlah beban keuangan	377.856.033.739	376.818.337.518	Total finance cost

Beban keuangan merupakan beban bunga atas bunga pinjaman Rekening Dana Investasi di Perusahaan atas RDI No. 265, 302, 324, dan 330 dan pinjaman RDI No. 213 dan 218 di PT PG Rajawali II, beban bunga atas pinjaman ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Sebagian bunga pinjaman RDI dikapitalisasi ke tanah MBAU tambahan bunga MTN dan Sukuk Ijarah.

Financing charges represent interest charges on the interest of investment fund account in the Company No.265, 302, 324, and 330 and investment fund account No.213 and 218 at PT PG Rajawali II, interest expense on loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Part of investment fund account interest is capitalized to the land of MBAU added interest of MTN and Sukuk Ijarah.

31 Desember 2020

31 December 2020

45. Informasi mengenai pihak berelasi

Grup merupakan suatu kelompok usaha dari sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Mengenai hubungan tersebut terdapat kemungkinan adanya transaksi yang dilakukan dengan kondisi dan syarat yang tidak sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Perusahaan menempatkan dan meminjam dana dari bank-bank yang dimiliki Pemerintahan dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- c. Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh pinjaman jangka panjang dalam bentuk Rekening Dana Investasi dalam mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga 18% per tahun.
- d. Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha dengan BUMN-BUMN lain atau Perusahaan yang tergabung dalam Grup PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang tidak dikonsolidasikan serta badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang.

Transaksi dengan pihak berelasi di bawah ini dilakukan dalam rangka usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan melakukan transaksi dengan PT Perkebunan Nusantara X dan XIV dalam rangka peningkatan kinerja pabrik gula.
- b. Perusahaan melakukan transaksi dengan PT PG Madu Baru dalam rangka melakukan kegiatan usaha pemberian jasa manajemen dan kucuran modal kerja.
- c. Perusahaan melakukan transaksi dengan PT Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka transaksi asuransi.

45. Related parties information

The Group represent a group of businesses as described below, in carrying out its operations in relation to and conducting transactions with related parties. Regarding the relationship there is a possibility that transactions are conducted with conditions and terms that are not the same if the transaction is done with a non-related party.

Nature of relationship with related parties are as follows:

- a. The Republic of Indonesia is represented by the Minister of State-Owned Enterprises as a shareholder of the Company and other SOEs having affiliated relationships through the capital participation of Government of Republic of Indonesia.
- b. The Company places and owes funds from Government-owned banks with normal terms and interest rates as applicable to third party customers.
- c. The Company and Subsidiaries obtain long-term loans in the form of Investment Fund Accounts denominated in Rupiah bearing interest at 18% per annum.
- d. The Company entered into agreements in the framework of business with other SOEs or companies incorporated in the unconsolidated PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Group and other authorized bodies or government agencies.

Transactions with related parties are as follows:

- a. The Company entered into transactions with PT Perkebunan Nusantara X and XIV in order to improve the performance of the sugar factory.
- b. The Company conducts transactions with PT PG Madu Baru in the framework of conducting business activities of providing management and dropping of working capital.
- c. The Company entered into transactions with PT Asuransi Jasa Indonesia in the framework of insurance transactions.

31 Desember 2020

31 December 2020

46. Perjanjian-perjanjian penting

PT Rajawali Nusindo

Berdasarkan perjanjian dengan PT Roche Indonesia Divisi Diagnostics, No. SPK/01/ 2014XII/V-I/FJ, Perusahaan berhak untuk memakai peralatan tertentu milik PT Roche Indonesia yang ditempatkan di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandaou, di Jl. Raya Manado - Tanawangko, Kec. Malalayang Manado. Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2014 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2019.

Perjanjian ini terakhir kali diperbaharui untuk untuk memperpanjang periode perjanjian dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.

Berdasarkan perjanjian dengan PT Novapharin, Perusahaan telah ditunjuk untuk mendistribusikan produk E-Catalog PT Novapharin Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Perjanjian ini terakhir kali diperbaharui untuk untuk memperpanjang periode perjanjian dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

PT Focus Distribusi Indonesia, cakupan wilayah tertentu. Jangka waktu perjanjian satu tahun, berakhir 31 Juli 2020, dapat diperpanjang. PT Focus Distribusi Nusantara, cakupan wilayah Jakarta, Pekanbaru, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, Bandung Barat, Banjarmasin, Bekasi Timur, Bogor, Depok, Gresik, Jember, Jepara, Kudus, dan Lombok dengan jangka waktu perjanjian satu tahun, berakhir 30 Desember 2019, dapat diperpanjang.

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Tokai Dharma Indonesia No. 154/SPK/PGA/TDI/XI/2018, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan/ menjual produk-produk PT Tokai Dharma Indonesia melalui outlet-outlet milik Perusahaan untuk wilayah/ Propinsi Pontianak, Balikpapan dan Banjarmasin. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Perjanjian ini terakhir kali diperbaharui untuk untuk memperpanjang periode perjanjian dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

46. Significant agreement

PT Rajawali Nusindo

Based on the agreement with PT Roche Indonesia Diagnostics Division, No. SPK / 01 / 2014XII / V-I / FJ, the Company has the right to use certain equipment of PT Roche Indonesia located at RSUP Prof. Dr. R.D. Kandaou, on Jl. Raya Manado - Tanawangko, Kec. Malalayang Manado. This agreement is effective for 5 (five) years, starting from 10 December 2014 and will expire on 9 December 2019.

This agreement was last amended to extend the period from 23 January 2020 to 22 January 2023.

Based on the agreement with PT Novapharin, the Company has been appointed to distribute PT Novapharin E-Catalog products. This agreement is effective from 4 January 2018 until 31 December 2019.

This agreement was last amended to extend the period from 01 January 2020 to 31 March 2020.

PT Focus Distribution Indonesia, certain area coverage. The term of the one-year agreement, ending 31 July 2020, can be extended. PT Focus Distribution Nusantara, coverage of Jakarta¹, Pekanbaru, Balikpapan, Samarinda, Kupang, Ambon, West Bandung, Banjarmasin, East Bekasi, Bogor, Depok, Gresik, Jember, Jepara, Kudus, and Lombok with a one-year agreement period, ending 30 December 2019, renewable

Based on the distribution agreement with PT Tokai Dharma Indonesia No. 166/SPK/PGA/ TDI/XI/2018, the Company is appointed to distribute / sell products of PT Tokai Dharma Indonesia through Company-owned outlets for Pontianak, Balikpapan and Banjarmasin regions/ provinces. This agreement is effective for a period of 1 (one) year, from 1 January 2019 to 31 December 2019.

This agreement was last amended to extend the period from 01 January 2020 to 31 March 2020.

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan prinsipal dari luar negeri dengan cakupan distribusi di seluruh Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Ideal care
2. Admeco
3. Smith medical ASD, Inc
4. Medex Benelux
5. IMT Medical
6. SMI Belgium
7. Mindray Shenzhen, China
8. Robert Riele GmbH
9. Solaris
10. DFI Co Ltd

Jangka waktu perjanjian prinsipal luar negeri berakhir tahun 2018 - 2021, sementara untuk Robert Riele jangka waktu perjanjian tidak terbatas.

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Visalux Elektrindo No. 001/Visalux-VE/VIII/2017, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan/ menjual produk-produk dari PT Visalux Elektrindo dengan wilayah distribusi meliputi: Surabaya, Cikarang, Bogor, Madiun, Mataram, Bandung, Cirebon, Banjarmasin, Serang, sorong, Jayapura, Banda Aceh, Manado, Palangkaraya, Balikpapan, Ambon, Kupang, Jember, Pontianak. Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.

Berdasarkan perjanjian distribusi dengan PT Haka Sejahtera Indonesia No. 101/S.Pj.Nus.01/VIII/2017, Perusahaan ditunjuk untuk mendistribusikan barang dari PT Haka Sejahtera Indonesia. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020.

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan PT Phapros Tbk untuk mendistribusikan produk-produk Phapros secara eksklusif dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perjanjian, perusahaan diwajibkan menjaga stok Phapros pada level tertentu serta berkewajiban menyediakan ruangan di kantor-kantor cabang sebagai ruangan kerja tenaga administrasi dan marketing Phapros. Perjanjian ini memiliki jangka waktu lima tahun dan berakhir tanggal 05 September 2023.

46. Significant agreements (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

The company has distribution agreements with overseas principals with distribution coverage throughout Indonesia, including as follows:

1. Ideal care
2. Admeco
3. Smith medical ASD, Inc
4. Medex Benelux
5. IMT Medical
6. SMI Belgium
7. Mindray Shenzhen, China
8. Robert Riele GmbH
9. Solaris
10. DFI Co Ltd

The term of the overseas principal agreement ends in 2018-2021, while for Robert Riele the term of the agreement is unlimited.

Based on the distribution agreement with PT Visalux Elektrindo No. 001/Visalux-VE/VIII/2017, the Company was appointed to distribute/ sell products from PT Visalux Elektrindo with distribution areas including: Surabaya, Cikarang, Bogor, Madiun, Mataram, Bandung, Cirebon, Banjarmasin, Serang, Sorong, Jayapura, Banda Aceh, Manado, Palangkaraya, Balikpapan, Ambon, Kupang, Jember, Pontianak. The agreement is valid from 21 August 2017 to 20 August 2020.

Based on a distribution agreement with PT Haka Sejahtera Indonesia No. 101/S.Pj.Nus.01/VIII/2017, the Company was appointed to distribute goods from PT Haka Sejahtera Indonesia. The agreement will take effect from 21 August 2017 to 21 August 2020.

The company has a distribution agreement with PT Phapros Tbk to distribute Phapros products exclusively with regional coverage throughout Indonesia. In the agreement, the company is required to maintain Phapros' stock at a certain level and is obliged to provide space in the branch offices as a workspace for Phapros administrative and marketing staff. This agreement has a term of five years and ends 5 September 2023.

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

Pihak berelasi (lanjutan)

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan PT Mitra Rajawali Banjaran untuk mendistribusikan produk kondom dan alat suntik secara eksklusif dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perjanjian ini memiliki jangka waktu tiga tahun dan berakhir tanggal 19 April 2022.

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan PT PG Rajawali I untuk mendistribusikan produk gula dan turunannya dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perjanjian ini memiliki jangka waktu tidak terbatas. Dari penjualan tersebut, perusahaan menerima margin dengan kondisi sebagai berikut :

1. Rp 250 per kuintal dari penjualan gula
2. 2% dari penjualan tetes

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan PT Perkebunan Mitra Ogan untuk mendistribusikan CPO dan Palm Kernel secara eksklusif dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perjanjian ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019 serta dapat diperpanjang secara otomatis.

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi dengan PT Perkebunan Mitra Kerinci untuk mendistribusikan produk teh kemas dan teh hitam secara eksklusif dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perjanjian ini memiliki jangka waktu tidak terbatas. Dari penjualan produk teh hitam, perusahaan mendapat margin keuntungan sebesar 5%.

Perusahaan memiliki perjanjian distribusi pelaksanaan Integrated Supply Chain (ISC) dengan PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Mitra Kerinci, PT Mitra Ogan untuk mendistribusikan produk-produk dan turunannya dengan cakupan wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perjanjian ini memiliki jangka waktu satu tahun yang berakhir 24 April 2020.

46. Significant agreements (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

Related parties (continued)

The company has a distribution agreement with PT Mitra Rajawali Banjaran to distribute condom products and syringes exclusively with a scope of territory throughout Indonesia and abroad. This agreement has a term of three years and ends on 19 April 2022.

The company has a distribution agreement with PT PG Rajawali I to distribute sugar products and its derivatives with a scope of territory throughout Indonesia and abroad. This agreement has an unlimited term. From the sale, the company received a margin with the following conditions:

1. Rp 250 per quintal from the sale of sugar
2. 2% of sales drops

The company has a distribution agreement with PT Perkebunan Mitra Ogan to distribute CPO and Palm Kernel exclusively with regional coverage throughout Indonesia and abroad. This agreement has a term of up to 31 December 2019 and can be extended automatically.

The company has a distribution agreement with PT Perkebunan Mitra Kerinci to distribute exclusively packaged tea and black tea products with coverage throughout Indonesia and abroad. This agreement has an unlimited term. From the sale of black tea products, the company gets a profit margin of 5%.

The company has a distribution agreement for the implementation of the Integrated Supply Chain (ISC) with PT PG Rajawali I, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Mitra Kerinci, PT Mitra Ogan to distribute products and their derivatives with regional coverage throughout Indonesia and abroad. This agreement has a term of one year ending 24 April 2020.

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Rajawali Nusindo (lanjutan)

Pihak berelasi (lanjutan)

Perusahaan memiliki sewa gedung kantor dan rumah dinas dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Objek yang disewakan adalah kantor pusat dan kantor cabang di seluruh Indonesia yang statusnya dimiliki oleh PT RNI. Perjanjian ini memiliki jangka waktu satu tahun dan akan berakhir tanggal 30 Mei 2020 untuk kantor cabang dan 31 Desember 2019 untuk kantor pusat, serta dapat diperpanjang secara otomatis.

PT GIEB Indonesia

1. PT Unilever Indonesia

- a. Perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dan PT GIEB Indonesia Cabang Gianyar, berkedudukan di Jl. Mambal-Ubud, Banjar Tingas, Mekar Buana, Abiansemal.

Nomor : 20480118/PPSD/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

- b. Perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dan PT GIEB Indonesia cabang Singaraja berkedudukan di Jl. P Dewata, Pemaron, Singaraja.

Nomor : 20480118/PPSD/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

- c. Perjanjian distribusi antara PT Unilever Indonesia Tbk dan PT GIEB Indonesia cabang Tabanan berkedudukan di Jl. Mawar No.140 Bongan Pala, Tabanan.

Nomor : 20480118/PPSD/I/2018
Tanggal : 23 Januari 2018

46. Significant agreements (continued)

PT Rajawali Nusindo (continued)

Related parties (continued)

The company has leases of office buildings and official houses with PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). The leased object is the head office and branch offices throughout Indonesia whose status is owned by PT RNI. This agreement has a term of one year and will expire on 30 May 2020 for branch offices and 31 December 2019 for headquarters, and can be extended automatically.

PT GIEB Indonesia

1. PT Unilever Indonesia

- a. The distribution agreement between PT Unilever Tbk and PT GIEB Indonesia Gianyar is located at Jl. Mambal-Ubud, Banjar Tingas, Mekar Buana, Abiansemal.

Number : 20480118/PPSD/I/2018
Date : 23 January 2018

- b. Distribution agreement between PT Unilever Indonesia Tbk and PT GIEB Indonesia Singaraja branch based in Jl. P Dewata, Pemaron, Singaraja.

Number : 20480118/PPSD/I/2018
Date : 23 January 2018

- c. Distribution agreement between PT Unilever Indonesia Tbk and PT GIEB Indonesia Tabanan branch located in Jl. Mawar No.140 Bongan Pala, Tabanan.

Number : 20480118/PPSD/I/2018
Date : 23 January 2018

31 Desember 2020

31 December 2020

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

46. Significant agreements (continued)

PT GIEB Indonesia

PT GIEB Indonesia

2. PT PG Candi Baru (lanjutan)

2. PT PG Candi Baru (continued)

PT PG Candi Baru merupakan perusahaan afiliasi, pada tahun 2013, PT GIEB Indonesia kembali menjual produk Gula yang diproduksi oleh PT PG Candi Baru. Setiap pemesanan produk gula dibuatkan Surat Persetujuan Pembelian Gula. Surat persetujuan pembelian gula adalah sebagai berikut:

PT PG Candi Baru is an affiliated company, in 2013, PT GIEB Indonesia again sells Sugar products manufactured by PT PG Candi Baru. Any ordering of sugar products is made under Sugar Purchase Approval Agreement. The approval letter for sugar purchase is as follows:

a. Nomor : 068/DIR/GIEB.4/V/2018
Tanggal : 12 Mei 2018
Kuantum : 5.000 Ton

a. Number : 068/DIR/GIEB.4/V/2018
Date : 12 May 2018
Quantum : 5,000 Tons

b. Nomor : 176/DIR/GIEB.4/X/2018
Tanggal : 20 Oktober 2018
Kuantum : 118 Ton
Harga : Rp 9.000.000/Ton

b. Number : 176/DIR/GIEB.4/X/2018
Date : 20 October 2018
Quantum : 118 Tons
Price : Rp 9,000,000/ Ton

c. Nomor : 458/DIR/GIEB.4/XII/2017
Tanggal : 22 Desember 2017
Kuantum : 40 Ton
Harga : Rp 9.725.000/Ton

c. Number : 458/DIR/GIEB.4/XII/2017
Date : 22 December 2017
Quantum : 40 Tons
Price : Rp 9,725,000/ Ton

3. PT Dua Kelinci

3. PT Dua Kelinci

Nomor : 1008/PD/GT-R-MKs/VII/2020
Tanggal : 7 Juli 2020
Masa : 17 September 2020 sampai
dengan 16 September 2021

Number : 1008/PD/GT-R-MKs/VII/2020
Date : 7 July 2020
Period : 17 September 2020 until
16 September 2021

4. PT Focus Distribusi Indonesia

4. PT Focus Distribusi Indonesia

Nomor : 028/FDI/PD-GT/IX/2020
Tanggal : 30 September 2020
Masa : 1 Desember 2020 sampai
dengan 30 November 2021

Number : 028/FDI/PD-GT/IX/2020
Date : 30 September 2020
Period : 1 Desember 2020 until
30 November 2021

Nomor : 006/FDI/PD-MT/XI/2020
Tanggal : 30 September 2020
Masa : 1 Desember 2020 sampai
dengan 30 November 2021

Number : 006/FDI/PD-MT/XI/2020
Date : 30 September 2020
Period : 1 December 2020 until
30 November 2021

5. PT Tokai Dharma Indonesia

5. PT Tokai Dharma Indonesia

Nomor : 166/SPK/PGA/TDI/XI/2020
Tanggal : 25 November 2020
Masa : 1 Januari 2021 sampai dengan
31 Desember 2021

Number : 166/SPK/PGA/TDI/XI/2020
Date : 25 November 2020
Period : 1 January 2021 until
31 December 2021

31 Desember 2020

31 December 2020

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

46. Significant agreements (continued)

PT GIEB Indonesia (lanjutan)

PT GIEB Indonesia

6. PT Sinar Antjol

6. PT Sinar Antjol

Nomor : 004/SPD-SA/NTT010219
Tanggal : 1 Februari 2019
Masa : 1 Februari 2020 sampai dengan
28 Februari 2021

Number : 004/SPD-SA/NTT010219
Date : 1 February 2019
Period : 1 February 2020 until
28 February 2021

7. PT Garam (Persero)

7. PT Garam (Persero)

Nomor : 09.A/KS/GRM/IV/2019
Tanggal : 1 April 2020
Masa : 1 April 2020 sampai dengan
31 Maret 2021

Number : 09.A/KS/GRM/IV/2019
Dated : 1 April 2020
Period : 1 April 2020 until 1 March
2021

8. PT Tirta Mumbul Jaya Abadi

8. PT Tirta Mumbul Jaya Abadi

Nomor : 01/PRJ/TMJA-GIEB/I/2020
Tanggal : 30 Januari 2020
Masa : 1 Februari 2020 sampai dengan
31 Januari 2021

Number : 023/PRJ/TMJA-GIEB/I/2020
Date : 30 January 2020
Period : 1 February 2020 until
31 January 2021

9. PT Industri Gula Glenmore

9. PT Industri Gula Glenmore

Nomor : 1.5/476/050/SP/IX/2019
Tanggal : 26 September 2019
Masa : 26 September 2019 sampai
dengan 26 Januari 2020 (tidak
ada kontrak permanent)

Number : 1.5/476/050/SP/IX/2019
Date : 26 September 2019
Period : 26 September 2019 until
26 January 2020 (non
permanent contract)

10. PT Perkebunan Nusantara XII

10. PT Perkebunan Nusantara XII

Nomor : 14/PKS/-/2019
Tanggal : 25 Oktober 2019
Masa : 07 Januari 2019 sampai dengan
31 Januari 2019 (tidak ada
kontrak permanen)

Number : 14/PKS/-/2019
Date : 25 Oktober 2019
Period : 07 January 2019 until
31 January 2019 (non
permanent contract)

11. PT Alesha Berkah Utama

11. PT Alesha Berkah Utama

Nomor : 330/A/IX/2020
Tanggal : 1 September 2020
Masa : 1 September 2020 sampai
dengan 31 Januari 2021

Number : 330/A/IX/2020
Date : 1 September 2020
Period : 1 September 2020 until
31 January 2021

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT GIEB Indonesia (lanjutan)

12. PT Jico Agung

Denpasar
Nomor : 05/JA/BO-BALI/VIII/2020
Tanggal : 21 Agustus 2020
Masa : 21 Agustus 2020 – 21 Agustus 2021

Klungkung
Nomor : 04/JA/BO-BALI/VIII/2020
Tanggal : 21 Agustus 2020
Masa : 21 Agustus 2020 – 21 Agustus 2021

Singaraja
Nomor : 03/JA/BO-BALI/VIII/2020
Tanggal : 21 Agustus 2020
Masa : 21 Agustus 2020 – 21 Agustus 2021

PT Mitra Rajawali Banjaran

Kontrak Katalog antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan No. 578 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang merupakan perjanjian kerjasama untuk pencantuman barang/ jasa dalam katalog *electronic* sebagai dasar melakukan *e-purchasing* antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kontrak katalog penyediaan alat kesehatan dan PT Mitra Rajawali Banjaran sebagai penyedia alat kesehatan kepada Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi. Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut sampai dengan 31 Juli 2019.

Perjanjian distribusi dan pemasaran (*marketing*) eksklusif antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Rajawali Nusindo dengan No. 009/SPJ/MRB.RN/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 yang menyatakan PT Mitra Rajawali Banjaran menunjuk PT Rajawali Nusindo sebagai penyalur (distributor) dan pemasaran (*marketing*) tunggal penjualan alat kesehatan Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP) Merek Skifa, RD dan Artika serta memasarkan untuk kepentingan reguler, tender *e-catalog* inpres, dan pasar pemerintah. Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku dari 21 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2018.

46. Significant agreements (continued)

PT GIEB Indonesia (continued)

12. PT Jico Agung

Denpasar
Number : 05/JA/BO-BALI/VIII/2020
Date : 21 August 2020
Period : 21 August 2020 until 31 August 2021

Klungkung
Number : 04/JA/BO-BALI/VIII/2020
Date : 21 August 2020
Period : 21 August 2020 until 31 August 2021

Singaraja
Number : 03/JA/BO-BALI/VIII/2020
Date : 21 August 2020
Period : 21 August 2020 until 31 August 2021

PT Mitra Rajawali Banjaran

Catalog contract between PT Mitra Rajawali Banjaran and the Government Goods/ Services Procurement Policy Agency with No. 578 of 2018 dated 16 October 2018 which is a cooperation agreement for the inclusion of goods/ services in the electronic catalog as a basis for *e-purchasing* between the Government Goods/ Services Procurement Policy Institution representing the Government of the Republic of Indonesia to contract catalogs for the supply of medical devices and PT Mitra Rajawali Banjaran as a provider of medical devices to Ministries/ Institutions/ Regional Work Units/ Institutions. The term of the cooperation agreement is until 31 July 2019.

Exclusive distribution and marketing agreement between PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Rajawali Nusindo with No. 009/SPJ/MRB.RN/VIII/ 2015 dated 21 August 2015 stating that PT Mitra Rajawali Banjaran appointed PT Rajawali Nusindo as a distributor and marketing sole of sales of medical devices for Disposable Syringes (ASSP) Brand Skifa, RD and Artika and market for regular interests, tender *e-catalog* instructions, and government markets. The term of the agreement is valid from 21 August 2015 to 20 August 2018.

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

Addendum perjanjian distribusi dan pemasaran eksklusif antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Rajawali Nusindo No. 028/S.pj/Nus.01/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang menyatakan bahwa PT Mitra Rajawali Banjaran dan PT Rajawali Nusindo menetapkan target penjualan tahun 2017 per bulan dan target penjualan per area, target penjualan tahun 2018 akan ditetapkan pada awal tahun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan atas hasil evaluasi target penjualan di tahun sebelumnya, dan untuk tender *e-catalog*, inpres, dan pasar pemerintah pemesanan akan disesuaikan dengan jadwal dari Kemenkes/BKKBN/Departemen lain.

Perjanjian kerjasama produksi antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Mondaffa Cresida No. 009/MRB/SPj/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014. Perjanjian tersebut menerangkan:

1. Perusahaan menyediakan sarana produksi berupa tempat, SDM, perizinan dan lisensi produksi Alat Suntik Sekali Pakai.
2. PT Mondaffa menyediakan mesin-mesin untuk digunakan produksi ASSP *Autodestruct* dan menanggung biaya penyusutan mesin.
3. Pengalihan hak atas mesin dari PT Mondaffa Cresida kepada Perusahaan dapat terjadi jika mencapai jumlah produksi minimal 50 juta pcs dalam waktu 5 tahun.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk pembagian keuntungan sebesar 60% untuk pihak PT Mondaffa Cresida 40% dan untuk PT Mitra Rajawali Banjaran.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

Addendum of exclusive distribution and marketing agreement between PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Rajawali Nusindo No. 028/S.pj/ Nus.01/II/2017 dated 28 February 2017 stating that PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Rajawali Nusindo set a sales target for 2017 per month and sales targets per area, the sales target for 2018 will be set at the beginning of the year on the basis of an agreement between the two parties based on the results of the evaluation of the sales target in the previous year, and for tenders *e-catalogs*, presidential orders and government markets, orders will be adjusted to the schedule of the Ministry of Health/BKKBN/other Departments.

Production agreement between PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Mondaffa Cresida No. 009/MRB/SPj /VII/2014 31 July 2014. The agreement explains:

1. The company provides production facilities in the form of premises, human resources, licensing and production licenses for disposable syringes.
2. PT Mondaffa provides machines for use in the production of the ASSP *Autodestruct* and covers machine depreciation costs.
3. The transfer of rights to the machine from PT Mondaffa Cresida to the Company can occur if it reaches a production amount of at least 50 million pcs within 5 years.
4. Both parties agreed to share a profit of 60% for PT Mondaffa Cresida 40% and for PT Mitra Rajawali Banjaran.

31 Desember 2020

31 December 2020

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

Addendum perjanjian kerjasama produksi antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Mondaffa Cresida yang kontrak semula No. 009/MRB/SPj/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 menjadi No 002/addendum/MRB/V/2017 tanggal 8 Mei 2017. Perjanjian tersebut menerangkan:

1. Mesin mesin ASSP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemasaran pihak PT Mitra Rajawali Banjaran yang ketentuannya akan diatur dalam perjanjian sewa menyewa.
2. PT Mondaffa menyediakan mesin-mesin untuk digunakan produksi ASSP Autodestruct dan menanggung biaya penyusutan mesin.
3. Pengalihan hak atas mesin dari PT Mondaffa Cresida kepada Perusahaan dapat terjadi jika mencapai jumlah produksi minimal 50 juta pcs dalam waktu 5 tahun.
4. Keuntungan 40% untuk PT Mitra Rajawali Banjaran, 60% untuk PT Mondaffa Cresida jika PT Mondaffa Cresida menjadi distributor dan order dari PT Mondaffa Cresida. Keuntungan 40% untuk PT Mondaffa Cresida, 60% untuk PT Mitra Rajawali Banjaran jika PT Mitra Rajawali Banjaran menjadi distributor dan order dari PT Mitra Rajawali Banjaran.
5. Mesin milik PT Mondaffa Cresida diserahkan kepada PT Mitra Rajawali Banjaran jika hasil produksi mencapai 50 jt potong.
6. Biaya pemeliharaan dan penggantian sparepart yang berkaitan untuk menjaga kualitas produk dan jika terjadi kerusakan mesin akan dibiayai oleh PT Mondaffa Cresida dan masuk kedalam harga pokok penjualan.
7. Pembayaran bahan baku dan material utama dilakukan oleh PT Mondaffa Cresida berdasarkan PO Supplier dengan DP 30% dan pelunasan 70% sebelum dikirim ke PT Mitra Rajawali Banjaran.
8. Menyediakan bahan baku utama dan penunjang produksi setelah menerima pembayaran dari PT Mondaffa Cresida.
9. Menyediakan material utama dan bahan penunjang produksi berupa penyeteran modal kerja oleh PT Mondaffa Cresida.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

Addendum to the production cooperation agreement between PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Mondaffa Cresida whose original contract No. 009/MRB/SPj/VII/2014 31 July 2014 to No. 002/addendum/MRB/V/2017 dated 8 May 2017. The agreement explains:

1. The ASSP engine can be used to meet the marketing needs of PT Mitra Rajawali Banjaran whose provisions will be regulated in a lease agreement.
2. PT Mondaffa provides machines for use in the production of the ASSP Autodestruct and covers machine depreciation costs.
3. The transfer of rights to the machine from PT Mondaffa Cresida to the Company can occur if it reaches a production amount of at least 50 million pcs within 5 years.
4. 40% profit for PT Mitra Rajawali Banjaran, 60% for PT Mondaffa Cresida if PT Mondaffa Cresida becomes a distributor and order from PT Mondaffa Cresida. 40% profit for PT Mondaffa Cresida, 60% for PT Mitra Rajawali Banjaran if PT Mitra Rajawali Banjaran becomes a distributor and order from PT Mitra Rajawali Banjaran.
5. The machine owned by PT Mondaffa Cresida is handed over to PT Mitra Rajawali Banjaran if the production reaches 50 million pieces.
6. Spare parts maintenance and replacement costs related to maintaining product quality and in the event of engine failure will be financed by PT Mondaffa Cresida and included in the cost of goods sold.
7. Payment of the main raw materials and materials is carried out by PT Mondaffa Cresida based on PO Supplier with 30% DP and repayment of 70% before being sent to PT Mitra Rajawali Banjaran.
8. Providing main raw materials and production support after receiving payment from PT Mondaffa Cresida.
9. Providing the main material and production supporting materials in the form of working capital deposits by PT Mondaffa Cresida.

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

Perjanjian sewa menyewa mesin produksi ASSP antara PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Mondaffa Cresida. Perjanjian tersebut menerangkan bahwa:

1. PT Mitra Rajawali Banjaran dapat menggunakan mesin produksi ASSP milik PT Mondaffa Cresida berupa satu line mesin yang terdiri dari mesin injection moulding dan assembling.
2. PT Mitra Rajawali Banjaran membayar biasa sewa mesin sebagai berikut:
 - Mesin injection moulding barrel kompensasi biaya Rp 10/pcs (PPN/PPH)
 - Mesin injection moulding plunger kompensasi biaya Rp 10/pcs (PPN/PPH)
 - Mesin printing kompensasi biaya Rp 10/pcs (PPN/PPH)
 - Mesin assembling kompensasi biaya Rp 10/pcs (PPN/PPH)
 - Mesin blister kompensasi biaya Rp 10/pcs (PPN/PPH)
3. PT Mondaffa Cresida menerima pembayaran biaya sewa penggunaan mesin oleh PT Mitra Rajawali Banjaran.
4. PT Mondaffa Cresida menerima laporan penggunaan mesin dari PT Mitra Rajawali Banjaran setiap bulannya.
5. PT Mondaffa Cresida akan membuat faktur tagihan dan faktur pajak untuk biaya sewa mesin setiap bulannya.
6. PT Mondaffa Cresida melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap mesin-mesin yang disewa oleh PT MRB.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

The lease agreement is leasing an ASSP production machine between PT Mitra Rajawali Banjaran and PT Mondaffa Cresida. The agreement states that:

1. PT Mitra Rajawali Banjaran can use PT Mondaffa Cresida's ASSP production machines in the form of a single machine line consisting of injection molding machines and assembling.
2. PT Mitra Rajawali Banjaran pays the usual machine rental as follows:
 - Injection molding barrel compensation costs Rp 10/pcs (PPN/ PPH)
 - Injection molding plunger machine costs Rp 10/pcs (PPN/PPH) compensation
 - Compensation printing machine costs Rp 10/pcs (PPN/PPH)
 - Assembling machine compensation costs Rp 10/pcs (PPN/PPH)
 - Blister machine compensation costs Rp 10/pcs (PPN/ PPH)
3. PT Mondaffa Cresida accepts payment of rental fees for machine use by PT Mitra Rajawali Banjaran.
4. PT Mondaffa receives reports on machine usage from PT Mitra Rajawali Banjaran every month.
5. PT Mondaffa Cresida will make invoices and tax invoices for monthly machine rental costs.
6. PT Mondaffa Cresida conducts maintenance and maintenance of the machines rented by PT MRB.

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Rajawali Banjaran (lanjutan)

Perjanjian kerjasama produksi ASSP PT Rajawali Nusindo dengan PT Mitra Rajawali Banjaran No. 004.1/S.Pj/MRB/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 menerangkan bahwa:

1. Kedua pihak sepakat untuk kerjasama dalam rangka pengembangan kapasitas Produksi ASSP melalui investasi mesin baru.
2. PT Rajawali Nusindo menyediakan modal investasi untuk pembelian mesin dan modal kerja untuk proses produksi ASSP dengan mesin baru.
3. PT Rajawali Nusindo akan memberikan modal kerja kepada PT MRB sebesar Rp 6.000.000.000.
4. Perhitungan HPP (terkait biaya langsung produksi yang terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu, tenaga kerja langsung, perawatan mesin, dan biaya energi sesuai dengan ketentuan disepakati sebesar 53% dari total nilai jual produksi yang dihasilkan).
5. PT Rajawali Nusindo mendapatkan pembagian margin untuk pengembalian modal kerja dan modal investasi dengan presentase 20% dari total nilai jual produksi dan margin distribusi sebesar 12% dari total nilai jual produksi.
6. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun.

PT Mitra Kerinci

Perjanjian penyeteroran modal PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Liki Energi, Akta No. 4 pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, antara Tuan Yosdian Adi Pramono Direktur PT Mitra Kerinci dengan Tuan Ondi selaku Direktur Rajawali Liki Energi. Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Rajawali Banjaran (continued)

The ASSP production cooperation agreement PT Rajawali Nusindo with PT Mitra Rajawali Banjaran No. 004.1/S.Pj/MRB/V/2017 dated 16 May 2017 explains that:

1. Both parties agreed to cooperate in the context of developing ASSP Production capacity through investment in new machinery.
2. PT Rajawali Nusindo provides investment capital for purchasing machinery and working capital for the ASSP production process with new machines.
3. PT Rajawali Nusindo will provide working capital to PT MRB of Rp 6,000,000,000.
4. Calculation of COGS (related to direct production costs consisting of raw materials and supporting materials, direct labor, machine maintenance, and energy costs in accordance with agreed terms of 53% of the total selling value of production produced).
5. PT Rajawali Nusindo gets a margin distribution for the return of working capital and investment capital with a percentage of 20% of the total sales value of production and distribution margin of 12% of the total sale value of production.
6. This agreement is valid for 5 years.

PT Mitra Kerinci

The agreement to deposit capital of PT Mitra Kerinci to PT Rajawali Liki Energi, Deed No. 4 on Thursday, 28 December 2017, between Mr. Yosdian Adi Pramono Director of PT Mitra Kerinci and Mr. Ondi as Director of Rajawali Liki Energi. The parties first explain that:

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Kerinci (lanjutan)

1. Berita acara negosiasi Nomor 01/MK-BA/474/VIII/2016 dan Nomor 001/BE-MK/DIR/VIII/2016 dibuat materai tanggal 11 Agustus 2017 oleh notaris, nomor 190/SBTD/XII/2017 antara PT Mitra Kerinci dan PT Brantas Energi yang telah menyetujui besaran nilai potensi atau aset yang digunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air PT Rajawali Liki Energi senilai Rp 22.400.000.000 dengan tanah seluas 50 Ha sebesar Rp 17.270.000.000.
2. Surat pernyataan Bukti setoran Modal PT Mitra Kerinci ke PT Rajawali Liki Energi No. 01/MK/604/XII/2017 menyatakan PT Mitra Kerinci telah melakukan tambahan setoran modal pada PT Rajawali Liki Energi sebesar Rp 17.270.000 atau sejumlah 3.540 lembar saham.

PT Rajawali Liki Energi dengan ini berjanji untuk menerima pemasukan dari PT Mitra Kerinci yaitu setoran modal non tunai dan dicatat sebagai setoran modal PT Rajawali Liki Energi senilai Rp 22.400.000.000 dan para penghadap telah menyetujui perhitungan seluruh kewajiban PT Mitra Kerinci atas uang modal untuk saham PT Rajawali Liki Energi sebesar 55% dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh PT Mitra Kerinci.

Rincian atas setoran modal PT Mitra Kerinci ke PT Rajawali Liki Energi sebesar Rp 22.400.000.000:

1. Setoran awal sebesar Rp 5.130.000.000 atau 5.130 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 ternyata dalam surat pernyataan bukti setoran modal No. 91/MK/706/XII/2016 yang didaftarkan notaris tanggal 27 Desember 2017 dibawah No. 192/SBTD/XII/2017.
2. Sebesar Rp 17.270.000.000 atau sejumlah 34.540 saham dengan harga nominal sebesar Rp 500.000 sebagaimana ternyata dari surat pernyataan bukti setoran modal No. 01.MK/604/XII/2017 yang didaftarkan tanggal 27 Desember 2017 No. 192/SBTD/XII/2017.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Kerinci (continued)

1. Negotiations Minutes No 01/MK-BA/474/VIII/2016 and No 001/BE-MK/DIR/VIII/2016 made stamp duty on 11 August 2017 by notary No 190/SBTD/XII/2017 between PT Mitra Kerinci and PT Brantas Energi who have approved the amount of potential value or assets used by the PT Rajawali Liki Energi Hydroelectric Power Plant worth Rp. 22,400,000,000 with a land area of 50 Ha of Rp 17,270,000,000.
2. A statement of proof of PT Mitra Kerinci's capital deposit to PT Rajawali Liki Energi No. 01/MK/604/XII/2017 states that PT Mitra Kerinci has made additional capital payments to PT Rajawali Liki Energi in the amount of Rp 17,270,000 or 3,540 shares .

PT Rajawali Liki Energi hereby promises to receive income from PT Mitra Kerinci, which is a non-cash capital deposit and recorded as a capital deposit of PT Rajawali Liki Energi worth Rp 22,400,000,000 and the viewers have agreed to the calculation of all PT Mitra Kerinci's obligations on capital money for PT Rajawali Liki Energi's shares of 55% of the total shares issued by PT Mitra Kerinci.

Details of PT Mitra Kerinci's capital injection to PT Rajawali Liki Energi amounting to Rp 22,400,000,000:

1. Initial deposit amounting to Rp 5,130,000,000 or 5,130 shares with nominal of Rp 1,000,000 recorded in a letter of proof of capital injection No. 91/MK/706/XII/2016 registered by notary dated 27 December 2017 under No. 192/SBTD/XII/2017.
2. An amount of Rp 17,270,000,000 or 34,540 shares at a nominal value of Rp 500,000 as it stated from the letter of proof of capital payment letter No: 01.MK/604/XII/2017 registered on 27 December 2017 No. 192/SBTD/XII/2017.

31 Desember 2020

31 December 2020

46. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

PT Mitra Kerinci (lanjutan)

Tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 meneruskan surat kami sebelumnya No. 01/MK/535/XI/2017 tanggal 2 Mei 2016 perihal tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo, dengan ini kami sampaikan:

1. Hasil rekonsiliasi data piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo pada tanggal 21 November 2008. Telah disepakati menjadi dasar penagihan kami sebagai berikut:
Piutang ekspor USD 259.258 =Rp 2.958.584.460
Piutang USD 22.869 =Rp 297.967.540
Total dalam bentuk rupiah Rp 3.256.552.000.
2. PT Mitra Kerinci telah melakukan penagihan atas piutang tersebut kepada PT Rajawali Nusindo, terakhir melalui surat No. 01/MK/535/XI/2017 tanggal 24 November 2017. Tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 meneruskan surat kami sebelumnya No. 01/MK/535/XI/2017 tanggal 2 Mei 2016 perihal tagihan piutang PT Mitra Kerinci kepada PT Rajawali Nusindo.

46. Significant agreements (continued)

PT Mitra Kerinci (continued)

PT Mitra Kerinci's receivables from PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2018 dated 31 July 2018 forwarding our previous letter No. 01/MK/535/XI/2017 dated 2 May 2016 Regarding PT Mitra Kerinci's receivables to PT Rajawali Nusindo, we hereby submit:

1. The results of PT Mitra Kerinci's data reconciliation account to PT Rajawali Nusindo on 21 November 2008. It was agreed to become the basis for our collection as follows:
Export receivables USD 259,258 =Rp 2,958,584,460
Receivables USD 22,869 =Rp 297,967,540
The total is in the form of rupiah Rp 3,256,552,000.
2. PT Mitra Kerinci has collected the receivables from PT Rajawali Nusindo, finally through letter No. 01/MK/535/XI/2017 dated 24 November 2017. PT Mitra Kerinci's receivables from PT Rajawali Nusindo No. 01/MK/404/VII/2018 dated 31 July 2018 forwarding our previous letter No. 01/MK/535/XI/2017 dated 2 May 2016 regarding PT Mitra Kerinci's receivables to PT Rajawali Nusindo.

47. Manajemen risiko keuangan

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko harga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

(i) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan/konsumen dan penyewa yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan/konsumen/ penyewa dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Perusahaan dan perusahaan anak memiliki risiko suku bunga terutama karena adanya pinjaman dengan suku bunga mengambang. Perusahaan mengelola risiko suku bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan mengambang yang tepat dan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

47. Financial risk management

The main financial risks faced by the Company are credit risk, foreign exchange rate risk, interest rate risk, liquidity risk and price risk. Attention to risk management has increased significantly by considering the changes and volatility of financial markets in Indonesia and internationally.

(i) Credit risk

Credit risk is the risk that the Company will suffer losses incurred by customers and tenants who fail to meet their contractual obligations. The Company's financial instruments that have potential credit risk consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and investments. The maximum amount of credit risk exposure is equal to the carrying amount of those accounts. The Company manages credit risk by setting acceptable limits on the amount of risk for each customer/ tenant and more selective in the choosing banks and financial institutions, ie only well-known and well-selected banks and financial institutions.

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. Company and subsidiaries have interest rate risk mainly due to loans with floating interest rates. The Company manages interest rate risk through a combination of loans with appropriate fixed and floating interest rates and oversight of the impact of interest rate movements to minimize negative impacts to the Company.

47. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

(iv) Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Perusahaan memiliki risiko harga terutama karena investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perusahaan mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas investasinya, serta selalu memantau perkembangan pasar global.

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak

1. PT Inti Bagas Perkasa

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan PT PG Rajawali II No. 916/S.PMh/RW-11.01NII/2015, PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) dinyatakan beku operasi per tanggal 31 Juli 2015 hingga waktu yang belum ditentukan. Seluruh kewajiban PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) baik pada pihak ketiga/ rekanan maupun kepada karyawan PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) diambil alih dan diselesaikan oleh PT PG Rajawali II.

Tindak lanjut dari pembekuan PT IBP, dilakukan serah terima kepengurusan dari Direktur PT IBP kepada PT PG Rajawali II sebagai pemegang saham dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 004/BA/RW.II.01/I/2016 antara Plt. Direktur PT Inti Bagas Perkasa dengan Direktur Utama PT PG Rajawali II selaku Pemegang Saham PT Inti Bagas Perkasa.

47. Financial risk management (continued)

(iii) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company's cash flow position shows short-term income is not sufficient to cover short-term expenses. The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents in fulfilling the Company's commitment to normal operation of the Company and regularly evaluating actual cash flows and cash flows projections, as well as scheduling the maturity dates of financial assets and liabilities.

(iv) Price risk

Price risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market prices. Company have a price risk primarily because investments are classified as available for sale. The Company manages the price risk by regularly evaluating the financial performance and market price of its investment, and always monitor the development of the global market.

48. Going concern of some subsidiaries condition

1. PT Inti Bagas Perkasa

Based on the decision letter issued by PT PG Rajawali II No.916/S.PMh/RW-11.01NII/2015, PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) was declared frozen operation as of 31 July 2015 up to undetermined time. All obligations of PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) to third parties/partners and employees of PT Inti Bagas Perkasa (PT IBP) are taken over and will be settled by PT PG Rajawali II.

As a follow-up to the suspension of PT IBP, a management handover was carried out from the Director of PT IBP to PT PG Rajawali II as a shareholder with an Official Report of Handover of Work No. 004/BA/RW.II.01/I/2016 between Plt. Director of PT Inti Bagas Perkasa with the President Director of PT PG Rajawali II as Shareholders of PT Inti Bagas Perkasa.

31 Desember 2020

31 December 2020

**48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas
anak (lanjutan)**

1. PT Inti Bagas Perkasa (lanjutan)

Sebagai upaya pemanfaat aset *idle* di PT IBP (Kec. Jatiwangi), pada tanggal 27 Juli 2017 dilakukan penandatanganan perjanjian nomor 064/S.Pj/RWII.01/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Rencana Kerjasama Pengembangan Bisnis Rumah Sakit Rajawali Timah Medika antara PT PG Rajawali II dengan PT Rumah Sakit Bakti Timah dengan objek aset yang diminati adalah lahan kantor ex. PG Karangsuwung, lahan tanah kosong Palimanan, Rumah dinas dan tanah kosong Plumbon serta Lahan Jatiwangi.

Dalam perkembangannya, pihak PT Rumah Sakit Bakti Timah dan PT Phapros, Tbk meminati lahan di lahan kosong Palimanan dan lahan eks. PG Karangsuwung yang lebih strategis. Untuk memetakan kembali potensi aset-aset Perusahaan, telah dilakukan kajian HBU dan FS oleh PT Surveyor Indonesia yang hasilnya adalah lahan di PT IBP dapat dikembangkan menjadi *mix use* (hotel, ruko dan mall).

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB)

Laporan keuangan disajikan dengan asumsi Perusahaan memiliki kelangsungan hidup usaha, dengan asumsi tersebut aset akan dapat direalisasi dan liabilitas akan dipenuhi selama masa bisnis normal.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 Perusahaan telah mengalami kerugian kumulatif. Manajemen yakin dengan rencana manajemen yang telah dibuat akan dapat memperbaiki kinerja pada tahun selanjutnya dan akumulasi rugi secara bertahap dapat dikurangi.

**48. Going concern of some subsidiaries condition
(continued)**

1. PT Inti Bagas Perkasa (continued)

As an effort to utilize idle assets at PT IBP (Kec. Jatiwangi), on 27 July 2017, agreement number 064 / S.Pj / RWII.01 / VII / 2017 was signed on 27 July 2017 concerning the Business Development Cooperation Plan for Rajawali Timah Medika Hospital between PT PG Rajawali II and PT Rumah Sakit Bakti Timah, the object of interest is the ex office land. PG Karangsuwung, Palimanan vacant land, official housing and Plumbon vacant land and Jatiwangi Land.

During its development, PT Rumah Sakit Bakti Timah and PT Phapros, Tbk are interested in land on vacant land in Palimanan and former land PG Karangsuwung which is more strategic. To remap the potential of the Company's assets, a HBU and FS study was carried out by PT Surveyor Indonesia, which resulted in the development of land in PT IBP into a mix use (hotels, shop houses and malls).

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB)

The financial statements are presented assuming the Company has business viability, assuming that the assets will be realized and the liabilities will be fulfilled during the normal business period.

In the years ended 31 December 2020 and 2019, the Company experienced cumulative losses. Management believes that the management plan that has been made will improve performance in the following year and the accumulated losses can be gradually reduced.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (lanjutan)

Rencana manajemen untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi akumulasi rugi, serta mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan sebagai berikut :

1. Revitalisasi Mesin

a. Mesin ASSP

Berdasarkan usulan investasi tahun 2021, PT Mitra Rajawali Banjaran sudah mengajukan usulan investasi mesin ASSP (*Normal Syringe, ADS, Safety Syringe*) senilai 10,5 Miliar. Hal tersebut merupakan langkah dalam upaya revitalisasi dan penambahan kapasitas mesin ASSP.

Di tahun 2020, PT Mitra Rajawali Banjaran memperoleh proyek ADS 0,5 ML Kemenkes sebanyak 31 juta pcs atau senilai Rp 26,2 Miliar atau meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 12,1 juta pcs atau senilai Rp 12 Miliar.

Selain itu untuk ASSP jenis ADS 3 ML dan 5 ML juga masih menjadi kebutuhan di Kemenkes dan BKKBN, sementara dengan kondisi pandemi Covid-19 dan rencana Pemerintah dalam hal ini Kemenkes, PT Mitra Rajawali Banjaran sudah diminta mengajukan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan Kemenkes atas ADS 0,5 ML untuk program Vaksinasi Covid-19.

Melalui surat nomor 022/MRB.03/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, Direktur PT Mitra Rajawali Banjaran sudah menyampaikan kesiapan produksi Skifa ADS 0,5 ML tahun 2021 sebanyak 100 juta pcs.

Atas kondisi tersebut, dengan kesiapan mesin dan tersedianya modal kerja maka peluang atas menjadi bagian rencana ketercapaian usulan RKAP 2021 yang telah diajukan kepada Pemegang Saham.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (continued)

The management plan to improve performance and reduce accumulated losses, as well as maintain the Company's survival as follows:

1. Revitalization machine

a. Machine ASSP

Based on the investment proposal in 2021, PT Mitra Rajawali Banjaran has submitted an investment proposal for ASSP machines (Normal Syringe, ADS, Safety Syringe) worth 10.5 billion. This is a step in an effort to revitalize and increase the capacity of the ASSP engine.

In 2020, PT Mitra Rajawali Banjaran received an ADS 0.5 ML project of the Ministry of Health of 31 million pieces or worth Rp 26.2 billion or an increase compared to 2019 which amounted to 12.1 million pieces or worth Rp 12 billion.

In addition, ASSP types of ADS 3 ML and 5 ML are still a necessity at the Ministry of Health and BKKBN, while with the Covid-19 pandemic conditions and the Government's plan in this case the Ministry of Health, PT Mitra Rajawali Banjaran has been asked to propose the ability to meet the Ministry of Health's needs for ADS , 5 ML for the Covid-19 Vaccination program.

Through letter number 022 / MRB.03 / I / 2021 dated 18 January 2021, the Director of PT Mitra Rajawali Banjaran has conveyed the readiness for production of Skifa ADS 0.5 ML in 2021 of 100 million pcs.

Due to these conditions, with the readiness of the machines and the availability of working capital, the opportunities for this will become part of the plan to achieve the 2021 RKAP proposal that has been submitted to the Shareholders.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (lanjutan)

Rencana manajemen untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi akumulasi rugi, serta mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan sebagai berikut : (lanjutan)

1. Revitalisasi Mesin (lanjutan)

a. Mesin ASSP (lanjutan)

Sehingga optimalisasi mesin ASSP merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh PT Mitra Rajawali Banjaran di tahun 2021 mengingat kebutuhan ADS 0,5 ML khususnya di masa vaksinasi yang dimungkinkan masih cukup banyak.

b. Mesin kondom

Dengan melihat potensi penjualan kondom di tahun 2020 dimana penjualan sebanyak 123.355 gross atau senilai 12,6 Miliar, di tahun 2021 PT Mitra Rajawali Banjaran berusaha mencapai penjualan kondom minimal sesuai RKAP 2021 yang telah diusulkan kepada Pemegang Saham.

Dalam rangka membangun kembali bisnis kondom, PT MRB tetap mengusulkan kembali investasi mesin kondom dengan bekerjasama dengan PLP Malaysia untuk pengadaannya.

Peluang bisnis PT Mitra Rajawali Banjaran atas produk kondom dimana memiliki beberapa kekuatan yaitu satu-satunya pabrikan kondom BUMN yang ada di Indonesia, memiliki sertifikat ISO, TKDN, standar PQS, dan variasi produk yang lengkap, diharapkan menjadi pertimbangan Pemegang Saham untuk memberikan perhatian atas usulan investasi tersebut.

Diharapkan atas pengadaan mesin kondom baru tersebut dapat menggantikan mesin lama yang sudah tidak produktif dan memberikan kontribusi bukan hanya omset dari *captive market* BKKBN dan reguler saja namun dapat memberikan kontribusi di pasar ekspor dan OEM produk.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (continued)

The management plan to improve performance and reduce accumulated losses, as well as maintain the Company's survival as follows: (continued)

1. Revitalization machine (continued)

a. Machine ASSP (continued)

So the ASSP engine optimization is a necessary condition that must be done by PT Mitra Rajawali Banjaran in 2021 given the need ADS 0.5 ML specially future possible vaccination is still quite a lot.

b. Condom machine

By looking at the potential for condom sales in 2020 where sales of 123,355 gross or worth 12.6 billion, in 2021 PT Mitra Rajawali Banjaran is trying to achieve minimum condom sales according to the 2021 RKAP that has been proposed to shareholders.

In order to rebuild the condom business, PT MRB is still proposing to re-invest in the condom machine in cooperation with PLP Malaysia for the monitoring.

PT Mitra Rajawali Banjaran's business opportunity for condom products, which has several strengths, namely the only state-owned condom manufacturer in Indonesia, has ISO certificates, TKDN, PQS standards, and complete product variations, is expected to be the consideration of Shareholders for pay attention to the investment proposal.

It is hoped that the procurement of the new condom machines can replace the old machines that are no longer productive and contribute not only to the turnover of the BKKBN and regular captive markets but also to contribute to the export market and OEM products.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (lanjutan)

Rencana manajemen untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi akumulasi rugi, serta mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan sebagai berikut : (lanjutan)

2. Pengembangan produk

Dalam rangka pencapaian laba yang lebih baik dari tahun sebelumnya yang sekaligus mengurangi jumlah akumulasi kerugian, PT MRB di tahun 2020 sudah melakukan pengembangan produk berupa perakitan Ventilator yang bekerja sama dengan PT Rekacipta Inovasi ITB (PT RII), kerja sama produksi dengan PT Industri Sandang Nusantara (PT ISN) untuk masker medis dan non medis sementara kerjasama operasi dengan PT Mitra Multi Teknomedika (PT MMT) untuk produk *Hyperbaric Chamber Oxygen Therapy* akan mengembangkan produk baru berupa *Oxygen Generator*. Hasil kerjasama-kerjasama tersebut diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan di tahun 2021.

Sementara untuk kerjasama yang sudah dilakukan inisiasi dan proses kajian di tahun 2021 dan diharapkan dapat segera direalisasikan sehingga dapat memberikan tambahan porto-folio baru dan kontribusi kinerja adalah kerjasama produksi dengan PT Bara Sehat Jaya untuk produk *Foley Chateter* dan kerjasama produksi sarung tangan Nitril dengan PT KPOMG Investama Sejahtera.

Kerjasama produksi diatas diharapkan berkembang dan dapat memberikan kontribusi lebih di tahun-tahun mendatang.

3. Pengembangan SDM dalam peningkatan produktivitas

Sumber daya manusia sebagai aset dalam peningkatan produktifitas perusahaan menjadi konsentrasi selanjutnya dalam rencana perbaikan kinerja perusahaan.

Upaya pengembangan SDM dibuktikan dalam penetapan anggaran pendidikan dan pelatihan yang menunjang kompetensi SDM sekaligus memberikan dampak motivasi bagi karyawan yang bersangkutan.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (continued)

The management plan to improve performance and reduce accumulated losses, as well as maintain the Company's survival as follows: (continued)

2. Product Development

In order to achieve better profits than the previous year which simultaneously reduces the amount of accumulated losses, PT MRB in 2020 has carried out product development in the form of Ventilator assembly in collaboration with PT Rekacipta Inovasi ITB (PT RII), production cooperation with PT Industri Sandang Nusantara (PT ISN) for medical and non-medical masks while the joint operation with PT Mitra Multi Teknomedika (PT MMT) for the Hyperbaric Chamber Ox-ygen Therapy product will develop a new product in the form of an Oxygen Generator. The results of this collaboration are expected to make a significant contribution in 2021.

Meanwhile, for the collaboration that has been initiated and a study process in 2021 and is expected to be realized soon so that it can provide additional new portfolios and performance contributions are production collaboration with PT Bara Sehat Jaya for Foley Chateter products and cooperation in producing Nitrile gloves with PT KPOMG Investama Sejahtera.

The production collaboration above is expected to develop and be able to provide more contributions in the coming years.

3. HR Development in increasing productivity

Human resources as an asset in increasing company productivity are the next concentration in the company's performance improvement plan.

Efforts to develop human resources are evidenced in the stipulation of a budget for education and training that supports the competence of human resources and at the same time has a motivational impact on the employees concerned.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (lanjutan)

Rencana manajemen untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi akumulasi rugi, serta mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan sebagai berikut : (lanjutan)

3. Pengembangan SDM dalam peningkatan produktivitas (lanjutan)

Peningkatan kompetensi individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan SDM sehingga jumlah anggaran ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat terealisasi dengan hasil yang maksimal bagi peningkatan produktivitas perusahaan.

4. Kinerja keuangan

Dalam proyeksi laba rugi sampai dengan tahun 2024 dengan diharapkan pencapaian laba meningkat dan atas kontribusi laba tersebut mengurangi akumulasi kerugian, dimana saldo akumulasi laba proyeksi tahun 2024 sebesar Rp 74,3 Miliar.

3. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE)

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Entitas akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Pada tanggal 31 Desember 2020 Entitas memiliki saldo defisit sebesar Rp 108.707.281.367.

Adapun langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif ditahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja usaha karung plastik.

- a. Peningkatan produksi karung plastik dengan menekan *reject* maksimal 5%.
- b. Rasionalisasi mesin produksi, melanjutkan program kerja yang telah dijalankan pada Q4 tahun 2020 dengan tujuan efisiensi biaya tenaga kerja dan biaya energi listrik serta efektivitas produksi.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

2. PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) (continued)

The management plan to improve performance and reduce accumulated losses, as well as maintain the Company's survival as follows: (continued)

3. HR Development in increasing productivity (continued)

Increasing individual competence is an inseparable part of developing human resources so that the amount of the budget is set to be bigger than the previous year and is expected to be realized with maximum results for increasing company productivity.

4. Financial performance

In the projection of profit and loss up to 2024, it is expected that the achievement of profit will increase and for this profit contribution to reduce the accumulated losses, where the balance of the accumulated profit projection for 2024 is Rp 74.3 billion.

3. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE)

The financial statements are prepared assuming that the entity will continue as a going concern. As of 31 December 2020, the Entity has a deficit balance of Rp 108,707,281,367.

The Entity's management steps to maintain positive performance in the coming years are as follows:

1. Improve the performance of the plastic sack business.

- a. Increase the production of plastic bags by pressing the reject maximum of 5%.
- b. Rationalization of production machines, continuing the work program that was carried out in Q4 2020 with the aim of efficiency in labor costs and electricity costs as well as production effectiveness.

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

3. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE) (lanjutan)

Adapun langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif ditahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. Meningkatkan kinerja usaha karung plastik. (lanjutan)
 - c. Optimalisasi tenaga operator untuk meningkatkan produktivitas operator, yang dilakukan dengan melakukan optimalisasi hari produksi dan jumlah shift kerja sesuai kebutuhan.
 - d. Reformulasi komposisi pemakaian bahan baku untuk memperoleh standar kualitas dan harga pokok produksi yang kompetitif.
 - e. Meningkatkan penjualan karung plastik dengan optimalisasi tender pelanggan existing dan pelanggan baru, serta pengembangan produk turunan plastik berupa kantong plastik medis, hand gloves plastik, karung laminasi termasuk tradingnya.
2. Lini bisnis kulit tidak dijalankan dengan pertimbangan diantaranya:
 - a. Tren kinerja bisnis kulit dalam +/- 5 tahun terakhir cenderung merugi.
 - b. Limbah yang dihasilkan dan isu lingkungan memberikan dampak finansial dan non finansial.
 - c. Pengembangan karung laminasi bekerjasama dengan PT Rajawali Citramass maupun dengan mitra strategis lainnya.
 - d. Manajemen *cash flow* untuk menjaga likuiditas perusahaan dengan menjaga *Net Operating Cash Flow* (NOCF) tetap positif.
 - e. Perbaikan penyusunan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu, salah satunya dengan update aplikasi sistem informasi akuntansi berbasis *Enterprise Resources Planning* (ERP) yang dijalankan.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

3. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE) (continued)

The Entity's management steps to maintain positive performance in the coming years are as follows: (continued)

1. Improve the performance of the plastic sack business. (continued)
 - c. Optimization of operator manpower to increase operator productivity, which is done by optimizing production days and the number of work shifts as needed.
 - d. Reformulation of the composition of the use of raw materials to obtain quality standards and competitive cost of goods manufactured.
 - e. Increasing sales of plastic bags by optimizing existing and new customer tenders, as well as developing plastic derivative products in the form of medical plastic bags, plastic hand gloves, laminated sacks, including trading.
2. The leather business line is not carried out with the following considerations:
 - a. The leather business performance trend in the last +/- 5 years tends to suffer a loss.
 - b. The resulting waste and environmental issues have financial and non-financial impacts.
 - c. The development of laminated sacks in collaboration with PT Rajawali Citramass and with other strategic partners.
 - d. Cash flow management to maintain company liquidity by keeping Net Operating Cash Flow (NOCF) positive.
 - e. Improvements in the preparation of financial reports for accurate and timely decision making, one of which is by updating the accounting information system application based on Enterprise Resources Planning (ERP) that is running.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

3. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE) (lanjutan)

Adapun langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif ditahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. Lini bisnis kulit tidak dijalankan dengan pertimbangan diantaranya: (lanjutan)
 - f. Rencana perbaikan mesin dengan menggandeng investor untuk pemantapan kapasitas atau mengembalikan kepada kapasitas terpasangnya, yaitu 31,2 juta lembar.
 - g. Sinergi dengan BUMN klaster pangan dan anak perusahaan RNI grup.
 - h. Transformasi *human capital resources* yang unggul untuk meningkatkan produktivitas, keahlian/skill sumber daya manusia.

4. PT Rajawali Gloves (dalam likuidasi)

Berdasarkan Surat Permohonan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 tanggal 17 Desember 2009 selaku Pemegang Saham terbesar Perusahaan untuk meminta persetujuan atas perubahan pola divestasi penjualan saham dengan cara dilikuidasi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia hal ini menunjukkan Pemegang Saham sudah tidak lagi mempunyai keinginan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Perusahaan juga mengalami kerugian dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2011 akumulasi kerugian mencapai Rp 12.571.901.777. Hal ini disebabkan penjualan ke Master Grip Inc. sebagai pembeli terbesar sekaligus Pemegang Saham sejak tahun 2005 tidak lagi memberi order sehingga penjualan menurun hingga 90% lebih, kemudian Perusahaan mencoba membidik pasar lokal yang hingga saat ini produk dari perusahaan harganya tidak bisa bersaing dari produk-produk lokal lain yang sejenis. Para Pemegang Saham asing yaitu Fabry Gloves & Mitten Co, Master Grip Inc, dan Mirae Trading Co, hingga saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian untuk meneruskan kelangsungan usaha ke depan.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

3. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring (RTE) (continued)

The Entity's management steps to maintain positive performance in the coming years are as follows: (continued)

2. The leather business line is not carried out with the following considerations: (continued)
 - f. Plans to repair machines by cooperating with investors to strengthen capacity or return to their installed capacity as 31.2 million shares.
 - g. Synergy with the BUMN food cluster and the RNI group's subsidiaries.
 - h. Transforming superior human capital resources to increase productivity, expertise / human resource skills.

4. PT Rajawali Gloves (in liquidation)

Based on the application letter of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) No. 367/RNI/01/XII/09 dated 17 December 2009 as the largest shareholder of the Company to request approval for the change of divestment of share sales by liquidation to the Minister of State Owned Enterprises (BUMN) of the Republic of Indonesia indicates that shareholders no longer have the intention to continue their business activities.

The Company also suffered losses in the last 7 (seven) years. Until 2011 accumulated losses reached Rp 12,571,901,777. This was due to sales to Master Grip Inc. as the biggest buyer as well as Shareholder since 2005 no longer gave orders so that sales decreased up to 90% more, then the Company tried to target the local market which until now the products of the Company the price cannot compete from other similar local products. The foreign shareholders were Fabry Gloves & Mitten Co, Master Grip Inc, and Mirae Trading Co., until now there was no clarity and certainty to continue the business continuity in the future.

31 Desember 2020

31 December 2020

**48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas
anak (lanjutan)**

4. PT Rajawali Gloves (dalam likuidasi) (lanjutan)

Dalam kegiatan operasionalnya selama tahun 2010 Perusahaan tidak lagi mendapat modal kerja dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham yang selama ini memberikan modal kerja dikarenakan akumulasi pinjaman modal kerjanya sudah mencapai Rp 11.315.052.075 pada tahun 2010.

Akibat kerugian operasi yang berulang kali terjadi menyebabkan saldo ekuitas per 31 Desember 2010 menjadi defisit sebesar Rp 12.571.901.777 oleh karena itu Perusahaan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilanjutkan operasionalnya dengan pertimbangan pihak Pemegang Saham sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan operasional perusahaan dan juga modal Perusahaan yang dalam kondisi negatif lebih dari 75 %.

PT Rajawali Gloves telah mengalami akumulasi kerugian dari usahanya yang sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp 12.571.901.777 dan yang mengakibatkan kesulitan modal kerja, terjadinya pemutusan hubungan kerja serta penghentian kegiatan operasional Perusahaan.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.762/Pdt.P/2012PN.Sby tanggal 26 Juni 2012 PT Rajawali Gloves diputuskan disetujui untuk dilikuidasi yang selanjutnya diaktakan dengan akta RUPS-LB PT Rajawali Gloves No.7 tanggal 16 Juli 2012.

Sampai saat ini proses likuidasi masih berlangsung (lebih dari 30 bulan), diantaranya dengan pencabutan perizinan termasuk pencabutan NPWP, Penjualan Aset Bergerak dan lainnya. Khusus untuk penjualan Aset Tidak Bergerak, agak terkendala menyangkut Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Pemegang Saham Utama.

**48. Going concern of some subsidiaries condition
(continued)**

4. PT Rajawali Gloves (in liquidation) (continued)

In its operational activities during 2010 the Company no longer got working capital from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the shareholder who has been providing working capital due to the accumulation of working capital loan has reached Rp 11,315,052,075 in 2010.

As a result of repeated operating losses, the equity balance as of 31 December 2010 becomes a deficit of Rp 12,571,901,777 therefore the Company is no longer allowed to continue operations with the consideration that the Shareholders have no ability to continue the Company's operations and also the Company's capital in negative condition more than 75%.

PT Rajawali Gloves had accumulated losses from its operations up to 31 December 2013 amounting to Rp 12,571,901,777 and which resulted in difficulties in working capital, termination of employment and termination of the Company's operational activities.

Based on the decision of Surabaya District Court No.762/Pdt.P/2012PN.Sby dated 26 June 2012 PT Rajawali Gloves was decided approved for liquidation which further notarized by deed of AGM-LB PT Rajawali Gloves No.7 dated 16 July 2012.

Until now the liquidation process is still ongoing (more than 30 months), such as with revocation of licenses including revocation of Taxpayer Identification Number, Sale of Movable Assets and others. Especially for the sale of fixed assets, it is rather constrained concerning Approval and Work Plan and Company Budget (RKAP) of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) as the Main Shareholder.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

5. PT GIEB Indonesia

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, telah terjadi pandemik virus COVID-19 yang mengakibatkan pendapatan dan biaya sampai pada awal bulan februari mengalami penurunan sebesar 72,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga di tahun 2021, Perusahaan akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas bisnis organisasi untuk mencapai hasil tahunan yang positif yaitu dengan langkah strategi berikut ini:

1. Pada tahun 2021, Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan omzet sebesar Rp. 365,04 milyar dengan laba Rp. 1,85 milyar.
2. Pada tahun 2021, Perusahaan merencanakan akan menambah principal dengan margin 10% dan TOP diatas 45 hari dan mempunyai nilai jual tinggi, sehingga produktivitas salesman meningkat menjadi Rp. 1,08 milyar per salesman per bulan
3. Bekerja sama dengan anak perusahaan RNI group untuk mendistribusikan produknya seperti hand sanitizer, the liki, alkohol, beras rania dan minyak rania dengan omset sebesar Rp 727 juta per bulan
4. Mengajukan penurunan suku bunga pinjaman modal kerja di Bank Mandiri yang sebelumnya tahun 2020 sebesar 8% per tahun menjadi 7,75% ditahun 2021, sehingga beban bunga dapat berkurang sebesar Rp. 76,04 juta setahun
5. Melakukan penurunan piutang overdue dari 25% menjadi 10% dengan cara mengefektifkan penagihan dan update plafon kredit dan termin kredit yang diberikan kepada pelanggan untuk bisa membantu likuiditas Perusahaan dan menghindari terjadinya kerugian piutang yang tidak tertagih.
6. Menganalisa beban kerja per karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan melakukan efisiensi biaya dengan merealisasikan biaya yang berdampak pada peningkatan penjualan.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

5. PT GIEB Indonesia

As of the date of issuance of the financial statements, there has been a pandemic of the COVID-19 virus which resulted in a decrease in income and expenses at the beginning of February by 72.48% compared to the previous year. So that in 2021, the Company will take further steps to increase the productivity of the organization's business to achieve positive annual results, namely the following strategic steps:

1. In 2021, the Company has prepared a Corporate Budget Work Plan (RKAP) with a turnover of Rp. 365.04 billion with a profit of Rp. 1.85 billion.
2. In 2021, the Company plans to add principals with a margin of 10% and TOP over 45 days and have a high selling value, so that salesman productivity will increase to Rp. 1.08 billion per salesman per month.
3. Cooperating with subsidiaries of the RNI group to distribute products such as hand sanitizers, the liki, alcohol, rania rice and rania oil with a turnover of Rp 727 million per month
4. Propose a reduction in the interest rate for working capital loans at Bank Mandiri, which previously was 8% per year in 2020 to 7.75% in 2021, so that the interest expense can be reduced by Rp. 76.04 million a year
5. Decrease overdue receivables from 25% to 10% by streamlining billing and updating credit ceilings and credit terms given to customers to help the Company's liquidity and avoid loss of uncollectible accounts.
6. Analyze the workload per employee according to the needs of the Company and carry out cost efficiency by realizing costs that have an impact on increased sales.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

6. PT Rajawali Citramass

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Entitas akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Pada tanggal 31 Desember 2020 Entitas mengalami kerugian sebesar Rp 18.351.197.425 dan defisiensi modal sebesar Rp 32.638.128.803.

Langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif di tahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan melalui penambahan order dari sinergi BUMN dan peningkatan produksi.
 - Sinergi BUMN berupa kerjasama dalam penyediaan modal kerja dengan *sharing profit*, di mana *sharing profit* tersebut diharapkan dapat meningkatkan omzet sebesar Rp28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar rupiah).
 - Pengembangan produk kantong sampah medis dengan spesifikasi yang lebih besar sesuai permintaan pelanggan melalui jasa maklon ke Entitas lain. Pengembangan produk tersebut diharapkan dapat meningkatkan omzet sebesar Rp5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan margin + 26%.
 - Pengembangan produk karung laminasi melalui investasi aset tetap mesin karung laminasi sepanjang tahun 2021, dimana aset tetap mesin tersebut diharapkan dapat digunakan untuk produksi karung laminasi pada akhir tahun 2021. Pengembangan produk karung laminasi diharapkan dapat meningkatkan omzet sebesar Rp2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan margin + 14%.
2. Meningkatkan likuiditas melalui percepatan penagihan piutang dan efisiensi biaya di semua lini.
 - Melakukan penagihan secara intensif guna menjaga CONF positif untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga kepastian margin dari setiap order penjualan yang didapat.

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

6. PT Rajawali Citramass

The financial statements are prepared assuming that the entity will continue as a going concern. As of December 31, 2020, the Entity incurred a loss of Rp 18,351,197,425 and deficiency of capital amounting to Rp 32,638,128,803.

The steps of the Entity's management to maintain positive performance in the years to come, are as follows:

1. Increase revenue through the addition of orders from BUMN synergies and increased production.
 - BUMN synergy in the form of cooperation in providing working capital with profit sharing, in which profit sharing is expected to increase turnover by Rp 28,000,000,000 (twenty-eight billion rupiah).
 - Development of medical waste bag products with larger specifications according to customer demand through printing services to other entities. The product development is expected to increase turnover of Rp 5,700,000,000 (five billion seven hundred million rupiah) with a margin of + 26%.
 - The development of laminated sack products is through investment in fixed assets of laminated sack machines throughout 2021, where the fixed assets of the machine are expected to be used for the production of laminated sacks by the end of 2021. Development of laminated sack products is expected to increase turnover by Rp 2,300,000,000 (two billion three hundred million rupiah) with a margin of + 14%.
2. Increase liquidity through accelerated collection of accounts receivable and cost efficiency on all fronts.
 - Conduct intensive invoices to maintain positive CONF to maintain raw material availability. This is expected to maintain the certainty of the margin of each sales order that is obtained.

31 Desember 2020

31 December 2020

48. Kondisi kelangsungan usaha beberapa entitas anak (lanjutan)

48. Going concern of some subsidiaries condition (continued)

6. PT Rajawali Citramass (lanjutan)

6. PT Rajawali Citramass (continued)

Langkah-langkah manajemen Entitas untuk mempertahankan kinerja positif di tahun-tahun mendatang, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The steps of the Entity's management to maintain positive performance in the years to come, are as follows: (continued)

2. Meningkatkan likuiditas melalui percepatan penagihan piutang dan efisiensi biaya di semua lini. (lanjutan)
 - Migrasi program IT dari Web ke ERP Odoo guna menjaga ketepatan dan keakuratan dalam penyajian data.
 - Efisiensi segala bidang terutama dalam biaya produksi melalui evaluasi pengupahan tenaga kerja borongan serta pengurangan tenaga kerja yang tidak efektif.

2. Increase liquidity through accelerated collection of accounts receivable and cost efficiency on all fronts. (continued)
 - Migration of IT programs from the Web to Odoo ERP to maintain accuracy and accuracy in presenting data.
 - Efficiency in all sectors, especially in terms of production costs, through evaluation of piece rate wages and reduction of ineffective labor.

7. Dampak permasalahan kelangsungan usaha beberapa Entitas Anak terhadap Konsolidasian

7. The impact of the business continuity problems of several subsidiaries to consolidation

	% Aset terhadap Total Aset Konsolidasian/ % Assets to Consolidated Total Assets	% Penjualan terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ % Sales to Consolidated Total Sales	
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PT GIEB Indonesia	0,86%	3,90%	PT GIEB Indonesia
PT Mitra Rajawali Banjaran	0,80%	0,75%	PT Mitra Rajawali Banjaran
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	0,35%	0,93%	PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Rajawali Citramass	0,50%	1,15%	PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Gloves Corporation	0,00%	0,00%	PT Rajawali Gloves Corporation
<u>Entitas Cucu</u>			<u>Sub Subsidiaries</u>
PT Inti Bagus Perkasa	0,21%	0,00%	PT Inti Bagus Perkasa

31 Desember 2020

31 December 2020

49. Aset dan liabilitas keuangan

Sebagaimana diisyaratkan dalam PSAK 50 dan 55 revisi 2014 tentang penerapan Instrumen Keuangan yang diterapkan pada tahun 2015. Berdasarkan penelaahan Manajemen perseroan dan Entitas Anak memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan investasi jangka pendek, yang timbul secara langsung dari kegiatan usaha. Perusahaan dan Entitas Anak juga memiliki liabilitas keuangan yang terdiri dari utang usaha, beban akrual, dan liabilitas jangka panjang. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan dan Entitas Anak.

Rincian aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2020:

49. Financial asset and liability

As indicated in the revised SFAS 50 and 55 revised in 2014 on the application of Financial Instruments adopted in 2015. Based on the management review and the Company and Subsidiaries have various financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and short-term investments, which arise directly from business activities. The Company and Subsidiaries also have financial liabilities consisting of accounts payable, accrued expenses, and long-term liabilities. The main objective of the financial liabilities is to finance the Company's and Subsidiaries' business activities.

Details of financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2020:

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	307.299.268.370	307.299.268.370	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	628.334.386.745	628.334.386.745	Trade receivables
Piutang lain lain	557.296.248.502	557.296.248.502	Others receivables
Investasi jangka panjang	55.787.718.288	55.787.718.288	Long-term investments
Aset lain	83.108.395.373	83.108.395.373	Other assets
Jumlah	1.631.826.017.278	1.631.826.017.278	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang bank	2.615.483.315.770	2.615.483.315.770	Bank loans
Utang usaha	908.263.297.965	908.263.297.965	Trade payables
Utang lain lain	741.330.540.377	741.330.540.377	Others payables
Biaya yang masih harus dibayar	79.384.560.596	79.384.560.596	Accrued expenses
Liabilitas jatuh tempo dalam 1 thn	594.047.987.707	594.047.987.707	Current Maturity liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.933.626.103.982	2.933.626.103.982	Long-term liabilities
Jumlah	7.872.135.806.397	7.872.135.806.397	Total

49. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan :

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya. Piutang usaha dan piutang lainnya dilakukan penyisihan penurunan nilai berdasarkan pengamatan atas kemungkinan tidak tertagihnya.

Investasi pada saham biasa yang tidak memiliki kuota pasar dengan kepemilikan saham dibawah 20% atau sampai dengan pemilikan 50% yang tidak diketahui nilai pasarnya, dicatat pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai tercatat dari liabilitas bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dilakukan penilaian secara berkala.

49. Financial asset and liability (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value for each group of financial instruments :

Short-term financial instruments with maturities of one year or less including cash and cash equivalents, accounts receivable, other receivables, accounts payable, other debt, and accrued expenses. The fair value of such financial instruments is deemed to be close to their carrying amount. Trade receivables and other receivables are provided allowance for impairment based on observation of the possibility of uncollectible.

Investments in ordinary shares that do not have market quotas with ownership interest below 20% or up to 50% of unrecognized market value are recorded at cost as their fair value cannot be measured reliably.

The carrying amount of long-term bank liabilities with floating interest rate is approximately equal to its fair value due to periodic appraisal.

50. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat diungkapkan di bawah ini.

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Grup telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

50. Significant accounting estimates and judgements

The estimates and judgements used in the preparation of the financial statements are continuously evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, the resulting results may differ from those initially estimated. Assumptions and considerations that have a significant effect on the carrying amount are disclosed below.

Going concern

The Group's management has assessed the Group's ability to continue its business and believes that the Group has the resources to continue its operations in the future. In addition, management is unaware of material uncertainty that can cause significant doubts about the Group's ability to maintain its viability. Therefore, financial statements have been prepared on the basis of sustainable enterprises.

Fair value of financial instrument

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position are not available in the active market, it is determined using various assessment techniques including the use of mathematical models. The input for this model come from market data that can be observed as long as the data is available. When such observable market data are not available, management considerations are required to determine fair value. These considerations include liquidity considerations and model inputs such as volatility for long-term derivative transactions and discount rates, accelerated repayment rates, and the assumption of default rates.

50. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Grup menelaah pinjaman yang diberikan dan piutang yang signifikan secara individu pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Grup membuat justifikasi tentang situasi keuangan nasabah dan nilai realisasi neto jaminan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual yang mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang pada penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut.

Penurunan nilai investasi tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo

Grup menelaah efek utang dan ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian individu pada pinjaman yang diberikan dan piutang.

Masa manfaat aset

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan, jika ada. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

50. Significant accounting estimates and judgements (continued)

Impairment of loan and receivable value

The Group reviews individual loans and receivables at each statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the consolidated statements of comprehensive income. In particular, justification by management is required in estimating the amount and timing of future cash flows when determining impairment. In the estimated cash flows, the Group justifies the client's financial situation and net realizable value of the guarantee. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results that may differ, which are reflected in future changes in the allowance for impairment losses.

The decrease in value of investments available for sale and held to maturity

The Group reviews debt and equity securities classified as available-for-sale and held-to-maturity at each statement date of the financial position to assess whether there has been a decline in value. Such assessments require the same considerations as those applied to individual assessments of loans and receivables.

Fixed assets useful lives

The Group conducts periodic review of the economic useful lives of the assets based on factors such as technical conditions and future technological developments, if any. Future results of operations will be materially affected by changes in these estimates resulting from changes in the factors mentioned above.

31 Desember 2020

31 December 2020

50. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

Perpajakan

Grup beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode di mana hasil tersebut dikeluarkan.

Sedangkan aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Kewajiban imbalan kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya neto untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

50. Significant accounting estimates and judgements (continued)

Taxation

The Group operates under Indonesian tax laws. Significant consideration is required to determine the provision for income tax and value added tax. If the final tax decision is different from the amount originally recorded, the difference will be recorded in the consolidated statements of comprehensive income in the period in which the results are issued.

Deferred tax assets are recognized on the recoverable tax amount in the future periods as a result of temporary differences that may be deducted. Management justification is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, in accordance with the appropriate time and future fiscal profit levels in line with the strategy of the future tax plan.

Employee benefits obligations

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors determined by using the actuarial assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term expected return on the program assets and the relevant discount rate. Any change in this assumption will have an impact on the carrying amount of the employee benefits obligation.

The expected assumption of expected return on plan assets is determined uniformly, taking into account long-term historical returns, asset allocation and future forecasts of long-term return on investment.

Another important assumption for employee benefits obligations is partly based on current market conditions.

**51. Kondisi menyediakan penggantian lahan
Jatitujuh**

PT Pabrik Gula Rajawali II

Kewajiban Penggantian Lahan

Kewajiban penggantian lahan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 12.022,50 ha sesuai luasan awal pencadangan kawasan hutan untuk perkebunan tebu, yang saat ini merupakan HGU Pabrik Gula Jatitujuh dengan sertifikat No.00001/Kab.Majalengka seluas 5.673 ha dan No. 02/Kab.Indramayu di Jatitujuh seluas 6.248 ha atau total seluas 11.921 Ha.

Kewajiban penggantian seluas 12.022,50 ha tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:152/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:153/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional, Departemen Pertanian yang pada waktu itu masih membawahi bidang kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 mengeluarkan areal kawasan hutan di wilayah Jatitujuh dan sekitarnya seluas 12.022,50 ha untuk dicadangkan sebagai lahan tanaman tebu dalam rangka membangun pabrik gula Jatitujuh yang merupakan salah satu unit pabrik gula milik PTP XIV (Persero).

Sesuai SK Mentan No. 481/Kpts/Um/8/1976, terkait pencadangan areal kawasan hutan tersebut PTP XIV (Persero) berkewajiban untuk:

- Mengganti areal hutan secara bertahap selama 10 tahun.
- Membayar ganti rugi tanaman (telah dibayar).
- Membayar biaya pengukuran batas.

51. Conditions provide Jatitujuh land replacement

PT Pabrik Gula Rajawali II

Land Replacement Obligations

The obligation to replace forest land to the Ministry of Environment and Forestry covers an area of 12,022.50 ha in accordance with the initial area of forest reserve for sugarcane plantations, which is currently the HGU of Jati Tujuh Sugar Factory with certificate No.00001 / Kab.Majalengka covering 5,673 ha and No. 02 / Kab. Indramayu in Jatitujuh covering an area of 6,248 ha or a total area of 11,921 Ha.

The obligation to replace an area of 12,022.50 ha is contained in the Decree of the Head of the National Land Agency Number: 152 / HGU / BPN / 2004 concerning the Granting of the Extension of the Period of Land for Cultivation Rights on Land HGU / BPN / 2004 concerning the Granting of Extension of the Term of Land Use Rights located in Indramayu Regency, West Java Province.

In order to meet the needs of national sugar, the Ministry of Agriculture, which at that time was still in charge of the forestry sector, was in accordance with Minister of Agriculture Decree No. 481 / Kpts / Um / 8/1976 dated 9 August 1976 issued a forest area in the Jatitujuh region and its surrounding area of 12,022.50 ha to be reserved as sugarcane land in the context of building a Jatitujuh sugar factory which is one of the PTP XIV mill sugar mill units (Persero).

In accordance with Minister of Agriculture Decree No. 481 / Kpts / Um / 8/1976, related to the reserve of the forest area PTP XIV (Persero) is obliged to:

- *Changing forest area gradually over 10 years.*
- *Pay crop compensation (already paid).*
- *Paying boundary measurement fees.*

**51. Kondisi menyediakan penggantian lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Kewajiban Penggantian Lahan (lanjutan)

Pada tahun 1979 telah terbit sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Perkebunan XIV (Persero).

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1989 pengelolaan PT Perkebunan XIV (Persero) diserahkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan selanjutnya pada tahun 1993 kepemilikan saham pemerintah dialihkan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Sejak saat itu PT Perkebunan XIV (Persero) menjadi anak perusahaan Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan diubah namanya menjadi PT PG Rajawali II. Upaya penggantian Kawasan hutan sejak HGU masih atas nama PTP XIV (Persero) sampai dengan saat ini HGU atas nama PT PG Rajawali II belum terealisasi.

Terdapat ketentuan dalam PP No. 10 tahun 2010 yang mencantumkan bahwa perusahaan perkebunan yang sudah mendapat izin prinsip sebelum berlakunya Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, penyerahan lahan pengganti dilakukan paling lama 12 tahun sejak PP tersebut diberlakukan. Atas dasar hal tersebut PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II diberi kesempatan melakukan penggantian Kawasan hutan paling lambat pada tahun 2022.

Tahun 1976: Pencadangan kawasan hutan untuk perkebunan tebu

Surat Keputusan Menteri Pertanian No.481/Kpts/Um/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 mengeluarkan areal kawasan hutan di wilayah Jatitujuh dan sekitarnya seluas 12.022,50 ha untuk dicadangkan sebagai lahan tanaman tebu dalam rangka membangun pabrik gula Jatitujuh yang merupakan salah satu unit pabrik gula milik PTP XIV (Persero), dengan syarat PTP XIV (Persero) berkewajiban:

- Mengganti areal hutan secara bertahap selama 10 tahun.
- Membayar ganti rugi tanaman (telah dibayar).
- Membayar biaya pengukuran batas.

51. Conditions provide Jatitujuh land replacement (continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Land Replacement Obligations (continued)

In 1979, a certificate of land use rights (HGU) was issued on behalf of PT Perkebunan XIV (Persero).

In a further development in 1989 the management of PT Perkebunan XIV (Persero) was handed over to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and subsequently in 1993 ownership of government shares was transferred to PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Since then PT Perkebunan XIV (Persero) became a subsidiary of Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and changed its name to PT PG Rajawali II. Efforts to replace forest areas since HGU are still in the name of PTP XIV (Persero) until now HGU on behalf of PT PG Rajawali II have not been realized.

There are provisions in PP No. 10 of 2010 which states that plantation companies that have obtained a principle permit prior to the enactment of Forestry Law No. 41 of 1999, surrender of replacement land was made no later than 12 years after the PP was enacted. Based on this, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II was given the opportunity to replace the forest area no later than 2022.

In 1976: Forest reserve for sugarcane plantation

Decree of the Minister of Agriculture No.481 / Kpts / Um / 8/1976 dated 9 August 1976 issued an area of forest area in the Jatitujuh region and its surrounding area of 12,022.50 ha to be reserved as sugarcane land in the context of building a Jati Tujuh sugar factory which is one of the units PTP XIV (Persero) millik sugar factory, with the condition that PTP XIV (Persero) is obliged to:

- Changing forest area gradually over 10 years.
- Pay crop compensation (already paid).
- Paying boundary measurement fees.

51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan Jatitujuh (lanjutan)

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Tahun 1979 - 1989: Pengelolaan PG Jatitujuh Oleh PTP XIV (Persero)

- Pada tahun 1979 terbit HGU atas nama PTP XIV yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2004.
- Upaya penggantian Kawasan hutan, namun tidak terealisasi.

Tahun 1989 - 1993: Pengalihan Pengelolaan PTP XIV (Persero) kepada PT RNI (Persero)

- Tahun 1989 Pemerintah menyerahkan pengelolaan PTP XIV (Persero) kepada PT RNI (Persero).
- Pada tahun 1993 Pemerintah mengalihkan saham PTP XIV (Persero) kepada PT RNI (Persero), dan PTP XIV (Persero) menjadi anak perusahaan PT RNI (Persero) serta berubah nama menjadi PT PG Rajawali II.
- Upaya penyelesaian penggantian lahan melalui hibah atau PMP sesuai usulan Menteri Keuangan surat No.S-1204/MK.013/1989 tanggal 28 November 1989 kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, & Industri yang telah disetujui Menko Ekuin sesuai surat No. S-613/M.Ekuin/1989 tanggal 18 Desember 1989 namun ditolak oleh Kementerian Kehutanan.

Tahun 2004 - 2008: Perpanjangan HGU dan Upaya Alternatif Penyelesaian Penggantian Kawasan Hutan

- Pengajuan Perpanjangan HGU, terdapat kendala dikarenakan PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II belum melakukan penggantian Kawasan hutan.
- Perpanjangan Sertifikat HGU dengan rekomendasi Menteri Kehutanan yang bersyarat kesanggupan PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II untuk mengganti Kawasan hutan selambatnya 10 tahun sampai dengan 31 Desember 2014, surat Menteri Kehutanan No.S.410/Menhut-VII/2004 tanggal 8 Oktober 2004.
- Sertifikat HGU terbit atas nama PT PG Rajawali II dan berlaku hingga 31 Desember 2029.

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement (continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Year 1979 - 1989: Management of PG Jatitujuh by PTP XIV (Persero)

- In 1979 the HGU was issued on behalf of PTP XIV which was valid until 31 December 2004.
- Efforts to replace forest areas, but were not realized.

Year 1989 - 1993: Transfer of PTP XIV (Persero) Management to PT RNI (Persero)

- In 1989 the Government handed over the management of PTP XIV (Persero) to PT RNI (Persero).
- In 1993 the Government transferred PTP XIV (Persero) shares to PT RNI (Persero), and PTP XIV (Persero) became a subsidiary of PT RNI (Persero) and changed its name to PT PG Rajawali II.
- Efforts to complete land replacement through a grant or PMP according to the proposal of the Minister of Finance letter No. S-1204/MK.013/1989 dated 28 November 1989 to the Coordinating Minister for Economy, Finance & Industry which has been approved by the Coordinating Minister for the Economy in accordance with letter No. S-613/M.Ekuin/1989 dated 18 December 1989 but was rejected by the Ministry of Forestry.

Year 2004 - 2008: Extension of HGU and Alternative Efforts to Complete Forest Area Replacement

- Submission of HGU Extension, there are obstacles due to PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has not yet carried out forest area replacement.
- Extension of the HGU Certificate with recommendation from the Minister of Forestry who is conditional on the ability of PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II to replace the Forest Zone no later than 10 years until 31 December 2014, Forestry Minister's letter No.S.410/Menhut-VII/2004 dated 8 October 2004.
- The HGU certificate is issued in the name of PT PG Rajawali II and is valid until 31 December 2029.

31 Desember 2020

31 December 2020

51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan Jatitujuh (lanjutan)

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Tahun 2004 – 2008: Perpanjangan HGU dan Upaya Alternatif Penyelesaian Penggantian Kawasan Hutan (lanjutan)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II juga pernah mengusulkan alternatif penyelesaian dengan program penghijauan/rehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jawa Barat.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II pada tahun 2008 telah mendapatkan 2 (dua) kali Surat Peringatan dari Menteri Kehutanan sesuai surat No. S.201/Menhut-VII/2008 tanggal 21 April 2008 dan surat No. S.582/Menhut-VII/2008 tanggal 15 September 2008.

Upaya Penggantian Kawasan Hutan

Tahun 2009

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II kembali mendapatkan Surat Peringatan ketiga dari Menteri Kehutanan sesuai surat No. S.484/Menhut-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009, dinyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak dapat memenuhi kewajibannya maka persetujuan prinsip tukar menukar atas nama PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II akan dipertimbangkan untuk dicabut.
- Upaya Penggantian Lahan dilakukan melalui Mou PT RNI (Persero) dengan PTPN VIII (Persero) tentang penyediaan calon lahan pengganti HGU Jatitujuh No. NK/IV.2/560/VII/2009 qq No. 30/MoU/RNI.01/VII/09 tanggal 27 Juli 2009. Rencana penggantian lahan terhenti karena ada larangan penjualan aset BUMN (Rekomendasi Panitia Aset Komisi VI DPR RI)

Tahun 2010

Batas waktu penggantian lahan dengan dasar: Pasal 52 ayat 1 PP No. 10 tahun 2010 yang mencantumkan bahwa Perusahaan perkebunan yang sudah mendapat izin prinsip sebelum Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, lahan pengganti dilakukan paling lama 12 tahun sejak PP tersebut diberlakukan, sehingga diberikan kesempatan batas waktu penggantian kawasan hutan adalah pada tahun 2022.

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement (continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Year 2004 - 2008: Extension of HGU and Alternative Efforts to Complete Forest Area Replacement (continued)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has also proposed an alternative settlement with the reforestation/ rehabilitation of critical land in West Java Province.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II in 2008 received 2 (two) times a Warning Letter from the Minister of Forestry in accordance with letter No. S.201/Menhut-VII/2008 dated 21 April 2008 and letter No. S.582/Menhut-VII/2008 dated 15 September 2008.

Efforts to Replace Forest Areas

Year 2009

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II again received a third Warning Letter from the Minister of Forestry in accordance with letter No. S.484/Menhut-VII/2009 dated 23 June 2009, stated that if within 30 days could not fulfill its obligations then approval of the principle of exchange on behalf of PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II will be considered revoked.
- Land Replacement Efforts are made through the MoU of PT RNI (Persero) with PTPN VIII (Persero) regarding the provision of prospective land replacement for Jatitujuh HGU No. NK/IV.2/560/VII/2009 qq No. 30/MoU/RNI.01/VII/09 dated 27 July 2009. The plan to replace the land was stalled due to a ban on the sale of BUMN assets (Recommendation of the Working Committee on Assets of Commission VI of the Republic of Indonesia)

Year 2010

Deadline for replacing land on the basis of: Article 52 paragraph 1 PP No. 10 of 2010 which states that plantation Companies that have obtained a principle permit before the Forestry Law No. 41 of 1999, replacement land is carried out no later than 12 years since the PP was enacted, so that given the opportunity to deadline the replacement of forest areas in 2022.

31 Desember 2020

31 December 2020

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Upaya Penggantian Kawasan Hutan (lanjutan)

Tahun 2011

Telah terbit Tim Terpadu pada tahun 2011

Tahun 2014

PT RNI (Persero) dengan surat No. 404/RNI.01/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diberi kesempatan penggantian Kawasan hutan sampai dengan tahun 2022.

Tahun 2015

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengirim kembali surat permohonan perpanjangan pemenuhan lahan pengganti melalui surat No.110/RNI.01/IV/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Rencana Penggantian Lahan sampai dengan tahun 2022.
- Menteri LHK mengirimkan surat kepada Menteri BUMN melalui surat No. S.316/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 13 Juli 2015, perihal Tuntutan agar Kawasan Tebu PT PG Rajawali II PG Jatitujuh menjadi Kawasan Hutan kembali. Dalam surat tersebut memohon Menteri BUMN untuk mendorong PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II agar segera menyelesaikan penyediaan lahan pengganti.
- Menteri BUMN mengirim surat kepada Menteri LHK melalui surat No. S-555/MBU/09/2015 tanggal 9 September 2015, hal: Permasalahan Kawasan Tebu PT PG Rajawali II unit PG Jatitujuh. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Menteri BUMN selalu mendorong PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II untuk segera memenuhi kewajibannya dalam mencari lahan pengganti. Selain itu dimohonkan pula perpanjangan waktu kepada PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II dalam upaya memenuhi pemenuhan kewajiban lahan pengganti.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Efforts to Replace Forest Areas (continued)

Year 2011

The Integrated Team was published in 2011

Year 2014

PT RNI (Persero) with letter No. 404 / RNI.01 / XII / 2014 dated 10 December 2014 submitted a request for an extension to the Minister of Environment and Forestry to be given the opportunity to replace forest areas until 2022.

Year 2015

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II sent a letter requesting the extension of replacement land fulfillment through letter No.110/RNI.01/IV/2015 dated 29 April 2015 regarding the Land Replacement Plan up to 2022.
- The Minister of LHK sent a letter to the Minister of SOEs through letter No. S.316/Menlhk-Setjen/2015 dated 13 July 2015, regarding the Demand that the PT PG Rajawali II PG Jatitujuh Sugarcane Area be a Forest Zone back. In the letter, the SOE Minister requested that PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II immediately complete the provision of replacement land.
- The SOE Minister sent a letter to the Minister of LHK through letter No. S-555/MBU/09/2015 dated 9 September 2015, regarding: Problems of Sugarcane Zone of PT PG Rajawali II PG Jatitujuh unit. The letter stated that the SOE Minister always encouraged PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II to immediately fulfill its obligations in finding replacement land. In addition, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II is also requested for an extension of time to fulfill the fulfillment of the replacement land obligations.

31 Desember 2020

31 December 2020

51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan Jatitujuh (lanjutan)

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Upaya Penggantian Kawasan Hutan (lanjutan)

Tahun 2015

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengirimkan surat kepada Menteri LHK melalui surat No.480/RNI.01/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Calon Lahan Pengganti Kawasan Hutan PG Jatitujuh Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka atas nama PT PG Rajawali II dan PTP XIV (Persero).
- Sebagai bentuk keseriusan PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II dalam memenuhi calon lahan pengganti, telah membentuk Tim yang khusus menangani proses pemenuhan penggantian lahan dengan SK Nomor: 93/SK/RNI.01/VIII/15 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Penggantian Lahan HGU PG Jatitujuh.

Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan Hutan

Tahun 2018

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 57/RNI.01/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengajukan lahan calon pengganti HGU PG Jatitujuh yang berasal dari lahan tidak produktif milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) seluas 12.308 ha dan calon lahan pengganti berasal dari APL (Areal Penggunaan Lain) seluas 1.000 ha yang terletak di Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.108/RNI.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018.
- Kerjasama dengan PTPN VIII (Persero) untuk penyediaan calon lahan pengganti: MOU Nomor NK/III.3/183/III/2018 dan 23/MoU/RNI.01/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perjanjian Pendahuluan No. SP/III.2/549/VII/2018 dan No. 45.4/S.Pj/RNI.01/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement (continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Efforts to Replace Forest Areas (continued)

Year 2015

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II sent a letter to the Minister of LHK via letter No.480/RNI.01/X/2015 dated 15 October 2015 Regarding Prospective Land Replacement Forest Areas PG Jatitujuh District. Indramayu and Kab. Majalengka on behalf of PT PG Rajawali II and PTP XIV (Persero).
- As a form of the seriousness of PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II in meeting prospective replacement land, has formed a Team that specifically handles the process of fulfilling land replacement with SK Number: 93/SK/RNI.01/VIII/15 concerning the Formation of Replacement Settlement Team PG Jatitujuh Land HGU.

Process in order to replace forest area

Year 2018

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 57/RNI.01/II/2018 on 26 February 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II submitted a candidate land for the replacement of PG Jatitujuh's HGU from an unproductive land owned by PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) covering 12,308 ha and the prospective replacement land came from APL (Other Use Areas) covering 1,000 ha which is located in Tegal Buleud District, Sukabumi Regency, West Java. PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 108/RNI.01/IV/2018 on 10 April 2018.
- Cooperation with PTPN VIII (Persero) to provide prospective replacement land: MOU Number NK/III.3/III/2018 and 23/MoU/RNI.01/2018 dated 13 March 2018. Preliminary Agreement No. SP/III.2/549/VII/2018 and No. 45.4/S.Pj/RNI .01/VII/2018 dated 16 July 2018.

31 Desember 2020

31 December 2020

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

**Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan
Hutan (lanjutan)**

Tahun 2018 (lanjutan)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 86/RNI.01/III/2018 tanggal 22 Maret 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah melakukan survey calon lahan pengganti HGU PG Jatitujuh tahap I milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur seluas + 2.442,70 ha. Dalam rangka percepatan program Perhutanan Sosial, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II memprioritaskan lahan-lahan yang diokupasi masyarakat berupa sawah dan lading. Selain lahan yang diokupasi masyarakat kami juga mensurvei lahan cadangan yang diperuntukkan untuk konservasi dan lahan marjinal. Surat belum mendapat jawaban.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 108/RNI.01/IV/2018 tanggal 10 April 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah melakukan survei calon lahan pengganti HGU PG Jatitujuh milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang terletak di Kabupaten Bandung seluas 1.667,09 ha. Lahan milik PTPN VIII (Persero) yang telah disurvei tahap I 2.442,7 ha dan tahap II 1.667,09 ha, dengan demikian lahan yang telah kami survey seluas 4.109,79 ha.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II memohon arahan setelah dilakukan survey calon lahan pengganti tersebut. Surat belum mendapat jawaban.

Tahun 2019

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur tahap I seluas 7.089 ha kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat No. 26/S.Pmh/RNI.01/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Permohonan Pertimbangan Gubernur.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Process in order to replace forest area (continued)

Year 2018 (continued)

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 86/RNI.01/III/2018 dated 22 March 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has conducted a survey of prospective land replacement for HGU PG Jatitujuh phase I owned by PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) located in Bandung Regency, Bogor Regency, and Cianjur Regency covering + 2,442.70 ha. In the framework of accelerating the Social Forestry program, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II prioritizes lands occupied by the community in the form of rice fields and fields. In addition to land occupied by the community, we also survey reserve land intended for conservation and marginal land. The letter hasn't received an answer.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 108/RNI.01/IV/2018 on 10 April 2018.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has surveyed prospective land replacement for PG Jatitujuh HGU owned by PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) located in Bandung Regency covering an area of 1,667.09 ha. The land owned by PTPN VIII (Persero) surveyed in phase I was 2,442.7 ha and phase II was 1,667.09 ha, thus the land surveyed was 4,109.79 ha.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II requested referrals after a survey of the proposed replacement land was carried out. The letter hasn't received an answer.

Year 2019

- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II submitted a request for a Governor's Consideration phase I covering an area of 7,089 ha to the Governor of West Java through letter No. 26/S.Pmh/RNI.01/I/2019 dated 21 January 2019 regarding the Governor's Request for Consideration.

**51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan
Jatitujuh (lanjutan)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

**Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan
Hutan (lanjutan)**

Tahun 2019 (lanjutan)

- Telah terbit Pertimbangan Gubernur Tahap I berdasarkan surat No. 522/722/Rek tanggal 27 Februari 2019, hal Pertimbangan Gubernur Calon Lahan Pengganti Kawasan Hutan PT RNI (Persero) seluas 7.089,84 Ha.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengirimkan surat Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 126/S.Pmh/RNI.01/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Gubernur Jawa Barat telah memberikan pertimbangan atas usulan calon lahan pengganti tahap I seluas 7.089,84 ha yang terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur sesuai surat No. 522/772/Rek tanggal 27 Februari 2019. Selanjutnya agar tidak mengalami kekeliruan dalam memproses Tukar Menukar Kawasan Hutan tersebut, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mohon arahan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Surat belum mendapat jawaban.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur tahap II seluas 5.557,34 ha kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat No. 106/S.Pmh/RNI.01/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Permohonan Pertimbangan Gubernur.
- PT RNI (Persero) mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur untuk Lahan Tambahan di Kebun Ciater Kabupaten Subang seluas ± 702,75 ha melalui surat No.208/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Tambahan Calon Lahan Pengganti.
- PT RNI (Persero) mengajukan permohonan Pertimbangan Gubernur untuk Lahan Tambahan di Kebun Cibungur seluas 1.021,04 ha melalui surat No. 229/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

**51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement
(continued)**

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Process in order to replace forest area (continued)

Year 2019 (continued)

- Governor Phase I Considerations have been issued based on letter No. 522/722/Rek dated 27 February 2019, regarding the Consideration of the Governor of PT RNI (Persero) 's Forest Land Replacement Area covering an area of 7,089.84 Ha.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has sent a letter to the Indonesian Ministry of Environment and Forestry No. 126/S.Pmh/RNI.01/III/2019 dated 28 March 2019. The Governor of West Java has given due consideration to the candidate's proposal Phase I replacement land area of 7,089.84 ha located in Bandung Regency, Subang Regency, Sukabumi Regency and Cianjur Regency in accordance with letter No. 522/772/Rek dated 27 February 2019. Furthermore, in order not to experience mistakes in processing the Exchange of Forest Area Exchange, PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II, asking for guidance on the obligations that must be carried out. The letter hasn't received an answer.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II submitted a Phase II Governor's Consideration request covering an area of 5,557.34 ha to the Governor of West Java through letter No.106/S.Pmh/RNI.01/III/2019 dated 19 March 2019 regarding the Request for Consideration Governor.
- PT RNI (Persero) submitted a request for Governor's Consideration for Additional Land in Subang Regency Ciater Plantation of ± 702.75 ha through letter No. 208/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 dated 13 June 2019 regarding Additional Supplementary Land for Candidates .
- PT RNI (Persero) submitted a Governor's Consideration Request for Additional Land in Cibungur Plantation covering an area of 1,021.04 ha through letter No. 229/S.Pmh/RNI.01/VI/2019 dated 20 June 2019.

31 Desember 2020

31 December 2020

51. Kondisi Menyediakan Penggantian Lahan Jatitujuh (lanjutan)

PT Pabrik Gula Rajawali II (lanjutan)

Proses Dalam Rangka Penggantian Kawasan Hutan (lanjutan)

Tahun 2019 (lanjutan)

- Pemprov Jawa Barat telah melaksanakan Rapat Pokja untuk permohonan Pertimbangan Gubernur tahap II. Proses sampai dengan saat ini adalah konsep surat Pertimbangan Gubernur Tahap II telah selesai dibuat dan siap untuk diajukan kepada Gubernur Jawa Barat.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II meminta berkonsultasi dengan KPK untuk proses permasalahan HGU PG Jatitujuh dan proses pengadaan konsultan pengurusan penggantian lahan HGU PG Jatitujuh.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengumumkan Lelang Terbuka di Harian Nasional Media Indonesia tentang pengumuman Lelang Pengurusan Pemenuhan Lahan Pengganti dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) pada tanggal 8 November 2019.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II telah mengajukan permohonan TMKH kepada Menteri KLHK No. 2086/S.Pmh/RW-II/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan No. 2250/S.Pmh/RW-II.01/XI/2019 tanggal 13 November 2019. Secara berangsur melengkapi berkas persyaratan yang masih belum terpenuhi.

Selanjutnya proses pengajuan tukar menukar kawasan hutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2022 dengan estimasi biaya Rp 3,6 Triliun untuk total lahan seluas 12.000 ha.

52. Penyajian kembali laporan keuangan

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018. Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan berdampak material atas beberapa akun, oleh karena itu perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan (konsolidasian) tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018.

51. Conditions Provide Jatitujuh Land Replacement (continued)

PT Pabrik Gula Rajawali II (continued)

Process in order to replace forest area (continued)

Year 2019 (continued)

- The West Java Provincial Government has held a Working Group Meeting to request Phase II of the Governor's Consideration. The process up to now is that the concept of the Phase II Governor's Consideration letter has been completed and is ready to be submitted to the Governor of West Java.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II requested to consult with the KPK for the process of the PG Jatitujuh HGU problem and the procurement process for the consultant of the PG Jatitujuh HGU land replacement.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has announced the Open Auction at the National Media Indonesia Daily regarding the announcement of the Auction for the Completion of Replacement Land in the context of Exchange of Forest Areas (TMKH) on 8 November 2019.
- PT RNI (Persero) c.q PT PG Rajawali II has submitted a request for TMKH to the Minister of KLHK No. 2086/S.Pmh/RW-II/X/2019 dated 22 October 2019 and No. 2250/S.Pmh/RW-II.01/XI/2019 dated 13 November 2019. Gradually completing the file requirements that still have not been met.

Furthermore, the process of proposing an exchange of forest areas with the Ministry of Environment and Forestry will be carried out in stages until 2022 with an estimated cost of Rp. 3.6 trillion for a total land area of 12,000 ha.

52. Restatement of financial statements

The Company restated the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 and the consolidated statement of financial position on 1 January 2019/ 31 December 2018. Based on the changes in accounting policies, this will have a material impact on several accounts, therefore the company restated the financial statements (consolidated) on 31 December 2019 and 1 January 2019/ 31 December 2018.

31 Desember 2020

31 December 2020

52. Penyajian kembali laporan keuangan (lanjutan)

52. Restatement of financial statements (continued)

Penyajian kembali atas laporan keuangan terdapat di laporan keuangan entitas anak yaitu, PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT GIEB Indonesia dan PT Rajawali Citramass. Akun - akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali, diikhtisarkan sebagai berikut:

Restate for financial occurred in subsidiary financial statements, at PT PG Rajawali II, PT PG Candi Baru, PT Perkebunan Mitra Ogan, PT GIEB Indonesia and PT Rajawali Citramass. Accounts that are affected by restatements are summarized as follows:

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019:

Consolidated financial position report as 31 December 2019:

31 Desember/ December 2019			
	Sebelum penyajian kembali/ Before restated	Setelah penyajian kembali/ After restated	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statements of financial position
Aset lancar			Current assets
Piutang usaha	555.819.083.635	564.897.335.811	Account receivables
Piutang lain-lain pihak ketiga	490.687.453.012	496.056.717.609	Other receivables third parties
Beban panen satu tahun yang akan datang	78.671.051.000	75.564.073.675	Future one year harvest expense
Uang muka	389.780.648.587	121.163.182.713	Advances
Aset tidak lancar			Non-current assets
Aset tetap	3.979.055.513.472	4.213.608.373.640	Property, plant and equipment
Piutang pajak	21.806.496.924	21.806.496.924	Tax receivable
Aset pajak tangguhan	504.296.048.190	498.222.902.484	Deferred tax assets
Liabilitas jangka pendek			Short-term liabilities
Utang pajak	110.020.076.969	164.409.106.336	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	139.382.255.279	163.684.086.682	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang			Long-term liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	55.582.756.701	54.806.614.950	Deferred tax liabilities
Ekuitas			Equity
Saldo laba			Retained earning
Telah ditentukan penggunaannya	1.186.413.790.087	1.126.779.889.526	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(29.857.108.633)	(76.042.058.967)	Unappropriated
Kepentingan non pengendali	112.100.791.460	106.252.097.016	Non-controlling interests
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			Statements of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan lain-lain	140.464.820.044	145.834.084.641	Other income
Beban lain-lain	(132.387.072.450)	(182.124.818.304)	Other expenses
Beban keuangan	(362.065.731.912)	(376.818.337.518)	Finance cost
Manfaat (beban) pajak penghasilan pajak tangguhan	65.427.394.921	76.636.217.258	Deferred tax income

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
Entitas Anak**
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

**PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and
Subsidiaries**
Notes to consolidated financial statements (continued)
For the year ended

31 Desember 2020

31 December 2020

52. Penyajian kembali laporan keuangan (lanjutan)

52. Restatement of financial statements (continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal
1 Januari 2019/ 31 Desember 2018:

*Consolidated financial position report on 1 January
2019/ 31 December 2018:*

	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018 1 January 2019/ 31 December 2018		
	Sebelum penyajian kembali/ Before restated	Setelah penyajian kembali/ After restated	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statements of financial position
Aset lancar			Current assets
Piutang usaha	767.757.738.112	776.170.108.484	Account receivables
Beban panen satu tahun yang akan datang	96.855.112.056	93.748.134.731	Future one year harvest expense
Aset tidak lancar			Non-current assets
Aset tetap	4.350.862.664.435	4.339.503.938.059	Property, plant and equipment
Piutang pajak	23.392.285.719	20.970.795.407	Tax receivable
Aset pajak tangguhan	408.848.438.023	392.485.624.914	Deferred tax assets
Liabilitas jangka panjang			Long-term liabilities
Utang pajak	58.255.733.810	73.647.688.222	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	198.141.286.891	222.443.118.294	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	46.710.704.147	45.934.562.396	Deferred tax liabilities
Ekuitas			Equity
Saldo laba			Retained earning
Telah ditentukan penggunaannya	1.032.267.338.437	972.633.437.876	Appropriated

53. Kejadian setelah tanggal neraca

RPJMN 2020-2024 di dalamnya terdapat aspirasi pemerintah dalam memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, diantaranya sebagai berikut :

- a. Mendukung objektif keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas) untuk Indonesia dengan meningkatkan produksi dan membangun rantai nilai yang efisien.
- b. Meningkatkan nilai ekonomi dengan membangun kapasitas ekspor dan menjadikan terintegrasi sepenuhnya dalam rantai nilai.

Namun, dalam kondisi saat ini banyak tantangan dalam sektor pangan antara lain:

- a. Produktivitas yang rendah dan ketergantungan impor yang relatif tinggi.
- b. Biaya yang tinggi didorong oleh biaya tenaga kerja, biaya input, dan biaya logistik.
- c. Ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan karena luas lahan pertanian yang terus menurun serta berkurangnya minat untuk generasi muda.
- d. Infrastruktur dan sumber daya yang belum optimal.
- e. Kurangnya kesejahteraan pelaku sektor pangan.
- f. Belum optimalnya penegakan aturan dan penyelarasan kebijakan.

Selanjutnya urgensi dilakukannya Restrukturisasi BUMN Klaster Pangan, adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan bahan pokok akan semakin meningkat akibat adanya perubahan dalam kebiasaan membeli (*buying habits*) masyarakat sebagai dampak dari COVID-19.
- b. Meningkatnya keterbatasan akses pada beberapa komoditas pangan akibat larangan ekspor di berbagai negara and keterbatasan logistik internasional paska COVID-19.
- c. Perlunya tambahan dukungan finansial yang lebih kepada pada petani / nelayan/ peternak untuk memastikan kelancaran modal kerja disamping program-program pemerintah yang sudah ada.
- d. Pentingnya menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan pokok dengan menghubungkan pasokan dan kebutuhan (*supply and demand*) dan melalui efisiensi di sepanjang rantai nilai pangan.
- e. Performa BUMN klaster pangan yang terus menurun karena kurang fokus dan dibebani oleh beban keuangan masa lalu.

53. Subsequent event

RPJMN 2020-2024 includes the aspirations of the government in strengthening Economic Resilience for Quality Growth, including the following:

- a. Supporting the objective of food security (availability, affordability, and quality) for Indonesia to increase production and build an efficient value chain.*
- b. Improving economic value by building export capacity and to make fully integrated in the value chain.*

However, under current conditions there are many challenges in the food sector, including:

- a. Low productivity and relatively high dependence on imports.*
- b. The high costs driven by labor costs, input costs, and logistics costs.*
- c. The mismatch between supply and demand is due to the decreasing area of agricultural land and reduced interest in the younger generation.*
- d. Infrastructure and resources are not optimal.*
- e. The lack of well-being food sector players.*
- f. Has not optimal enforcement of rules and policy alignment.*

Furthermore, the urgency to carry out the Restructuring of SOE Food Clusters is as follows:

- a. Basic material needs will increase due to changes in purchasing habits (buying habits) society as a result of COVID-19.*
- b. Increased limited access to some food commodities due to the export ban in various countries and international logistical limitations post COVID-19.*
- c. The need for additional financial support to farmers / fishermen / ranchers to ensure the smooth working capital in addition to existing government programs.*
- d. The importance of maintaining affordability of staple food commodity prices by linking supply and demand (supply and demand) and through efficiency along the food value chain.*
- e. The performance of BUMN food clusters has continued to decline due to lack of focus and being burdened by past financial expenses.*

53. Kejadian setelah tanggal neraca

Dengan rencana dilakukannya Restrukturisasi BUMN Klaster Pangan, manfaat yang akan dihasilkan dari restrukturisasi Klaster Pangan tersebut bagi tiap-tiap pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. BUMN Klaster Pangan
 - a. Meningkatkan skala usaha, akses pendanaan, dan profitabilitas Klaster *Holding* Pangan.
 - b. Penerapan *Operational Excellence* melalui kolaborasi dengan mitra teknologi.
 - c. Menuju perusahaan pangan berkelas dunia.
2. Ekosistem Pangan Nasional
 - a. Penciptaan sinergi di seluruh Ekosistem Pangan nasional (misal lintas BUMN/ Klaster/ swasta).
 - b. Peningkatan produksi untuk mendorong swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan atas impor
3. Rakyat
 - a. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani / peternak / nelayan kecil.
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas bagi UMKM.
4. Negara/Pemerintah RI
 - a. Memperkuat ketahanan pangan (dengan ketersediaan, mutu, keterjangkauan dan kesinambungan pangan).
 - b. Meningkatkan ekspor sebagai penyeimbang neraca pangan dan devisa Indonesia.

53. Subsequent event

With the plan to carry out the SOE Food Cluster Restructuring, the benefits that will be generated from the Food Cluster restructuring for each stakeholder are as follows:

1. *SOE Food Cluster*
 - a. *Improving the business scale, access to funding, and profitability Cluster Holding Food.*
 - b. *Implementation of Operational Excellence through collaboration with technology partners.*
 - c. *Towards a world class food company.*
2. *National Food Ecosystems*
 - a. *The creation of synergies across national Food Ecosystems (eg cross-state/ Cluster/ private) implementation of Operational Excellence through collaboration with technology partners.*
 - b. *Increased production to encourage food self-sufficiency and reduce dependence on imports.*
3. *Public*
 - a. *The increase in income and welfare for farmers / ranchers / fishermen.*
 - b. *Empowerment and increased productivity for MSMEs.*
4. *State / Government of the Republic of Indonesia*
 - a. *Strengthening food security (with food availability, quality, affordability and sustainability).*
 - b. *Increase exports as a counterweight balance Indonesian food and foreign exchange.*

53. Kejadian setelah tanggal neraca

PT RNI (Persero) terpilih untuk menjadi induk *Holding* BUMN Pangan, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. 100% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sehingga menghindari risiko dilusi kepemilikan.
2. Memiliki kapabilitas dan pengalaman sebagai perusahaan *Holding*.
3. Memiliki skala bisnis terbesar dari sisi pendapatan dan total aset dibandingkan anggota BUMN Kluster Pangan lainnya.
4. Memiliki likuiditas yang sangat baik dengan posisi kas dan aset tetap yang sangat besar.
5. Memiliki pengalaman multisektor termasuk sektor pangan (gula) dari mulai produksi hingga distribusi.

Sedangkan BUMN yang masuk dalam kluster pangan, adalah sebagai berikut:

1. PT RNI (Persero)
2. PT Berdikari (Persero)
3. PT Sang Hyang Seri (Persero)
4. PT Pertani (Persero)
5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
6. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
7. Perum Perikanan Indonesia
8. PT Perikanan Nusantara (Persero)
9. PT Garam (Persero)

Untuk menuju *holding* pangan perlu dilakukan langkah-langkah utama dalam pembentukan *holding* pangan sebagai berikut:

1. Pemerseroan Perindo
 - a. Melakukan kajian perubahan status Perusahaan Umum Perindo menjadi Persero.
 - b. Terbitnya PP Perubahan Status Perum menjadi Persero dan pengesahan AD Persero.

53. Subsequent event

PT RNI (Persero) was selected to be the parent SOE Holding Food, by the following reasons:

1. 100% owned by the Government of Indonesia thus avoiding the risk of ownership dilution.
2. Have the capability and experience as a holding company.
3. Has the largest business scale in terms of revenue and total assets compared to members of other state enterprises Food Cluster.
4. Has the largest business scale in terms of revenue and total assets compared to members of other state enterprises Food Cluster.
5. Having a multi-sector experience including the food sector (sugar) from the start of production to distribution.

Meanwhile, SOE that are included in the food cluster are as follows:

1. PT RNI (Persero)
2. PT Berdikari (Persero)
3. PT Sang Hyang Seri (Persero)
4. PT Pertani (Persero)
5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
6. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
7. Perum Perikanan Indonesia
8. PT Perikanan Nusantara (Persero)
9. PT Garam (Persero)

Towards a food holding, it is necessary to take the main steps in the formation of food holding as follows:

1. The company of Perindo
 - a. Conducting a study on the change in the status of the Perindo Public Company to Persero.
 - b. The issuance of a Government Regulation Changing the Status of Perum to Persero and validation AD Persero.

53. Kejadian setelah tanggal neraca

Untuk menuju *holding* pangan perlu dilakukan langkah-langkah utama dalam pembentukan *holding* pangan sebagai berikut: (lanjutan)

2. Penggabungan Portofolio Sinergis

- Melakukan rancangan penggabungan BUMN.
- Terbitnya PP Penggabungan BUMN.
- Melakukan pengumuman sebelum Penggabungan.
- Melakukan RUPS dalam rangka Penggabungan.

3. Pelaksanaan Inbreng

- Terbitnya PP PMN/Inbreng.
- Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan nilai definitif PMN.
- Melakukan Pengumuman sebelum Pengalihan Saham.
- Keputusan RUPS RNI atas perubahan permodalan.
- Penandatanganan Akta Pengalihan Saham.

4. Konversi Hutang RDI

- Pengajuan Konversi Hutang RDI Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan nilai definitif PMN.
- Pelaksanaan Konversi Hutang RDI menjadi porsi ekuitas kepemilikan pemerintah RI pada masing-masing Anggota Holding terkait (terjadi dilusi kepemilikan *Holding*).

5. Pelaksanaan Inbreng (inbreng saham dilusi)

- Terbitnya PP PMN/Inbreng.
- Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan nilai definitif PMN.
- Melakukan Pengumuman sebelum Pengalihan Saham.
- Keputusan RUPS RNI atas perubahan permodalan.
- Penandatanganan Akta Pengalihan Saham.

53. Subsequent event

Towards a food holding, it is necessary to take the main steps in the formation of food holding as follows: (continued)

2. Synergistic Portfolio Merger

- Conducting a plan to merge SOE.
- The issuance of a Government Regulation on the Merger of SOE.
- Make an announcement before the Merger.
- Conducting a GMS for the Merger.

3. Inbreng implementation

- The issuance of PP PMN / Inbreng.
- Decree of the Minister of Finance on the determination of the definitive value of PMN.
- Make an announcement before the Transfer of Shares.
- RNI AGM Decisions on change in equity
- Signing of the Share Transfer Deed.

4. RDI Debt Conversion

- RDI Debt Conversion Submission Decree of the Minister of Finance on the determination of the definitive value of PMN.
- Implementation of Conversion of RDI's Debt into a portion of the RI government ownership of equity in each related Holding Member (*Holding ownership dilution occurs*).

5. Implementation of Inbreng (inbreng diluted shares)

- The issuance of PP PMN/Inbreng.
- Decree of the Minister of Finance on the determination of the definitive value of PMN.
- Make Announcement before the Transfer of Shares.
- RNI RUPS decision on changes in capital.
- Signing of the Share Transfer Deed.

54. Persetujuan laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 25 Februari 2021.

55. Informasi keuangan tambahan

Informasi berikut pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 adalah informasi tambahan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), entitas induk saja yang menyajikan penyertaan Perusahaan pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya.

54. Approval of the consolidated financial statements

Management is fully responsible for the preparation of the Consolidated Financial Statements that were completed and approved to be issued on 25 February 2021.

55. Additional financial information

The following information in appendix 1 to appendix 5 represents additional information of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), a parent entity represent the Company's investment in subsidiaries based on the cost method.

**LAMPIRAN/
*APPENDIX***

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Entitas Induk
Laporan posisi keuangan
Per 31 Desember 2020

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Holding Company
Statements of financial position
As of 31 December 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Aset			ASSETS
Aset lancar			Current assets
Kas dan setara kas	68.726.564.488	511.784.633.327	Cash and cash equivalents
Deposito dibatasi penggunaannya	979.143.631.579	723.552.631.579	Restricted deposit
Piutang usaha	-	979.241.742	Trade receivables
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak berelasi	2.896.439.008.609	2.693.182.108.409	Related parties
Pihak ketiga	-	22.951.559	Third parties
Pajak dibayar dimuka	72.479.090.637	58.014.246.111	Prepaid taxes
Pendapatan yang akan diterima	115.263.175.872	53.157.650.484	Accrued income
Biaya dibayar dimuka	2.471.834.492	726.538.407	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	4.134.523.305.677	4.041.420.001.618	Total current assets
Aset tidak lancar			Non-current assets
Aset pajak tangguhan - bersih	64.683.119.126	69.957.632.574	Deferred tax assets - net
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak berelasi	49.298.819.712	49.298.819.712	Related parties
Pihak ketiga	93.841.645.550	77.531.424.570	Third parties
Investasi dalam entitas anak	1.368.817.769.884	1.368.817.769.884	Investment in subsidiaries
Investasi dalam entitas lainnya	38.492.168.235	32.939.171.360	Investment in other entities
Properti investasi			Investment property
setelah dikurangi akumulasi			net of accumulated depreciation
penyusutan per 31 Desember 2020			as of 31 December 2020 and 2019
dan 2019 masing-masing sebesar			amounting to Rp 48,893,946,854
Rp 48.893.946.854 dan			and Rp 31,513,481,911
Rp 31.513.481.911	2.831.038.714.747	2.179.393.562.459	respectively
Aset tetap			Fixed assets
setelah dikurangi akumulasi			net of accumulated depreciation
penyusutan per 31 Desember 2020			as of 31 December 2020 and 2019
dan 2019 masing-masing sebesar			amounting to Rp 95,148,182,906
Rp 95.148.182.906 dan			and Rp 92,935,514,354
Rp 92.935.514.354	804.809.165.461	1.469.396.960.691	respectively
Aset tidak lancar lainnya	36.948.604.267	38.906.897.325	Other non current assets
Jumlah aset tidak lancar	5.287.930.006.982	5.286.242.238.575	Total non current assets
Jumlah aset	9.422.453.312.659	9.327.662.240.193	Total assets

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Entitas Induk
Laporan posisi keuangan
Per 31 Desember 2020

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Holding Company
Statements of financial position
As of 31 December 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Liabilitas dan ekuitas			<u>Liabilities and equity</u>
Liabilitas jangka pendek			<u>Current liabilities</u>
Utang bank	1.334.619.206.346	871.712.161.131	Bank loans
Utang usaha	29.132.934.012	22.052.261.384	Trade payables
Utang lain-lain			Other payables
Pihak berelasi	37.792.754.152	2.747.071.843	Related parties
Pihak ketiga	2.384.890.978	4.347.715.078	Third parties
Utang pajak	10.165.908.526	34.713.543.562	Taxes payable
Pendapatan diterima dimuka	6.282.625.040	3.263.746.051	Prepaid income
Biaya yang masih harus dibayar	9.979.221.379	14.626.032.913	Accrued expenses
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun :			Current maturity of liabilities :
PT BRI (Persero) Tbk	61.000.000.000	1.250.000.000	PT BRI (Persero) Tbk
PT Bank BNI Syariah	5.160.892.701	6.599.955.000	PT Bank BNI Syariah
Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI)	22.083.980.572	2.103.236.245	Investment fund accounts payables
Surat utang jangka menengah (MTN)	-	465.000.000.000	Medium term notes
Sukuk ijarah	-	200.000.000.000	Sukuk ijarah
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.518.602.413.706	1.628.415.723.207	<u>Total current liabilities</u>
Liabilitas jangka panjang			<u>Non-current liabilities</u>
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term bank loans - net of current portion
Rekening Dana Investasi (RDI)	1.020.069.578.692	1.041.101.941.139	Investment fund account
PT Bank BNI Syariah	134.222.335.000	76.522.335.000	PT Bank BNI Syariah
PT BRI (Persero) Tbk	398.000.000.000	458.000.000.000	PT BRI (Persero) Tbk
Liabilitas imbalan kerja	76.597.546.801	66.728.625.548	Employee benefits
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.628.889.460.493	1.642.352.901.687	<u>Total non current liabilities</u>
Jumlah liabilitas	3.147.491.874.199	3.270.768.624.894	<u>Total liabilities</u>
Ekuitas			<u>Equity</u>
Modal saham – Modal dasar 4.100.000 lembar ditempatkan dan disetor penuh			Share capital – authorized 4,100,000 shares issued and fully paid 1,051,567 shares with nominal value
1.051.567 lembar dengan nilai nominal			
Rp 1.000.000 per lembar saham	1.051.567.000.000	1.051.567.000.000	Rp 1,000,000 per share
Tambahan modal disetor	1.285.527.566.239	1.285.527.566.239	Additional paid in capital
Komponen ekuitas lainnya	2.209.877.152.748	2.219.633.881.027	Other components of equity
Saldo laba			Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	1.500.165.168.033	1.388.851.159.910	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	227.824.551.440	111.314.108.123	Unappropriated
Jumlah ekuitas	6.274.961.438.460	6.056.893.615.299	<u>Total equity</u>
Jumlah liabilitas dan ekuitas	9.422.453.312.659	9.327.662.240.193	<u>Total liabilities and equity</u>

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Entitas Induk
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Per 31 Desember 2020

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Holding Company
Statements of profit or loss and other comprehensive income
As of 31 December 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Pendapatan	903.656.331.000	404.420.605.520	Revenue
Beban pokok pendapatan	(360.572.904.306)	-	Cost of revenues
Laba (rugi) kotor	543.083.426.694	404.420.605.520	Gross profit
Beban usaha			Operating expenses
Beban pegawai	(87.411.531.906)	(93.735.807.949)	Employee expenses
Beban administrasi dan umum	(81.010.202.994)	(78.203.167.898)	General and administration expenses
Pendapatan lainnya	86.077.593.091	64.329.955.295	Other incomes
Beban lainnya	(11.001.981.014)	(36.107.786.563)	Other expenses
Beban keuangan	(192.168.628.543)	(145.601.286.792)	Finance cost
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	257.568.675.328	115.102.511.613	Profit (loss) before income taxes
Manfaat (beban) pajak penghasilan :			Tax income benefit (expense):
Pajak kini 3w, 14	(21.717.712.720)	-	Current tax
Pajak tangguhan 3w, 14	(8.026.411.168)	(3.788.503.490)	Deferred tax
Pendapatan (beban) pajak - bersih	(29.744.123.888)	(3.788.503.490)	Total tax income benefit (expenses) - net
Laba (rugi) operasi bersih tahun berjalan	227.824.551.440	111.314.008.123	Operating profit (loss) for the year - net
Penghasilan komprehensif lainnya			Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :			Item that will not be reclassified to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) aktuarial manfaat pasti	(12.508.626.000)	(15.459.182.218)	Actuarial gain (loss) on defined benefit
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2.751.897.720	3.864.795.555	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss
Laba (rugi) penghasilan komprehensif lainnya	(9.756.728.280)	(11.594.386.663)	Other comprehensive income profit (loss)
Jumlah laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan	218.067.823.160	99.719.621.460	Total profit (loss) and other comprehensive income for the year

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Entitas Induk
Laporan perubahan ekuitas
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Holding Company
Statements of changes in equity
For the year ended
31 December 2020

(Dalam Rupiah)

(In Rupiah)

	Modal saham ditempatkan dan disetor <i>Capital share</i>	Tambahan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i>	Komponen ekuitas lainnya <i>Other equity components</i>	<u>Saldo laba/ Retained earnings</u>			
				Telah ditentukan penggunaannya <i>Appropriate</i>	Belum ditentukan penggunaannya <i>Unappropriate</i>	Jumlah ekuitas <i>Total equity</i>	
Saldo per 1 Januari 2019	1.051.567.000.000	67.500.000	2.231.228.267.690	1.024.356.429.657	369.077.664.051	4.676.296.861.398	Balance as of 1 January 2019
Penyertaan modal negara	-	1.285.460.066.239	-	-	-	1.285.460.066.239	State capital investment
Cadangan umum	-	-	-	369.077.664.051	(369.077.664.051)	-	General reserve
Laba (rugi) komprehensif lainnya :	-	-	(11.594.386.663)	-	-	(11.594.386.663)	Total other comprehensive income (loss)
Dividen	-	-	-	(4.582.933.798)	-	(4.582.933.798)	Dividend
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	111.314.008.123	111.314.008.123	Net profit (loss) of current year
Saldo per 31 Desember 2019	1.051.567.000.000	1.285.527.566.239	2.219.633.881.027	1.388.851.159.910	111.314.008.123	6.056.893.615.299	Balance as of 31 December 2019
Penyertaan modal negara	-	-	-	-	-	-	State capital investment
Cadangan umum	-	-	-	111.314.008.123	(111.314.008.123)	-	General reserve
Laba (rugi) komprehensif lainnya :	-	-	-	-	-	-	Total other comprehensive income (loss)
Dividen	-	-	(9.756.728.279)	-	-	(9.756.728.279)	Dividend
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	227.824.551.440	227.824.551.440	Net profit (loss) of current year
Saldo per 31 Desember 2020	1.051.567.000.000	1.285.527.566.239	2.209.877.152.748	1.500.165.168.033	227.824.551.440	6.274.961.438.460	Balance as of 31 December 2020

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Entitas Induk
Laporan arus kas
Per 31 Desember 2020

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Holding Company
Statements of cash flow
As of 31 December 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	740.769.616.563	155.973.638.580	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan Karyawan dan untuk biaya-biaya lainnya	(540.574.680.271)	(175.881.388.571)	Cash paid to suppliers, employees and for other expenses
Pembayaran pajak	(45.854.332.179)	(59.459.043.228)	Tax payments
Penerimaan lain-lain	31.019.089.381	(103.236.371.027)	Other proceeds
Pembayaran bunga	(151.283.144.751)	-	Interest payment
Penerimaan dividen	124.028.909.062	-	Dividend received
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	158.105.457.805	(182.603.164.246)	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	(3.457.489.815)	(33.511.458.350)	Acquisition cost of fixed assets
Pengurangan (penambahan) investasi	-	1.361.000.000.000	Deduction (addition) of investments
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(3.457.489.815)	1.327.488.541.650	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan (pembayaran) utang bank	518.917.982.916	(224.636.249.782)	Proceeds (payments) from bank loans
Pembayaran utang Rekening Dana Investasi	(1.051.618.000)	(5.626.457.415)	Investment fund account liabilities payments
Pembayaran dividen	-	(4.582.933.798)	Dividend payment
Penerimaan (pembayaran) MTN & Sukuk	(665.000.000.000)	-	-Proceeds (payments) from MTN & Sukuk
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi	(450.572.401.745)	(470.021.698.702)	Increase (decrease) in related parties payable
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(597.706.036.829)	(704.867.339.697)	Net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(443.058.068.839)	440.018.037.707	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	511.784.633.327	71.766.595.620	Cash and cash equivalent at the beginning of period
Kas dan setara kas pada akhir tahun	68.726.564.488	511.784.633.327	Cash and cash equivalent at the end of period